

SISTIM KESATUAN HIDUP SETEMPAT



DAERAH SULAWESI TENGAH TAHUN 1980/1981



Direktorat
Kebudayaan

14

557/1983

PROYEK INVENTARISASI & DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1980/1981

305. 9844

SYA

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan

SISTIM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SULAWESI TENGAH

Editor : Sagimun M.D.
Rivai Abu.

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL**

**PROYEK INVENTARISASI & DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1980/1981**

PERPUSTAKAAN	
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL	
Nomor Induk	: 15571483
Tanggal terima	: 8-11-1982
Sil/bahagia dari	: Proyek IDK D
Nomor buku	: 307.095985291
Kopi ke	: 2

P R A K A T A

Dalam tahun anggaran 1980/1981 Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tengah telah berhasil menyusun naskah SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SULAWESI TENGAH.

Kami yakin bahwa naskah ini perlu disempurnakan karena inventarisasi dan dokumentasi yang dilakukan masih merupakan usaha permulaan yang belum mendalam.

Terjalannya kerjasama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi (IKIP Ujung Pandang Cabang Palu), Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, maupun Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta, telah terwujud dalam naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya disusun naskah SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SULAWESI TENGAH ini, kami perlu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Bidang Kesenian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Dekan Koordinator IKIP Ujung Pandang Cabang Palu;
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
4. Tim penulis naskah yang terdiri dari:
 - Ketua merangkap anggota : Drs. Syamsuddin Hi. Chalid,
 - A n g g o t a : Drs. Bochari,
 - A n g g o t a : Drs. Nurdin Rahman,
5. Tim penyempurna naskah di Pusat, terdiri dari:
Sagimun M.D. dan Rivai Abu.
6. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Semoga dengan terbitnya naskah ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan kebudayaan Nasional.

Palu, 1 Pebruari 1982
Pemimpin Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
Daerah Sulawesi Tengah,

Drs. Abd. Gani Hali
NIP. 130162858

S A M B U T A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

Kami bergembira karena Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tengah dalam tahun anggaran 1980/1981 telah berhasil menyusun naskah SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SULAWESI TENGAH. Naskah ini selesai disusun berkat adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di Pusat, dalam hal ini Tim penyempurna naskah, maupun di Daerah, terutama Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

Usaha inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah ini merupakan suatu tahap awal yang diharapkan dapat lebih disempurnakan di masa-masa mendatang. Kegiatan menggali untuk melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka pengembangan kebudayaan Nasional, seperti halnya dengan naskah ini, masih relatif kurang terutama dari segi penerbitan.

Kami bersyukur karena dengan terbitnya naskah SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SULAWESI TENGAH ini dapat merupakan sarana penelitian dan bahan bacaan yang berharga guna pembangunan kebudayaan khususnya dan pembangunan bangsa dan negara pada umumnya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta membantu mensukseskan proyek pembangunan ini.

Palu, Pebruari 1982.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Tengah,

DRS. H. SOEDARSONO

NIP: 130098187

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Tengah Tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari: Drs. Syamsuddin Hi. Chalid, Drs. Bochari dan Drs. Nurdin Rahman dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari: Sagimun M.D., Rivai Abu.

Harapan dami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 28 Januari 1982

Pemimpin Proyek

(Drs. Bambang Suwondo)

NIP. 130117589 .

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	III
PENGANTAR	IV
SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN KE PROPINSI SULAWESI TENGAH	V
DAFTAR ISI	VII
BAB PERTAMA. PENDAHULUAN	1
Masalah	1
Tujuan	2
Ruang lingkup	3
Prosedur dan pertanggung jawaban pene- litian	5
BAB KEDUA. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KAILI	17
I. IDENTIFIKASI	17
L o k a s i	17
Penduduk	22
Latar belakang sosial budaya	26
II. BENTUK KOMUNITAS	31
Ciri-ciri komunitas kecil	31
Struktur komunitas kecil	33
Pemerintahan dalam komunitas kecil ..	34
Lembaga-lembaga komunitas kecil	43
III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL	46
Pelapisan sosial masa lalu	46
Pelapisan sosial masa kini	52
IV. PIMPINAN MASYARAKAT	56
Gambaran umum	56
Pimpinan tradisional	58
Pimpinan masa kini	62

V.	SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL .	64
	Mempertebal keyakinan	64
	Memberi imbalan	67
	Mengembangkan rasa malu	68
	Mengembangkan rasa takut	70
VI.	BEBERAPA ANALISA	72
BAB KETIGA.	KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA	
	LORE	78
I.	IDENTIFIKASI	78
	L o k a s i	78
	Penduduk	82
	Latar belakang sosial budaya	84
II.	BENTUK KOMUNITAS	88
	Ciri-ciri komunitas kecil	88
	Struktur komunitas kecil	89
	Pemerintahan dalam komunitas kecil . .	90
	Lembaga-lembaga komunitas kecil	92
III.	SISTEM PELAPISAN SOSIAL	93
	Pelapisan sosial masa lalu	93
	Pelapisan sosial masa kini	100
IV.	PIMPINAN MASYARAKAT	105
	Gambaran umum	105
	Pimpinan tradisional	109
	Pimpinan masa kini	111
V.	SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL .	113
	Mempertebal keyakinan	113
	Memberi imbalan	166
	Mengembangkan rasa malu	117
	Mengembangkan rasa takut	118
VI.	BEBERAPA ANALISA	121

BAB KEEMPAT. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA	
BUOL	126
I. IDENTIFIKASI	126
L o k a s i	126
Penduduk	128
Latar belakang sosial budaya	130
II. BENTUK KOMUNITAS	134
Ciri-ciri komunitas kecil	134
Struktur komunitas kecil	135
Pemerintahan dalam komunitas kecil ..	135
Lembaga-lembaga komunitas kecil	137
III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL	138
Pelapisan sosial masa lalu	138
Pelapisan sosial masa kini	144
IV. PIMPINAN MASYARAKAT	148
Gambaran umum	148
Pimpinan tradisional	152
Pimpinan masa kini	156
V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL .	157
Mempertebal keyakinan	158
Memberi imbalan	160
Mengembangkan rasa malu	161
Mengembangkan rasa takut	162
VI. BEBERAPA ANALISA	165
BIBLIOGRAFI	168
LAMPIRAN : INDEKS	169

BAB PERTAMA

PENDAHULUAN

Di dalam Bab pendahuluan ini akan digambarkan sekitar pelaksanaan proyek penelitian ini dari awal kegiatan hingga adanya naskah laporan sebagai hasil penelitian. Adapun pokok-pokok yang dikemukakan dalam Bab Pendahuluan ini meliputi empat hal pokok, yaitu: masalah, tujuan, ruang lingkup serta prosedur dan pertanggungjawaban ilmiah penelitian. Dengan keempat hal pokok tersebut akan berusaha memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan seperti: apakah yang menjadi sebab dan pendorong penelitian Komunitas Kecil ini, apakah yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini, batasan-batasan apa yang diberikan terhadap tema Komunitas Kecil itu dan bagaimana penelitian ini dilakukan dan apa hasilnya.

Dari gambaran yang dikemukakan di atas, maka berikut ini akan dicoba memberikan gambaran sepintas lintas keempat hal pokok tersebut sebagai berikut:

MASALAH.

Masalah ini terbagi atas dua bagian, yaitu masalah umum dan masalah khusus.

Masalah umum ini sesungguhnya adalah masalah pada umumnya dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia khususnya yang menyangkut sistem budaya yang berkaitan dengan Sistem Kesatuan Hidup Setempat di daerah Sulawesi Tengah. Masalah umum di sini begitu penting justru Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) belum dapat sepenuhnya melayani data yang terjalin dalam bahan kesejarahan, folklore (nilai budaya), adat-istiadat (sistem budaya), geografi budaya (lingkungan budaya) baik untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan maupun kepentingan masyarakat. Oleh karena itu di dalam penelitian, penginventarisasian dan pendokumentasian adat-istiadat sebagai sistem budaya ini khususnya dengan tema Sistem Kesatuan Hidup Setempat dapat mengungkap dan menggambarkan beberapa komponen yang berkaitan dengan tema tulisan ini.

Dari hasil inventarisasi dan dokumentasi sehubungan dengan tema di sini, maka tergambar beberapa komponen pokok yang berkaitan dengan Sistem Kesatuan Hidup Setempat, antara lain ialah :

Identifikasi suku bangsa di daerah ini (Kaili, Buol dan Lore)

yang mencakup lokasinya, penduduknya, dan latar belakang sosial budayanya.

Bentuk daripada komunitas kecil dari suku bangsa Kaili, Buol dan Lore yang meliputi ciri-cirinya, struktur komunitas kecil, pemerintahan dalam komunitas kecil dan lembaga-lembaga sosial di dalam komunitas kecil ini.

Sistem pelapisan sosial yang meliputi pelapisan sosial masa lalu dan pelapisan sosial masa kini.

Pimpinan masyarakat pada suku bangsa Kaili, Buol dan Lore seperti gambaran umum tentang pelapisan sosial, pimpinan tradisional, pimpinan masa kini yang ada.

Sistem pengendalian sosial yang berlaku pada suku bangsa Kaili, Buol dan Lore meliputi: mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu dan mengembangkan rasa takut.

Hal-hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan Sistem Kesatuan Hidup Setempat sebagai bagian dari sistem budaya dari ketiga suku bangsa di daerah ini yang merupakan masalah umum dari tulisan ini.

Sedangkan yang berkaitan dengan masalah khusus dalam tulisan ini ialah bahwa Sistem Kesatuan Hidup Setempat merupakan ikatan yang erat antara pendukung suatu kehidupan, yaitu suku bangsa Kaili, Buol dan Lore dengan tempat dan lingkungan kediamannya. Hal ini dapat dilihat karena adanya proses perubahan kebudayaan dari kurun ke kurun waktu selama ini telah terjadi perubahan kebudayaan dalam kesatuan hidup setempat dari ketiga suku bangsa ini. Proses perubahan ini telah merubah bentuk dan sifat dari Sistem Kesatuan Hidup Setempat itu. Dan sebaliknya apabila dilihat pembangunan yang sementara digalakkan dewasa ini, pada hakekatnya merupakan suatu proses pembaharuan di segala bidang kehidupan. Proses ini menuntut pula perubahan-perubahan kebudayaan di dalam masyarakat kita, termasuk di dalamnya sistem kesatuan hidup setempat. Perubahan-perubahan itu baik berjalan secara lambat maupun cepat, selain tidak menggeser wujud-wujud kebudayaan lama, di lain pihak dapat pula menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat pendukung kebudayaannya.

TUJUAN.

Dalam mengemukakan tujuan penelitian di sini, tentunya timbul pertanyaan apakah yang ingin dicapai dengan pelaksanaan penelitian, penginventarisasian dan pendokumentasian ini ?

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut maka dalam penelitian ini ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum: dimaksudkan di sini ialah agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan pada umumnya, khususnya mengenai sistem budaya di daerah ini dalam kaitannya dengan Sistem Kesatuan Hidup Setempat, guna disumbangkan untuk menyusun kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat.

Tujuan khusus: adalah berusaha mengumpulkan dan menyusun buku Adat-istiadat (Sistem Budaya) daerah Sulawesi Tengah tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat. Dengan sistem budaya ini diharapkan akan memberi informasi terutama tentang bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial yang ada di daerah Sulawesi Tengah ini. Kelihatannya bahwa tujuan khusus ini akan terungkap dalam uraian-uraian selanjutnya dari lokasi penelitian yang telah ditetapkan antara lain ialah: suku-suku bangsa Kaili, Buol dan Lore yang letaknya di ketiga Kabupaten di Sulawesi Tengah ini.

RUANG LINGKUP.

Memperhatikan tema dari penelitian dan pencatatan aspek adat-istiadat daerah ini, yaitu Sistem Kesatuan Hidup Setempat yang merupakan bagian dari sistem budaya, maka jelas bahwa ruang lingkupnya suatu kesatuan yang lahir dari "ikatan yang erat" antara kelompok sosial dengan tempat kediamannya dari suku bangsa yang diteliti di daerah Sulawesi Tengah.

Karena penduduk daerah Sulawesi Tengah ini terdiri dari 12 suku bangsa yang besar yang mendiami keempat Kabupaten, yakni Donggala, Poso, Buol Toli-Toli dan Banggai, maka dari keduabelas suku bangsa itu telah ditetapkan tiga suku bangsa sebagai komunitas kecil, masing-masing komunitas kecil Kaili yang berdiam di wilayah Toaya di Kabupaten Donggala, komunitas kecil Lore yang berdiam di wilayah Gintu Lore Selatan Kabupaten Poso, dan komunitas kecil Buol yang berdiam di Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli.

Penentuan komunitas kecil tersebut di atas merupakan upaya batasan kerja dalam pelaksanaan tugas penelitian ini. Hal ini dilakukan justru suatu kesatuan yang lahir dari ikatan yang erat antara kelompok komunitas kecil bersangkutan (Kaili, Lore dan Buol) didukung oleh keterikatan sosial kelompoknya dengan tempat di mana ia diam/tinggal

menetap, bahkan didukung oleh rasa bangga, rasa cinta, rasa kesatuan dan persatuan di mana antara sesama komunitas kecil di wilayah masing-masing saling mengenal, sebagai suatu keutuhan yang bulat di dalam setiap aspek kehidupan komunitas kecil itu. Jelasnya tidak ada aneka warna yang menonjol antara kehidupan kelompok komunitas ini.

Dari gambaran yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ruang lingkup di sini sesungguhnya meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan menentukan tiga komunitas Kecil (Kaili, Lore dan Buol) di mana masing-masing komunitas kecil itu terdapat suatu keterikatan yang erat antara sesamanya dari segala aspek kehidupan sebagai suatu unsur budaya yang mereka dukung bersama.

Dari pengertian ruang lingkup di atas, maka di dalam kehidupan komunitas kecil itu terlihat beberapa hal yang erat kaitannya dengan Sistem Kesatuan Hidup Setempat dari komunitasnya yang merupakan materi yang akan diteliti lebih tajam dalam penelitian ini. Materi tersebut adalah bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial yang dimiliki oleh komunitas kecil itu yang memang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan pengendalian sosial komunitas kecil inilah yang merupakan materi pokok daripada ruang lingkup dari komunitas yang bersangkutan.

Setelah menetapkan materi pokok daripada ruang lingkup ini, maka yang tidak kurang pentingnya ialah menentukan ruang lingkup operasional. Ruang lingkup operasional di sini tidak akan lepas dari suku bangsa yang ada di daerah ini. Di sini ditetapkan tiga suku bangsa sebagai sasaran dari tugas operasional, yaitu Suku Bangsa Kaili di Daerah Kabupaten Donggala, Suku Bangsa Lore di Daerah Kabupaten Poso dan Suku Bangsa Buol di Daerah Kabupaten Buol-Toli-Toli. Ketiga suku bangsa ini merupakan ruang lingkup operasional yang bersifat umum. Bersifat umum di sini diartikan karena ketiga suku bangsa tersebut mendiami wilayah yang cukup luas.

Karena di dalam penelitian ini tidak mungkin dimasuki wilayah yang begitu luas tersebut, maka sesuai dengan petunjuk yang ada, maka ditentukanlah suatu wilayah yang lebih sempit pada setiap suku bangsa itu. Wilayah yang lebih sempit inilah sebagai ruang lingkup operasional dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi dan penjajakan yang telah dilakukan terlebih dahulu, maka telah ditetapkan lokasi-lokasi yang sesungguhnya merupakan sasaran operasional dalam tugas penelitian ini.

Adapun lokasi-lokasi yang ditentukan sebagai sasaran operasional di sini ialah: Kecamatan Sindue khususnya desa Toaya di Daerah Tingkat II Donggala yang mewakili suku bangsa Kaili, Kecamatan Lore Selatan khususnya Desa Gintu di Daerah Tingkat II Poso yang mewakili suku bangsa Lore, dan Kecamatan Biau khususnya desa Buol yang mewakili suku bangsa Buol di Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli.

Lokasi-lokasi sebagai sasaran operasional tersebut di atas ditentukan dengan pertimbangan bahwa ketiga kecamatan dan desa tersebut di samping merupakan wilayah yang cukup tua, juga sebagai wilayah kerajaan dahulu serta para warganya diikat oleh suatu ikatan yang sangat erat yang mencintai kehidupan gotong royong, mencintai tempat kediamannya, diliputi oleh rasa bangga, rasa persatuan dan kesatuan di antara sesamanya, sehingga tidak kelihatan adanya aneka ragam bagi kelompok-kelompok sosial di dalam komunitas kecil itu. Tegasnya terdapat kehidupan yang utuh serta bulat dalam segi penghidupan dan kehidupan di antara para warga masyarakatnya.

PROSEDURE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN.

Prosedure dan pertanggungjawaban penelitian di sini menggambarkan bagaimana penelitian secara keseluruhan mulai dipersiapkan, direncanakan dan dilaksanakan serta sampai kepada hasil akhir daripada penelitian ini.

Oleh karena itu dalam bagian ini dikemukakan dan digambarkan tiga aspek pokok yang benar-benar dilakukan dalam usaha mencapai hasil akhir dari penelitian ini. Ketiga aspek pokok itu ialah: aspek penelitian, aspek penulisan laporan dan aspek hasil akhir yang dicapai.

Aspek penelitian.

Dalam aspek ini dikemukakan antara lain mengenai organisasi penelitian, tenaga-tenaga peneliti, metode yang dipergunakan, lokasi penelitian, jadwal penelitian, pengalaman dalam pelaksanaan penelitian serta hambatan-hambatan yang dialami selama penelitian ini berlangsung.

Mengenai organisasi penelitian dapat dikemukakan bahwa berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka langkah yang pertama dan utama ialah harus menetapkan terlebih dahulu organisasi penelitian lengkap dengan mekanisme kerjanya. Penetapan organisasi dan mekanisme kerja ini harus memperhitungkan masalah yang dihadapi, memperhitungkan ruang lingkup dan lokasi penelitian.

Dengan dasar inilah maka ditetapkan organisasi penelitian sebagai pegangan dasar yang hakiki dan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas penelitian baik yang bersifat teknis administratif maupun yang bersifat teknis operasional. Dengan dasar dan pegangan inilah ditetapkan komponen-komponen dasar daripada organisasi penelitian yang dilaksanakan di daerah Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Menetapkan team peneliti serta merencanakan lokasi penelitian sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh petunjuk pelaksanaan penelitian. Team peneliti diwajibkan mendalami materi pokok Term Of Reference (TOR) yang telah ditetapkan dari hasil pengarahan di Palu oleh Team penanggung jawab Aspek Adat-Istiadat Pusat.

Menetapkan mekanisme kerja dan pembagian tugas. Untuk ini diatur sebagai berikut: Anggota-anggota peneliti ditugaskan mengadakan orientasi dan penjajakan baik terhadap lokasi penelitian, maupun penentuan informan/responden, sumber-sumber informasi, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan tugas penelitian dan pengumpulan data di lapangan sekaligus mempelajari kepustakaan yang relevan dan menunjang pelaksanaan tugas-tugas penelitian ini.

Setiap anggota peneliti ditugaskan untuk menyusun angket/pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian untuk selanjutnya diolah bersama menjadi pedoman/wawancara/angket yang tetap sebagai instrumen penelitian di lapangan nanti.

Setiap anggota peneliti ditetapkan lokasi penelitiannya, masing-masing; Drs. Syamsuddin Hi Chalid di daerah Kabupaten Donggala (suku bangsa Kaili), Drs. Bochari di daerah Kabupaten Poso, dan Drs. Nurdin Rahman di daerah Kabupaten Buol-Toli-Toli (suku Buol), dan mereka bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya di lokasi penelitiannya masing-masing.

Kepada tenaga peneliti tersebut ditugaskan pula untuk mengadakan komunikasi/minta bantuan dari pejabat-pejabat di daerah penelitiannya masing-masing mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa. Hal ini penting justru dari pejabat itulah akan diperoleh informasi yang lebih jelas tentang hal-hal yang bertalian dengan materi pokok dari penelitian ini di samping mendapatkan informan yang sesuai dengan bobot yang diharapkan.

Ketiga tenaga peneliti tersebut, juga ditugaskan sebagai team pengolah data dan sekaligus sebagai team penulis naskah laporan.

Dalam hal ini maka tiap-tiap anggota peneliti berkewajiban mengolah data lapangan dan menyusun naskah laporannya masing-masing dalam tanggung jawabnya (tiap komunitas kecil di wilayah penelitiannya) yang kemudian secara bersama-sama menyusun naskah yang siap untuk diangkat sebagai laporan hasil akhir.

Mengenai tenaga-tenaga peneliti di sini dapat dikemukakan bahwa sesuai dengan tenaga yang ada dan diharapkan mampu untuk mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya telah ditetapkan tiga orang tenaga peneliti. Ketiga orang itu ialah: Drs. Syamsuddin Hi Chalid sebagai Ketua, Drs. Bochari dan Drs. Nurdin Rahman sebagai anggota. Ketiga tenaga peneliti tersebut berkewajiban mencai pembantu di lokasinya masing-masing, yang diperkirakan mampu dan mau melaksanakan tugas ini.

Mengenai metode-metode penelitian di sini dapat dikemukakan bahwa berhasil tidaknya penelitian ini banyak ditentukan oleh penggunaan metode yang tepat. Berdasarkan hasil orientasi dan penjajakan kepustakaan dan segala komponen yang berkaitan dengan keadaan yang hidup dan berkembang di lokasi penelitian serta informasi yang diperoleh sebelum penelitian ini dilakukan dan dikaitkan dengan TOR yang ada, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah metode wawancara, angket dan observasi (sebagai pelengkap).

Khusus metode wawancara dan angket telah disiapkan instrumennya (terlampir), yang merupakan pegangan pokok peneliti dalam usaha pengumpulan data primer. Adapun pelaksanaan metode ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan data primer yang lebih banyak dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pedoman wawancara/angket ini disebar-kan jauh sebelum peneliti terjun ke lapangan. Ini dilakukan melalui Camat/Kepala Desa di lokasi penelitian bekerjasama dengan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat, untuk disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tua-tua desa, para informan yang dianggap mengetahui secara baik materi pokok dari sistem kesatuan hidup setempat yang ditanyakan.

Kepada mereka yang telah menerima daftar wawancara dan angket ini, kemudian didatangi peneliti untuk tatap muka, memintakan penjelasan, membicarakan hal-hal yang ingin diungkapkan sehubungan dengan materi pokok penelitian ini.

Perlu dikemukakan bahwa dalam proses tatap muka di sini di samping diadakan wawancara secara langsung kepada para informan, juga

atas prakarsa Camat/Kepala Desa, diadakan diskusi panel/panel interview di mana para informan yang dianggap mengetahui secara baik materi permasalahan diundang untuk mengikuti panel interview itu. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih lengkap, justru dipadukan beberapa pendapat yang berkembang dalam panel interview itu.

Mengenai lokasi penelitian, sesungguhnya meliputi seluruh wilayah Sulawesi Tengah, tetapi di dalam pelaksanaannya dipilih tiga Daerah Tingkat II (Donggala, Poso dan Boul-Toli-Toli) yang juga hanya meliputi tiga suku bangsa yaitu Kaili, Lore dan Buol.

Untuk lebih memperoleh gambaran tentang suku bangsa yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah ini dan sekaligus memberikan gambaran tentang suku bangsa yang diteliti, maka perlu dikemukakan kelompok suku bangsa dengan bahasa yang digunakan yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah yaitu: "suku bangsa Kaili, Tomini, Kulawi, di Kabupaten Donggala, Lore, Pamona, Bungku dan Mori di Kabupaten Poso, Saluan, Balantak dan Banggai di Kabupaten Banggai, Buol, Toli-Toli di Kabupaten Buol-Toli-Toli (5, 13).

Untuk jelasnya mengenai keduabelas kelompok suku bangsa tersebut di atas, maka berikut ini digambarkan lokasi tempat tinggal dan bahasa yang digunakan suku bangsa itu sebagai berikut:

No. Suku bangsa		Kabupaten	Kecamatan	Bahasa yang dipergunakan
1	2	3	4	5
1. K a i l i	Donggala	P a l u	K a i l i	
		Sirenja	K a i l i	
		<i>SINDUE</i>	K a i l i	
		Tawaeli	K a i l i	
		Sigi. Biro Maru	K a i l i	
		Sigi Belo	K a i l i	
		Marawola	K a i l i	
		Banawa	K a i l i	
		Parigi	K a i l i	
		Dampelas	Dampelas	
		Balaesang	Balaesang	
2. Tomini	Donggala	Tomini	Tomini	

1	2	3	4	5
			Tinombo Mautong Una-una	Tomini Tomini K a i l i
3. Kulawi	Donggala	Kulawi		Kaili/Pipikoro
4. Lore	P o s o	<i>LORE SELATAN</i> Lore Utara		B a d a , Bada/Napu
5. Pamona	P o s o	Poso Kota Poso Pesisir Una-una Wl. Kepulauan L a g e Pamona Utara Pamona Selatan Ampana Kota Ampana Berone		Pamona Pamona Pamona Pamona Pamona Pamona Pamona Pamona Pamona
6. Mori	P o s o	Mori Atas Mori Lembe Mori Petasia		Mori Mori Mori
7. Bungku	P o s o	Bungku Utara Bungku Selatan Bungku Tengah Bungku Kepulauan		Bungku Bungku Bungku Bungku
8. Saluan	Banggai	Luwuk Kintom Batui Lamala Pagimana Bunta		Saluan Saluan Saluan Saluan Saluan Saluan
9. Banggai	Banggai	Banggai Liang Bulagi Bangkurung		Banggai Banggai Banggai Banggai

1	2	3	4	5
			Tinangkung	Banggai
			B u k o	Banggai
			Totikum	Banggai
10. Balantak	Banggai		Balantak	Balantak
			Lamala	Balantak
11. B u o l	Buol/Toli-Toli		Paleleh	Buol
			Bunebogu	Buol
			Bokat	Buol
			<i>B I A U</i>	Buol
12. Toli-Toli	Buol/Toli-Toli		Toli-Toli Utara	Toli-Toli
			Galang	Toli-Toli
			Baolan	Toli-Toli
			Dampal Utara	Toli-Toli
			Dampal Selatan	Toli-Toli

Dari hasil pengamatan dan berdasarkan hasil study pendahuluan yang berkaitan dengan bahan-bahan dan potensi dari suku bangsa tersebut di atas, khususnya keadaan suku bangsa itu sendiri dikaitkan dengan materi pokok dari ruang lingkup penelitian sebagaimana di-kemukakan terdahulu, maka ruang lingkup operasionalnya dalam hubungan dengan Sistem Kesatuan Hidup Setempat ini ialah Suku Kaili yang mendiami wilayah Kecamatan SINDUE, Suku bangsa Lore yang mendiami wilayah Kecamatan Lore Selatan, dan Suku bangsa Buol yang mendiami wilayah Kecamatan Biau.

Adapun pertimbangan di dalam menetapkan sampel penelitian tersebut antara lain ialah: Bahwa ketiga suku bangsa dari 12 suku bangsa yang ada di wilayah ini dapat mewakili wilayah administratif masing-masing. Seperti Suku Kaili mewakili wilayah Kabupaten Donggala, suku bangsa Lore mewakili wilayah Kabupaten Poso, di mana pertimbangan khusus suku bangsa Lore ini adalah karena unsur keaslian. Demikian pula suku bangsa Buol mewakili wilayah Kabupaten Buol-Toli-Toli. Dan mengenai lokasi penelitian di Kecamatan/Desa dipilih justru karena ketiga tempat itu (Toaya, Gintu dan Buol) benar-benar memperlihatkan komunitas kecilnya merupakan suatu kesatuan yang lahir dengan ikatan

yang erat di antara warganya dalam segala segi hidup, dan kehidupannya. Tidak ada aneka warna antara kelompok-kelompok masyarakatnya. Tegasnya komunitas kecil pada ketiga lokasi itu masih merupakan suatu keutuhan yang bulat.

Mengenai jadwal penelitian, dapat digambarkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh tugas penelitian ini, diadakan pentahapan sebagai berikut:

Tahap pertama: yaitu diadakan persiapan pelaksanaan penelitian. Persiapan di sini dimulai sejak awal Juli sampai medio September di mana dipersiapkan antara lain study kepustakaan yang relevan, penentuan lokasi, pembuatan pedoman wawancara/angket, inventarisasi informan/responden, izin dan permintaan fasilitas dari Pemerintah Daerah setempat, menugaskan kepada team peneliti untuk mendalami isi dan materi TOR dan menyebarkan angket ke calon-calon informan.

Tahap penelitian lapangan sebagai tahap kedua. Dalam tahap ini team peneliti sudah terjun ke lapangan/lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Waktunya mulai medio September sampai dengan medio Oktober, di mana masing-masing anggota peneliti terjun ke wilayahnya masing-masing sesuai penetapan dari Ketua Team. Dalam melaksanakan tugas penelitian lapangan ini, mereka juga ditugaskan untuk mengadakan kategorisasi dan kompilasi data lapangan yang diperolehnya sesuai dengan sistematika yang dituntut oleh TOR. Hal ini dianggap penting, justru akan membantu team peneliti dalam tahap pengolahan data.

Tahap ketiga: yaitu tahap pengolahan data. Dalam tahap ini dilakukan setelah peneliti kembali dari lapangan di mana mereka telah mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dan menunjang pembuatan naskah laporan. Tahap pengolahan data ini dilaksanakan medio Oktober sampai awal Nopember. Dalam tahap ketiga ini tiap-tiap peneliti juga bertugas di samping mengolah data secara bersama-sama, diwajibkan pula menyusun naskah laporan dari komunitas kecil yang ditelitinya. Setelah konsep naskah tersebut selesai, maka diadakan pembahasan bersama untuk mendapatkan konsep naskah yang siap untuk diketik dan diperbanyak sebagai hasil akhir penelitian ini.

Tahap keempat: yaitu tahap pengetikan dan penjiilidan mulai awal Desember sampai dengan akhir Desember.

Pelaksanaan dan pengalaman dalam penelitian.

Pelaksanaan penelitian untuk mengumpulkan data mengenai Sistem Kesatuan Hidup Setempat di daerah Sulawesi Tengah, adalah

rangkaian proses yang telah digambarkan di atas, mulai dari persiapan, yaitu penyusunan organisasi, pembentukan team peneliti, mengeja kerangka penelitian sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Juga study kepustakaan yang relevan, penentuan sampel dan lokasi penelitian, pembuatan pedoman wawancara/angket yang merupakan instrumen penelitian, mengadakan hubungan dengan aparat pemerintah setempat, menyebarkan angket/pedoman wawancara sampai kepada pelaksanaan pengumpulan data di lapangan dan pengolahan data serta memperbanyak laporan penelitian ini.

Penelitian berjalan cukup lancar sesuai rencana, namun diakui bahwa masih banyak kekurangan, justru disadari masih ada materi-materi pokok yang belum terungkap secara tuntas sesuai dengan tuntutan penelitian ini. Hal ini tidak dapat dihindari karena informan yang mengetahui masalah tersebut tidak berada di tempat, ataukah memang tidak ada orang yang mengetahui secara pasti. Misalnya masalah sejarah suatu wilayah, masalah pelapisan sosial, masalah pimpinan yang samar dan lain-lain sebagainya.

Sadar akan kelemahan ini, maka peneliti mendatangi secara khusus para informan yang menurut orang di daerah itu (lokasi) dianggap paling mengetahui dan menghayati materi yang berkaitan dengan Sistem Kesatuan Hidup Setempat.

Mengenai hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan penelitian ini, sesungguhnya tidak ada hambatan yang prinsipil. Hal ini dapat diwujudkan justru persiapan sebelum terjun ke lapangan/lokasi penelitian sudah dimatangkan. Hal ini juga didukung oleh partisipasi aparat pemerintah setempat mulai dari tingkat Propinsi sampai kepada aparat pemerintah di desa di mana lokasi penelitian diadakan.

Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa masih ada juga hambatan-hambatan, seperti misalnya masalah bahasa daerah. Tetapi ini dapat diatasi dengan bantuan petugas pemerintah daerah setempat yang senantiasa mendampingi peneliti yang dapat berfungsi sebagai penterjemah.

Selain hambatan soal bahasa, juga dirasakan adanya hambatan yang sulit diatasi yaitu hubungan antara satu desa dengan desa lainnya. Ini memang suatu hambatan yang serius, karena sudah diketahui bahwa daerah Sulawesi Tengah masih sangat sulit hubungan daratnya. Akibatnya jadwal pelaksanaan penelitian dapat terganggu karena sulitnya komunikasi lewat darat ini.

Satu hal yang perlu dikemukakan di sini, ialah apabila peneliti

sudah mendatangi informan di suatu daerah terpencil dan sudah membuang waktu yang cukup lama, tetapi informan yang diharapkan tidak berada di tempat ataupun tidak dapat memberi keterangan karena soal-soal adat yang mengikat.

ASPEK PENULISAN LAPORAN.

Sistematika laporan.

Adapun sistematika laporan terdiri atas:

Bab Pertama :

PENDAHULUAN : terdiri dari:

- a. Masalah,
- b. Tujuan,
- c. Ruang lingkup,
- d. Prosedure dan pertanggungjawaban penelitian.

Bab Kedua :

KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KAILI : terdiri dari:

- a. Identifikasi:
 - Lokasi,
 - Penduduk,
 - Latar belakang sosial budaya.
- b. Bentuk:
 - Ciri-ciri sebuah komunitas kecil,
 - Struktur komunitas kecil,
 - Pemerintahan dalam komunitas kecil,
 - Lembaga-lembaga sosial komunitas kecil.
- c. Sistem pelapisan sosial:
 - Pelapisan sosial masa lalu,
 - Pelapisan sosial masa kini.
- d. Pimpinan masyarakat:
 - Gambaran umum,
 - Pimpinan tradisional,
 - Pimpinan masa kini.
- e. Sistem pengendalian sosial:
 - Mempertebal keyakinan,
 - Memberi imbalan,
 - Mengembangkan rasa malu,
 - Mengembangkan rasa takut.
- f. Beberapa analisa:

- Bentuk komunitas kecil,
- Sistem pelapisan sosial komunitas kecil,
- Pimpinan masyarakat pada komunitas kecil,
- Sistem pengendalian pada komunitas kecil.

Bab Ketiga :

KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA LORE.
(isinya sama dengan a sampai dengan f di atas).

Bab Keempat :

KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA BUOL.
(isinya sama dengan a sampai dengan f di atas).

I N D E K S.

BIBLIOGRAFI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

Sistem Penulisan.

Sesuai dengan petunjuk dalam rangka penyeragaman sistem penulisan, maka ditetapkan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab-bab ditulis dengan huruf besar dan ditulis di tengah-tengah bagian atas. Sub bab ditulis dengan huruf besar di pinggir kiri. Seksi-seksi yang merupakan bagian dari sub bab ditulis dengan huruf kecil dengan digaris di bawahnya, mulai enam ketukan ke tengah. Seksi-seksi yang terurai atas beberapa bagian, maka bagian-bagian itu ditulis enam ketukan ke tengah dalam bentuk alinea-alinea, dan alinea itu harus berimbang. Kata-kata yang diindeks ditulis dengan huruf kecil, dan digaris di bawahnya. Antara satu bab dengan bab atau sub bab harus dengan penulisan yang berimbang.

Mengenai sistem bibliografi digunakan cara secara berikut:

Daftar bibliografi disusun di belakang sesudah indeks. Daftar bibliografi adalah untuk seluruh bab. Penyusunan daftar bibliografi berdasarkan urutan alfabetis pengarang, dan urutan-urutan tentang sebuah publikasi adalah: nama pengarang, nama buku, nama penerbit, kota penerbitan dan tahun penerbitan. Kutipan-kutipan dari buku dibuat di belakang kutipan itu dengan angka-angka dalam kurung misalnya (5, 45) yang berarti bahwa angka 5 adalah nomor urut buku kepustakaan pada daftar bibliografi, sedangkan angka 45 adalah halaman di mana terdapat teks yang dikutip itu.

Mengenai kata-kata yang diindeks harus digaris di bawahnya, dan

kata-kata yang diindeks itu disusun dengan urutan alphabetis pada daftar indeks dan di belakang kata-kata itu dibubuhkan halaman-halaman di mana kata-kata tersebut ditemui, misalnya yang diindeks adalah kata "*bamburu*" 9, 27, 33, 107; artinya kata bamburu itu terdapat pada halaman 9, 27, 33 dan 107.

ASPEK HASIL AKHIR.

Pandangan tentang hasil akhir penelitian.

Sesungguhnya peneliti telah berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil akhir daripada penelitian ini dengan hasil yang cukup baik tanpa kekurangan. Tetapi harus diakui bahwa apa yang dicapai dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna bahkan banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan antara lain karena selain terbatasnya waktu, tenaga peneliti yang tidak profesional, dana dan waktu yang terbatas, juga karena luasnya wilayah dan banyaknya suku bangsa di daerah ini (12 suku bangsa) yang hidup tumbuh dan berkembang dengan sistem budaya yang mungkin berbeda satu dengan yang lain, khususnya dalam sistem kesatuan hidup setempat yang merupakan milik mereka.

Oleh karena itu, jelas bahwa ketiga suku bangsa (komunitas kecil) yang dijadikan sampel belum sepenuhnya dapat menjamin mewakili seluruh suku bangsa (komunitas kecil) lainnya. Inilah antara lain kekurangan pokok dari hasil akhir penelitian ini.

Dalam kaitan kekurangan tersebut di atas, team peneliti aspek adat-istiadat daerah dengan tema Sistem Kesatuan Hidup Setempat, telah mengadakan persiapan-persiapan sebaik-baiknya, mendasari diri dengan bekal yang cukup untuk dipertanggungjawabkan dalam menetapkan ketiga komunitas kecil tersebut sebagai sampel penelitian. Ketiga komunitas kecil ini dapat dianggap sebagai model atau cermin daripada apa yang diminta dan dituntut dengan penelitian ini.

Penggunaan sampling dalam penelitian ini membawa konsekwensi di mana dengan sampling ini bermaksud: "mereduksi objek penelitiannya dan ingin mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitian itu sendiri (6, 83).

Kekurangan lainnya ialah bahwa lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat sepenuhnya diteliti secara tuntas, dan belum sepenuhnya dapat mengungkap seluruh aspek dan materi yang erat kaitannya dengan sistem kesatuan hidup setempat suku bangsa yang bersangkutan atau komunitas kecil bersangkutan. Hal ini

disebabkan karena di samping wilayah yang begitu luas, juga karena komunikasi yang sangat sulit. Di samping kekurangan tersebut, juga disadari mutu informan yang mungkin kurang. Hal ini disebabkan para informan/responden belum atau tidak mengetahui secara pasti materi pokok daripada sistem kesatuan hidup setempat yang ingin diungkapkan. Namun untuk mengatasinya peneliti mengadakan wawancara yang berulang-ulang, sehingga diperoleh data yang dianggap memadai.

Dari gambaran yang dikemukakan di atas, di samping terlihat adanya kekurangan-kekurangan, juga terlihat adanya kelebihan. Yang jelas bahwa penelitian ini menghasilkan suatu gambaran tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat di daerah Sulawesi Tengah. Ini berarti telah memberi sumbangan yang berharga, memberikan data dan informasi tertulis yang diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak berwenang untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebudayaan dan kemasyarakatan serta dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Kesimpulan dan pandangan masa depan peneliti tentang penelitian ini.

Bahwa Sistem Kesatuan Hidup Setempat pada hakekatnya merupakan ikatan yang erat antara warga komunitas kecil (Kaili, Lore dan Buol) dengan lingkungan tempat di mana dia hidup. Dari ungkapan-ungkapan serta uraian-uraian di dalam bab-bab selanjutnya meliputi ketiga komunitas kecil di sini, akan tergambar perubahan wujud-wujud kebudayaan dalam kesatuan hidup setempat, di mana sesungguhnya hal ini terjadi berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Demikianlah dapat dilihat bahwa pembangunan yang digalakkan dewasa ini, sesungguhnya merupakan upaya dalam rangka usaha memperbaiki hidup dan kehidupan dan pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan dalam segala segi kehidupan. Proses pembaharuan ini juga menyentuh aspek kesatuan hidup setempat masyarakatnya. Dengan gambaran dalam uraian di atas, jelaslah kepada kita bahwa dengan hasil penelitian ini akan sangat besar arti dan peranannya dalam usaha dan upaya mengungkapkan sistem budaya masyarakat bersangkutan. Dan lebih konkrit lagi bahwa dengan penelitian ini akan memberi informasi tertulis mengenai sistem kesatuan hidup setempat dari komunitas kecil yang ada di daerah Sulawesi Tengah.

Hal ini tercermin dalam uraian-uraian dalam laporan ini yang telah berusaha menggambarkan tentang bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial yang berdasarkan

hasil ungkapan dari latar belakang sosial budaya ketiga komunitas kecil yang dijadikan sasaran operasional penelitian ini.

* * *

BAB KEDUA

KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KAILI

I. IDENTIFIKASI

LOKASI

Suku bangsa Kaili adalah penduduk mayoritas di daerah Kabupaten Donggala. Dari 16 Kecamatan di daerah Kabupaten Donggala 11 Kecamatan di antaranya didiami oleh suku bangsa Kaili. Dan dari ke 11 Kecamatan itu dipilih salah satu Kecamatan sebagai sampel penelitian yaitu Kecamatan Sindue. Untuk jelasnya mengenai hal ini lihat uraian pada halaman 10.

Letak dan keadaan geografis. Untuk ini akan dikemukakan antara lain: letak administratif, letak geografis, keadaan geografis, alam fauna dan alam flora.

Mengenai letak administratif di sini ialah bahwa suku bangsa Kaili ini sebagaimana dikemukakan di atas mendiami 11 wilayah kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Donggala. Bahkan di kecamatan lainnya masih juga didiami oleh suku bangsa Kaili walaupun agak kurang, seperti di Kecamatan Dampelas, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Moutong. Jadi dapat dikatakan bahwa Kabupaten Donggala ini pada umumnya dihuni oleh suku bangsa Kaili. Dengan demikian letak administratif suku bangsa Kaili adalah di daerah Kabupaten Tingkat II Donggala pada umumnya. Sedangkan letak lokasi penelitian ialah salah satu kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Donggala, yaitu Kecamatan Sindue yang letaknya di pantai barat Kabupaten Donggala.

Mengenai letak geografis dapat dilihat pada peta terlampir. Dalam peta itu tergambar batas-batas geografis dari lokasi suku bangsa serta lokasi penelitian itu. Jelasnya bahwa lokasi penelitian ini, yaitu Kecamatan Sindue berada di pantai barat Kabupaten Donggala yang letaknya kurang lebih 35 kilometer dari kota Palu (ibu kota Kabupaten Donggala dan ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah).

Mengenai keadaan geografis lokasi suku bangsa Kaili ini dapat digambarkan bahwa pada umumnya terdiri dari dua keadaan, yaitu sebagai daerah maritim di mana Kabupaten Donggala diapit oleh dua laut di pantai barat (selat Sulawesi) dan di pantai timur (Teluk Tolo), dan lainnya sebagai daerah pedalaman yaitu daerah yang agak jauh masuk ke pedalaman dari pantai dan bergunung-gunung, yang sukar

dihuni manusia karena gunung yang susah dicapai, terjal dan bertebing tinggi. Juga sebagai suatu daerah yang berada tepat di garis khatulistiwa, maka lokasi ini mempunyai iklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim angin barat, dan musim angin timur. Pergantian musim di sini bagi wilayah ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakatnya.

Keadaan alam fauna di lokasi penelitian pada umumnya hampir sama saja dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Di sini banyak dijumpai binatang-binatang buruan seperti rusa, babi rusa, babi, ayam hutan dan lain-lainnya. Sedangkan binatang buas tidak ada, kecuali bermacam-macam ular. Binatang ternak cukup banyak dipelihara di lokasi penelitian ini seperti kambing, sapi, kuda, kerbau yang dipergunakan selain sebagai konsumsi dan untuk dijual, juga digunakan sebagai alat untuk tenaga kerja. Selain itu banyak pula jenis burung. Burung yang biasa dipelihara oleh penduduk ialah burung nuri dan burung *kakatua* yang berwarna putih dan berwarna kuning kehijau-hijauan.

Sedangkan alam flora pada umumnya sama dengan daerah tropis lainnya, hanya saja di daerah ini banyak dijumpai kayu hitam (*ebony*), kayu bayan (*kayu ipi*) dan bermacam-macam kayu lunak lainnya. Ini merupakan potensi komoditi ekspor Sulawesi Tengah yang akhir-akhir ini merupakan sumber devisa yang cukup besar di luar kopra. Di daerah ini di mana-mana dijumpai kebun-kebun kelapa mulai dari pantai hingga jauh ke pedalaman. Tetapi kebun-kebun kelapa tersebut pada umumnya tumbuh dengan baiknya di daerah dataran rendah sepanjang pantai. Kopra merupakan komoditi yang cukup besar di daerah ini. Di samping itu, maka juga dikenal potensi komoditi lainnya seperti rotan, damar, kopi, dan *kasiavera* (kayu manis). Sekarang ini kebun-kebun cengkeh sudah mulai memasuki kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dalam waktu 2 atau 3 tahun yang akan datang wilayah ini akan merupakan salah satu penghasil cengkeh yang cukup besar. Selanjutnya di lereng-lereng gunung banyak ditumbuhi oleh berbagai jenis rumpun bambu dari berbagai jenis, dan salah satu jenis bambu yang cukup dikenal di wilayah ini adalah bambu emas (*volobulava*), yaitu bambu yang berwarna kekuning-kuningan yang banyak digunakan dalam pelaksanaan upacara-upacara adat.

Pola perkampungan.

Dalam pola perkampungan di sini dikemukakan: pola perkampungan suku bangsa Kaili pada umumnya dan pola perkampungan di

lokasi penelitian (komunitas kecil di daerah Sindue).

Pola perkampungan suku bangsa Kaili ini pada umumnya terdapat tiga pola umum yang dikenal sejak dahulu yaitu: pola perkampungan mengelompok padat, pola perkampungan menyebar dan pola perkampungan di antara kedua pola di atas.

Pada umumnya pola perkampungan yang mengelompok padat merupakan yang terbesar dari yang lainnya dan disebut *Ngapa*, sedang lokasi perkampungan yang mengelompok kecil dan menyebar di berbagai tempat dalam satu ikatan komunitas kecil tertentu seperti pusat pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain disebut *Boya*. Biasanya *Boya* mempunyai nama-nama tersendiri yang diberikan dengan latar belakang peristiwa sosial tertentu seperti jenis pepohonan yang bersejarah, tempat berlabuh (*sampo*). *Boya* ini yang semakin hari semakin padat penduduknya akibat perkembangan dan perpindahan penduduk. Akibat perkembangan dan perpindahan penduduk itulah kemudian berkembang menjadi *kinta*. *Kinta* inilah juga dalam perkembangannya yang sekarang ini berubah statusnya menjadi *Kampung*. Istilah kampung ini dikenal setelah penjajahan Belanda. Kini masih tetap digunakan kampung, walaupun dalam sistem pemerintahan dewasa ini sudah dipopulerkan sebutan desa.

Salah satu ciri letak suatu perkampungan antara lain ialah mengelompok padat di daerah yang mempunyai sumber mata air atau sungai (*matauve* atau *binangga*). Tetapi pada umumnya letak kampung/desa berada pada tempat-tempat yang cukup strategis di tepi atau di sepanjang jalan, sungai, pantai dan berada di dataran rendah.

Biasanya batas desa dengan desa lainnya ditandai oleh: sungai, gunung-gunung dan batas antara desa dengan kecamatan lainnya pada umumnya didasarkan pada batas-batas kerajaan yang pernah ada dalam sejarah di daerah ini.

Sedangkan bangunan-bangunan atau tempat-tempat tertentu untuk kepentingan umum seperti tanah lapang, mesjid, rumah adat, sekolah dan sebagainya, pada umumnya diadakan dan ditempatkan di lokasi yang strategis di mana penduduknya cukup padat, dan dapat dijangkau oleh penduduk dalam waktu yang tidak lama.

Lokasi pekuburan pada umumnya terletak pada daerah Pantai atau di lereng-lereng pegunungan, baik bukan Kuburan tua maupun Kuburan baru. Kuburan-kuburan tersebut tidak jauh letaknya dari pusat perkampungan bahkan sebagian besar di tengah-tengah perkampungan.

Selanjutnya mengenai pola perkampungan pada komunitas kecil yang menjadi lokasi penelitian pada suku bangsa Kaili, hampir sama keadaannya seperti yang diuraikan di atas. Namun secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Bangunan-bangunan upacara adat kerajaan dahulu, selalu terletak berdampingan dengan rumah raja yang disebut *Baruga*. Sedangkan rumah adat yang dibuat khusus untuk kepentingan rakyat dibuat di *Boya* sesuai kesepakatan rakyat sendiri. Rumah adat yang dibuat di *Boya* tersebut disebut *Bantaya*, yang bentuknya lebih sederhana dan kadang-kadang dibuat secara darurat.

Fungsi *Baruga* selain sebagai pusat lembaga adat untuk tempat musyawarah membicarakan dan memutuskan perkara, juga merupakan pusat dari berbagai bentuk upacara adat seperti upacara *Balia* (upacara keagamaan), upacara *Mora ego* (kesenian), upacara *Movunja* (selamatan panen). Jelasnya merupakan suatu tempat yang dijadikan alat komunikasi untuk kepentingan seluruh rakyat dari segala aspek kehidupan.

Baruga yang merupakan milik adat kerajaan diatur penggunaannya oleh raja (*Madika*) dan tua-tua adat kerajaan (*totua nungata*). Bangunannya dibuat secara permanen dari kayu dan beratap rumbia. Bangunan ini didirikan dan diselesaikan mulai dari awal hingga selesai dengan jalan gotong royong. Sedangkan *Bantaya* dibuat secara sederhana dan kadang-kadang secara darurat yang juga dikerjakan secara gotong royong. Fungsinya digunakan untuk upacara adat satu kali untuk wilayah itu. Bahan yang digunakan membangun *Bantaya* ialah ramuan kayu atau bambu dengan atap rumbia dan berlantai tanah.

Struktur bangunan *Baruga* terdiri dari dua jenjang, yaitu tinggi dan rendah. Bagian yang tinggi dilengkapi dengan dinding berbentuk empat segi dan bagian yang rendah terdapat di bagian tengah dan lebih luas. *Baruga* ini dindingnya terbuat dari papan demikian pula lantainya. Atapnya dari rumbia. *Baruga* ini mempunyai ciri khusus di mana dindingnya hanya setengah yaitu tinggi dinding kurang lebih setengah sampai satu meter. Dengan tinggi dinding demikian memungkinkan orang di dalam *Baruga* dapat melihat ke luar dalam keadaan duduk atau berdiri.

Arsitektur bangunan *Baruga* cukup sederhana, baik dilihat dari segi bentuknya, ukirannya, desainnya, tata ruangnya dan keadaan di dalam dan di luar ruangnya. Ukiran yang ada dalam *Baruga* itu sangat sederhana, dan tidak mempunyai simbol tertentu, hanya sekedar seni tradisional, khususnya yang terdapat di tiang tengah.

Pada umumnya bangunan ini didirikan secara gotong royong oleh seluruh warga masyarakat. Pembuatan dan pembangunannya dipimpin oleh *pande* (tukang) yang memang dianggap memiliki keahlian khusus untuk itu. Biasanya para *pande* itu dimiliki pengetahuan magis sehubungan dengan waktu pendirian serta letak bangunan itu.

Tempat-tempat tertentu seperti tanah lapang selalu berada di tengah-tengah perkampungan dan digunakan untuk kegiatan olah raga dan kadang-kadang sebagai pusat keramaian di desa-desa. Tempat-tempat ibadah seperti mesjid dan musholla selain digunakan untuk ibadah shalat, juga untuk tempat da'wah dan syiar agama Islam, seperti upacara Isra' Mi'raj, Mauludan, Pusat Pengajian dan sebagainya. Sedangkan kuburan pada umumnya terletak di pinggir desa. Mengenai jalan-jalan di kampung-kampung pada umumnya sudah teratur dan sudah merupakan suatu jaringan jalan (sudah diperkeras) dengan usaha gotong royong masyarakat desa, khususnya kampung yang penduduknya sudah mengelompok padat. Sedangkan jalan lainnya adalah jalan negara/propinsi yang menghubungkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya yang bersumber dari Ibu Kota Kabupaten/Propinsi, yaitu Palu. Jalan ini berada sepanjang pantai membujur dari utara ke selatan.

Hampir semua rumah-rumah di sini diberi pagar. Dan pada setiap menjelang perayaan 17 Agustus atau Hari Ulang Tahun Propinsi tanggal 13 April, pagar-pegar rumah penduduk diwajibkan untuk diperbaiki dan kadang-kadang harus diperbaiki dengan model yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Demikian pula antara rumah dengan rumah lainnya dibatasi dengan pagar hidup. Tempat mandi pada umumnya adalah sungai (*binangga*) atau sebagian pada sumber mata air yang ada di kampung (*uwelibo*), khususnya bagi wanita. Biasanya *uwelibo* ini adalah sumber untuk air minum/memasak Tetapi yang paling umum sebagai tempat mandi umum dan tempat cuci umum adalah sungai. Sungailah merupakan tempat pertemuan baik laki-laki, wanita, tua dan muda. Bahkan sungai ini pula dijadikan tempat buang air (bagian mudik/bawah).

Di sungai ini susah untuk menetapkan tempat mandi khusus baik bagi wanita maupun bagi laki-laki. Tetapi biasanya di sepanjang sungai (tepi sungai) selalu dibuat sumur yang mempunyai mata air yang baik. Sumur inilah yang dijadikan tempat khusus wanita untuk berkumpul, sekaligus merupakan tempat pertemuan bagi kaum wanita.

PENDUDUK

Suku bangsa Kaili pada umumnya walaupun mempunyai dialek

bahasa yang berbeda-beda, telah menyebar pada hampir seluruh daerah tingkat II Donggala. Daerah penyebarannya tidak terlalu sulit diselidiki karena bahasa asal terbawa di daerah penyebarannya.

Asal-usul penduduk suku bangsa Kaili ini, menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan agaknya berbeda-beda dan agak bersifat subjektif. Tetapi dari bukti-bukti sejarah yang ada, maka diketahui bahwa *adanosibolai* (adat perkawinan antar keluarga bangsawan) dari satu suku dengan yang lainnya memegang peranan penting. *Adanosibolai* ini menunjukkan bahwa hampir semua suku bangsa Kaili mempunyai ikatan keluarga yang erat. Jadi dapat disimpulkan bahwa suku bangsa Kaili ini merupakan "keluarga luas", sebab kelompok kekerabatannya terdiri dari satu keluarga inti, tetapi seluruhnya merupakan suatu kesatuan sosial yang amat erat (6, 113). Tetapi dari pengamatan terhadap suku bangsa ini, menunjukkan bahwa semua suku bangsa Kaili di mana pun dia berada mempunyai unsur-unsur persamaan, sehingga komunitas kecil yang dijadikan sampel penelitian di sini pada hakekatnya sama dengan di tempat-tempat lainnya. Rupanya pengaruh keluarga luas cukup besar dalam kehidupan mereka.

Lebih jauh dapat dilihat bahwa cepat-lambatnya adat-istiadat mereka itu menghilang, adalah banyak dipengaruhi oleh banyaknya pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Kelihatannya bahwa kehidupan suku bangsa ini sudah cukup lama dimasuki oleh pengaruh suku bangsa lain seperti dari suku Bugis, suku Mandar dari Sulawesi Selatan, dan dari suku Gorontalo (Sulawesi Utara).

Jumlah penduduk suku bangsa Kaili diperkirakan 60% dari seluruh penduduk daerah Tingkat II Donggala, sehingga dengan demikian jumlah penduduk pendatang cukup banyak, yaitu kurang lebih 40%. Menurut hasil sensus tahun 1977 (hasil registrasi) jumlah penduduk daerah Tingkat II Donggala adalah 500.753 jiwa. Ini berarti bahwa jumlah suku bangsa Kaili adalah $60\% \times 500.753$ jiwa dikurangi dengan jumlah suku bangsa lainnya (Tomini, Bampelas dan Balaesang). Lihat tabel pada halaman 10.

Apabila kita memperhatikan tabel dalam uraian halaman 10 tulisan ini, maka jelas bahwa suku bangsa Kaili ini mendiami daerah pemukiman yang cukup luas. Bahkan mendiami 11 wilayah kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di daerah Tingkat II Donggala. Ke 11 kecamatan itu ialah: Palu, Sirenja, "SINDUE", Tawaeli, Sigi Biromaru, Sigi Bolo, Marawela, Banawa, Parigi, dan kulawi. Sedangkan yang 5 kecamatan yang dihuni oleh suku bangsa yang bukan Kaili ialah Bampe-

las, Balaesang, Tomini, Tinombo, dan Moutong. Namun dari ke 5 kecamatan ini masih ada beberapa suku bangsa Kaili yang ikut bermukim pada ke 5 kecamatan tersebut, walaupun minoritas. Untuk jelasnya lihat peta terlampir.

Mengenai mobilitas dan penyebarannya, dapat dikemukakan, bahwa suku bangsa Kaili ini kadar mobilitasnya sangat rendah. Umumnya kalau ada mobilitas adalah karena perkawinan. Misalnya seorang pria di Kecamatan Palu kawin dengan wanita di Kecamatan Parigi, maka laki-laki ikut tinggal menetap di daerah istrinya. Selain karena perkawinan juga karena ingin merantau, atau berdagang. Untuk ini mereka merantau atau berdagang ke daerah Sulawesi Selatan khususnya Mandar, atau ke Kalimantan Timur. Tapi ini sangat kecil jumlahnya.

Mengenai gambaran penduduk di lokasi penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

Jumlah penduduk di lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Sindue menurut hasil sensus tahun 1980 adalah 23.453 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

D e s a	Jumlah menurut usia					
	0-4	5-9	10-14	15-24	25-49	50 ke atas
	1/p	1/p	1/p	1/p	1/p	
1	2	3	4	5	6	7
Malaka	161	116	110	140	222	65
	149	136	97	183	205	58
Lero	181	176	213	210	364	136
	197	163	181	302	391	132
Toaya	237	278	228	275	464	214
	240	204	179	344	505	201
Sumari	57	59	92	81	125	37
	90	63	58	109	145	27
Taripa	21	21	19	28	43	10
	20	37	13	19	37	15
Masaingi	49	50	50	60	108	42
	48	50	46	82	83	42
Marana	124	133	95	146	212	71
	124	122	111	136	229	67

penduduk asli dengan penduduk pendatang tidak ada perbedaan. Saling menghormati secara timbal balik. Perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang sudah dianggap biasa, namun kecenderungan memilih jodoh masih besar di kalangan sukunya masing-masing. Di lokasi penelitian ini peranan dan pengaruh pendatang sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Hal ini disebabkan karena selain jumlah mereka kecil, juga tidak ada hal-hal yang menonjol dibandingkan dengan penduduk asli, baik keahlian dan ketrampilan khusus atau pendidikan. Pergaulan antara kedua suku bangsa ini sudah cukup lama terbina dengan baik.

Partisipasi penduduk pendatang dalam kegiatan sosial cukup besar. Hal ini adalah sebagai akibat selain karena sudah terbinanya hubungan kekerabatan karena perkawinan, juga karena sifat keterbukaan masyarakat terhadap penduduk pendatang.

Adapun pengaruh pendatang khususnya suku Bugis, nampak dalam salah satu aspek pembinaan keagamaan, seperti kelihatan pada sistem mengeja huruf al Quran dengan menggunakan bahasa Bugis. Hal ini dimungkinkan karena pergaulan di antara penduduk asli dan pendatang begitu intim, sehingga sebagian besar penduduk asli di desa-desa dapat mengerti bahasa Bugis.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Uraian di dalam latar belakang sosial budaya di sini meliputi antara lain: latar belakang sejarah, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan dan bahasa.

Mengenai latar belakang sejarah, bangsa Kaili dapat dikemukakan bahwa menurut informasi yang telah lama dikenal adanya kerajaan Kaili ini. Kerajaan yang sudah lama dikenal di daerah Sulawesi Selatan ini. Kerajaan yang sudah lama pula mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di daerah Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Bone. Kalau di daerah Sulawesi Selatan dikenal sebutan *Magau* (raja), maka di Bone dikenal sebutan *Madika* (raja). Sekedar memberikan gambaran tentang struktur pemerintahan daerah tanah Kaili dapat dikemukakan sebagai berikut:

Kagau (kerajaan) dipegang oleh *Madika* (raja) sebagai pemerintat. Beliau dibantu oleh Dewan pemerintahan *Kagau* *Madika* disebut *Libu Nu*

1	2	3	4	5	6	7
E n u	93	115	68	91	159	61
	96	130	55	130	145	51
Saloya	64	33	27	44	102	24
	52	40	29	59	64	23
Tibo	154	150	117	162	276	59
	150	145	102	172	223	48
Kaliburu	136	101	100	106	180	54
	120	102	63	137	147	54
Batusuya	223	202	156	225	344	82
	224	172	166	212	274	66
Tamarenja	82	98	77	124	154	46
	101	81	74	123	115	53
O t i	136	133	130	150	231	67
	115	141	94	175	191	65
Alindau	210	225	170	188	316	105
	196	217	130	243	313	68
Jumlah :	1928	1878	1668	2020	3317	1069
	1822	1814	138	2436	2850	774
						<u>11572</u>
						23453

Dari jumlah penduduk 23 jiwa tersebut di atas maka menurut hasil sensus tahun 1980 terdapat 1172 pendatang. Ini berarti bahwa jumlah penduduk asli adalah 1172 jiwa = 95%. Penduduk peranakan ini pada umumnya adalah suku bangsa Bugis dari Sulawesi Selatan dan nelayan, bahkan ada yang berdagang di samping kedatangan mereka. Mereka datang dengan mudah mencari ikan, dan win dengan penduduk asli. Tetapi mereka tertarik akan kesuburan tanah di daerah ini karena pada musim panen mereka mengungsi akibat keganasan gerombolan DI Perjuangan di Sulawesi Selatan sekitar tahun lima puluhan.

Hubungan penduduk asli dan penduduk pendatang pada umumnya cukup baik. Mereka banyak terlibat dalam kegiatan bersama-sama, seperti gotong royong di desa-desa. Di antara

jiwa tersebut di atas maka menurut hasil sensus tahun 1980 terdapat 1172 pendatang. Ini berarti bahwa jumlah penduduk asli adalah 1172 jiwa = 95%, dan penduduk peranakan ini pada umumnya adalah suku bangsa Bugis dari Sulawesi Selatan dan nelayan, bahkan ada yang berdagang di samping kedatangan mereka. Mereka datang dengan mudah mencari ikan, dan win dengan penduduk asli. Tetapi mereka tertarik akan kesuburan tanah di daerah ini karena pada musim panen mereka mengungsi akibat keganasan gerombolan DI Perjuangan di Sulawesi Selatan sekitar tahun lima puluhan.

Hubungan penduduk asli dan penduduk pendatang pada umumnya cukup baik. Mereka banyak terlibat dalam hubungan kerjasama, seperti gotong royong di desa-desa. Di antara

Maradika, susunannya sebagai berikut:

Madika Matua, sebagai ketua/Perdana Menteri dan urusan luar negeri bertanggung jawab kepada *Magau*.

Punggawa, anggota dan sebagai Menteri Dalam Negeri.

Galara, Anggota dan sebagai Menteri Kehakiman.

Tadulako, Anggota dan sebagai Menteri Peperangan.

Pabicara, anggota dan sebagai Menteri Penerangan.

Sabandara, anggota dan sebagai Menteri Perhubungan.

Badan inilah yang memutar roda pemerintahan di tanah Kaili. Baik Ketua maupun anggota diangkat dan diberhentikan oleh *Magau* (raja) atas usul dan persetujuan *Laligau* (Ketua *Dewan Pitunggota*). (2, 4).

Selain *Libu Nu Maradika* tersebut di atas, juga dikenal *Libu Nto Deya* yang disebut *Kota Pitunggota* sebagai Dewan Permusyawaratan Rakyat/badan legislatif. Para anggotanya adalah *Totua Nu Ngata* mewakili rakyat dari tiap-tiap desa atau *soki* dari seluruh pelosok kerajaan. Dewan inilah yang menyusun dan mengawasi jalannya pemerintahan dan adat-istiadat untuk kepentingan seluruh rakyat dan seluruh negeri. *Kota Pitunggota* ini merupakan Dewan yang mewakili rakyat dari tujuh penjuru negeri. Ketujuh penjuru negeri ini adalah para wakil rakyat yang mendiami desa atau *soki* dari utara, timur, timur laut, tenggara, barat, dan barat daya. Khusus barat daya tidak terwakili karena daerah itu adalah lautan. Demikian sekedar sejarah singkat tentang suku bangsa Kaili ini, di mana pencerminannya dapat dilihat dari eksistensi kerajaan yang pernah ada di tanah Kaili, dengan menggunakan struktur pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, dengan adanya perubahan kekuasaan *Magau* (raja) dalam tampuk pemerintahan telah digantikan dengan struktur pemerintahan yang disebut Swapraja, dan Kepala Kampung. Sebagian besar Swapraja dan Kepala-Kepala Kampung di wilayah ini adalah keturunan Raja, termasuk pada wilayah Kecamatan Sindue sekarang yang dijadikan lokasi penelitian sebagai suatu komunitas kecil.

Lebih lanjut dapat dikemukakan latar belakang sejarah dari lokasi penelitian ini antara lain ialah bahwa wilayah komunitas kecil (sekarang Kecamatan Sindue) sejak dahulu dan pada zaman pemerintahan Belanda wilayah ini sudah menjadi anggota *Dewan Pitunggota* sebagaimana dikemukakan di atas, sampai dikenalnya bentuk pemerintahan Swapraja. Sebagai anggota *Dewan Pitunggota* kerajaan Banawa, lokasi ini menjadi distrik Banawa Tengah yang terdiri atas 15 kampung. Sekarang daerah ini lebih dikenal dengan wilayah Kecamatan Sindue

dengan ibukotanya Toaya. Selama Toaya dalam status distrik Danawa Tengah (tahun 1950 – 1958) telah dipimpin oleh beberapa pejabat Distriktschoofd atau Kepala Distrik, dan sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1962 wilayah ini berubah statusnya menjadi sub Kecamatan Banawa Tengah. Akhirnya sejak tahun 1962 sub Kecamatan Banawa Tengah ini berubah menjadi Wilayah Kecamatan Sindue sampai dengan sekarang.

Adapun kepala wilayah Kecamatan Sindue ini sejak berdirinya sebagai wilayah Kecamatan telah dipimpin oleh: Ge Lamataiya (1962 – 1968), Thamrin Datupalinge (1968 – 1976), J.K. Jonathan (1976 – 1980) dan Andi Musu Pettalolo (1980 sampai dengan sekarang).

Sistem mata pencaharian.

Mata pencaharian utama suku bangsa Kaili dan suku bangsa di lokasi penelitian adalah bertani (sawah, ladang dan kebun). Sawah dan ladang untuk menanam padi dan palawija. Sedangkan perkebunan yang utama adalah menanam kelapa. Kelapa merupakan hasil utama masyarakat di daerah ini. Selain kelapa, juga sudah dikenal tanaman cengkeh.

Sistem kekerabatan.

Pada suku bangsa Kaili hanya dikenal keluarga batih dan keluarga luas. Struktur dan peranan keluarga batih adalah: strukturnya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Peranannya adalah ayah dan ibu harus dihormati dan dimuliakan oleh anak-anaknya, ayah bekerja untuk menghidupi keluarga batih ini, dibantu oleh ibu dan anak-anaknya. Sedangkan ibu berkewajiban mengasuh anak-anaknya dan mengurus rumah tangga. Ayah dan ibu berkewajiban pula mencari jodoh/menentukan jodoh anak-anaknya. Sedangkan struktur keluarga luas terdiri dari lebih dari satu keluarga batih di mana mereka diikat oleh suatu kesatuan sosial yang sangat erat. Biasanya mereka tinggal di satu desa atau desa berdekatan. Di daerah ini dikenal keluarga luas utrolokal di mana keluarga inti senior bersama-sama dengan keluarga-keluarga batih baik dari anak-anak laki-laki maupun perempuan (4, 113). Jelas bahwa anggota keluarga luas di sini adalah: nenek (laki dan perempuan), mertua (laki dan perempuan), ayah dan ibu (keluarga-keluarga batih), paman dari pihak laki-laki dan perempuan, kemenakan, anak-anak, cucu, ipar, sepupu sekali, sepupu duakali dan seluruh keluarga yang masih sedarah. Peranannya adalah sama dengan peranan keluarga batih. Yang jelas kesatuan sosial di antara mereka sangat erat

di mana keluarga inti yang senior memegang peranan penting di sini. Anggota keluarga luas ini saling menghormati, saling membantu dalam kehidupannya.

Sistem religi.

Sistem religi di sini akan diutarakan tentang; agama yang dianut, dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Agama yang dianut di sini adalah Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katholik. Jumlah pengikut agama-agama tersebut ialah Islam yang mayoritas ($\pm 90\%$), sedangkan agama Kristen lainnya kurang lebih 10%. Khusus di lokasi penelitian Islam = 93% dan Kristen Protestan = 7%. Mengenai aliran-aliran yang ada berdasarkan agama, khususnya Islam dikenal adanya aliran Muhammadiyah, aliran Ahlusunnah Waljamaah. Khusus pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat dapat dikemukakan bahwa pada umumnya kerukunan hidup umat beragama cukup tinggi. Cukup menonjol pengamalan Trilogi kerukunan hidup umat beragama yang sementara ini digalakkan oleh Pemerintah. Kerukunan intern, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan Pemerintah berjalan cukup baik. Dalam hal ini kelihatan secara nyata dalam kegiatan-kegiatan upacara keagamaan (Isra' Mi'raj, Mauludan, Hari-hari besar Islam lainnya) selain diikuti oleh umat Islam, juga diikuti oleh umat beragama lainnya. Bahkan lebih dari itu seperti kelihatan dalam pembangunan rumah-rumah ibadah (mesjid, gereja) dilakukan secara gotong royong bahkan saling membantu antara umat beragama itu sendiri. Demikian pula bantuan umat beragama kepada Pemerintah terwujud dengan baik, seperti pendirian mesjid, mushallah, pesantren, sekolah-sekolah Kristen, gereja dan sebagainya adalah atas prakarsa pemeluk agama masing-masing dan selalu atas bimbingan Pemerintah setempat. Keadaan ini berlaku baik bagi suku bangsa di daerah ini maupun di lokasi penelitian.

Mengenai kepercayaan yang hidup dalam masyarakat dapat dikemukakan antara lain:

Kepercayaan yang masih hidup dalam masyarakat kelihatan dalam berbagai upacara adat dalam aspek daur hidup, upacara adat dalam bidang pertanian dan adat kemasyarakatan lainnya. Misalnya masih adanya kepercayaan kepada dewa-dewa, kepercayaan kepada benda-benda sakti, orang keramat dan simbol-simbol religi lainnya. Pada dasarnya kepercayaan-kepercayaan yang masih ada ialah: Kepercayaan kepada dewa-dewa yang disebut *karampua*, seperti *karampua nulangi*

dan *karampua ntana* (penguasa langit dan penguasa bumi). Kepercayaan kepada *To manuru*, yaitu orang sakti yang menjelma dari kayangan sebagai titisan dewa, tidak dikenal asal-usulnya, karena menjelma dengan tiba-tiba melalui berbagai media seperti kayu besar, bambu kuning. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus yang dianggap mendiami seluruh wilayah. Mereka percaya bahwa makhluk halus itu merupakan sumber segala bencana, gangguan hidup (penyebab penyakit, membawa kegagalan panen dan hasil pertanian lainnya). Demikian pula kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan alam (benda-benda alam) yang dapat dijadikan penangkal untuk mengusir penyakit dan berbagai bencana lainnya, sehingga timbullah berbagai ilmu-ilmu hitam (black magic) seperti *doti*.

Dari kepercayaan-kepercayaan inilah timbul berbagai kelakuan manusia dalam kaitan dengan kepercayaannya itu. Dikenal misalnya simbol-simbol berupa azimat (*sima-sima*) upacara-upacara tolak bala' (*motula bala*) dan ini nampak dalam upacara-upacara adat.

Adapun upacara-upacara religi dalam bentuk permohonan, pemujaan, perlindungan kepada roh-roh halus, kepada *To manuru* tersebut dilakukan dalam suatu upacara keagamaan yang disebut *Upacara Balia*.

Di daerah Kaili dikenal 4 macam Balia yaitu:

Balia Ntomanuru, *Balia Bone Moloso* (Moloso = Raja), *Balia Tampilangi*, dan *Balia Mounda*. Dua Balia yang disebut terakhir termasuk *Balia Bone Biasa*. (3, 7).

Balia Ntomanuru dilakukan oleh seluruh rakyat untuk memuja *Ntomanuru* yang dianggap memiliki kekuatan gaib dan menguasai hidup dan kehidupan.

Balia Bone Moloso khusus diselenggarakan oleh raja dengan melibatkan seluruh rakyat (unsur pertemuan).

Balia Tampilangi khusus diselenggarakan dalam bidang pertanian (membuka ladang, sawah, menanam dan menuai padi).

Balia Mounda, diselenggarakan khusus untuk menyembuhkan penyakit. Walaupun keempat macam Balia tersebut sekarang ini sudah agak kurang, namun masih mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Bahasa.

Bahasa sebagai alat komunikasi baik dalam suku bangsa Kaili, maupun dalam komunitas kecil di lokasi penelitian, sering ditandai

dengan adanya perbedaan dalam struktur dan stratifikasi sosial yang ada. Namun hanya berlaku sebagai suatu norma dalam pergaulan. Pada suku bangsa Kaili dan di lokasi penelitian tidak didapati penggunaan bahasa-bahasa khusus yang membedakan struktur sosial seperti "bahasa-bahasa raja" di dalam beberapa bahasa daerah.

II. BENTUK KOMUNITAS

CIRI-CIRI KOMUNITAS KECIL

Ciri-ciri sebuah komunitas kecil ditandai oleh batas-batas wilayah, legitimasi, atribut-atribut serta ciri-ciri khusus lainnya. Komunitas kecil di lokasi penelitian ditandai oleh pemakai sub dialek bahasa Kaili, yang menggunakan bahasa *raiava* (*rai* = tidak, *ava* = di mana). Perbedaan dialek bahasa Kaili pada umumnya terletak pada perbedaan kata "tidak" dan "di mana". Karena itu jenis bahasa Kaili seperti *ledo*, *rai*, *tara*, *doi*, *unde*, *ado*, dan sebagainya berarti tidak. Khusus jenis dialek bahasa *rai* dibedakan dalam penggunaan arti kata di mana, seperti *ava*, *riva*, *rinjaa* seperti *malau ava*, *malau riva*, *malau rinjaa* yang berarti mau ke mana.

Atribut-atribut lainnya sebagai ciri komunitas kecil ialah adanya lokasi pekuburan dan pasar. Lokasi pekuburan antara keluarga bangsawan dan masyarakat biasa (*to dea*), sejak dahulu letaknya dipisahkan. Perbedaannya ditandai dengan tingginya timbunan tanah di atas pekuburan dibanding dengan yang lainnya atau pada bagian letak tanah yang berbukit, serta batu nisan (*bate*) yang agak lebih besar dan lebih tinggi, yang khusus dibuat/dipesan di daerah lain.

Pasar sebagai pusat perdagangan di lokasi penelitian sudah ada sejak zaman Belanda di desa Toaya, sebagai pasar mingguan, yang terletak di pusat/di tengah perkampungan yang memanjang jalan pantai barat, hari pasar diatur secara bergilir dan berputar kembali dalam satu siklus waktu satu minggu. Hal ini membuka peluang adanya pedagang gerobak untuk mengunjungi pasar dari satu desa ke desa yang lain dalam siklus waktu tersebut dalam satu wilayah kecamatan bahkan antar kecamatan.

Dilihat dari segi wilayah administratif dari 15 desa lainnya, hanya 1 desa yang tidak memakai dialek bahasa *rai ava* yaitu Bolaka. Dilihat dari perangkat adat ia tunduk kepada adat kampung Labuan Kecamatan Tawaeli. Namun perbedaan itu tidak berarti, bahkan dari cerita rakyat diceritakan bahwa Labuan dan Lero mempunyai hubungan kekeluarga-

an. Batas wilayah administrasi Kecamatan Sindue dalam sejarah Kerajaan Sindue dahulu cukup luas, yakni sampai ke wilayah Toli-toli.

Legitimasi di sini dapat dilihat pada bentuk fisik bangunan. Dalam hal ini tercermin kepada bentuk rumah raja yang berbeda dengan rumah rakyat biasa. Rumah raja disebut *Kataba*, yang sengaja dibuat jauh lebih besar dari rumah rakyat biasa. *Kataba* umumnya bertingkat dua di mana bagian bawah merupakan kolong rumah yang tidak didiami, tetapi berfungsi sebagai tempat berkumpul rakyat pada waktu ada pesta adat dan pesta lainnya. Juga sebagai tempat penyimpanan alat-alat angkutan seperti gerobak. Bagian atap depan dan belakang rumah raja (solopio) dibuat bersusun tiga, bagian kiri kanan dinding dibuat jalan penghubung yang merupakan sayap rumah. Bagian depan rumah tempat tangga naik disebut *Gandaria* diberi dinding setinggi 80 – 100 cm yang diberi ukiran. Tempat ini digunakan untuk mengadakan musyawarah atau melayani tamu.

Komunitas kecil di daerah Kaili ini umumnya ditandai dengan adanya rumah adat yang disebut *Baruga*. *Baruga* merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan pimpinan adat-istiadat, pusat permusyawaratan dalam satu wilayah tertentu di mana perangkat adat itu berlaku. Tetapi selain *Baruga*, juga dibangun *Bantaya* di desa-desa yang berfungsi sebagai tempat upacara adat dan kepercayaan, kesenian dan lain-lain. Karena itu semua suku Kaili pada hampir semua wilayah kerajaan memiliki lembaga dan kepemimpinan adat yang hampir sama. Semuanya memiliki *Baruga*, rumah raja dan *Bantaya*. Jelas kepada kita bahwa di wilayah suku bangsa Kaili, termasuk komunitas kecil lokasi penelitian ini, masih diikat oleh adanya perangkat adat dan pimpinan adat, di mana hukum adat masih tetap berlaku dan tetap dihormati. Di sini dikenal *Kota Pitunggota* yang merupakan badan legislatif dengan tugas sebagai lembaga yang mengatur tentang hukum adat. Untuk jelasnya lihat uraian pada halaman terdahulu.

Atribut-atribut komunitas kecil ikut mewarnai bentuk komunitas kecil itu, seperti terlihat dalam bentuk simbol-simbol dan bangunan-bangunan khusus lainnya. Di lokasi penelitian dapat dilihat simbol-simbol kebesaran Raja, di mana pengakuan rakyat kepada raja dan turunannya ditandai dengan adanya *ada' nekasuwia*, yaitu suatu kebiasaan yang melembaga bagi seluruh rakyat mengadakan pemberian kepada raja dan keturunannya. Pemberian ini berupa keikhlasan rakyat yang telah berhasil mendapatkan panen yang baik dari hasil pertanian, hasil buruan, hasil perikanan dan sebagainya. *Ada' Nekasuwia* ini meru-

pakan pencerminan dan pertanda penghormatan dan rasa terima kasih rakyat kepada rajanya. Simbol lain yang dapat dilihat ialah apabila raja mengadakan pesta, maka spontan seluruh rakyat secara bergotong royong ikut membantu pelaksanaan pesta itu, baik sumbangan tenaga maupun sumbangan berupa benda. Atribut-atribut lainnya dapat dilihat adanya bangunan-bangunan khusus seperti *baruga*, rumah raja dan *bantaya*. Pembangunan *baruga*, rumah raja dan *bantaya* ini dilakukan secara bergotong royong oleh rakyat komunitas kecil itu. Kekhususan lainnya yang perlu dicatat ialah pakaian adat raja yang digunakan pada setiap upacara resmi atau di dalam upacara adat. Pakaian ini merupakan pertanda perbedaan antara raja dan keturunannya dengan rakyat biasa.

STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Komunitas kecil masyarakat Kaili di lokasi penelitian pada dasarnya adalah induk dari beberapa komunitas yang lebih kecil. Sebagai induk karena secara historis berasal dari komunitas kecil yang pernah hidup tumbuh dan berkembang sejak dahulu kala, dari pusat kelahirannya yaitu di daerah Sindue, yang kemudian menyebar membentuk *boya* yang sekarang ini sudah menjadi desa-desa baru. Dan ini menjadi kelompok komunitas yang lebih kecil, di mana sekarang ini meliputi hampir semua daerah administrasi di lokasi penelitian ini.

Secara struktural, komunitas kecil di daerah ini telah berkembang dalam berbagai bentuk dan perpindahan pusat-pusat pemerintahan. Sejak sebelum sampai dengan zaman penjajahan Belanda, struktur pemerintahan kerajaan yang berfungsi eksekutif adalah sebagai berikut: *Magau* atau *Maradika*, *Maradika Malolo*, *Maradika Matua*, *Galara*, *Pabisara* dan *Suro*. Sedangkan lembaga legislatifnya ialah Dewan Hadat kerajaan yang dipimpin oleh *Baligau*. Pada periode ini kekuasaan Dewan Hadat tingkat kerajaan membagi wilayah atas beberapa daerah otonom yang masing-masing dipimpin oleh Dewan Hadat setempat dalam rangka usaha mengayomi masyarakat dari segi hukum adat.

Hubungan komunitas yang lebih besar dengan komunitas yang lebih kecil, nampak dalam struktur tersebut ialah apabila daerah wilayah hukum otonom tersebut tidak mampu menyelesaikan suatu perkara, maka akan diambil alih di tingkat kerajaan.

Sesudah Belanda menguasai pemerintahan, maka terjadi perubahan fungsi dan struktur pemerintahan komunitas kecil. Badan eksekutifnya di tingkat kerajaan berubah menjadi distrik, walaupun masih dipimpin oleh keturunan raja-raja. Sedangkan fungsi dan struktur Dewan Hadat

berubah pula. Dewan Hadat kerajaan sebagai lembaga sosial terbatas hanya pada mengayomi masyarakat dari segi hukum adat atau sebagai lembaga yudikatif dan dipimpin oleh *Magau*, bukan lagi *Baligau* seperti pada periode sebelum zaman Belanda. *Magau* di sini bukan lagi berfungsi sebagai raja tetapi adalah pemimpin adat. Hingga sekarang *magau* adalah pemimpin adat di tingkat Kecamatan sebagai pemimpin adat pada komunitas yang lebih besar, sedang daerah otonom untuk wilayah-wilayah hukum tersebut masih tetap dipertahankan. Dan pada tiap-tiap *boya* (desa) masih ada lembaga Dewan Hadat yang dipimpin oleh *totua nuboya* (orang tua desa) yang biasanya diambil dari penduduk asli keturunan raja yang tinggal di wilayah itu.

PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Pemerintahan adalah suatu perangkat yang ada di dalam suatu komunitas kecil dalam usaha mengatur, mengembangkan dan mengawasi masyarakat dalam suatu komunitas kecil itu. Dengan demikian pemerintahan dalam komunitas kecil itu ikut mewarnai bentuk dari komunitas itu. Untuk ini, maka berturut-turut akan diuraikan hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan komunitas kecil sebagai berikut:

Sejarah pertumbuhan pemerintahan.

Sebelum Belanda datang di daerah ini, sudah ada kerajaan yang berkembang dalam satu pemerintahan. Salah satu di antaranya ialah kerajaan di Sindue (lokasi penelitian). Konon menurut cerita rakyat bahwa salah seorang putri kerajaan ini pernah dikawini oleh raja dari Sulawesi Selatan (*Welado*). Putri ini bernama *Pince pute*, yaitu putri raja *Sindo* (maksudnya Sindue) yaitu salah seorang putri dari raja *Pue Ruantaku Tunana* (raja berkepala dua)

Sebelum zaman Belanda Komunitas kecil suku Kaili di Sindue ini merupakan satu kerajaan kecil yang otonom. Strukturnya terdiri dari 3 susunan pemerintahan yaitu: Pusat kedudukan pemerintahan, dipimpin oleh Madika/Magau "Ngapa". Ngapa terdiri dari beberapa boya yang dipimpin oleh *Togura Nuboya*. Dan tiap boya terdiri lagi dari beberapa *Kinta*, yang dipimpin oleh *Togura Nukinta*. *Togura Nuboya* dan *Togura Nukinta* terdiri dari pemimpin masyarakat dari kalangan keluarga bangsawan atau pendiri boya dan kinta tersebut.

Pada zaman Belanda beberapa boya berubah menjadi desa/kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang disebut *Kapala*. Setelah pusat pemerintahan komunitas kecil ini berubah menjadi

distrik (1930), ia kembali menjadi sub Kecamatan (1958) dan seterusnya menjadi Kecamatan (1962) hingga sekarang ini. Ngapa (Desa Toaya/Lero sekarang ini), yang seharusnya menjadi ibu kota distrik, oleh Belanda dipindahkan ke *Tibo*, tetapi pada akhirnya (tahun 1947) kembali lagi ke *Toaya*. Sejak zaman ini *Boya* yang sudah berubah status menjadi *desa* dipimpin oleh *Kapala*, dan *Kinta* dipimpin oleh *Kapala Jaga*. Singkatnya satu komunitas kecil pada suku Kaili terdiri dari suatu bentuk/letak perkampungan. Perkampungan suatu komunitas kecil terdiri dari: *Ngapa*, *Boya* dan *Kinta*. *Ngapa* adalah suatu kampung yang merupakan asal usul penyebaran penduduk ke lokasi lainnya, yang lebih muda usianya yang disebut *Boya* dan *Kinta* sebagai tempat perpindahan penduduk dalam mencari kehidupannya. *Ngapa* adalah kampung tertua dan pendirinya merupakan Cakal Bakal pemimpin dan raja pada komunitas kecil tersebut. *Boya* dan *Kinta* adalah pusat perkampungan kecil yang menyebar di sekitar *Ngapa* tersebut yang lama kelamaan berkembang menjadi *desa/kampung*. *Boya* lebih besar dari *Kinta*. Semakin cepat penyebarannya dan semakin luas wilayah yang dikuasainya, mewarnai luasnya batas-batas wilayah komunitas kecil tersebut. Salah satu ciri dari pembagian wilayah administrasi pemerintahan Distrik dan Kecamatan di daerah ini ditentukan oleh luasnya wilayah yang dikuasai oleh komunitas kecil tersebut dalam proses penyebaran penduduknya. Hal ini ditandai dengan pemakaian dialek bahasa Kaili setempat seperti halnya komunitas kecil masyarakat Sindue sekarang ini, yang memakai dialek yang sama. Suatu pertanda bahwa penduduknya berasal dari satu rumpun keluarga yang mempunyai asal usul yang sama.

Sindue yang dikenal dewasa ini adalah sebuah *desa* yang agak terpencil di atas kampung Enu, sebagai pusat kerajaan waktu itu dan sebagai sumber asal-usul raja-raja yang datang kemudian. Dan untuk mengabadikan nama kerajaan yang tua ini dan pernah ada dengan segala kebesarannya, maka dalam perubahan status pemerintahan yang dahulu disebut sub Kecamatan Banawa Tengah, diubah menjadi Kecamatan Sindue sejak 1962 sampai sekarang.

Susunan nama-nama raja yang pernah berkuasa di Sindue sudah tidak dikenal oleh masyarakat. Satu-satunya raja yang dikenal sebagai raja yang terakhir berkuasa dan berkedudukan di Sindue adalah *Lamagau*. Raja inilah kemudian yang menurunkan raja-raja Sindue yang sudah berkedudukan di Toaya. Perpindahan kerajaan dari Sindue ke Toaya adalah karena perkawinan putra *Lamagau*, yaitu *Dae Mangulu*

dengan putri bangsawan Toaya yang sekaligus mewarisi kerajaan dan pemerintahan yang bergelar *Magau*. Dae Mangulu melahirkan *Datumporea* sebagai *Magau* kedua, seterusnya diwariskan kepada cucunya yang bernama *Kasa* yang dikenal dengan panggilan *Pue Bunggu*. Pada zaman beliaulah pembinaan perangkat adat lebih sempurna, karena sarana dan prasarana adat dikembangkan rumah adat yaitu *Baruga*. *Baruga* dibangun dengan megahnya dan fungsi serta peranannya sebagai lembaga adat cukup berwibawa. Setelah beliau pemerintahan diwariskan kepada anaknya *Pue Yompo*. Pada jaman ini kedudukan kerajaan berpindah ke Lero. Namun *Baruga* yang dibangun di Toaya masih tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dan lembaga adat serta keanggotaannya terdiri dari dua desa yaitu Lero dan Toaya yang jaraknya kurang lebih 3 km.

Pada zaman penjajahan Belanda, kerajaan kembali berkedudukan di Toaya, dipimpin oleh *Kulinti* yang dikenal dengan gelar *Papa Dae Mbene*. Pada periode ini raja masih bergelar *Magau*, namun tidak lagi memegang tampuk kekuasaan pemerintahan. Fungsi dan peranan *Magau* dialihkan untuk memelihara, mengatur, mengembangkan dan mengawasi hukum adat yang masih terpelihara di kerajaan. Sedangkan kekuasaan pemerintahan sudah di tangan Kepala-Kepala Kampung, juga sebagian besar diambil dari keturunan raja, sehingga pemerintahan dan adat-istiadat hidup dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam periode ini kerajaan Sindue semakin kecil peranannya dan masuk sebagai salah satu anggota hadat *Pitunggota* kerajaan *Banawa*, yang berkedudukan di Donggala di bawah pimpinan raja *Lamaranua*, dan raja-raja yang menggantikan beliau berdasarkan keturunan.

Konon, dari informasi yang ada bahwa terbentuknya Dewan pemerintahan kerajaan *Banawa* banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dari Sulawesi Selatan. Sebagai Badan legislatif pemerintahan dipimpin oleh *Baligau*.

Dewan *Hadat Pitunggota* ini menjadi lemah dan putus antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya setelah peristiwa *Malonda*, yaitu perang *Raja Malonda* melawan Belanda yang mencoba membujuknya untuk berunding di atas kapal Belanda. Karena firasat dan pengalaman yang pernah dilakukan Belanda kepada salah seorang Raja, yaitu paman Raja *Malonda* sendiri (*Makagili*) yang pernah ditipu oleh Belanda dan dibuang ke Makasar, maka *Raja Malonda* menolak keras bujukan Belanda itu. Dengan menikam salah seorang perantara Belanda yang berhasil mempertemukan beliau dengan Belanda, dan kemudian memberi

komando kepada anak buahnya untuk berperang.

Sejak itu hubungan antara raja-raja *Pitunggota* semakin rapuh, bahkan tidak berfungsi lagi, karena mereka saling mencurigai. Ada yang pro dan kontra terhadap Belanda.

Pada zaman Jepang tiap dewan Hadat kerajaan masing-masing berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Hal ini terjadi pada zaman *Magau Dae Lipu* (wanita) yang berkedudukan di Lero. Kedudukan *Magau* pada dua periode terakhir, juga berkedudukan di Lero, masing-masing bernama *Gadalangi* dan *Burhani* yang memimpin lembaga Hadat sejak kemerdekaan sampai dewasa ini.

Satu cabang keturunan raja Sindue (*Lamagau*), yang melahirkan raja yang tidak bermahkota, tetapi cukup berwibawa dan disegani tetap berdomisili di Sindue (sekarang Enu), adalah *Madika Lusu Manuru* yang dikenal dengan gelar *Pue Mpevonju*. Gelar ini diberikan karena raja tersebut dianggap keramat dan dapat merubah-ubah wajahnya. Kemudian disusul dengan *Madika Datundilangi* yang terkenal dengan nama *Madika Ruantaka tanama* (berkepala dua), disusul oleh *Madika Rampatana* (*pue Nteke*), kemudian *Pue Subi*, dan terakhir yang terkenal keramat, ditakuti dan berwibawa serta terkenal penentang Belanda adalah *Lasadindi*. Lasadindi pernah diangkat menjadi Kepala Kampung, tetapi karena pengaruhnya yang besar ia dipecat oleh Belanda. Ia dengan gigih melalui Syarikat Islam menentang penjajahan Belanda. Dan pada zaman ia dikejar-kejar oleh Belanda, ia bersama pengikut-pengikutnya menjelajahi hutan-hutan belantara, yang hingga sekarang banyak di antaranya menjadi masyarakat terasing yang hidup di sekitar daerah Sindue dan Toaya.

Pada zaman *Dae Mangyulu* menjadi *Magau* di Toaya, raja-raja di Sindue tetap merupakan *Dewan Hadat*. Pemerintahan berfungsi sebagai lembaga eksekutif pada zaman sebelum penjajah Belanda datang.

Dilihat dari segi bentuk pemerintahan, nampak perbedaan dan pergeseran-pergeseran fungsi dan status kekuasaan pemerintahan. Sebelum Belanda datang, raja (*magau*) mempunyai fungsi sebagai ketua dewan eksekutif, sedangkan lembaga legislatifnya terdiri dari anggota-anggota dewan hadat yang dipimpin oleh *Baligau*.

Dengan datangnya kaum penjajah Belanda, kekuasaan pemerintahan ditangani oleh Belanda melalui raja-raja yang patuh dan tunduk pada kekuasaannya. Dengan demikian terjadi perubahan dalam status, fungsi raja (*Magau*) dari fungsi dan peranannya sebagai badan eksekutif menjadi Dewan Hadat Kerajaan dengan fungsi legislatif, yang membidangi

urusan hukum adat dan masih berlaku sampai dewasa ini.

Pergeseran kekuasaan eksekutif terjadi pada zaman Belanda. Kerajaan Sindue berangsur-angsur hilang kekuasaannya, sampai kerajaan ini menggabung sebagai salah satu *anggota pitunggota* dari Kerajaan Banawa yang berkedudukan di Lero.

Pemerintahan komunitas kecil dipimpin oleh *Kepala* (Kepala Kampung).

Pada awal abad ke XX (1903–1918) saat Sulawesi Tengah masih Wilayah Gubernuran Makasar, Sulawesi Tengah masuk Wilayah Karesidenan Manado. Daerah penelitian termasuk afdeling Donggala dengan ibukotanya Donggala yang meliputi beberapa onder afdeling. Salah satu onder afdeling itu ialah onder afdeling Donggala yang meliputi *Kerajaan Banawa* dan *Tawaeli*.

Kerajaan Banawa terbagi lagi atas tiga wilayah masing-masing Banawa Utara, Banawa Tengah dan Banawa Selatan. Komunitas kecil yang menjadi lokasi penelitian ini termasuk Wilayah Banawa Tengah yang kemudian pada tahun 1930 menjadi Distrik.

Pada zaman Jepang struktur Pemerintahan nampak tidak berubah, hanya dengan istilah pemerintahan Jepang. Raja disebut *Suco* dan *Kepala Distrik* disebut *Gunco* sedang Kepala Kampung disebut *Kuco* atau *Kepala*.

Dengan perubahan-perubahan nama jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut maka kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut:

Bekas afdeling Donggala yang dahulu dikepalai oleh seorang Asisten Residen, berubah menjadi Ken yang dikepalai oleh *Ken Kanrikan*. Bekas onder afdeling Donggala yang dahulu dijabat oleh Kontrolieur, kemudian menjadi Bunken dan dikepalai oleh seorang *Bunken Kaurikan*, yang membawahi *Suco-Suco* (raja-raja) dan Kepala Distrik yang disebut *Gunco*.

Walaupun nama jabatan dalam Pemerintahan Jepang itu berubah, namun rakyat dalam komunitas kecil tetap menggunakan gelar "*raja*" Kepala Distrik dan *Kepala* untuk Kepala Kampung. Istilah-istilah tersebut tidak populer di kalangan rakyat.

Pada zaman Kemerdekaan dalam komunitas kecil lokasi penelitian masih mengalami perubahan-perubahan dari distrik Banawa Tengah menjadi Sub Kecamatan (1958–1982) dan menjadi Kecamatan (1962) hingga sekarang ini.

Aparat-aparat

Aparat pemerintahan komunitas kecil sekarang ini dapat dibagi atas dua macam, yaitu aparat pemerintahan formal dan aparat non pemerintahan. Aparat non pemerintahan yang masih hidup dan berperan dalam komunitas kecil ialah lembaga adat yang dipimpin oleh *Magau* dan lembaga adat pertanian yang dipimpin oleh *Ulutumba*. Kepemimpinan lembaga adat dalam komunitas kecil juga mempunyai struktur; Pemangku adat tingkat Kecamatan dipimpin oleh *Magau*. Dan wilayah kecamatan dibagi tiga wilayah kerja lokal, sesuai dengan kondisi geografis. Tiap pusat lokal ini dipimpin oleh *Ketua Dewan Hadat*, yang mempunyai wilayah yang terdiri dari beberapa Desa. Dan pada tiap desa lembaga adat ini dipimpin oleh *Ketua nuada* atau sering juga disebut *togura nungapa*.

Tiap tingkatan tersebut mulai dari *Magau nuada* sampai dengan *Togura nungapa* dilengkapi oleh anggota yang dianggap ahli dalam soal hukum adat.

Fungsi lembaga adat ini ialah memelihara dan menjalankan tugas-tugas pengadilan dari setiap anggota masyarakat yang meminta perlindungan hak, rasa aman dan sebagainya dari setiap orang yang mengajukan perkaranya, baik hak warisan, pelanggaran adat lainnya seperti perkawinan, perceraian, perkosaan dan sebagainya.

Kepemimpinan lembaga ini bersifat kolektif dan selalu memutuskan perkara dengan jalan musyawarah. Setiap orang yang merasa kurang puas dengan keputusan dewan hadat di tingkat pedesaan dapat naik banding - yang paling tinggi ialah pada tingkat *Magau*, dan keputusannya sudah tidak dapat ditolak lagi.

Hingga dewasa ini lembaga adat ini sudah kurang berperan. Hal ini disebabkan karena hukum adat tersebut sudah tergeser secara berangsur-angsur dengan meningkatnya kesadaran hukum dan bernegara dalam masyarakat, sehingga perkara-perkara yang menyangkut agama, banyak ditangani oleh Imam atau P3NTR dan sekarang ini oleh Kepala Kantor/aparat Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Dan yang menyangkut gangguan ketertiban sosial sudah banyak ditangani oleh Kepolisian, perkara perdata ditangani oleh Camat dan sebagainya sesuai fungsi lembaga-lembaga pemerintahan yang ada pada komunitas kecil tersebut.

Namun sepanjang anggota masyarakat masih ada yang tunduk pada hukum adat setempat, Pemerintah masih melindunginya, bahkan musyawarah dewan hadat sering dihadiri oleh Kepala Kampung selama

perkara dan masalahnya masih dapat dibatasi dalam ruang lingkup pemerintahan desa. Dan kadang-kadang Magau atau anggotanya diundang (didatangkan untuk membahas masalah/perkara tersebut di tingkat desa).

Kerjasama vertikal dalam lembaga adat nampak dalam batas-batas berat atau ringannya perkara dan sifat perkara tersebut dapat diselesaikan. Perkara-perkara yang berat langsung diajukan kepada Kepolisian bila mengandung unsur Kriminil, dan atau Kepala Kantor Urusan Agama bila tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, seperti perkara kawin lari, hamil sebelum nikah dan sebagainya.

Dalam bidang pertanian di lokasi ini dikenal pula lembaga adat pertanian. Lembaga adat ini berfungsi sebagai pengatur dan pelaksanaan upacara adat dan hukum pertanian. Lembaga adat ini mempunyai aparat yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsi tertentu, yaitu:

1. *Ulutumba* – sebagai pemimpin upacara pertanian mulai dari pembukaan kebun baru sampai dengan upacara panen selesai. Ulutumba dianggap sebagai ahli dalam bidang pertanian, sekaligus sebagai penggerak massa dalam satu organisasi yang bersifat gotong royong.
2. *Panuntu* – adalah wakil atau pembantu utama Ulutumba dalam melaksanakan fungsi dan tugas sehari-hari.
3. *Pagane* – sebagai ahli mantra (pawang) yang bertugas memimpin upacara-upacara ritual pertanian sejak awal pembukaan kebun sampai dengan selesai panen.
4. *Togura ntana* – sebagai hakim atau ahli hukum adat pertanian, yang bertugas memutuskan perkara yang menyangkut sengketa di bidang pertanian.
5. *Maradika ritana* – sebagai penguasa areal tanah pertanian. Ia berhak menentukan boleh-tidaknya mengolah satu lokasi pertanian atau tidak, atau membatalkan hak pakai tanah seseorang.
6. *Suro* – sebagai pesuruh yang melakukan tugas sebagai penghubung antar pengurus dan anggota petani dalam komunitas kecil tersebut, misalnya menyampaikan pesan, putusan, pengumuman dan sebagainya.

Lembaga adat ini walaupun sekarang masih ada namun struktur pengurusnya sudah kurang lengkap lagi. Namun masyarakat masih terikat pada upacara dan teknologi pertanian tradisional, yang masih

sukar ditembus oleh pengaruh teknologi pertanian dewasa ini. Tanah, kebun dan sawah, mereka sebut "tanah mpoada" (tanah yang memiliki adat).

Lembaga adat ini hidup di daerah lokasi pertanian yang agak jauh ke pedalaman, sehingga agak sulit menerima perkembangan dan kemajuan di bidang pertanian.

Aparat pemerintahan formal dalam komunitas kecil di lokasi ini, sama halnya dengan daerah lainnya.

Di tingkat kecamatan dijumpai aparat-aparat pemerintahan sebagai berikut:

1. Aparat Kantor Wilayah Kecamatan Sindue yang dipimpin oleh Kepala Wilayah Kecamatan berkedudukan di Toaya.
2. Aparat Sektor Kepolisian Kecamatan Sindue yang dipimpin oleh Dan Sektor berkedudukan di Toaya.
3. Aparat Koramil Kecamatan Sindue, yang dipimpin oleh Dan Ramil, berkedudukan di Toaya.
4. Aparat Kantor Departemen P dan K Kecamatan Sindue dipimpin oleh Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan Sindue.
5. Aparat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue berkedudukan di Toaya.
6. Aparat Kepala Kampung/Kepala Desa yang meliputi Kepala-Kepala Rukun Kampung (RK) dan Rukun Tetangga (RT) dilengkapi dengan aparat desa seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Badan Musyawarah Desa (BAMUDES) yang anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat desa.

Hubungan Vertikal.

Dengan menyebutkan berbagai aparat komunitas kecil tersebut di atas, jelas bahwa Pemerintahan komunitas kecil ini mempunyai susunan baik vertikal maupun horizontal.

Hubungan vertikal dalam pemerintahan jelas nampak adanya garis struktural, mulai dari Bupati – Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) - Kepala Kampung (desa) - Kepala RK sampai dengan Kepala RT.

Kepala Wilayah Kecamatan sebagai Koordinator Pemerintahan di Kecamatan yang juga mempunyai staf, diatur dalam susunan organisasi pemerintahan yang juga mempunyai hierarchie berdasarkan pembagian fungsi masing-masing.

Hubungan kerja secara vertikal ini berjalan dan terjalin dengan baik. Setiap desa mempunyai otonomi pemerintahan sendiri dalam mengelola pembangunan desanya, sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Namun kenyataan faktor kepemimpinan desa belum memungkinkan otonomi itu berjalan dengan baik dan masih memerlukan banyak bimbingan Camat. Hal ini nampak kurang terarahnya penggunaan dana subsidi desa yang secara tepat guna dan tepat arah.

Pada aparat non pemerintahan, hubungan vertikal ini juga terjalin dengan baik. Hanya saja lembaga adat (ex kerajaan) di tingkat Kecamatan peranannya untuk mengayomi hukum adat, berangsur-angsur hilang, kecuali bila ada perkara-perkara yang datang *dari bawah* yang menuntut penyelesaian di tingkat Magau (Kecamatan). Dalam bidang hukum adat pertanian susunan itu jelas sesuai fungsi masing-masing aparatnya. Lembaga adat pertanian ini juga adalah warisan sistem kerajaan yang masih hidup. Namun lembaga adat ini tidak ada kaitannya dengan pemerintahan yang ada sekarang ini. Ia hidup dalam lingkungan keluarga petani yang terbatas, dan banyak peranan aparatnya yang berubah. Peranan Madika utama misalnya, dulu ditangani oleh raja atau cakal-bakal atau pendiri desa tersebut atau keturunannya. Sekarang ditangani oleh Kepala Kampung yang kebetulan masih dari keturunannya.

Hubungan Horizontal.

Hubungan horizontal yang merupakan perwujudan kerjasama antar aparat yang ada, atau antar pemerintahan komunitas kecil yang sederajat. Di tingkat Kecamatan aparat-aparat pemerintahan melakukan tugas sesuai fungsinya masing-masing dalam satu koordinasi Kepala Wilayah Kecamatan. Jalinan hubungan kerjasama cukup baik, dalam usaha bekerjasama menjalankan tugas-tugas pembangunan di segala bidang. Perwujudannya nampak dalam rapat bersama,⁴ dan saling memberi dan meminta bantuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.

Di tingkat pedesaan maupun di tingkat Kecamatan nampak adanya pengakuan akan peran dan fungsi masing-masing aparat pemerintah ataupun aparat-aparat non pemerintah. Misalnya antara Kepala Kampung dengan Ketua Dewan Hadat, Imam atau pegawai syara' dan lain-lain. Hal ini nampak misalnya pada masalah minggat, pembagian pusaka, perceraian dan sebagainya dapat saja lari ke rumah Imam, Ketua Dewan Hadat Kampung atau kepada Kepala Kampung ataupun

Kepala RK yang pada akhirnya penyelesaian masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah/mupakat di antara aparat yang ada. Dan bila perkara tersebut misalnya dapat diselesaikan oleh Kepala RK, atau Imam, maka keputusan tersebut dapat diterima dan saling memperkuat. Kecuali perkara kriminil langsung ditangani oleh Kepala Kampung atau Kepolisian.

LEMBAGA – LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL

Seperti diuraikan di atas, komunitas kecil diwarnai oleh adanya lembaga-lembaga sosial, baik di bidang ekonomi, sistem kemasyarakatan dan sistem religi.

Di bidang ekonomi khususnya di bidang pertanian masih dijumpai lembaga adat pertanian walaupun hampir punah dan masih terdapat di desa *Taripa* dan sekitarnya, seperti yang diuraikan di atas. Tujuan lembaga adat itu ialah mengorganisir anggota tani untuk membuka kebun baru, mengolah bersama dengan gotong royong menurut upacara dan hukum adat pertanian yang berlaku, dan melindungi hak-hak petani dalam memilih dan mengolah tanah pertanian. Bentuk organisasi lembaga tersebut merupakan satu organisasi petani, di mana pengurusnya/pimpinannya dipilih secara musyawarah. Dengan demikian bentuknya adalah *demokrasi*, termasuk pengambilan keputusan-keputusan teknis, waktu dan pembagian lokasi diputuskan dalam musyawarah anggota tani.

Pemimpin-pemimpin lembaga adat itu dipilih dari orang-orang yang dianggap ahli dan berpengalaman serta berwibawa. Memiliki pengetahuan-pengetahuan tertentu sesuai bidang/jabatannya.

Keanggotaannya hanya terdiri dari anggota tani saja, dan yang bersedia patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Norma-norma yang berlaku antara lain:

1. Setiap anggota tani bersedia bekerjasama (gotong royong).
2. Pemimpin-pemimpin lembaga adat, karena jabatannya berhak diberi bagian tanah yang dikerjakan secara gotong royong oleh anggota.
3. Wajib mematuhi pantangan-pantangan (tabu), dan wajib menghadiri upacara-upacara ritual, yaitu upacara *Balia Tampilangi*, Sebagai satu penyembahan pemujaan kepada arwah-arwah/mahluk halus yang dapat merusak tanaman. Biaya upacara ditanggung bersama.

4. Wajib menjaga hak-hak orang lain, jangan sampai ada yang mengganggu tanaman orang lain dan sebagainya.

Peranan lembaga ini terasa semakin menghilang, dengan perkembangan agama, perubahan-perubahan sistem pemerintahan Kerajaan, dan pengaruh perekonomian yang sudah lebih maju, serta perubahan struktur sosial.

Lembaga sosial lainnya di bidang ekonomi adalah koperasi. Pada saat daerah ini masih berstatus distrik dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1960-an perkoperasian sangat maju dan terkenal dengan nama *Kooperasi Banteng* Banawa Tengah) yang bergerak di bidang perkopraan. Dan hasilnya dapat membangun sebuah gedung SMP yang cukup besar dan membantu membeli kapling tanah untuk asrama siswa di kota Palu. Tapi pada akhirnya lembaga ini lumpuh karena kebijakan-kebijakan/peraturan-peraturan di bidang perkopraan yang selalu berubah dan mempersempit ruang gerak koperasi dengan adanya hak monopoli pembelian kopra dari pedagang-pedagang besar. Hingga akhir ini walaupun KUD sudah lahir kembali, namun kesadaran masyarakat berkooperasi sudah luntur, dan agak sukar dimotivasikan, karena sistem perkoperasian rakyat yang masih lemah.

Lembaga sosial komunitas kecil dalam sistem kemasyarakatan yang masih hidup adalah lembaga Dewan Hadat seperti yang diuraikan di atas. Lembaga Dewan Hadat ini merupakan lembaga permusyawaratan tokoh-tokoh masyarakat yang menguasai hukum adat yang dipimpin oleh *Magau* dalam bentuk kepemimpinan koloktif. Tujuannya ialah membahas kasus dan mencari jalan pemecahannya berdasarkan hukum adat setempat, misalnya kawin lari, gugatan harta warisan, perceraian, menetapkan dan memimpin upacara-upacara adat dan sebagainya. Tegasnya lembaga adat bertugas untuk memelihara kehidupan adat istiadat setempat. Anggota Dewan Hadat Kampung dipilih dan ditetapkan berdasarkan musyawarah tokoh-tokoh dan pemimpin komunitas kecil dari orang-orang tua yang berpengalaman, ahli dan berwibawa. Umumnya diambil dari lapisan sosial yang tinggi seperti keluarga bangsawan atau penduduk asli (cakal bakal) dari komunitas kecil tersebut. Lembaga adat ini dipimpin oleh *Magau nuada* yang sekarang ini berkedudukan di *Lero*. Peranan Lembaga ini sangat besar dalam memelihara kelangsungan hidup norma dan hukum adat setempat. Membela dan masih memelihara sistem mulai budaya masyarakat setempat. Namun peranan ini sudah semakin kecil. Hal ini disebabkan karena pergeseran-pergeseran sistem nilai budaya, dan semakin terbatas-

nya orang-orang tua yang ahli benar dalam soal adat-istiadat yang pernah kuat menguasai kehidupan masyarakat.

Lembaga sosial dalam sistem religi pada komunitas kecil, sekarang ini diperankan oleh *para dukun* secara individual dan tidak melembaga. Kewenangan menyelenggarakan upacara-upacara dahulu ditangani oleh raja-raja, pemimpin lembaga adat dan para dukun (*sando*). Satu-satunya upacara religi yang pernah menguasai kehidupan masyarakat Kaili ialah *upacara balia*, yang sekarang inipun sudah semakin punah.

Upacara Balia ini terdiri dari bermacam-macam bentuk dan tujuan pada garis besarnya dapat dibagi atas:

1. *Balia Ntomanuru* — bertujuan sebagai upacara pengembangan, pengabdian, permohonan dan sebagainya yang penuh dengan acara ritual. Balia ini dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat petani.
2. *Balia Bone Meloso* — balia ini bertujuan ganda, dapat bersifat penyembuhan, permohonan, pengobatan, hiburan dan untuk maksud-maksud ekonomi. Balia ini hanya dilakukan oleh para raja dan keturunannya.
3. *Balia Bone biasa* — sama dengan balia di atas, tapi khusus bagi keluarga biasa.
4. *Balia Tampilangi* — balia ini dilaksanakan untuk maksud-maksud pemujaan dan perlindungan kepada roh-roh halus dalam bidang pertanian, yang dilakukan pada masa menjelang membuka kebun baru.
5. *Balia Mounda* — yang dilaksanakan untuk maksud pengobatan.

Anggota tetap dalam setiap penyelenggaraan upacara religi ini ialah (1). para dukun, (2). para penggagas/yang terlibat (petani, orang-orang yang sakit, (3). dan orang tertentu yang mudah kesurupan (*topokoro balia*) dan para penyelenggara teknis upacara tersebut seperti pemukul gong, gendang yang disebut *Bule*.

Bentuk lembaga ini agak samar-samar, kurang terorganisir dan melembaga. Setiap orang yang ingin menyelenggarakan upacara dapat berhubungan dengan dukun (*sando*), dan para *bule* serta *Topokoro balia*. Dan perlengkapan upacara tersebut disiapkan dengan cara gotong royong masyarakat setempat.

Hingga sekarang peranan para dukun masih saja nampak dalam melakukan upacara balia tersebut. Namun pengaruh agama membuat

upacara dan lembaga tersebut semakin terdesak, dan tinggal pada desa-desa terpencil yang kurang terjangkau oleh pengaruh da'wah Islamiah.

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

Pelapisan sosial resmi

Dasar pelapisan

Sesuai kenyataan yang ada pada komunitas kecil suku bangsa Kaili khususnya yang berhubungan dengan dasar pelapisan sosial adalah karena keturunan, kekuasaan dan keaslian.

Bentuk pelapisan

Secara tajam bentuk lapisan sosial pada komunitas suku bangsa Kaili ada 4 tingkat, yaitu: Raja (*Maradika*), Bangsawan (*togura nungapa*), Masyarakat/rakyat kebanyakan (*to dea*) dan Budak (*batua*). Raja (*Maradika*) pada umumnya adalah keturunan dari *Tomanuru*. Tomanuru adalah orang yang menjelma secara tiba-tiba yang dijumpai pada pohon-pohon (bambu kuning) yang dipercaya sebagai penjelmaan dari dewa. Dalam bahasa Kaili raja disebut *Maradika*, atau *Madika*. Bangsawan (*tegura nungapa*) adalah kelompok masyarakat penduduk asli yang mempunyai kedudukan sosial dan masih keturunan raja yang biasanya merupakan pembantu utama Raja dalam menjalankan tugasnya seperti *Punggawa* (Menteri Dalam Negeri), *Galara* (Menteri Kehakiman), *Tadulako* (Menteri Peperangan), *Pabicara* (Menteri Penerangan) dan *Sabandara* (Menteri Perhubungan). Rakyat kebanyakan (*todea*), yaitu orang-orang yang tidak termasuk golongan Raja, bangsawan dan budak. *To dea* ini merupakan penduduk yang terbanyak. Budak (*batua*) adalah kelompok orang yang dikategorikan karena beberapa sebab antara lain: karena kalah perang, karena melanggar adat, karena miskin dan karena warisan dari orang tuanya.

Dari gambaran tentang susunan pelapisan sosial di atas maka akan dikemukakan beberapa komponen yang berkaitan dengan setiap lapisan itu sebagai berikut :

Raja (*Maradika*) adalah keturunan raja secara langsung dalam pengertian masih berdarah asli (ibu dan ayah) keturunan raja secara langsung dan penduduk asli. Keanggotaan dari Bangsawan (*togura nungapa*) adalah masih keturunan raja tetapi tidak berdarah asli lagi.

Mungkin ayah dari keturunan raja tetapi ibu bukan. Selanjutnya keanggotaan dari *to dea* adalah seluruh rakyat biasa yang tidak termasuk golongan raja, bangsawan dan budak. Sedangkan budak jelas adalah karena kalah perang, karena melanggar adat dan karena warisan dari orang tua.

Atribut-atribut yang dipakai lapisan *Maradika* adalah pakaian, rumah yang bentuknya lebih besar, simbol-simbol kebesaran tertentu dalam upacara-upacara adat. Pakaian di sini adalah pakaian adat yang kualitas, corak dan warnanya berbeda dengan rakyat kebanyakan (*to dea*), bentuk rumah selalu lebih besar, lebih mewah dari golongan lapisan di bawahnya, demikian pula simbol-simbol dalam upacara-upacara adat terutama upacara daur hidup selalu menggunakan instrumen *ula-ula* (semacam bendera dari kain dengan bentuk orang-orangan, berwarna kuning, merah dan biru. Dalam upacara *Balia*, Raja (*Maradika*) memiliki atribut tersendiri yang biasa disebut *Balia Moloso*, yaitu upacara *Balia* khusus milik raja saja, sedangkan *Balia* rakyat kebanyakan disebut *Balia Bone Biasa*. Perbedaannya terletak di dalam nilai kualitas dan kuantitasnya upacara itu.

Atribut-atribut golongan bangsawan (*togura nungapa*) cirinya sama dengan atribut raja seperti tersebut di atas, tetapi tidak boleh melampaui milik raja (*Maradika*), baik kualitas, besar dan isi atribut itu. Maknanya juga berbeda.

Gelar yang disandang Raja selain *Maradika*, juga yang dikenal luas ialah *Magau* (Raja yang dilantik memimpin kerajaan), *Maradika Matua* sebagai perdana menteri dan *Madika Malolo* sebagai Raja Muda atau wakil raja. Gelar ini fungsional dalam kehidupan masyarakat. Yang berhak menyandang gelar ini hanyalah yang berasal dari keturunan raja saja.

Sedangkan gelar dari golongan bangsawan (*togura nungata*) adalah mereka yang menduduki jabatan dalam pemerintahan kerajaan sebagai pembantu raja seperti *Punggawa* (Menteri Dalam Negeri), *Galara* (Menteri Kehakiman), *Tadulako* (Menteri Peperangan), *Pabicara* (Menteri Penerangan) dan *Sabandara* (Menteri Perhubungan). Pada masyarakat kebanyakan (*to dea*) tidak dijumpai gelar-gelar tertentu.

Hak-hak dalam masyarakat dari setiap lapisan tersebut dapat diuraikan secara singkat, seperti: lapisan *Maradika* berhak membuat/membangun rumah yang lebih besar dengan bergotong royong oleh masyarakat, membuat upacara-upacara pesta adat yang sepenuhnya didukung dan dengan bantuan sukarela dari seluruh anggota masya-

rakat. Dari segi kekuasaan berhak dipilih dan diangkat menjadi *Magau* (Raja yang diangkat untuk memerintah). Golongan bangsawan (*togura nungata*) berhak menjadi Ketua/anggota Dewan Hadat yang berfungsi sebagai badan legislatif, juga berhak diangkat sebagai pembantu raja. Sedangkan orang-orang golongan rakyat biasa (*to dea*) juga berhak ditunjuk sebagai anggota Dewan Hadat dengan selektif, artinya bagi mereka yang memiliki kecakapan, berani, jujur, amanah dan memiliki pengaruh yang besar.

Kewajiban-kewajiban lapisan tersebut adalah untuk mengayomi masyarakat, mengayomi seluruh isi kerajaan, menciptakan kesejahteraan lahir batin, kedamaian dan kebahagiaan hidup. Sedangkan kewajiban golongan *Batua* (Budak) ialah mengabdikan kepada Raja dan bangsawan dalam segala bidang kegiatan.

Peranan lapisan-lapisan itu di dalam masyarakat berbeda-beda sesuai dengan status mereka. Golongan Raja berperan sebagai pengawas dan pengendali kehidupan sosial, mengatur dan memimpin kerajaan sebaik-baiknya. Mereka sebagai pemimpin yang menjadi teladan masyarakat, menegakkan adat-istiadat yang berlaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Beliaulah sumber dan simbol dari akhlak dan sopan santun bermasyarakat. Golongan bangsawan ikut membantu raja dalam menjalankan tugasnya sebagai pengendali sosial berdasarkan adat-istiadat atau hukum adat yang berlaku. Mereka menegakkan norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan *to dea* harus ikut berpartisipasi secara positif dalam kehidupan masyarakat banyak dan membantu raja dan *to gura nungata* dalam menjalankan tugasnya.

Hubungan antar lapisan

Di dalam hubungan antar lapisan ini akan digambarkan lapisan-lapisan dalam komunitas kecil suku bangsa Kaili. Jalinan tersebut dapat terbentuk karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan tetangga, pekerjaan dan hubungan kemasyarakatan.

Hubungan kekerabatan terjadi melalui perkawinan. Perkawinan pada komunitas kecil suku Kaili banyak dipengaruhi oleh *sistem Mahar* berdasarkan tingkat-tingkat kedudukan sosialnya. Tingkat mahar itu baik kualitas, kuantitas, dan jenis-jenis mahar harus sesuai dengan status darah/kedudukan sosial seseorang dalam lapisan tertentu. Seperti jenis mahar yang ditetapkan adat adalah adat *Pitompole* (mahar untuk Raja dan keturunannya), adat *Limampole* (bagi golongan bangsawan) dan

adat *sanjasio* (bagi rakyat kebanyakan). Dari adat yang berhubungan dengan mahar di atas, terbuka kemungkinan terjadinya perkawinan dari golongan atas ke golongan bawah (Raja dengan *To dea*), atau bangsawan dengan *to dea*. Kawin dengan raja atau *maradika* merupakan suatu kebanggaan karena ia merasa terangkat derajatnya dalam lapisan masyarakat. Hanya saja untuk menjadi putra mahkota selalu dipilih dari putra hasil perkawinan kalangan yang berdarah murni (keturunan raja dengan raja). Dalam pergaulan sehari-hari setiap hubungan dibatasi oleh statusnya masing-masing. Walaupun diikat dalam hubungan darah dan perkawinan, nampak ada jarak di antara mereka bersaudara. Seperti misalnya dalam upacara perkawinan mereka diperlakukan berbeda, terutama seorang putra raja dari hasil perkawinan sedarah akan berbeda dengan seorang putra raja dari hasil perkawinan dari golongan *to dea*. Mereka sudah memiliki status yang berbeda, namun masih terikat dalam satu ikatan kekeluargaan yang cukup baik.

Hubungan antara tetangga pada lapisan-lapisan sosial ini cukup akrab, hanya nampak adanya keseganan dari golongan *to dea* terhadap golongan raja dan bangsawan. Karena segala sesuatunya dikerjakan secara gotong royong (*sintuwu*) maka perasaan keseganan itu tidak begitu tajam kelihatannya.

Hubungan pekerjaan antar lapisan sosial yang berbeda dalam pekerjaan yang sama kelihatan agak tajam, sebab para raja dan pembantunya umumnya tidak mampu bekerja. Seluruh sawah, ladang dan peternakan dikerjakan secara gotong royong oleh rakyatnya (*to dea* dan *batua*), di mana raja dan bangsawan menyediakan fasilitas seperti alat-alat, konsumsi dan kebutuhan lainnya dalam melakukan kerja gotong royong itu. Namun demikian dalam hubungan pekerjaan ini tetap terbina hubungan yang baik, justru rakyat pada komunitas suku Kaili ini benar-benar mengabdikan untuk kepentingan raja dan kerajaan pada umumnya.

Dalam hubungan kemasyarakatan dapat dilihat pada upacara keagamaan dan upacara adat lainnya. Raja di sini mempunyai peranan sendiri, di mana raja dijadikan media komunikasi antara kerajaan dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat kebanyakan. Seperti misalnya upacara *Balia*, di samping bersifat hiburan, bermotif ekonomi juga sebagai suatu upacara keagamaan yang harus diagungkan oleh seluruh isi kerajaan. Semua kegiatan upacara-upacara ini dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat luas.

Perubahan lapisan.

Lapisan sosial itu, kini telah mengalami perubahan melalui proses waktu yang cukup lama. Tentu saja perubahan ini mempunyai sebab-sebab dan juga terlihat hasil perubahan. Untuk ini akan dikemukakan sebagai berikut:

Sebab-sebab perubahan.

Pada umumnya perubahan ini disebabkan:

Masuknya dan semakin mendalamnya pengertian dan penghayatan tentang agama khususnya agama Islam, yang tidak membedakan manusia dalam tingkat dan lapisan sosial tertentu. Semakin terbukanya daerah dari dunia luar dengan perkembangan komunikasi yang memberi peluang perkembangan di bidang ekonomi sosial budaya dan kehidupan kemasyarakatan lainnya. Semakin terbukanya kesempatan pendidikan bagi masyarakat luas yang membawa perubahan pikiran-pikiran baru, terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari kerajaan ke struktur pemerintahan seperti sekarang ini, dan semakin lunturnya tata-nilai tradisional yang kolot yang membatasi hak dan kewajiban seseorang khususnya lapisan bawah.

Dari faktor-faktor penyebab tersebut, memperlihatkan adanya suatu perubahan penghayatan terhadap lapisan itu sendiri dari masa ke masa. Ada suatu masa di mana para penyebar agama menempatkan diri dalam posisi lapisan sosial yang terbatas yang dianggap sebagai orang suci, di mana raja dan kaum bangsawan serta masyarakat luas memandangnya sebagai orang yang paling disegani, berwibawa justru ajakan dan ajaran yang dibawanya dapat memenuhi kebutuhan rokhani secara keseluruhan. Ada suatu masa di mana penguasa (yang memegang pemerintahan) pada zaman penjajahan Belanda seperti Kepala Distrik, Kepala Kampung dan sebagainya yang menguasai masyarakat, namun secara psikologis tidak ada ikatan batin dan pengakuan komunitas kecil ini. Bahkan diketahui pada zaman itu, banyak masyarakat menyingkir ke gunung karena sikap kekerasan dan kerja paksa serta pembayaran pajak yang besar. Ada suatu masa di mana golongan ekonomi kuat mendapatkan pengakuan dari komunitas kecil ini, karena menguasai kebutuhan hidup masyarakat. Dan ada suatu masa golongan pejabat pemerintahan seperti Camat, aparat pemerintahan di Kecamatan dan desa (Polisi dan Militer) mendapat posisi dalam kehidupan masyarakat, karena mereka sangat menentukan terutama pada zaman SOB, zaman pemberontakan DI/TII dan Permesta, tetapi ada suatu masa juga di mana guru-guru dan kaum terpelajar mendapat pengakuan dan penghargaan yang dianggap

sebagai suluh dan juru pembangunan desa, seperti pada zaman sekarang ini.

Titik akhir dari proses perobahan ini melahirkan pelapisan sosial baru yang merombak pelapisan sosial yang lama berdasarkan keturunan, kekuasaan dan keaslian. Kelihatan tidak dikenal lagi sistem pemerintahan kerajaan dengan segala kemegahannya, tetapi seluruh masyarakat sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pengisian pembangunan di wilayah komunitas kecil ini. Di sini sudah kelihatan pajabat formal seperti Camat, Dan Sektor dan Koramil bukan lagi harus dari keturunan Raja, atau kekuasaan dan keaslian, tetapi sudah berasal dari masyarakat biasa dan dari pendatang yang mempunyai kemampuan untuk jabatan itu.

Pelapisan sosial samar.

Kalau di atas telah dikemukakan pelapisan sosial resmi maka berikut ini akan dikemukakan pelapisan sosial samar. Dalam hal ini akan diusahakan menggambarkan sesuatu anggapan masyarakat di mana anggapan itu sesungguhnya belum secara nyata mewarnai lapisan-lapisan yang telah ada. Untuk hal ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Dasar pelapisan sosial samar di sini adalah karena keahlian dan keberanian seseorang, yang cukup menonjol dalam masyarakat. Misalnya *Pande* (tukang) dalam pembangunan rumah, ahli menentukan kayu mana yang cocok digunakan, juga yang memiliki keahlian dalam pengobatan yang bersifat magis dan tradisional, seperti dukun dan ahli mantera yang biasa disebut *pagane*. *Pagane* ini selain mengobati penyakit, juga dapat menentukan waktu-waktu yang baik dan tidak baik, misalnya kapan mulai turun sawah, kapan mulai panen, di mana sebaiknya membangun rumah, dan lain sebagainya. Karena itu peranan *to pagane* ini dimasa lalu dalam aspek kehidupan sosial cukup menonjol dan diakui oleh masyarakat komunitas kecil ini. Orang yang mempunyai keberanian, merupakan pula dasar seseorang mendapatkan posisi sosial tertentu di dalam kehidupan komunitas kecil suku bangsa Kaili. Mereka ini mendapatkan julukan *Tadulako*. Mereka ini dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu-ilmu sakti, kebal, dan memiliki pengetahuan tentang bela diri serta trampil menggunakan alat-alat perang. Karena itu mereka dihargai dan dihormati oleh masyarakat luas, bahkan kadang-kadang mereka muncul sebagai pemimpin masyarakat secara tidak resmi.

Hubungan antara lapisan sosial samar, tetap diikat oleh ketentuan adat yang berlaku. Dalam hubungan perkawinan tetap menggunakan sistem mahar tertentu sesuai status mereka. Tidak ada pantangan dan hambatan dalam hubungan perkawinan, lebih-lebih apabila ada hubungan darah. Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan selalu diikat oleh hubungan darah dan selalu ada usaha untuk mengangkat keluarga lainnya yang status sosialnya rendah.

Hubungan tetangga antar lapisan sosial samar ini tetap terpelihara baik, dapat dilihat dari sistem gotong royong yang terpelihara baik. Demikian pula hubungan dalam pekerjaan. Di sini nampak ada peranan lapisan sosial samar tersebut yaitu melakukan kerjasama dengan fungsi dan keahlian serta keberaniannya masing-masing, dalam membantu raja/pembantu raja melaksanakan tugasnya demi pembinaan dan kemajuan kerajaan.

Perubahan pada lapisan sosial samar ini dapat dilihat beberapa sebab, seperti misalnya karena adanya pengaruh agama (Islam) yang menggeser nilai-nilai tradisional dengan upacara agama, kemajuan dan perkembangan pendidikan, semakin terbukanya dunia luar. Dan ini melalui proses yang cukup lama. Tetapi semakin besar pengaruh agama, dan semakin maju pembangunan desa serta kemajuan pendidikan dan adanya keterbukaan itu, mempercepat proses perubahan itu. Demikian pula dapat dilihat penghayatan masyarakat terhadap perubahan sistem pemerintahan, di mana sudah dikenal adanya Kecamatan dan Desa yang jelas, semakin mempercepat proses perubahan pelapisan sosial itu.

Dari perubahan-perubahan sosial samar ini, muncul lapisan baru yang terasa mewarnai kehidupan komunitas kecil ini. Dan ini sesungguhnya sama dengan pelapisan sosial resmi sebagaimana dikemukakan di atas. Perubahan di sini antara lain ialah dapat dilihat dari mereka yang memiliki: ilmu keagamaan/umum, kekayaan, dan ketrampilan khusus, serta senioritas. Atas dasar ini lapisan sosial samar yang hidup dalam masyarakat di desa ialah: Kelompok para ahli agama dan kaum yang memiliki kepandaian, kelompok orang yang memiliki kekayaan yang hidup sederhana, dan kelompok orang tua-tua adat yang masih tetap terpelihara sebagai pengemban adat-istiadat dalam komunitas kecil Kaili di pedesaan.

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI.

Dalam menggambarkan pelapisan sosial masa kini, akan digambarkan empat hal pokok yang memberikan uraian tentang pelapisan sosial

yang kelihatan sekarang ini, seperti: dasar pelapisan, bentuk pelapisan, hubungan antar lapisan dan perobahan lapisan. Ini pun dibagi dalam dua pokok uraian yaitu pelapisan sosial resmi dan pelapisan sosial samar.

Pelapisan sosial resmi.

Berdasarkan data yang ada sehubungan dengan pelapisan sosial resmi sekarang ini dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar pelapisan sosial.

Dasar pelapisan sosial yang ada dalam komunitas kecil suku bangsa Kaili masa kini antara lain karena Senioritas/keturunan, kekuasaan dan kepandaian (pendidikan). Senioritas di sini selain umur, juga diperhitungkan status sosial dalam masyarakatnya dan tingkat seseorang dalam jenjang kekeluargaan, kekuasaan dalam arti yang memerintah secara resmi (pejabat pemerintah) dan kepandaian ialah mereka-mereka yang memiliki pengetahuan, pendidikan serta keahlian tertentu baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti ahli dalam bidang agama (para ulama), para pendidik lainnya.

Bertolak dari dasar-dasar pelapisan sosial tersebut, terlihat bahwa bentuk pelapisan sosial sekarang, ada kelompok orang yang dituakan dan mempunyai pengaruh di dalam masyarakat (tokoh adat dan tokoh informal lainnya), para pejabat pemerintahan (Camat, Kepala Desa, Dan Sektor dan Dan Ramil serta pemimpin formal lainnya), dan kelompok pendidik dan tokoh agama (para ulama) dan kemudian dikenal rakyat biasa.

Tokoh-tokoh formal adalah mereka-mereka yang telah diangkat secara resmi oleh Pemerintah sebagai aparat pemerintah, sedangkan tokoh-tokoh informal adalah ketua adat, tokoh masyarakat dan para ulama.

Mengenai gelar yang disandang oleh tokoh formal adalah Camat, Kepala Desa, Dan Sektor, dan Dan Ramil, Imam, Kiyai dan Ustaz.

Mengenai hak-hak tokoh formal ialah menetapkan aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi sesuai dengan garis dari Pemerintah, menetapkan rencana pembangunan di wilayahnya sesuai bidang tugas masing-masing, sedangkan tokoh informal berhak mengajak masyarakat dan membantu Pemerintah untuk mensejahterakan penduduk dan menjaga kehidupan lingkungan secara baik.

Dengan demikian tokoh formal berkewajiban mengayomi seluruh masyarakat dengan berusaha membina masyarakat secara lebih baik

dengan mengadakan hubungan kerjasama dengan tokoh-tokoh informal lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Rakyat biasa berkewajiban memberikan partisipasi sebaik mungkin dalam pembinaan dan pembangunan masyarakat keseluruhannya.

Karena itu peranan tokoh formal dan informal sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kerjasama di antara mereka merupakan kunci berhasilnya pengelolaan tugas-tugas yang diembannya. Misalnya dapat dilihat peranan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan dan bidang keagamaan serta ketertiban masyarakat. Biasanya ketua adatlah yang menangani kasus-kasus seperti perselisihan atau ketegangan sosial lainnya, dan kalau tidak dapat diselesaikan, maka diserahkan kepada pejabat formal seperti Kepolisian, petugas bidang keagamaan untuk penyelesaian selanjutnya. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam komunitas kecil suku Kaili ini lapisan sosial yang formal dan informal serta rakyat seluruhnya senantiasa mengadakan hubungan baik dalam usaha membina dan mengembangkan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan wilayahnya.

Hubungan antar lapisan.

Hubungan antar lapisan di sini adalah karena terjalinnya sesuatu hubungan dari hubungan kekerabatan, tetangga, pekerjaan dan hubungan kemasyarakatan. Hubungan kekerabatan terjadi melalui perkawinan. Dalam hal ini tidak terjadi lagi pembatasan-pembatasan yang ketat, artinya antara golongan pemimpin formal dapat saja kawin dengan lapisan lainnya, demikian pula sebaliknya. Hanya saja diikat oleh ketentuan adat yang berlaku dan memenuhi norma keagamaan. Hubungan tetangga antara lapisan cukup baik. Dalam hal ini dikenal adanya rukun-rukun tetangga yang merupakan kelompok rumah tangga sebagai wadah dalam pembinaan kelompok di lingkungannya yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Rukun tetangga ini tergabung lagi dalam rukun kampung yang lebih besar dengan tujuan agar di antara sesama penduduk ada hubungan-hubungan baik yang timbal balik. Rukun kampung dan rukun tetangga ini cukup besar arti dan peranannya dalam kehidupan masyarakatnya, justru kedua wadah ini mengakrabkan hubungan antara mereka dan diikat oleh bentuk kegiatan gotong royong dalam aspek kehidupan sosial masyarakatnya. Dari gambaran di atas, jelas bahwa hubungan pekerjaan di antara mereka cukup baik, apalagi segala sesuatunya selalu dikerjakan secara gotong royong sebagai ciri khas masyarakat komunitas kecil suku Kaili. Tiap ada orang yang berani menentang konsepsi gotong royong ini. Jadi jelas

bahwa rukun tetangga dan rukun kampung sangat besar peranannya. Hubungan kemasyarakatan sudah jelas tergambar dalam uraian di atas, yaitu cukup baik. Biasanya melalui rukun tetangga dan rukun kampung inilah sebagai media kehidupan kemasyarakatan terjalin hubungan yang baik di antara mereka. Misalnya ada pesta perkawinan, kedukaan, pesta adat lainnya dan lain-lain kegiatan, maka seluruh warga desa merasa berdosa apabila tidak ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan itu. Demikian pula dalam kegiatan keagamaan seperti hari-hari besar Islam (Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Isra' Mi'raj) dan hari-hari besar Kristen (Hari Natal dan Tahun Baru), seluruh warga masyarakat ikut serta secara bersama-sama meramaikannya tanpa ada perbedaan perasaan baik dari segi status sosial, maupun kedudukannya dalam masyarakat.

Perubahan lapisan.

Adapun sebab-sebab sehingga terjadi perubahan lapisan pada komunitas kecil suku Kaili ini antara lain ialah karena: terjadinya struktur pemerintahan yang melalui proses waktu yang cukup lama, adanya kemajuan pada pola berpikir di mana semakin mendalamnya pengertian dan pemahaman serta penghayatan agama sebaik-baiknya di mana tidak dibedakan antara manusia dengan manusia lainnya, semakin terbukanya wilayah ini bagi dunia luar dengan perkembangan komunikasi yang lebih baik, dan semakin terbukanya kesempatan menikmati pendidikan baik formal maupun non formal yang membawa pikiran-pikiran dalam masyarakat. Dari gambaran sebab-sebab adanya perubahan tersebut di atas yang walaupun prosesnya cukup lama, namun karena adanya kesadaran masyarakat akan perubahan itu, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung untuk menghayati secara baik akan perubahan itu. Utamanya perubahan yang dibawa oleh kehidupan spiritual, melalui kehidupan beragama yang baik. Demikian pula adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai sumber kemajuan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama dan kesadaran akan pentingnya pendidikan sungguh merupakan era baru dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal demikian ini tercermin dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal demikian ini tercermin dalam sikap dan perbuatan suku bangsa Kaili ini, di mana telah terpaternya dalam kehidupan mereka untuk menerima hal-hal baru sebagai sumber kemajuan dan tidak selalu terikat secara ketat akan sifat tradisionalisme.

Pelapisan sosial samar.

Dalam pelapisan sosial samar ini akan digambarkan anggapan

masyarakat komunitas kecil suku Kaili, yang sesungguhnya belum secara nyata mewarnai lapisan-lapisan yang telah ada. Dalam hal ini akan digambarkan sebagai berikut:

Dasar pelapisan sosial samar di sini adalah karena kepandaian dan keahlian seseorang. Misalnya saja seseorang yang memiliki kualitas pendidikan, para cerdik-cendekia, para pemuka agama (para ulama), para petani yang memiliki keahlian khusus sebagai pelopor pembaharuan. Mereka inilah yang dianggap termasuk sesuatu lapisan tertentu walaupun tidak nyata, justru karena keahlian dan kepandaian yang dimilikinya. Karena itu mereka itu mendapat simpati dan mendapat tempat di hati masyarakat luas. Mereka dihormati dan merupakan tempat bertanya. Dengan demikian dianggap pantas digolongkan ke dalam lapisan sosial tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

IV. PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Ada dua hal pokok yang akan dikemukakan di sini yaitu Pimpinan Tradisional dan Pimpinan Masa kini. Keduanya diuraikan secara terpisah untuk mendapatkan gambaran umum.

Pimpinan tradisional pada dasarnya terbagi atas dua macam, yaitu pimpinan formal dan pimpinan informal.

Bentuk pimpinan tradisional adalah demokratis yang tumbuh dan berkembang atas prinsip kolektif baik dalam pimpinan tradisional formal maupun yang informal. Dahulu pimpinan formal terdiri atas dua lembaga, yaitu lembaga eksekutif di bawah pimpinan *Maradika* atau *Magau* (Raja) dan lembaga legislatif yaitu lembaga Dewan Hadat kerajaan yang dipimpin oleh *Baligau*. Kedua lembaga tersebut mempunyai hak yudikatif yang berjenjang, di mana *Magau* (raja) dapat menerima hak apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh anggota lembaga Dewan Hadat. Sedangkan pimpinan informal seperti lembaga Dewan Hadat tanah juga demikian halnya, yaitu berbentuk demokratis dan selalu didasarkan pada musyawarah atau *libu* yang dilaksanakan di *baruga* (rumah adat).

Adapun sifat-sifat pimpinan tradisional baik formal maupun informal pada komunitas suku bangsa Kaili selalu menunjukkan antara lain: berpandangan jauh ke depan, jujur adil serta amanah, banyak pertimbangan, berwibawa, ahli dan cakap, sebagai suri-teladan serta berasal dari keturunan raja.

Ketujuh sifat kepemimpinan tersebut di atas, merupakan syarat bagi seorang pimpinan tradisional baik formal dan informal. Seorang *Magau* atau *Madika Matua* dan *Madika Malolo* selalu dan harus memenuhi ketujuh syarat kepemimpinan di atas.

Dalam perkembangan sistem pemerintahan ini terlihat bahwa tergesernya kedudukan *Magau* atau *Madika Matua* dan *Madika Malolo* itu dari fungsi eksekutif ke legislatif dan yudikatif, di mana berlakunya sistem pemerintahan pada zaman Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan, sebagai lembaga Dewan Hadat sekarang, maka kini lembaga ini menjadi pimpinan informal yang kita kenal dewasa ini.

Peranan pimpinan formal dalam status dahulu (sebelum penjajahan Belanda) memperlihatkan peranannya yang cukup besar dan menentukan dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula peranan pimpinan informal.

Struktur.

Adapun struktur pimpinan tradisional formal adalah sebagai berikut: Kerajaan (*Kagaua*) dipegang oleh seorang *Magau* (Raja) sebagai pemerintah tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat. Beliau dibantu oleh seorang wakil yang disebut *Madika Malolo*. Sedangkan Dewan Pemerintahan *Kagaua* (Lembaga Eksekutif) yang biasa disebut *Lihu Nu Maradika*, susunannya sebagai berikut:

Madika Matua, sebagai Ketua Dewan Pemerintahan merangkap Perdana Menteri dan urusan Dalam Negeri, bertanggung jawab kepada *Magau* (Raja).

Punggawa, anggota sebagai Menteri Dalam Negeri.

Galara, anggota dan sebagai Menteri Kehakiman.

Taduloka, anggota dan sebagai Menteri Peperangan.

Pabicara, anggota sebagai Menteri Penerangan.

Sabandara, anggota dan sebagai Menteri Perhubungan.

Badan eksekutif inilah yang memimpin pemerintahan di daerah Kaili, di mana ketua dan anggota pemerintahan di sini diangkat dan diberhentikan oleh *Magau* (Raja) atas usul dan persetujuan *Baligau* (Dewan Adat Pitunggota sebagai Lembaga legislatif).

Selanjutnya lembaga legislatif yang dipimpin oleh *Baligau* disebut *Libu Nto Deya* (kota pitunggota). Para anggota dari lembaga legislatif ini adalah *totua Nu ngata* (orang tua dari kampung/*soki*) yang mewakili tiap-tiap kampung (*soki*) dari seluruh pelosok kerajaan Kaili.

"*Baligau*" di sini berarti perubah atau orang yang berkuasa merubah segala sesuatu dalam pemerintahan apabila bertentangan dengan Hukum

Adat atau undang-undang kerajaan. (4). Lembaga legislatif inilah yang menyusun dan mengawasi jalannya pemerintahan dan hukum adat yang berlaku untuk kepentingan rakyat dan kerajaan pada umumnya.

Sedangkan pimpinan tradisional yang informal adalah tokoh-tokoh masyarakat (*totua nu ngata*) yang ada pada setiap *soki* di wilayah kerajaan Kaili. *Totua Nungata* ini ialah: *Maradika Ntana* (tokoh dalam bidang pertanian), *Togura ntana* (tokoh dan pemegang adat tanah), *Ulutumba* (tokoh pada upacara-upacara pembukaan tanah dan pertanian), *Panuntu* (wakil *Ulutumba*), *Pagane* (ahli mantera, pawang, dukun/*sando*), dan *suro* (penghubung atau pesuruh dari pimpinan informal tradisional ini). Pimpinan tradisional informal tersebut di atas, pada hakekatnya secara fungsional membantu lembaga legislatif dan eksekutif dari kerajaan di daerah Kaili ini.

Pimpinan masa kini yang formal susunannya adalah: pada tingkat Kecamatan dan desa adalah: Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan, Komandan Sektor Kepolisian, Komandan Koramil, Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Kepala-Kepala Instansi tingkat Kecamatan lainnya, sedangkan di tingkat Desa adalah Kepala Desa lengkap dengan aparat desa. Pada setiap desa dikenal adanya Rukun Kampung (RK) dan Rukun Tetangga (RT).

Sedangkan pimpinan informal masa kini adalah terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap desa, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama (para ulama) dan pimpinan organisasi sosial lainnya. Di tingkat desa mereka itu dihimpun dalam Badan Musyawarah Desa (Bamudes) dan Lembaga Ketahanan Desa, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya.

Mengenai pimpinan masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas, sesungguhnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dan agama tersebut bersumber dari tokoh-tokoh formal pada waktu dahulu (tradisional), yang sekarang ini berfungsi sebagai pembantu pimpinan formal walaupun sesungguhnya sekarang ini mereka termasuk kategori pimpinan informal.

PIMPINAN TRADISIONAL

Pimpinan tradisional yang formal.

Pimpinan tradisional yang formal terdiri atas beberapa komponen yang berkaitan dengan gelar, jabatan, daerah kepemimpinan, persyaratan dan sebagainya yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Nama dan gelar.

Dari berbagai nama dan gelar sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah dijelaskan sebagai berikut:

Madika atau *Maradika* adalah gelar yang dimiliki bagi orang yang memegang suatu kekuasaan dan atau karena memiliki darah biru (murni) keturunan raja (*Magau*). Sedangkan *Magau* adalah gelar bagi seorang raja yang sudah dilantik berdasarkan pengangkatan dari Dewan Hadat Kerajaan (*Baligau*). Diduga keras istilah *Magau*, *Madika* ini adalah pengaruh dari Sulawesi Selatan. Untuk membedakan nama *Madika* yang memegang kekuasaan atau tidak digunakan istilah *Madika bose* sebagai orang yang memegang kekuasaan, dan *Madika Kadi* bagi orang yang berdarah biru. Gelar-gelar lainnya seperti *Madika Malolo*, *Madika Matua* adalah gelar yang juga diduga keras pengaruh dari Sulawesi Selatan seperti halnya gelar *punggawa* dan gelar *Pabicara*. Gelar *Sabandara* mungkin dari istilah syahbandar yang diucapkan dalam dialek daerah Kaili. Sedangkan gelar *Tachulaka* adalah istilah khas daerah yang melambangkan sifat keberanian, kepemimpinan dan keunggulan khususnya dalam bidang keamanan dan pertahanan yang senantiasa sukses. Gelar-gelar tersebut dipakai bagi mereka yang berhak memakainya setelah diangkat oleh *Magau*. Sedangkan *Magau* diangkat secara demokratis melalui musyawarah Dewan Hadat Kerajaan.

Jabatan dan lapangan kepemimpinan.

Setiap gelar tersebut mempunyai fungsi dan bidang tugas masing-masing sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, baik dalam bidang eksekutif maupun dalam bidang legislatif, meliputi seluruh wilayah kerajaan di daerah ini.

Lokasi kepemimpinan.

Pimpinan-pimpinan ini diangkat dan berkuasa di seluruh wilayah tanah Kaili yang dalam sistem pemerintahan dahulu meliputi tujuh penjuru angin yang disebut *Kota Pitunggota*.

Kota Pitunggota tersebut terdiri atas wakil-wakil dari setiap *soki* (kampung) untuk duduk sebagai anggota Dewan Hadat Kerajaan.

Persyaratan formal menjadi pemimpin.

Untuk *Magau* dan *Madika Malolo* serta *Madika Matua*, Harus memenuhi syarat antara lain ialah: turunan Raja dan memiliki darah biru, memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti diuraikan dalam halaman terdahulu di atas dan dipilih serta diangkat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku melalui *Libu Nto Deya* (Dewan Legislatif Kerajaan). Sedangkan jabatan bagi anggota eksekutif lainnya yang

bukan termasuk golongan Maradika diperlukan syarat-syarat dan sifat kepemimpinan: Cakap dan memiliki keahlian, berani, senior dan berdarah bangsawan. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ialah kejujuran, keadilan, sebagai panutan, kesaktian dan sebagainya.

Hak-hak pimpinan.

Pimpinan tradisional formal mempunyai hak-hak sebagai berikut: Raja (Magau) serta *Madika Malolo* dan *Madika Matua* berhak menjatuhkan hukuman kepada yang melanggar hukum adat kerajaan, setelah mendapatkan pertimbangan dari *Baligau* dan Ketua-ketua adat di wilayahnya, berhak menyatakan perang, menetapkan hari duka apabila ada keluarga kerajaan meninggal, berhak mengumpulkan seluruh rakyat untuk kerja gotong royong bagi kepentingan kerajaan. Sedangkan pimpinan formal lainnya ialah berhak memberikan pertimbangan kepada Raja dan wakilnya melalui *Madika Matua* sesuai bidang tugasnya masing-masing. Demikian pula hak dari *Baligau* yang membidangi lembaga legislatif kerajaan, berhak menyampaikan keadaan pengelolaan Hukum Adat yang berlaku dan diperlakukan dalam kerajaan.

Kewajiban di sini adalah mengayomi seluruh rakyat, melindungi Adat Kerajaan, mengambil inisiatif untuk kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugasnya masing-masing. Sedang bagi Dewan Hadat berkewajiban menerima dan menyalurkan seluruh keluhan masyarakat, memusyawarahkan dan memutuskan perkara-perkara yang ada, memimpin upacara-upacara kerajaan sesuai dengan adat yang berlaku. Tegasnya pemimpin formal di sini berkewajiban mensejahterakan seluruh rakyat.

Pengangkatan.

Magau yang memegang pimpinan tertinggi pemerintahan kerajaan diangkat melalui musyawarah (*Libu Nto Deya*) Dewan Hadat Kerajaan. Pemilihan terjadi apabila seorang *Magau* meninggal dunia, dan yang dipilih melalui cara selektif, dari keturunan raja yang memiliki darah biru (asli), yaitu ayah dari keturunan Raja demikian pula ibunya. Pembantu-pembantu *Magau* seperti *Madika Malolo*, *Madika Matua* dan anggota-anggota pimpinan formal lainnya ditunjuk dan dipilih oleh *Magau* atas persetujuan Dewan Hadat Kerajaan. *Magau* dilantik di Baruga (Rumah Hadat) dengan upacara kebesaran, di mana seluruh rakyat menghadirinya. Yang melantik ialah *Baligau* (Ketua Dewan Hadat).

Atribut-atribut.

Yang memiliki atribut-atribut hanyalah *Magau*, *Madika Malolo*,

Madika Matua dan pimpinan formal lainnya, serta keturunan raja. Atribut di sini ialah simbol-simbol kerajaan, pakaian, rumah dan lain-lain sebagainya yang membedakannya dengan rakyat biasa (*to dea*).

Hubungan antar pimpinan.

Hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif menggambarkan para pimpinan lembaga tersebut mempunyai hubungan struktural dan fungsional. Sebagaimana dikemukakan di muka, bahwa antara lembaga-lembaga pemerintahan pada komunitas kecil Kaili ini kelihatan hubungan itu sudah diatur secara tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. Tetapi semuanya berpusat kepada *Magau*.

Hubungan dengan masyarakat.

Dari gambaran yang telah dikemukakan terdahulu, di mana pimpinan formal di sini sudah jelas tugas dan fungsinya. Di dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka kelihatannya bahwa kehadiran pemimpin-pemimpin formal ini sangat disegani dan dihormati oleh masyarakatnya, justru mereka sebagai panutan masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat tersebut begitu besar terhadap pemimpinnya, maka pengaruhnya di dalam kehidupan masyarakat sangat besar. Besarnya pengaruh pimpinan tersebut di dalam kehidupan masyarakat karena mereka adalah Raja dan keturunan raja yang dipercayai sebagai keturunan *to manuru* dan *to baraka*, dengan sifat-sifat kepemimpinan yang terpuji dan berwibawa. Bahkan rakyat (*to dea*) selalu memberikan hadiah hasil usahanya (hasil pertanian, buruan, perikanan) kepada Raja dan keturunannya sebagai pencerminan pengabdianya kepada pemimpin-pemimpinnya. Pemberian semacam ini dikenal dengan nama *Ne kasuwia*. Bahkan rakyat secara gotong royong selalu mengerjakan sawah dan ladang raja dan keturunannya, sebagai rasa pengabdian yang tinggi. Dengan demikian pengaruh pimpinan formal di sini sangat besar dalam kehidupan masyarakat di lingkungannya.

Pimpinan tradisional yang informal.

Mengenai pimpinan tradisional yang informal ini, juga tidak terlepas dari keadaan kehidupan kerajaan pada waktu itu. Untuk ini maka pimpinan tradisional yang informal pada komunitas kecil suku bangsa Kaili, sesungguhnya masih merupakan tangan kanan *Magau* dan aparat-aparat kerajaan yang non struktural, dan sifatnya hanya fungsional semata-mata karena disesuaikan dengan fungsi dan keahlian masing-masing pemimpin informal itu. Sebagaimana dikemukakan dalam

halaman terdahulu di atas, pimpinan tradisional informal pada komunitas kecil suku Kaili adalah tokoh-tokoh masyarakat (*to tua nu ngata*) yang ada pada setiap soki (kampung) di dalam lingkungan kerajaan. *To tua nu ngata* ini ialah: *Maradika ntana* (tokoh pemegang adat tanah), *Ulutumba* (tokoh pada upacara-upacara pembukaan daerah pertanian dan upacara di dalam pertanian itu sendiri), *Panuntu* (wakil *Ulutumba*), *pagane* (ahli mantera, pawang, dukun)sando) dan *suro* (yang bertugas sebagai penghubung atau pesuruh dari pimpinan informal tradisional ini). Pimpinan Informal tersebut di atas harus saling isi-mengisi, saling bekerjasama dalam menjalankan tugasnya. Beliau-beliaulah sebagai tangan kanan *Magau* dan aparat kerajaan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Dari gambaran tentang pimpinan informal tersebut di atas, jelaslah kepada kita bahwa pimpinan tradisional yang informal ini mempunyai fungsi dan pengaruh yang cukup besar di dalam kehidupan komunitas kecil suku Kaili.

PIMPINAN MASA KINI

Pimpinan masa kini yang formal.

Pada komunitas kecil suku Kaili, pimpinan masa kini yang formal dapat dilihat mulai dari Kepala Wilayah Kecamatan (Camat dengan aparat-aparat dan stafnya, sampai kepada Kepala-Kepala Desa di tingkat desa (*soki*). Kepala Desa sendiri dibantu oleh Sekretaris Desa lengkap dengan staf pembantu seperti bidang pemerintahan/ketertiban, bidang pembangunan/ekonomi, bidang keuangan, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang umum. Jelas bahwa Camat dan Kepala Desa adalah pemimpin formal yang sudah melembaga. Pimpinan ini diangkat dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah. Di samping Camat dan Kepala Desa, juga dikenal pimpinan formal lainnya seperti Komandan Sektor Kepolisian, Komandan Koramil, Kepala Urusan Agama, Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala-Kepala kantor/dinas lainnya di tingkat Kecamatan. Beliau-beliau ini berkewajiban membantu Camat mengemban tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Pimpinan formal inilah yang bertanggung jawab terhadap usaha mewujudkan pembangunan desa secara terpadu, mewujudkan desa swakarya, swadaya menjadi desa swasembada sampai menjadi desa Pancasila. Camat dibantu oleh seluruh aparat pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa. Dalam hal ini seorang Camat dan Kepala Desa harus memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis, terbuka, jujur, amanah, berdedi-

kasi tinggi agar dapat mencapai tujuan pembangunan di wilayahnya. Kepemimpinan yang demikian perlu didukung oleh sikap keterpaduan dari segala unsur yang ada dalam masyarakat.

Pimpinan masa kini yang informal.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dari pemimpin formal sebagaimana dikemukakan di atas, mutlak perlu adanya kerjasama dan hubungan baik dengan pemimpin informal yang ada dan hidup dalam masyarakat komunitas kecil ini. Pemimpin informal di sini ialah tokoh-tokoh adat, pemuka-pemuka agama (para ulama), tokoh-tokoh organisasi sosial kemasyarakatan seperti organisasi pemuda di desa, organisasi wanita seperti Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi serta Organisasi Wanita Keagamaan dan sebagainya. Khusus tokoh-tokoh adat yang sekarang ini sebagai pemimpin informal, sesungguhnya adalah pemimpin formal pada waktu dulu, justru merekalah yang paling mengetahui keadaan dan kehidupan adat pada komunitas kecil ini. Adat di daerah komunitas kecil ini masih tetap terpelihara baik karena selain peranan tokoh-tokoh adat dan pemimpin informal lainnya berusaha untuk melestarikannya, juga adanya kerjasama dan hubungan baik dengan pemimpin formal. Kenyataan menunjukkan bahwa di tingkat desa, pemimpin-pemimpin informal tersebut dipersatukan dalam wadah yang sengaja dibentuk, yaitu Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Lembaga Musyawarah Desa anggotanya adalah tokoh dan pemuka adat, tokoh masyarakat, para ulama, para guru di desa, sedangkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa anggotanya selain tokoh-tokoh masyarakat, para tua-tua desa juga dari ketua-ketua organisasi sosial kemasyarakatan di desa seperti dari pemuda atau wanita, Ketua lembaga ini diketuai oleh Kepala Desa sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Camat setempat. Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fungsi dan peranan pemimpin informal dalam kehidupan masyarakat desa cukup besar. Keterpaduan antara pemimpin formal dan pemimpin informal dalam komunitas kecil suku bangsa Kaili sangat penting untuk mengemban tugas-tugas yang dihadapi, di mana partisipasi masyarakat sangat diharapkan.

Dari gambaran dan uraian yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa susunan pimpinan tradisional, pimpinan masa kini dan pimpinan masyarakat itu sendiri, merupakan potensi yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat komunitas suku bangsa Kaili.

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Sistem pengendalian sosial khususnya pada komunitas suku bangsa Kaili, adalah suatu sistem yang bermaksud agar warga masyarakatnya dapat berpikir dan bertindak-laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengendalian sosial tersebut diharapkan setiap anggota masyarakat di samping menghayati nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, juga harus mampu berbuat, bertindak-laku sesuai dengan pranata sosial, nilai sosial, norma sosial dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam rangka pengendalian sosial ini, ditempuh jalan atau cara-cara antara lain: mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu dan mengembangkan rasa takut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Mempertebal keyakinan dalam rangka pengendalian sosial digunakan beberapa jalur seperti pendidikan, sugesti sosial, propaganda dan kepercayaan/agama.

Pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu jalan untuk menanamkan kejakinan, baik pendidikan formal maupun non formal. Dengan pendidikan ini orang dididik untuk dapat hidup sesuai dengan citra kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Adapun macam-macam pendidikan yang ada ialah pendidikan formal seperti Perguruan Tinggi (Universitas Tadulako, IKIP, IAIN, Perguruan Tinggi Islam Al-Chairaat, AAN) semuanya di Palu, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Tingkat Pertama baik negeri maupun swasta, Sekolah Dasar, Pendidikan Guru Agama, Aliyah, Sanawiyah dan Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta. Yang diajarkan adalah materi kurikulum yang berkenaan dengan sikap dan nilai hidup, (Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila), pengetahuan (Ilmu Pengetahuan alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa, Matematika dan logika), Ketrampilan jasa dan lain-lain), humaniora (pendidikan kesenian, kesegaran jasmani, filsafat, sejarah) dan Kewiraan serta Kewarganegaraan. Dari materi kurikulum yang diajarkan tersebut diharapkan agar anak didik mampu memiliki dan menghayati nilai dan sikap agama yang dianutnya serta sebagai manusia yang mampu menghayati dan

mengamalkan Pancasila, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki ketrampilan-ketrampilan, mengetahui ilmu-ilmu sosial, alam, bahasa dan matematika serta mampu sebagai manusia yang berbudaya tinggi sesuai dengan perkembangan zaman. Tegasnya, sebagai manusia yang mampu mempertinggi kecerdasan dalam segala bidang dan mampu menghormati nilai-nilai hidup kemasyarakatan. Lebih tegas lagi memiliki kualitas hidup. Sedangkan macam-macam pendidikan non formal adalah pendidikan kepramukaan, pendidikan ketrampilan, pendidikan kesejahteraan keluarga dan pendidikan masyarakat lainnya yang pada umumnya diselenggarakan oleh organisasi sosial yang ada dan hidup pada komunitas kecil ini. Yang diharapkan dari pendidikan non formal ini adalah kemampuan untuk memasuki hidup kemasyarakatan yang lebih luas, belajar berdiri sendiri, berwiraswasta, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya secara baik. Juga dengan pendidikan non formal ini selain membantu pendidikan formal juga sekaligus membantu keluarga-keluarga menata pembinaan anak didik itu sendiri.

Sugesti sosial.

Dalam sugesti sosial ini orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat sangat penting. Sugesti sosial ini biasa dilakukan di lingkungan keluarga dan pada tempat-tempat pertemuan tertentu.

Pada setiap kesempatan yang ada selalu diingatkan bahwa esensi hakiki hidup yang baik ini adalah berdasarkan *Sintuwu*. Dalam konsep *sintuwu* ini mengandung banyak pengertian antara lain ialah :

- *Sintuwu* berarti *deta nto deya* (kemauan orang banyak) atau *dota pasangani* (kemauan bersama) untuk melakukan sesuatu pekerjaan.
- *Sintuwu* adalah kegiatan kerjasama dan tolong-menolong yang didorong oleh rasa kekeluargaan, kebersamaan dan persekutuan hidup dalam komunitas, untuk kepentingan seseorang, keluarga, kerabat dan masyarakat pada umumnya.
- *Sintuwu* adalah kegiatan gotong royong untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam berbagai bidang dan lapangan kehidupan yang dipandang baik dan terpuji di mana kita menghendaki kerjasama atau bantuan orang lain. (8, 54-55). Jelas bahwa konsepsi *Sintuwu* pada komunitas kecil yang sudah dikenal sejak dahulu, selalu diagung-agungkan pada setiap kesempatan, justru konsep *Sintuwu* ini sebagai media sugesti sosial dalam rangka usaha mempertebal keyakinan. Salah satu pepatah yang juga selalu diingatkan ialah : *Adara nakalepumo dakome*

rarantai ntinana sampe niote kana niadaki mpapola sampe geira narandaa bo nakabilasamo ipaneganehi, artinya: Mereka (kamu semua anak-anak) disempurnakan perangaimu menurut *adat*, sejak dari kandungan sampai dilahirkan dan terus-menerus sampai hari ini dan menjadi orang yang dewasa.

Pepatah ini menunjukkan betapa pentingnya setiap orang sejak anak-anak hingga dewasa untuk selalu memperbaiki perangai, sikap dan tingkah-laku sesuai dengan adat yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap orang berkewajiban menghayati dan mengamalkan nilai-nilai, norma-norma serta aturan-aturan yang berlaku sesuai adat. Ini pun merupakan suatu sugesti sosial dalam rangka mempertebal keyakinan bahwa adatlah sebagai pedoman yang cukup mendasar dalam kerangka mengarungi hidup dan kehidupan ini. Menyempurnakan perangai, sikap dan tingkah-laku di sini juga termasuk sopan-santun pergaulan, tutur bahasa dan sikap yang didasari oleh jiwa *sintuwu* itu sendiri.

Salah satu contoh dalam sopan-santun pergaulan ialah apabila dalam satu rumah hanya tinggal seorang gadis karena orang tua atau saudaranya ke luar rumah, maka pintu harus ditutup dan dikunci dan tidak diperbolehkan menerima tamu. Dan sebaliknya seorang pria yang hendak bertamu, harus lebih dahulu memberi isyarat atau bertanya dan sebelum mendapat jawaban diperbolehkan naik, maka pria tersebut tidak boleh naik atau masuk rumah. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini akan dituntut dan dihukum sesuai dengan adat yang berlaku. Kesemuanya ini adalah usaha untuk menegakkan adat-istiadat pada komunitas kecil ini.

Propaganda.

Dalam setiap kesempatan dan pertemuan di mana saja, di tingkat Kecamatan, dan desa para pemimpin formal (Camat dan Kepala Desa serta pemimpin lainnya), maupun pemimpin informal (tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya) senantiasa menggunakan kesempatan tersebut untuk menggugah masyarakat agar menghargai waktu, bekerja keras, mempertinggi jiwa *sintuwu* (gotong royong), mempertebal rasa keagamaan, memiliki budi pekerti luhur, menghormati orang lain, dan senantiasa membantu pemerintah sehingga sikap yang demikian diharapkan akan menumbuhkan suasana kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Kepercayaan dan agama.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, kepercayaan dan agama

yang tumbuh dan hidup berkembang pada komunitas suku Kaili sangat besar. Dapat dilihat banyaknya upacara-upacara keagamaan dari upacara dan adat daur hidup, pertanian, pembangunan rumah, dan upacara selamatan lainnya. Dan dalam kehidupan keagamaan ini dapat dilihat seperti kegiatan yang diarahkan untuk lebih mempertebal keyakinan, rasa keagamaan, menjauhi segala larangan agama dan kepercayaan dan sebaliknya menghayati dan mengamalkan segala sesuatu yang dianjurkan oleh agama dan kepercayaan itu.

Perwujudannya dalam kehidupan masyarakat seperti misalnya memperingati hari-hari besar keagamaan (Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Isra' Mi'raj, Hari Natal) senantiasa dirayakan dengan penuh pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan komunitas kecil ini, peranan kepercayaan dan agama begitu besar, di mana sikap dan tingkah-laku seseorang banyak diukur dari penghayatan dan pengamalannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Karena itu peranan agama sangat besar pada komunitas kecil ini.

MEMBERI IMBALAN

Memberi imbalan adalah salah satu usaha untuk pengendalian sosial. Imbalan ini meliputi imbalan konkrit, imbalan dalam kepercayaan dan imbalan dalam agama.

Imbalan konkrit di sini berupa imbalan benda. Imbalan berwujud benda diberikan bagi mereka yang menunjukkan prestasi baik di lingkungannya seperti pemenang Lomba Desa, pemenang dalam memperingtinggi hasil produksi (padi, jagung, dan bahan pertanian lainnya). Yang diberikan sebagai imbalan atas prestasinya adalah alat-alat pertanian, obat-obatan, pupuk dan bahkan uang. Juga diberikan imbalan non materiil seperti piagam penghargaan, pemberian kesempatan untuk meninjau daerah-daerah lain yang sudah lebih maju, baik dalam Kabupaten/Propinsi di Sulawesi Tengah maupun di Kabupaten/Propinsi lainnya, dengan biaya Pemerintah. Imbalan semacam ini sangat besar arti dan peranannya, justru merupakan dorongan bagi masyarakat untuk berkompetisi secara positif dalam membina wilayahnya masing-masing.

Imbalan dalam kepercayaan.

Imbalan yang diperoleh seseorang di sini ialah apabila seseorang bersikap dan bertingkah-laku sesuai dengan kepercayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Artinya apabila seseorang itu tetap

taat dan patuh melaksanakan upacara-upacara adat, upacara-upacara religius, menghormati nilai-nilai luhur yang berlaku, menegakkan adat di lingkungannya. Mereka itu akan tetap dihormati oleh masyarakatnya. Bahkan kepada merekalah diberi gelar tokoh adat/tokoh masyarakat, dan sekaligus diberi kepercayaan sebagai pemimpin informal yang cukup disegani dan dihormati. Mereka ini mempunyai peranan yang cukup menonjol dalam lingkungan komunitas kecil suku Kaili.

Imbalan agama.

Di wilayah komunitas kecil suku Kaili, agama yang terbesar penganutnya adalah Islam. Imbalan yang diperoleh apabila seseorang bersikap, bertindak-laku dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, ialah dihormati dan diagungkan sebagai tokoh agama sebagai ulama (Kiayi dan Ustaz). Mereka mendapat tempat terhormat dalam kehidupan masyarakat, bahkan merupakan contoh dan panutan masyarakatnya. Mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam masyarakatnya.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Bahwa rasa malu adalah salah satu aspek yang berpengaruh dalam pengendalian sosial, sebab rasa malu adalah suatu rintangan untuk berbuat, bertindak-laku di luar nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas kecil suku Kaili. Karena itu makin besar rasa malu makin besar kemungkinan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, dan sebaliknya sebagai alat pendorong untuk bertindak-laku sesuai dengan kebiasaan dan pranata sosial yang berlaku di lingkungannya. Dalam hubungan ini akan dicoba memberikan gambaran dan mengungkapkan melalui: peranan gunjing, peranan kepercayaan dan peranan agama

Peranan gunjing.

Gunjing sering dilakukan di tempat-tempat pertemuan khusus seperti di tempat mandi umum, di tempat cuci umum (Sungai dan sumur umum), di tempat pekerjaan gotong royong seperti di sawah, di ladang atau di tempat kegiatan lainnya seperti di tempat upacara-upacara keagamaan. Yang dipergunjingkan adalah mengenai tingkah-laku atau sikap seseorang yang selalu bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma serta aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya. Misalnya seseorang yang selalu memperlihatkan sikap

dan kelakuan yang tidak senonoh, suka mengganggu orang lain, kikir, mementingkan diri sendiri, enggan terhadap segala bentuk upacara adat dan upacara keagamaan lainnya, tidak menghormati hak orang lain dan sebagainya. Hasil gunjingan tersebut berkembang dari mulut ke mulut dan membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat utamanya bagi mereka yang kena gunjing. Kadang-kadang pengaruh gunjing ini dapat merubah sikap dan tingkah-laku seseorang terutama yang kena gunjing, dan dapat merupakan himbauan bagi seluruh anggota masyarakatnya.

Peranan kepercayaan.

Adapun perbuatan-perbuatan yang memalukan menurut kepercayaan di wilayah komunitas kecil suku Kaili, adalah sikap acuh tak acuh terhadap pentingnya adat dan upacara yang harus tetap dihormati dan dilaksanakan di lingkungannya. Misalnya acuh tak acuh terhadap upacara-upacara adat seperti dalam bidang pertanian, kematian, atau upacara selamatan lainnya. Apabila terang-terangan mereka itu tidak mengacuhkan adat dan upacara tersebut, maka yang bersangkutan dipencilkan dalam kehidupan masyarakat dalam arti mereka itu tidak dikunjungi, tidak diikutsertakan dalam setiap upacara adat, tidak diajak dalam kerja gotong royong dan lain sebagainya usaha hukuman moral. Biasanya orang yang demikian akan merasakan beban moral yang cukup berat, bahkan seperti diliputi oleh perasaan berdosa. Kalau demikian kejadiannya, maka jelas bahwa peranan kepercayaan di sini cukup kuat dalam kehidupan masyarakat komunitas kecil suku Kaili.

Peranan agama.

Dalam masyarakat komunitas kecil suku Kaili, sudah diuraikan terdahulu bahwa peranan agama sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu apabila ada orang atau kelompok orang yang acuh tak acuh terhadap penghayatan dan pengamalan agama yang dianutnya (misalnya Islam), maka ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu masyarakat harus secara sadar dan bertanggung jawab menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan baik, maka imbalannya ialah mereka itu tetap dihormati, dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Bahkan kepadanya diberi gelar ulama (Kyai, Ustaz dan pemuka agama). Tetapi apabila ia acuh tak acuh, maka yang bersangkutan akan dicemoohkan dan dapat diberi hukuman moral seperti tidak mengikutsertakan orang itu dalam

setiap kegiatan sosial lainnya. Dari gambaran tersebut jelas bahwa peranan agama pada komunitas kecil suku Kaili sangat besar.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Salah satu bentuk dalam pengendalian sosial adalah mengembangkan rasa takut, justru rasa takut ini merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan agar masyarakat di lingkungannya tidak berbuat dan bersikap di luar nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalam komunitas kecil suku Kaili ini. Dalam hal ini, maka ada tiga faktor yang penting untuk diperhatikan, yaitu faktor kepercayaan, faktor agama dan faktor hukum adat.

Kepercayaan.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kepercayaan di sini adalah meremehkan atau tidak mentaati tata upacara adat yang diharuskan dan berlaku secara umum dilingkungan masyarakat seperti upacara daur hidup, upacara dalam bidang pertanian, upacara selamatan lainnya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diharuskan ialah mengikuti secara tertib setiap aturan dan upacara adat yang berlaku, seperti melaksanakan upacara-upacara adat sesuai ketentuan, melaksanakan kerja gotong royong (*sintuwu*) dalam setiap pelaksanaan adat dan upacara dalam segala segi kehidupan, membantu orang lain menyediakan alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam upacara-upacara itu serta selalu bersedia sebagai peserta upacara yang baik.

Bagi mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh kepercayaan ini, diberi sanksi berupa hukuman sosial di mana mereka itu dipencilkan dalam setiap kegiatan yang ada, jadi merupakan beban psikologis yang cukup berat. Hal ini akan dirasakan oleh yang bersangkutan apabila sanksi tersebut sudah berjalan, dan perasaan selalu diliputi dosa besar. Biasanya hukuman sosial tersebut dapat merubah sikap dan tingkah-laku seseorang, dan ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menghayati dan mengamalkan kepercayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lingkungannya.

Agama.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang agama adalah semua larangan yang diajarkan oleh agama itu sendiri, seperti mencuri, menipu, berbohong, berhati dengki, egoistis, iri hati, sombong dan seluruh perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Sedangkan

perbuatan-perbuatan yang diharuskan adalah menolong sesama manusia, kasih-mengasihi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempertebal ketakwaannya sesuai dengan ajaran agama. Tegasnya menjauhi segala larangan dan mematuhi seluruh ketentuan dan ajaran agama.

Bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang agama sanksinya adalah cemoohan dari masyarakat, bahkan sudah dicap sebagai orang yang meremehkan prinsip dasar ajaran agama itu sendiri. Kalau cemoohan ini sudah meluas dalam masyarakat lingkungannya, dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan akan dibebani beban moral yang cukup berat, yaitu berupa perasaan dosa besar. Apalagi kalau yang bersangkutan sudah tidak pernah didekati, tidak diajak dalam pergaulan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sanksi ini yang dapat dilihat, tetapi yang pasti cukup banyak akibat dari sanksi itu, seperti adanya perasaan tidak tentram, gelisah dalam hidup dan semacamnya. Sedangkan sanksi sesudah mati adalah azab dan siksaan Tuhan yang tiada taranya. Apabila sanksi ini bekar-benar dapat dirasakan dan menghunjam dalam lubuk hati yang bersangkutan, maka lambat atau cepat akan mempengaruhi jiwanya, sehingga menggugah yang bersangkutan untuk bertobat, merubah sikap dan tingkah-lakunya untuk mengikuti, menghayati dan mengamalkan agama sebaik-baiknya.

Hukum adat.

Hukum adat di sini sesungguhnya sangat erat dengan adat-istiadat dan kebiasaan yang selama ini hidup tumbuh dan berkembang sejak adanya komunitas kecil suku Kaili. Adat-istiadat identik dengan nilai, norma dan aturan yang berlaku dan sudah lama ada di dalam kehidupan komunitas kecil ini. Adat dan hukum adat ini tercermin dalam tata upacara adat sebagai norma sosial. Tata upacara adat di sini antara lain dapat dilihat dari berbagai bentuk upacara seperti adat dan upacara daur hidup (mulai dari adat dan upacara anak dalam kandungan, upacara kelahiran, upacara meningkat dewasa/asah gigi, upacara perkawinan, sampai upacara kematian), adat dan upacara dalam bidang pertanian (membuka tanah pertanian, turut sawah, menanam dan upacara panen), adat dan upacara *Balia* (*Balia Moloso*, *Balia Tampilangi*, *Balia Mowunda*, *Balia Bone Moloso*), dan adat upacara selamatannya lainnya seperti naik rumah baru, membangun rumah baru dan lain-lain. Adat dan upacara yang ada dalam kehidupan komunitas kecil suku Kaili ini merupakan nilai budaya, bahkan merupakan norma dan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya, justru ini merupakan hasil dari

nenek moyang, dan merupakan warisan yang harus dilestarikan, melalui hukum adat yang harus diperlakukan sebaik-baiknya. Apabila ada orang yang melanggar adat-istiadat ini atau hukum adat yang harus diagungkan itu, sehingga menimbulkan ketegangan sosial seperti misalnya melakukan zina, kawin lari, mencuri dan tak mengacuhkan seluruh nilai, norma yang berlaku, akan diberi sanksi. Sedangkan perbuatan yang diharuskan ialah harus tetap menghormati dan memuliakan hukum adat/adat kebiasaan dengan jalan ikut serta menghayati dan mengamalkan tata nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam komunitas kecil suku Kaili. Adapun sangsi yang diberikan kepada yang melanggar hukum adat atau adat-istiadat seperti disebutkan di atas, tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggaran itu berat misalnya zina, kawin lari, mencuri, membunuh maka sanksinya ialah orang itu dijadikan budak (dahulu), tetapi sekarang ini diselesaikan menurut hukum yang berlaku, di mana antara Ketua Adat dengan aparat Pemerintah seperti pengadilan agama dan Kepolisian dan kejaksaan harus bekerjasama dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum. Tetapi apabila pelanggaran itu dianggap ringan, berdasarkan bukti-bukti, maka sanksinya cukup ringan misalnya kerja bakti dalam waktu tertentu. Sanksi-sanksi ini diberikan untuk mendidik masyarakat terutama bagi yang melanggar, dalam usaha menaati dan menghormati hukum adat yang berlaku. Ini berarti ikut memelihara kehidupan sosial yang lebih baik. Karena itu pemberian sanksi di sini mempunyai pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat komunitas kecil suku bangsa Kaili.

VI. BEBERAPA ANALISA

Dalam sub bab ini ingin diberikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan uraian - uraian terdahulu mengenai Bentuk, Sistem Pelepasan Sosial, Pemimpin masyarakat dan pengendalian sosial, dan perubahan-perubahan nilai yang terjadi dalam proses perkembangannya.

BENTUK KOMUNITAS KECIL

Dengan memperhatikan uraian-uraian terdahulu nampak jelas adanya perubahan bentuk komunitas kecil dalam masyarakat Kaili di lokasi penelitian. Pertama tentang ciri - ciri komunitas kecil. Batas wilayah komunitas kecil yang ditandai dengan dialek bahasa penduduk-

nya yang sekarang ini, tidak mengalami banyak perubahan, dengan adanya batas wilayah administratif. Kecuali satu desa yaitu Dalaka, sebagai akibat perkembangan perpindahan penduduk yang berbatasan secara administratif. Legimitasi sebagai tanda-tanda pengenalan komunitas kecil seperti bentuk bangunan, perangkat adat yang berlaku, sudah ada yang punah, yaitu Baruga, dan sebagian masih hidup, walaupun sudah semakin terdesak yaitu perangkat adat. Baruga sebagai rumah dan pusat lembaga adat kerajaan sudah punah sejak zaman Belanda akibat kurang dipelihara.

Hal ini disebabkan karena:

1. Perubahan sistem kerajaan dan kekuasaan raja-raja, yang justru memanfaatkan Baruga tersebut sebagai sarana adat-istiadat,
2. pusat kekuasaan Magau berpindah dari Toaya ke Lero,
3. pengaruh agama masuk ke daerah ini.

Perangkat adat hingga sekarang ini masih hidup dan berpusat di kampung Lero, dan masih diakui sebagai lembaga Dewan Hadat yang memegang wilayah kekuasaan di tingkat Kecamatan, yang mempunyai tiga daerah teritorial. Namun perangkat adat ini sudah kurang berwibawa dan hampir tidak berperan lagi.

Faktor-faktor penyebabnya ialah:

1. Pengaruh pendidikan yang semakin maju, dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi,
2. Pemimpin-pemimpin adat yang ahli hukum adat semakin terbatas, karena pergantian-pergantian pemimpin adat secara tradisional dari generasi muda yang kurang berpengalaman,
3. Hukum adat yang tidak tertulis, sehingga kepastian hukum adat kurang terjamin,
4. Pengaruh agama yang semakin besar, yang memberi peranan tokoh-tokoh agama yang bekerja pada Kantor Urusan Agama dan mengurus soal-soal seperti nikah, talak cerai, masalah pusaka dan sebagainya.

Atribut-atribut komunitas kecil seperti simbol-simbol, bangunan-bangunan khusus, juga telah punah. Hingga penelitian ini dijumpai 2 rumah keluarga bangsawan, namun tidak sempurna dan hampir rubuh. Hal ini disebabkan karena besarnya rumah tersebut, tidak mampu dibiayai, dan usaha gotong royong keluarga untuk merehabilitasinya sudah kurang sehingga kurang terpelihara.

Struktur dan sistem pemerintahan komunitas kecil juga mengalami

perubahan-perubahan total dari sebelum Belanda sampai sekarang ini. Perubahan itu meliputi sistem pemerintahan, aparat-aparat yang ada, bentuk pimpinan dan fungsi aparat itu sendiri. Hubungan vertikal dan horizontal dalam struktur pemerintahan komunitas kecil tetap nampak dari masa ke masa. Zaman kejayaan raja-raja yang memegang kekuasaan pemerintahan, terdesak dan digantikan oleh kekuasaan raja-raja yang tunduk kepada pemerintah Belanda dan merubah struktur serta fungsi pemerintahan karena pengaruh politik. Bentuk-bentuk pemerintahan komunitas kecil tersebut berubah menjadi distrik - sub Kecamatan dan menjadi Kecamatan hingga sekarang ini. Lembaga-lembaga sosial komunitas kecil yang pernah tumbuh dan berkembang dari dahulu dan masih hidup dewasa ini adalah *lembaga adat* dan *lembaga pertanian*. Nasibnya pun bagaikan kembang hidup di karang, hidup segan mati tak mau. Dengan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pemerintahan komunitas kecil di lokasi penelitian ini telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, sepanjang kurun waktu yang cukup panjang.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Sistem pelapisan sosial komunitas kecil di lokasi penelitian pun mengalami perubahan yang mendasar, baik pada zaman sebelum penjajahan - zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan, pada lapisan sosial resmi ataupun pelapisan sosial samar.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan pelapisan sosial tersebut adalah:

1. Faktor agama, yang mengajarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menggeser kepercayaan *To manuru* dari alam berpikir masyarakat, yang umumnya berstatus raja dan bangsawan.
2. Faktor pendidikan yang memberi tempat bagi orang-orang terpelajar/berpendidikan memimpin pemerintahan, dan memberi peluang bagi keturunan budak-budak mengecam pendidikan.
3. Faktor politik penjajahan, yang mengangkat raja yang patuh/setia kepada Belanda, dan penggabungan kerajaan-kerajaan kecil menjadi anggota dewan *Pitunggota* Kerajaan Banawa.

Walaupun penggeseran kekuasaan terjadi pengakuan rakyat terhadap raja-raja setempat masih sangat besar terbukti dengan adanya adat *nekasuvia* (suatu kebiasaan masyarakat memberikan kepada raja macam-macam hasil panen) dan bantuan-bantuan bahan konsumsi

pesta bagi raja pada saat-saat raja melakukan pesta. Hal ini berlangsung pada zaman Belanda sampai dengan awal zaman kemerdekaan. Pengaruh sistem pelapisan sosial resmi, hingga sekarang masih terasa dalam setiap penyelenggaraan upacara adat, khususnya dalam upacara daur hidup yang merupakan sisa-sisa peninggalan sistem sosial pada zaman kerajaan. Yang paling menonjol ialah dalam upacara perkawinan khususnya penentuan mahar. Hingga dewasa ini pemberian mahar ditentukan oleh status sosial seseorang, misalnya mahar *pitu mpole* bagi keluarga raja, *lima mpole* bagi keluarga bangsawan, dan ada *Sanjasio* untuk masyarakat biasa. Sedang budak/keturunannya tidak semahal ukuran mahar seperti tersebut di atas.

Dalam upacara tradisional dalam komunitas kecil ini, setiap individu akan ditetapkan jenis upacara adat yang sesuai dengan status sosialnya yang disebut *Vati*, sejak upacara adat pada masa kanak-kanak. Dengan demikian masih jelas perbedaan status sosial, anak tersebut dalam setiap pelaksanaan setiap upacara daur hidup. Pengaruh ekonomi, pendidikan dan agama seperti yang disebutkan di atas, ada kecenderungan sistem nilai tersebut semakin sirna dan kehadirannya sudah sangat sporadis.

Demikian pula halnya dengan lapisan sosial samar, kedudukan *Sando* (dukun) mulai bergeser digantikan dengan mantri kesehatan, status *Tadulako* (pemberani dan pengawal desa dari gangguan ketertiban dan keamanan) digantikan oleh pemimpin-pemimpin formal, seperti Koramil, Kepolisian dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi sejak zaman kemerdekaan, sebagai akibat perkembangan pendidikan dan pengaruh agama. Kecenderungan perubahan pelapisan sosial teratas ialah: 1. ke arah pemegang kekuasaan formal yaitu pejabat-pejabat pemerintahan mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan Kepala Kampung, disusul oleh 2. para cendekiawan dan pemuka agama, 3. kemudian status kekayaan dan 4. masyarakat biasa (to dea).

Dalam pelapisan sosial samar, nampak tokoh-tokoh adat (to gura nungapa) masih dominan dalam setiap upacara adat.

PIMPINAN MASYARAKAT

Pergeseran bentuk dan struktur pemerintahan membawa perubahan-perubahan yang berarti pula bagi pemimpin masyarakat. Pimpinan tradisional walaupun formal masih ada dalam struktur kepemimpinan lembaga adat, namun sudah sangat terdesak, baik pimpinan lembaga

sosial di bidang sistem kemasyarakatan dan sistem ekonomi, seperti lembaga Dewan Hadat yang bergerak di bidang hukum adat dan lembaga pertanian. Pergeseran nilai tersebut terjadi disebabkan karena banyak faktor antara lain, karena sebagian besar tugas/bidang yang digarap oleh pimpinan tradisional tersebut sudah diambil-alih oleh berbagai instansi seperti Departemen Agama, pertanian, Kejaksaan dan Kepolisian serta para pegawai syara' dan Kepala Kampung. Nampak adanya kecenderungan bahwa pimpinan tradisional semakin hari semakin tidak berperanan, dan digantikan oleh pemimpin-pemimpin formal.

Pergeseran ini terjadi disebabkan karena: 1. semakin pesatnya usaha-usaha pembangunan sektoral, yang sudah ditangani oleh pemimpin-pemimpin formal, seperti penanganan masalah agama (NTR), Panca usaha pertanian, pendidikan formal dan non formal dan sebagainya 2. pengaruh pendidikan, yang menggeser tokoh-tokoh tradisional yang umumnya berpendidikan rendah. Dalam kenyataan dewasa ini pemimpin-pemimpin tradisional masih tetap dipertahankan hidupnya dan diberi peranan pada setiap upacara tradisional yang berlangsung di pedesaan.

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Sama halnya dengan uraian terdahulu, bahwa sistem pengendalian sosial juga mengalami perubahan-perubahan. Hal ini tentu disebabkan karena perubahan sistem nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam pergantian generasi ke generasi. Sistem nilai tradisional yang sudah mulai lepas dari alam pikiran generasi muda, diganti dengan sistem nilai baru, membawa akibat-akibat tertentu, berupa gap antara generasi tua dan generasi muda. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang bersifat magis, sudah mulai terdesak dan digantikan oleh peranan agama, termasuk hukum adat setempat. Semangat jiwa gotong royong berangsur-angsur semakin menurun. Gotong royong hanya nampak dalam setiap bentuk upacara pesta daur hidup dan di bidang keagamaan, sedang di bidang sosial, teknologi dan pertanian berangsur-angsur pudar. Banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain: 1. perkembangan ekonomi yang semakin baik, 2. hubungan luar dengan kota dan komunikasi yang semakin maju/terbuka, 3. pendidikan masyarakat yang semakin maju, 4. sistem upah dan penggajian yang lebih menonjol karena semakin terbukanya lapangan kerja dan profesi anggota masyarakat. 5. adanya kecende-

rungan rakyat mengharapkan bantuan Pemerintah dan sebagainya.

Kegiatan musyawarah dan mufakat semakin terbatas, dan jiwa demokrasi terasa kurang berkembang, sebagai akibat kurangnya kemampuan dan kepemimpinan desa yang disebabkan pendidikan Kepala Desa yang belum sesuai dengan tuntutan pembangunan dewasa ini.

Namun nilai-nilai luhur sebagian masih tetap terpelihara, karena adanya rasa malu dan rasa takut, bila melakukan perbuatan-perbuatan amoral, yang pernah ditopang oleh hukum adat/kepercayaan, kembali tegak dengan ajaran agama, seperti perzinaan, pergaulan bebas, rasa hormat terhadap orang tua, dan ajaran moral lainnya.

Kesimpulan.

Bahwa komunitas kecil suku Kaili adalah suatu komunitas yang sudah lama ada, hidup tumbuh dan berkembang dengan segala perangkat yang ada untuk menunjang eksistensinya. Bahwa potensi nilai-nilai sosio-budaya baik sebagai nilai budaya, lingkungan budaya dan sistem budaya pada komunitas kecil suku bangsa Kaili ini cukup besar dan perlu dikembangkan, dibina dan dilestarikan. Bahwa wilayah komunitas suku bangsa Kaili ini cukup luas, bahkan merupakan komunitas terbesar di daerah Sulawesi Tengah. Bahwa komunitas ini sejak dahulu sudah mengenal sistem pemerintahan (Kerajaan) yang tercermin dalam kehidupan demokrasi yang bersifat kolektif, di mana terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga yang ada seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Bahwa dalam komunitas ini sudah sejak lama dikenal adanya sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial sebagai upaya nyata membina masyarakatnya, dan merupakan wujud nyata dari esensi hakiki dari keberadaan komunitas suku bangsa Kaili ini.

Saran-saran.

Untuk lebih mendalami secara terperinci aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya yang dimiliki oleh suku bangsa Kaili ini maka hendaknya dilakukan penelitian secara analitis dan mendalam tentang:

1. Upacara-upacara tradisional dengan segala aspeknya.
2. Hukum adat yang berlaku pada komunitas kecil ini.
3. Asal-usul serta identifikasi daripada suku bangsa Kaili.
4. Perbandingan sistem pemerintahan masa lalu dan masa kini.
5. Perbandingan sistem pelapisan sosial masa lalu dan masa kini.
6. Perbandingan pimpinan masyarakat tradisional dan pimpinan masyarakat masa kini.

BAB KETIGA

KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA LORE

Salah satu suku bangsa yang dipilih sebagai sampel penelitian ialah suku bangsa Lore yang bermukim di daerah pedalaman daerah Kabupaten Poso. Suku bangsa ini sangat terpencil hidupnya dibandingkan dengan suku bangsa lainnya yang ada di Sulawesi Tengah.

I. IDENTIFIKASI

LOKASI

Suku bangsa Lore adalah penduduk yang mendiami dua kecamatan di daerah Kabupaten Poso, yaitu Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore Utara. Untuk jelasnya lihat tabel pada halaman pendahuluan tulisan ini.

Letak dan keadaan geografis.

Letak daerah kediaman suku bangsa Lore adalah di sebelah utara berbatasan dengan suku bangsa Pamona yang mendiami Kecamatan Poso Pesisir, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Sulawesi Selatan (wilayah Mamasa dan Toraja), di sebelah barat berbatasan dengan suku bangsa Kulawi yang mendiami Kecamatan Kulawi (Kabupaten Donggala), dan di sebelah timur berbatasan dengan suku bangsa Pamona yang mendiami wilayah Kecamatan Pamona Utara. Untuk jelasnya lihat peta terlampir.

Letak administrasi komunitas kecil suku bangsa Lore lokasi penelitian adalah pada Kecamatan Lore Selatan dengan ibukota Kecamatan Gintu. Lokasi ini berbatasan dengan Kecamatan Lore Utara di sebelah utara, dengan Kecamatan Kulawi di sebelah barat, dengan Kecamatan Pamona Utara di sebelah timur dan Sulawesi Selatan di sebelah selatan (wilayah Mamasa dan Toraja). Dari letak daerah suku bangsa Lore dan letak lokasi penelitian komunitas kecil suku bangsa Lore sebagaimana dikemukakan di atas, jelaslah letak geografis daerah tempat tinggal suku bangsa Lore dan letak geografis dari lokasi komunitas kecil ini. Yang jelas bahwa suku bangsa Lore ini mendiami wilayah pedalaman yang sangat terpencil, dan hanya dapat dijangkau dengan jalan kaki atau naik kuda. Ibukota Kecamatan lokasi penelitian di sini ialah Gintu di Kecamatan Lore Selatan, dapat dijangkau melalui dua jurusan. Dari jurusan Kulawi (Dati II Donggala) dengan perjalanan kaki dari Julawi

selama 2 hari 2 malam non stop. Juga dari jurusan Tentena (Kecamatan Pamona Selatan Dati II Poso) dengan perjalanan kaki selama kurang lebih 3 atau 4 hari penuh. Dewasa ini sudah ada pesawat terbang Cesna dari Tentena ke Lore Selatan milik missie Zending, dengan menempuh penerbangan kurang lebih 20 menit. Peneliti sewaktu ke sana naik Cesna.

Mengenai keadaan geografis dapat dikemukakan di sini baik mengenai suku bangsa Lore pada umumnya maupun lokasi penelitian komunitas kecil suku bangsa Lore tersebut ialah, mereka mendiami suatu wilayah yang benar-benar di tengah-tengah pedalaman, yang langsung berbatasan dengan daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Jadi jelas suku Lore mendiami wilayah pegunungan dengan dataran tinggi yang sangat menarik. Khusus di lokasi penelitian, wilayahnya merupakan dataran tinggi dengan bentuk Kuwali yang cukup luas dan sangat subur.

Keadaan alam fauna di lokasi penelitian pada umumnya hampir sama dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Di daerah ini banyak hidup binatang buruan seperti rusa, babi rusa, anoa, ayam hutan serta bermacam-macam ular dan burung. Penduduk di wilayah ini memelihara babi, kerbau, sapi dan kuda. Babi untuk konsumsi, kerbau, sapi dan kuda untuk tenaga kerja dan juga dijual.

Keadaan flora pada umumnya sama dengan daerah tropis lainnya, hanya saja di daerah ini banyak dijumpai kayu hitam (*ebony*), dan berbagai macam kayu lunak lainnya. Ini merupakan potensi komoditi yang cukup besar sebagai sumber devisa. Wilayah ini juga sangat baik untuk penanaman pohon kopi. Daerah ini terkenal sebagai penghasil kopi. Sekarang sementara digalakkan tanaman cengkeh. Juga di hutan-hutan banyak tumbuh damar, bahkan kayu manis juga dapat tumbuh dengan baik. Di samping itu juga merupakan penghasil rotan. Juga banyak tumbuh enau dan bambu. Enau banyak digunakan untuk membuat saguer (tuak) dan gula merah.

Pola perkampungan.

Mengenai pola perkampungan pada suku bangsa Lore ini dapat dikemukakan bahwa mereka itu hidup mengelompok padat. Menurut informasi, pola perkampungan suku bangsa ini pada waktu dahulu ialah mendiami bukit-bukit dengan mengelompok padat. Bukit-bukit yang dipilih adalah bukit yang satu sama lain saling berdekatan di mana ada sumber air yang dekat seperti sungai. Pola perkampungan yang demikian ini, justru karena pada waktu dahulu selalu terjadi perang antar

suku. Di samping itu dikenal juga adanya *pengayayo* (pemotong kepala), yang merajalela pada waktu itu. Tetapi sekarang ini ciri yang demikian masih jelas tampak di mana pola perkampungannya masih tetap mengelompok padat, walaupun tidak lagi di bukit-bukit, tetapi sebagian desa sudah di dataran atau di lembah. Dengan gambaran ini jelas bahwa desa-desa di sini polanya mengelompok padat yang dahulu terletak di bukit-bukit, tetapi sekarang sudah memilih tempat di lembah, di tempat yang rata dan banyak sumber air, serta wilayahnya cukup subur. Antara satu desa dengan desa lainnya dibatasi antara lain oleh sungai-sungai kecil, kuburan dan atau batas sawah atau kebun tertentu. Di desa-desa juga dikenal tempat-tempat tertentu seperti tanah lapang, dan daerah perburuan seperti padang rumput sekitar desa untuk memburu rusa dan babi rusa. Sedangkan bangunan-bangunan di desa ialah rumah tempat tinggal yang disebut *Tambi*, dan di samping *Tambi* selalu dibangun *Buho* (lumbung padi). *Buho* ini selain berfungsi sebagai lumbung padi juga digunakan untuk tempat musyawarah desa. Selain itu dikenal rumah adat yang disebut *Duhunga*. *Duhunga* ini berfungsi sebagai tempat musyawarah yang dipimpin oleh raja, juga sebagai tempat upacara-upacara adat dan upacara perkawinan. Bangunan-bangunan lainnya adalah rumah-rumah ibadah seperti gereja dan mesjid. Selain itu juga dikenal bangunan *Bamburu*, yaitu suatu bangunan yang selalu ditemui di tengah-tengah sawah atau ladang yang merupakan pondok dan amat sederhana ditutup dengan daun-daun anau. Menurut A.C. Kruyt selain *Bamburu* dikenal pula bangunan *lolo*, yaitu sebuah pondok besar atau gudang yang ditempati sementara mereka membangun sebuah rumah, juga sebuah pondok di kebun disebut *pangka*. (1, 9).

Selanjutnya mengenai pola perkampungan pada komunitas kecil yang menjadi lokasi penelitian pada suku bangsa Lore ini, sama keadaannya dengan apa yang diuraikan di atas. Namun secara singkat dapat digambarkan hal-hal sebagai berikut:

Bangunan-bangunan untuk tempat upacara adat kerajaan dahulu yaitu *Duhunga*. *Duhunga* ini selalu terletak di samping atau berdekatan dengan rumah Raja (*Tambi*). Sedangkan rumah tempat tinggal adalah *tambi* dan selalu ada bangunan di sampingnya pula yang disebut *Buho*. *Buho* ini selain sebagai tempat untuk bermusyawarah di desa-desa juga berfungsi sebagai lumbung padi. Fungsi dari *Duhunga* selain tempat untuk bermusyawarah yang dipimpin oleh Raja (*Tuana*) juga berfungsi sebagai tempat upacara-upacara adat, tempat perkawinan, tempat

memutuskan perkara. Jadi tegasnya sebagai pusat lembaga adat kerajaan. Bahan-bahan bangunan itu adalah balok-balok besar di mana kedua ujungnya ditunjang oleh batu-batu besar. Atapnya terbuat dari ijuk. Atap ini sekaligus berfungsi sebagai dinding. Sedangkan bagian muka dan belakang ditutup dengan bambu yang sudah dipotong-potong dan bersusun tiga. Mereka tidak menggunakan paku tetapi pasak dari kayu yang cukup kuat. Di samping ijuk juga sering digunakan bambu sebagai atap. Bangunan ini (*Tambi* dan *Duhunga*) sebenarnya balok-balok yang ditopang oleh batu diletakkan melintang dan saling menghubungkan kedua ujung balok itu dan ini merupakan dasar (fondasi). Di atas balok itulah diletakkan balok untuk lantai dan di atasnya dibuat bangunan bagian atas dari *Tambi* dan *Duhunga* itu. Bagian atasnya hanya terdiri satu ruangan, tidak ada kamar-kamar. Kamar dibuat dengan membuat tirai.

Bangunan ini sangat sederhana, baik dilihat dari segi bentuknya, tata ruangnya maupun keadaannya di dalam ruangan itu. Pada umumnya di bumbungan rumah selalu ada tanduk kepala kerbau yang dipasang. Ukiran tidak ada. Pada umumnya bangunan ini dibangun secara gotong royong yang dikepalai oleh para tukang yang memang ahli untuk itu.

Mengenai tempat-tempat tertentu pada komunitas kecil ini antara lain ialah *Duhunga* (Rumah Adat) *Bambaru* dan *Buho* yang telah dikemukakan fungsi dan peranannya. Di lokasi ini *Duhunga* yang terpelihara baik hanya satu, sedangkan *Buho* cukup banyak. Hampir setiap *Tambi* ada *Buho* yang didirikan di sampingnya. Sedangkan *Bamburu* juga cukup banyak dibuat di sawah-sawah dan ladang. Gereja cukup banyak. Setiap desa mempunyai satu gereja. Pada umumnya gereja terletak di tengah-tengah desa. Mesjid hanya ada satu yang terletak di Gintu (ibukota Kecamatan Lore Selatan. Sedangkan tempat pekuburan pada umumnya di pinggir desa.

Mengenai jalan-jalan dapat dikemukakan bahwa jalan tersebut hanya jalan setapak. Tetapi antara satu desa dengan desa lainnya dihubungkan dengan jalan yang sangat sederhana yang sampai sekarang belum pernah dijalan kendaraan roda empat. Jalan ini dibuat secara gotong royong oleh seluruh masyarakat.

Batas-batas dalam desa seperti pagar dibuat penduduk secara baik. Setiap rumah diusahakan dipagari dengan baik. Sedangkan parit-parit adalah batas antara satu sawah dengan sawah lainnya. Di Lore Selatan ini (daerah Bada) sangat dikenal dengan hasil padinya. Luas sawah di-

bandingkan jumlah penduduk cukup luas. Parit di sini berfungsi memisahkan sawah-sawah, bahkan parit juga berfungsi memisahkan desa yang satu dengan desa yang lainnya.

Mengenai tempat mandi pada umumnya di sungai-sungai. Sungai-lah merupakan tempat mandi umum. Antara wanita dan laki-laki harus terpisah. Biasanya laki-laki di bagian hulu, sedangkan perempuan harus jauh di bagian hilir.

PENDUDUK

Sebagaimana diketahui, suku bangsa Lore ini hanya mendiami dua kecamatan di daerah Kabupaten Poso, yaitu Kecamatan Lore Selatan dan Lore Utara. Jumlah penduduknya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Daerah Tingkat II Poso. Suku bangsa Lore diperkirakan hanya berjumlah kurang lebih 12.000 jiwa. Mereka mendiami suatu wilayah di pedalaman yang sangat sulit untuk dijangkau. Komunikasi darat tidak ada kecuali jalan kaki dan naik kuda. Tetapi dua tahun terakhir ini sudah ada pesawat cesna yang menghubungkannya dengan dunia luar. Cesna ini milik missie zending, yang banyak membantu pembinaan rokhani penduduk setempat. Oleh karena komunikasi dengan dunia luar sangat sulit, tegasnya merupakan daerah yang terisolir, maka jelas bahwa mobilitas dan penyebaran suku bangsa ini sangat sedikit. Bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali, kecuali beberapa orang yang ke luar daerahnya.

Mengenai gambaran penduduk di lokasi penelitian dapat dikemukakan di sini antara lain:

Jumlah penduduk seluruhnya (sebelum sensus 1980) adalah 6.402 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

D e s a	Jumlah menurut usia					
	0—4	5—9	10—14	15—19	20—54	55—
	1	2	3	4	5	6
	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P
Gintu	100	89	57	55	200	41
	94	25	71	58	192	35
Runde	30	21	14	24	67	16
	30	22	23	16	77	11

1	2	3	4	5	6	7
B. Kaia	58	52	58	45	198	32
	57	49	53	37	184	21
Bakekau	14	17	14	7	37	2
	30	18	11	6	36	2
Bewa	49	39	36	22	116	11
	45	35	25	33	119	19
Bomba	35	21	34	23	67	10
	36	33	11	15	89	8
Lelio	19	22	13	20	48	6
	14	11	15	10	58	4
Lengkeka	26	30	28	40	130	20
	37	31	47	34	115	20
Tomehipi	18	20	7	15	42	3
	15	15	14	20	44	4
Kogeroa	34	21	13	18	70	14
	17	17	21	28	82	17
Tuare	35	30	20	24	132	12
	26	30	13	17	114	17
Pada	36	20	23	13	64	14
	45	24	29	19	80	8
Kolori	30	25	37	16	61	11
	22	14	26	18	66	8
Bulili	29	27	37	49	97	2
	26	27	33	19	96	2
Jumlah :	513	434	391	371	1.338	213
	493	351	392	330	1.371	204

Jumlah seluruhnya : 6.402.

Dari jumlah 6.402 jiwa penduduk di atas, terdapat 149 orang pendatang, atau 2,3%. Pendatang ini datang ke daerah ini karena didorong antara lain: kesuburan tanah, banyaknya potensi alamiah yang memberi kemungkinan untuk sumber hidup, karena ikatan perkawinan. Pekerja-

an pendatang ini pada umumnya bertani)berkebun.

Hubungan penduduk asli dengan penduduk pendatang sangat baik. Ini dapat dilihat dalam hubungan kerjasama dalam kegiatan bersama untuk kepentingan bersama. Mereka hormat menghormati, saling menghargai. Hubungan perkawinan di antara penduduk asli dan pendatang tidak ada masalah, dan sudah dianggap biasa. Dalam hubungan pekerjaan senantiasa secara bersama-sama melalui kelompok-kelompok kerja yang memang sudah hidup tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong sangat tinggi di antara seluruh penduduk tanpa kecuali. Segala sesuatunya dilakukan dengan bekerja bersama (dalam bidang pertanian, perumahan, upacara-upacara adat, perkawinan). Dengan demikian jelas bahwa partisipasi pendatang dalam bidang kehidupan masyarakat, dalam bidang sosial-budaya cukup besar. Hal ini dimungkinkan karena mereka sudah merasakan sebagai penduduk asli, justru penerimaan penduduk asli sangat baik, dalam segala segi kehidupan. Mengenai pengaruh pendatang tidak begitu menonjol, kecuali ada beberapa orang yang dapat dikatakan sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang pertanian. Misalnya tatacara mengolah sawah dan kebun yang baik, atau tata-cara menanam cengkeh dan kopi yang baik.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Latar belakang sejarah

Untuk ini akan digambarkan secara singkat latar belakang suku bangsa Lore di daerah lembah *Bada* dan latar belakang sejarah lokasi penelitian khususnya tentang perkembangan lokasi komunitas kecil selama ini. Khusus latar belakang sejarah suku bangsa ini, bahwa sejak dahulu suku bangsa ini diperintah oleh seorang raja. Menurut informasi dari beberapa informan, bahwa sebelum wilayah ini diperintah oleh Raja atau *Tuana*, rakyatnya hanya hidup secara liar, namun sudah berusaha menetap di dua kampung (**kampung lama**), yaitu di *Tinoe* dan *Bulili*. Demikianlah pada suatu hari turun seseorang dari langit yang disebut *manuru*. *Manuru* inilah yang menjadi raja (*Tuana*) di wilayah ini. *Manuru* yang menjelma ini setelah beberapa lama menjadi *Tuana* ia mengambil permaisuri, yaitu seorang gadis dari kampung *Bulili*. Dari perkawinan ini *manuru* memperoleh seorang putra yang diberi nama *Lapabada*. *Lapabada* lahir setelah kurang lebih 11 tahun *manuru* kawin. Menurut sejarah *Lapabada* inilah yang memerintah sebagai raja yang kedua di daerah lembah *Bada* ini. Perlu diketahui bahwa lembah

Bada ini meliputi seluruh wilayah Kecamatan Lore Selatan sekarang ini. Demikianlah dari generasi ke generasi lembah Bada ini diperintah oleh *Tuana-tuana* dari keturunan *Manuru*, katurunan *Lapabada* tersebut. Keturunan raja ini memerintah wilayah ini sampai pada zaman Belanda, bahkan sampai zaman kemerdekaan. Pada zaman Belanda wilayah yang didiami oleh suku bangsa Lore ini diperintah oleh *Raja Kabo* sebagai raja Lore. Raja Kabo ini membawahi tiga onderdistrik, yaitu *Napu*, *Besua* dan *Bada*. *Napu* diperintah oleh *Abe*, *Besia* oleh *Lagimpu*, dan *Bada* oleh *K. Pole*. Pada zaman kemerdekaan Kerajaan Lore tersebut berubah menjadi swapraja di mana yang menjadi kepala Swapraja adalah *Jibril Pelima*, dan daerah itu tetap terdiri atas tiga distrik yaitu Distrik *Napu* dengan Kepala Distrik *P. Longki*, Distrik *Besoa* dengan Kepala Distrik *M. Dago* serta Distrik *Bada* dengan kepala Distrik *K. Pole*. Demikianlah perkembangan sejarah wilayah ini, di mana sampai sekarang, wilayah yang didiami oleh suku bangsa Lore ini dibagi atas dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore Utara.

Sedangkan latar belakang sejarah dari lokasi (komunitas kecil) selama ini dapat dikemukakan, bahwa yang menjadi lokasi komunitas kecil di sini adalah *lembah Bada*, yang sekarang ini meliputi seluruh wilayah Kecamatan Lore Selatan yang sekarang terdiri atas 14 desa. Perkembangan lokasi ini dari waktu ke waktu sebagaimana dikemukakan di atas bahwa wilayah ini sesungguhnya pada waktu masih diperintah oleh *Manuru* kemudian oleh putranya *Lapabada*, hanya terdiri atas dua desa, yakni desa *Tinoe* dan *Bulili*. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda termasuk onderdistrik *Bada* di bawah Kerajaan Lore. Setelah merdeka *Lembah Bada* ini menjadi distrik di bawah Swapraja Lore. Dan sekarang menjadi Kecamatan Lore Selatan dengan ibukotanya *Gintu*.

Sistem mata pencaharian.

Mata pencaharian utama dari suku bangsa Lore pada umumnya adalah bertani (sawah dan ladang). Sawah di daerah ini khususnya di lembah *Bada* (lokasi penelitian) cukup luas, justru keadaan tanahnya memungkinkan pembuatan sawah yang cukup baik dan subur. Hal ini karena menurut sejarahnya, lembah *Bada* ini waktu dahulu adalah danau. Sekarang daerah ini terkenal sebagai lembah yang sangat subur. Selain bersawah, juga membuka ladang di sekitar lembah ini. Yang ditanam adalah kopi, palawija, kelapa dan di sana-sini tumbuh dengan suburnya sagu.

Sistem kekerabatan.

Pada suku bangsa Lore hanya dikenal keluarga batih dan keluarga luas. Keluarga batih terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Ayah dan ibu dihormati dan dimuliakan oleh anak-anaknya. Ayah bekerja untuk menghidupi keluarganya, ibu mengasuh anak-anaknya. Dan sebaliknya anak harus membantu orang tuanya. Ayah dan ibu berkewajiban mengawinkan anak-anaknya yang sudah dewasa. Sedangkan keluarga luas di sini dapat dilihat pada waktu kehidupan masyarakat dahulu, yang sampai sekarang masih terlihat beberapa cirinya. Di sini kelihatan beberapa keluarga batih menempati satu rumah besar, di mana keluarga batih senior yang berkuasa untuk mengatur segala-galanya. Karena itu mereka sebagai keluarga luas diikat oleh satu kesatuan sosial yang sangat erat. Kalau ada keluarga batih yang membuat rumah sendiri, maka mereka itu masih dalam satu desa dan hubungan kekeluargaan sangat erat. Segalanya harus dikerjakan secara bersama-sama. Di sini keluarga batih yang seniorlah yang mengatur pembagian pekerjaan, mengatur norma yang berlaku dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu dari keluarga luas ini peranan keluarga batih seniorlah yang sangat menentukan. Para anggota keluarga batih tunduk kepada keluarga batih senior ini. Kewajiban anggota keluarga luas ini ialah secara gotong royong mengerjakan segala sesuatunya untuk kepentingan bersama. Ikatan kesatuan sosial mulai dari nenek, ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kamanakan dan cicit dan seterusnya merupakan suatu ikatan kekeluargaan yang sangat erat.

Sistem religi.

Sistem religi di sini akan dikemukakan antara lain: agama yang dianut dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat komunitas kecil ini. Adapun agama yang dianut dan jumlah pengikutnya adalah sebagai berikut:

Agama Kristen Protestan	: 6.046 orang.
Agama Kristen Katholik	: 64 orang.
Agama Kristen Pantekosta	: 144 orang.
Agama Islam	: 149 orang.

Jumlah : 6.406 orang.

Jadi jelas pengikut agama Kristen = 97,7% dan pengikut Agama Islam = 2,3%. Khusus pengaruh agama di dalam kehidupan masyarakat, memperlihatkan suatu kerukunan hidup ummat beragama yang sangat baik. Pengalaman dalam bentuk sikap dan tingkah laku penganut-penganut

agama pada komunitas kecil ini benar-benar terwujud dengan baik dalam kehidupan masyarakat, yaitu menciptakan kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan kerukunan hidup umat beragama dengan Pemerintah. Jelas di sini mereka benar-benar menghayati dan mengamalkan trilogi kerukunan hidup umat beragama dengan sebaik-baiknya. Dalam wujudnya dapat dilihat kerjasama umat beragama dalam setiap upacara keagamaan senantiasa berjalan dengan rukun dan penuh kekeluargaan. Demikian pula dalam membangun rumah-rumah ibadah (gereja dan mesjid) dibangun secara bersama-sama, tanpa ada pikiran saling mencurigai. Keadaan ini berlaku bagi seluruh suku bangsa Lore dan khususnya yang terlihat dan terbukti di lokasi komunitas kecil ini.

Mengenai kepercayaan yang hidup dalam masyarakat dapat dikemukakan antara lain: Kepercayaan ini dapat dilihat dalam berbagai upacara adat, misalnya dalam berbagai upacara adat daur hidup (mulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa remaja, perkawinan sampai kematian), upacara dalam bidang pertanian (membuka sawah dan kebun baru, turun sawah, panen dan selesai panen), upacara mendirikan rumah baru (mulai menentukan lokasi, mengumpulkan ramuan rumah, mendirikan rumah sampai menaiki rumah baru), dan upacara adat lainnya seperti adat pengobatan orang sakit dan lain sebagainya. Salah satu media yang digunakan oleh suku bangsa Lore dalam pelaksanaan upacara-upacara adat tersebut ialah melalui upacara *Walia*. (*Walia* = fungsi *Balia* di Kaili). Dengan upacara *Walia* ini sebagai suatu kepercayaan lama sebagai suatu sarana untuk mengajukan permohonan kepada Tuhan (*Khalaik*). Permohonan ini seperti: supaya hidup tenteram dan aman, penyembuhan penyakit, pertanian berhasil, murah rezeki, meminta hujan, minta anak dan lain-lain. Upacara *Walia* ini diselenggarakan di *Duhunga* atau juga di *Lobo* yang khusus digunakan untuk upacara adat.

Bahasa.

Mengenai bahasa, maka sebagai alat komunikasi baik dalam kalangan suku bangsa Lore maupun dalam komunitas kecil di lokasi penelitian ini, sering ditandai dengan adanya perbedaan dalam bahasa untuk stratifikasi sosial tertentu. Tetapi penggunaan bahasa dalam menunjukkan stratifikasi sosial tersebut hanya semata-mata sebagai penghormatan dan sebutan antara seseorang yang lebih muda kepada orang tua-tua terutama ketua-ketua Hadat.

II. BENTUK

CIRI-CIRI KOMUNITAS KECIL

Di sini akan dikemukakan mengenai batas-batas wilayah, legitimasi, atribut-atribut dan ciri-ciri khusus lainnya.

Batas-batas wilayah di sini antara lain ialah batas wilayah alamiah. Khusus komunitas kecil di lokasi penelitian adalah mereka yang mendiami seluruh wilayah *lembah Bada* yang letaknya jauh di pedalaman terpencil, di mana keadaannya terisolir dari dunia luar, justru belum ada jalan darat. Jalan satu-satunya hanya jalan setapak yang dapat digunakan untuk jalan kaki dan naik kuda. Lembah Bada ini berbatasan dengan Lore Utara di sebelah utara, dengan wilayah Kulawi di sebelah barat, dengan Pamona Utara di sebelah timur dan Wilayah Sulawesi Selatan di sebelah selatan.

Legitimasi di sini dapat dilihat dalam bentuk fisik bangunan-bangunan yang khas Lore (Bada). Adapun bangunan-bangunan di sini antara lain ialah rumah tempat tinggal yang disebut *Tambi*. Tambi untuk *Tuana* (raja) jauh lebih besardari *Tambi* untuk orang biasa. Di samping Tambi dibangun *Buho* (lumbung pada dan tempat musyawarah). Juga dikenal rumah adat Kerajaan yang disebut *Duhunga*. Di samping ketiga bangunan itu juga ada *bambaru* yang khusus dibuat di sawah atau di ladang, *lolo* yaitu sebuah pondok atau gudang yang dibuat untuk tempat sementara apabila membangun *Tambi* yang baru.

Selain bangunan-bangunan fisik tersebut di atas maka komunitas kecil ini yang mendiami wilayah lembah *Bada*, ditandai oleh adanya rumah adat yang sampai sekarang masih terpelihara baik. Rumah adat ini disebut *Duhunga*. *Duhunga* ini merupakan pusat kegiatan pemimpin-pemimpin adat untuk mengayomi masyarakat, tempat bermusyawarah, pusat pemerintahan (waktu dahulu). Selain *Duhunga* dikenal pula bangunan *Lobo*, yaitu suatu bangunan yang khusus digunakan untuk upacara-upacara keagamaan/kepercayaan lama misalnya permohonan untuk keberhasilan, perlindungan dari malapetaka, keselamatan dan sebagainya yang sifatnya magis. *Duhunga* dan *lobo* merupakan perangkat adat, dan ini sama sifatnya, fungsi dan peranannya yang terdapat pada suku bangsa Kaili yang disebut Baruga dan *Banya* (lihat uraian pada halaman terdahulu).

Atribut-atribut di sini yang ikut mewarnai komunitas kecil suku bangsa Lore antara lain dapat dilihat rumah adat (*duhunga*) itu. Rumah adat itu bentuknya khas Lore (Bada), di mana fondasinya hanya terdiri

dari balok-balok atau pohon-pohon kayu yang besar disusun melintang beberapa susun yang disanggah oleh batu besar sebagai tiang. Di atas balok-balok melintang itu dibuat bangunan induk berupa kotak persegi empat tanpa ada kamar. Atapnya dari ijuk atau bambu yang sekaligus berfungsi sebagai dinding. Dan pada bubungan atap selalu dipasang kepala kerbau sebagai simbol khas Bada. Rupanya di sini ada pengaruh Toraja. Rumah tinggal (*Tambi*) juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan *duhunga*, dan uniknya semua *Tambi* selalu ada *Buho* di sampingnya yang bentuknya sama dengan *Tambi*, tetapi ukurannya kecil. Bangunan-bangunan dan ciri-ciri khas inilah yang membedakannya dengan suku bangsa lainnya yang ada di Sulawesi Tengah ini.

STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Komunitas kecil masyarakat Lore (Bada) di lokasi penelitian pada dasarnya dapat dikatakan induk dari beberapa komunitas kecil, walaupun sekarang sudah sangat samar. Sebagai induk, karena menurut sejarah wilayah ini pertama-tama hanya berpusat di desa Bulili dan Tinoe sebagai desa tertua. Sekarang ini setelah melalui proses yang cukup lama tumbuh dan berkembang serta menyebar desa-desa yang baru. Sekarang di lembah Bada sudah dikenal 14 buah desa. Ini menjadi kelompok komunitas kecil yang sekarang meliputi seluruh wilayah lembah Bada yang merupakan lokasi penelitian ini.

Sebelum zaman Belanda komunitas kecil suku Lore khususnya di daerah lembah Bada merupakan satu kerajaan kecil, yaitu kerajaan Bada. Struktur Pemerintahannya pada waktu itu berpusat pada kekuasaan *Tuana* (Raja). *Tuana* dibantu oleh *Pabisara* (Ketua adat) dan *Kabilaha* (Panglima Perang). Wilayah kekuasaan Kerajaan Bada terdiri atas beberapa kelompok pemukiman yang dipimpin oleh *Pabisara* (Ketua adat) dibantu oleh *tauna maroa* (orang baik-baik) di setiap kelompok pemukiman itu.

Pada zaman Belanda, kelompok pemukiman ini berubah menjadi *Kampu* yang dipimpin oleh *Kepala* dan masih tetap di bawah kekuasaan Kerajaan Bada. Pada zaman Belanda, Wilayah Lore dibagi atas 3 onder-distrik, yaitu onderdistrik Bada, Napu dan Besoa.

Jelas bahwa kerajaan-kerajaan kecil pada waktu zaman Belanda yaitu kerajaan Bada, Napu dan Besoa yang pada waktu itu disebut kerajaan Lore dan dijadikan distrik Lore, dipimpin oleh Raja Kabo.

Distrik Lore ini tidak pernah dimasuki Jepang, sehingga struktur pemerintahan versi Jepang tidak dikenal di wilayah ini. Pada zaman

kemerdekaan Kerajaan Lore hilang dan diganti dengan istilah *Swapraja* yang membawahi tiga distrik yaitu Distrik Bada, Napu dan Besoa, Kepala Swapraja pada waktu itu adalah J. Pelima dibantu oleh K. Pola di Distrik Bada, P. Longki di Distrik Napu dan M. Bogo di Distrik Besoa.

Dan sejak tahun 1963 istilah Swapraja berubah menjadi Kecamatan yang meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lore Selatan dengan ibu kotanya Gintu, dan Kecamatan Lore Utara dengan ibu kotanya Wuasa. Keadaan ini berlaku hingga sekarang.

PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Pemerintahan adalah suatu perangkat yang ada di dalam suatu komunitas kecil dalam usaha mengatur, mengembangkan dan mengawasi masyarakat dalam suatu komunitas kecil itu. Jadi pemerintahan dalam komunitas kecil itu ikut mewarnai bentuk komunitas kecil itu. Dalam hal ini akan dikemukakan hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan komunitas kecil sebagai berikut:

Sejarah pertumbuhan pemerintahan.

Pada zaman sebelum Belanda datang wilayah komunitas kecil ini merupakan pemerintahan kerajaan, yaitu kerajaan Bada yang berpusat di Gintu. Raja yang pertama-tama adalah *Manuru*, kemudian diganti oleh anaknya yang diberi nama *Lapabada*. Turunan *Manuru* inilah yang memerintah kerajaan Bada ini. Raja yang terakhir ialah raja *Longki*. Raja Longki ini masih tetap berkuasa sampai zaman Belanda. Pada waktu zaman Belanda di wilayah suku bangsa Lore di samping kerajaan Bada, juga ada kerajaan di daerah Napu dan Besoa dengan raja Kabo sebagai rajanya. Demikian pula pada zaman Jepang Raja Longki dan Raja Kabo masih berkuasa di wilayah Lore ini. Pada zaman Belanda kerajaan di daerah Lore ini dibagi atas tiga onderdistrik masing-masing onderdistrik Bada, Napu dan Besoa. Hal ini masih berlaku hingga zaman Jepang. Keadaan ini berubah setelah kemerdekaan. Kerajaan ini hilang dan diganti dengan swapraja yang membawahi 3 distrik. Kepala Swapraja pada waktu itu adalah Jibril Pelima sedangkan distrik yang ada ialah Distrik Bada dengan kepala Distriknya K. Pole, Distrik Besoa dengan Kepala Distriknya M. Bogo, dan distrik Napu dengan Kepala Distriknya P. Longki. Dan sesudah itu maka sejak tahun 1963 swapraja itu berubah menjadi Kecamatan yang meliputi 2 Kecamatan yaitu K

Aparat-aparat.

Aparat-aparat pemerintahan komunitas kecil di sini ada dua, yaitu aparat pemerintahan formal dan aparat non pemerintahan.

Aparat pemerintahan formal yang ada ialah: Kantor Wilayah Kecamatan, sektor Kepolisian, Koramil Kecamatan, Kantor Departemen P dan K, Kantor Urusan Agama yang kesemuanya berpusat di Gintu sebagai ibukota Kecamatan. Selain itu maka di tingkat desa dikenal adanya Kepala Desa, Kepala Rukun Kampung (RK), Kepala Rukun Tetangga (RT) dan dilengkapi dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Badan Musyawarah Desa (BAMUDES). LKMD dan BAMUDES ini anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh non formal di desa-desa.

Sedangkan aparat non formal/non pemerintahan yang masih dijumpai dan masih dalam komunitas kecil ini adalah: Lembaga Adat yang terdapat di setiap desa dan dipimpin oleh Pabisara (Ketua Adat). Upacara-upacara adat diselenggarakan di *Duhunga*, yaitu suatu bangunan khusus sebagai rumah adat.

Lembaga adat ini berfungsi dalam berbagai kehidupan bidang kemasyarakatan seperti menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan:

Soal warisan, perkawinan, perceraian, perkosaan dan juga masalah yang berhubungan dengan upacara-upacara keagamaan (religi) yang masih berkembang pada komunitas kecil ini seperti upacara pembukaan tanah baru, upacara mendirikan/menaiki rumah baru, upacara daur hidup lainnya.

Lembaga adat ini beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya, dan kepemimpinananya bersifat kolektif.

Hubungan vertikal.

Bertolak dari aparat-aparat di tingkat Kecamatan dengan tingkat desa yang dikemukakan di atas, jelas bahwa hubungan vertikal di sini merupakan suatu keharusan yang diikat secara organisatoris. Jelas bahwa Camat berhubungan secara vertikal dengan Kepala-Kepala Desa. Camat di sini dibantu oleh staf kecamatan dengan bidang tugas yang sudah ditentukan dalam kelembagaan Kecamatan. Demikian pula desa berhubungan secara vertikal dengan aparat pembantunya. Dalam hal ini Kepala desa dibantu oleh Badan Musyawarah Desa dan Lembaga Musyawarah Desa di samping dibantu secara langsung oleh aparat desa itu

secara melembaga. Bamudes dan Lembaga Musyawarah Desa di sini sangat penting dalam menghidupkan hubungan vertikal dengan Kepala Desa sebagai aparat pembantu, justru aspirasi masyarakat desa banyak dimonitor oleh kedua lembaga desa itu, di samping kemampuan Kepala Desa untuk menyerapnya. Dalam hal ini maka kemampuan membawa aspirasi masyarakat desa itu akan merupakan bahan yang sangat berguna untuk dikembangkan dan disalurkan melalui Kepala Wilayah Kecamatan.

Hubungan horizontal.

Dalam rangka mengembangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di wilayah ini sebaik-baiknya, maka Camat akan selalu mengadakan hubungan horizontal dengan aparat-aparat yang sederajat di tingkat Kecamatan yaitu dengan Komandan Resort Kepolisian, dan Koramil setempat. Hubungan horizontal ini sangat penting dalam usaha mengayomi masyarakat. Untuk melancarkan pelaksanaan tugas ini maka diadakan hubungan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti lembaga adat, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL.

Dalam mengemukakan hal ini ada tiga hal pokok yang perlu digambarkan, yaitu lembaga ekonomi, lembaga kemasyarakatan dan sistem religi.

Mengenai lembaga ekonomi dapat dilihat adanya Koperasi Unit Desa. Walaupun Koperasi Unit Desa ini masih belum berperan dengan baik, maka sesungguhnya lembaga inilah yang dapat menjadi soko guru bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Lembaga ini bertujuan untuk menghimpun kekuatan ekonomi masyarakat dalam segala bidang kehidupan, terutama dari hasil pertanian dan alat-alat serta sarana pertanian mereka. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Anggotanya adalah seluruh petani.

Mengenai sistem kemasyarakatan pada komunitas kecil ini, maka untuk menampung keinginan masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan diadakanlah Lembaga Sosial Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Kedua lembaga kemasyarakatan inilah yang merupakan wadah kegiatan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat ikut terarah dalam peranannya dalam kehidupan desa. Lembaga ini beranggotakan selain pejabat formal di tingkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat-aparat desa itu sendiri), juga mengikutsertakan tokoh-tokoh

informal lainnya seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat di samping para ulama, pemuda dan wanita

Sistem religi.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa di wilayah ini masih cukup kuat peranan adat, maka Ketua Adatlah yang berperan. Adat istiadat harus selalu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu lembaga adat sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Mereka merupakan unsur pembantu di bidang urusan keagamaan, demi tegaknya hukum dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Dewan Hadatlah yang akan membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mungkin timbul. Dalam hal ini Ketua Adatlah yang memimpin lembaga adat ini. Beliau memimpin setiap upacara adat yang ada, misalnya upacara adat dalam bidang pertanian, dalam upacara daur hidup, upacara mendirikan dan menaiki rumah baru dan sebagainya. Jelas bahwa peranannya cukup besar dalam menata kehidupan masyarakat yang masih banyak berorientasi kepada pentingnya hukum adat itu.

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

Pelapisan sosial resmi

Pada dasarnya pelapisan sosial resmi masa lalu dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Lapisan tertinggi disebut *Tuana* (Raja). Segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat berpusat pada *Tuana*.
Tuana-lah sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Kepala di bidang kemasyarakatan.
2. Lapisan kedua adalah keturunan Raja, yaitu *Kabilaha* (Panglima Perang) dan *Pabisara* (Ketua-Ketua Adat).
Kabilaha dan *Pabisara* merupakan tangan kanan *Tuana*. Karena itu fungsi *Kabilaha* dan *Pabisara* ini sangat penting, sebab selain sebagai pembantu utama raja dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, juga berkewajiban memberikan informasi kepada *Tuana* tentang kerajaan dan masyarakatnya dalam segala bidang kehidupan.
3. Lapisan ketiga ialah *Tuana Maroa* yaitu semua penduduk yang berketurunan dan berperilaku baik-baik. Mereka ini merupakan jumlah

terbanyak sebagai rakyat biasa.

4. Lapisan keempat ialah Hawik (budak). *Hawik* ini ada karena:
 - tawanan perang,
 - rakyat yang melanggar adat,
 - rakyat yang mengkhianati kerajaan,
 - membunuh, merampok, memperkosa dan selalu mengganggu ketertiban masyarakat.

Bentuk pelapisan.

Gambaran mengenai bentuk pelapisan ini meliputi 2 hal pokok, yaitu struktur pelapisan dan komponen-komponen setiap lapisan yang ada. Mengenai struktur lapisan di sini, terbagi atas empat lapisan, di mana setiap lapisan merupakan golongan tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya. Keempat lapisan itu ialah: *Tuana* atau bangsawan (Raja dan keturunannya), *Kabilaha* yaitu golongan pahlawan atau panglima perang yang merupakan golongan yang dekat dengan *Tuana* (Raja) dan keluarganya, *Tauna Maroa* yaitu semua golongan masyarakat yang berkelakuan dan berperilaku baik-baik. Golongan inilah yang paling banyak jumlahnya sebagai rakyat biasa, dan lapisan yang terakhir adalah *Hawik* (budak), yaitu lapisan sosial yang paling rendah. *Hawik* ini ada karena beberapa hal, yaitu karena kalah perang (tawanan perang), karena melanggar adat kerajaan misalnya membunuh, mencuri, memperkosa, dan mengkhianati kerajaan. Selanjutnya tiap-tiap lapisan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Lapisan pertama *Tuana*; hanya turunan raja yang dapat menjadi *tuana*, sebab hal ini merupakan ketentuan adat kerajaan. *Tuana* ini menggunakan atribut seperti pakaian adat kerajaan. Pakaian ini membedakan antara seorang *Tuana* dan *Tauna Maroa* (orang kebanyakan). Pakaian adat tersebut adalah: *Puruka sengke* (celana), *sig* (destar), *badu bandara* (baju) dan *Tiho* (parang) kerajaan bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan adalah: *Kalava* (blues) *wini* (rok), *Pohea* (ikat kepala) dan *kala bulohu* (gelang). Selain itu rumah tempat tinggal *Tuana* (*Tambi*) harus lebih besar dari rakyat biasa dan pada bubungan *Tambi* dipasang tanduk kepala kerbau. Jadi setiap *Tambi* yang ada kepala dan tanduk kepala kerbaunya pada bubungannya, maka itu pertanda bahwa rumah (*Tambi*) itu adalah rumah raja atau keturunan raja. Sedangkan gelar yang dipakai ialah *Tuana* dan *kabilaha* saja. Mengenai hak-hak dalam masyarakat antara lain ialah mengayomi seluruh masyarakat. Golongan Raja inilah yang memerintah sesuai dengan norma dan

peraturan yang berlaku. Dalam memerintah ini beliau dibantu oleh Ketua Hadat. Ketua Hadat ini juga dar5 golongan *Tuana*. Lapisan ini berhak memutuskan hukuman bagi pelanggar adat serta menetapkan hukuman, berhak menentukan di mana rumah adat dibangun, menentukan tempat-tempat upacara adat, waktu-waktu upacara adat kerajaan dan berhak mengangkat para pembantunya. Dalam menjalankan haknya beliau diberi pertimbangan oleh Ketua Hadat. Golongan ini pula menentukan negeri dalam keadaan bahaya, sehingga perlu bersiap-siap. Mengenai kewajiban-kewajiban lapisan ini adalah melindungi seluruh negeri, mensejahterakan rakyat secara keseluruhan baik rokhani maupun jasmani.

Lapisan kedua, yaitu *kabilaha*, anggota-anggotanya adalah juga masih keturunan *Tuana*. Atribut-atribut untuk lapisan ini sama dengan atribut yang digunakan oleh lapisan *Tuana* baik mengenai pakaian maupun tempat tinggalnya (bentuk *Tambi*). Gelarnya ialah *kabilaha*, yaitu yang membantu raja dalam menjaga keamanan dan ketertiban seluruh negeri. Lapisan inilah yang memimpin kalau ada perang suku terjadi. Tegasnya berperan menjaga keamanan seluruh wilayah kerajaan. Dengan demikian jelas mempunyai hak membantu *tuana* dalam bidang pengamanan seluruh wilayah kerajaan. Dengan demikian lapisan ini berkewajiban menjaga seluruh negeri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini. Lapisan inilah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melindungi seluruh rakyat dari bahaya atau ancaman dari mana pun datangnya. Tegasnya menjaga keamanan seluruh negeri. Jadi jelas lapisan ini cukup berperan dalam menentukan keadaan seluruh wilayah negeri dalam hal keamanan. Lapisan ketiga yaitu *Tauna Maroa*. Anggotanya adalah seluruh rakyat yang tidak termasuk lapisan pertama dan kedua serta lapisan keempat. Atribut-atribut dan gelar-gelar tidak ada. Hak-hak dari lapisan ini adalah mendapat perlindungan hukum, mengikuti upacara-upacara adat yang diselenggarakan oleh kerajaan, mengeluarkan pendapat atau keluhan kepada *Tuana*, Ketua Adat dan kepada *kabilaha* yang merugikan lapisan ini. Sedangkan kewajibannya adalah membantu raja dan *kabilaha* serta ketua adat dalam menjalankan tugasnya. Mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan dari *Tuana*. Taat kepada peraturan yang berlaku di dalam kerajaan. Memberikan pengabdian setinggi-tingginya kepada kerajaan. Lapisan inilah yang diharapkan memberikan peranan yang besar dalam pengembangan tugas-tugas sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat, justru inilah merupakan lapisan yang sangat besar jumlah dan potensial. Kemajuan

dan kemunduran kerajaan banyak tergantung dari kepaduan dan kepatuhan lapisan ini kepada kerajaan. Tegasnya lapisan ini ikut menentukan dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi secara keseluruhan. Lapisan terakhir, yaitu *hawik* Lapisan ini adalah orang-orang yang dijadikan budak. Lapisan ini ada karena menjadi tawanan perang (suku lain yang kalah perang) dan juga karena ada rakyat yang melanggar adat, membunuh, memperkosa dan membuat keonaran dalam kerajaan. Lapisan ini tidak memiliki atribut dan gelar. Mereka tidak mempunyai hak. Dan sebaliknya mereka berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah *tuana* dan *kabilaha* serta ketua adat. Segala perintah dari kerajaan wajib dilaksanakan. Biasanya apabila seorang *hawik* selama menjadi *hawik* memperlihatkan kelakuan yang baik dan sudah diuji kebaikannya, dapat diberi kelonggaran, dan bahkan sewaktu-waktu dapat diberi pengampunan oleh *Tuana*, dan dapat menjadi *tuana maroa*.

Hubungan antar lapisan.

Di dalam hubungan antar lapisan di sini akan digambarkan lapisan-lapisan dalam komunitas kecil suku bangsa Lore di lokasi penelitian ini terjalin. Jalinan ini dapat terbentuk karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan tetangga, hubungan pekerjaan dan hubungan kemasyarakatan.

Hubungan kekerabatan ini terjadi melalui perkawinan. Perkawinan di sini terbatas pada lapisan tertentu, artinya antar lapisan *Tuana* dan *Kabilaha* sendiri, antar *Tauna Maroa* sendiri. Tetapi dapat saja perkawinan ini terjadi antar lapisan *Tuana* dan *Kabilaha* yang laki-laki dengan *Tauna Maroa* yang perempuan tetapi sebaliknya tidak akan terjadi perkawinan antara *Tauna Maroa* yang laki-laki dengan *Tuana* atau *Kabilaha* yang perempuan. Jadi ada larangan adat seorang *Tauna Maroa* yang laki-laki untuk kawin dengan keturunan raja dan *kabilaha* yang perempuan, tetapi seorang laki-laki keturunan raja dan *kabilaha* dapat saja mengambil istri dari orang biasa (*Tauna Maroa*). Biasanya keturunan dari perkawinan antara keturunan raja dengan orang kebanyakan (*Tauna Maroa*) ini mempunyai hak untuk menjadi lapisan *kabilaha*. Dengan gambaran di atas jelas bahwa dengan adanya lapisan-lapisan dalam komunitas kecil ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam pembinaan hubungan kekerabatan antar lapisan yang ada.

Mengenai hubungan tetangga antar lapisan di sini walaupun ada perbedaan derajat sosial, bukan berarti menghalangi hubungan tetangga.

Hubungan tetangga di sini berjalan secara wajar, artinya seorang keturunan raja dan *kabilaha* dapat sewaktu-waktu bergaul dengan tetangganya yang bukan keturunan raja (*Tauna Maroa*), demikian pula sebaliknya seorang *tauna maroa* menjalin hubungan tetangga dengan keturunan raja asalkan mengikuti norma adat (penuh hormat, sopan dan diikat oleh tata cara adat) yang berlaku dalam kerajaan itu.

Mengenai hubungan pekerjaan, dapat digambarkan bahwa apabila dalam satu pekerjaan yang sama yang diikuti oleh anggota-anggota lapisan yang berbeda, maka bagi lapisan keturunan raja beban pekerjaan tidak begitu berat seperti misalnya hanya sebagai mandor, pengawas, koordinator dan membagi tugas pekerjaan, tetapi sebaliknya bagi anggota dari lapisan *Tauna Maroa* yang harus bekerja sampai pekerjaan itu selesai. Kalau pekerjaan itu merupakan tugas *Hawik* (budak), maka tidak ada lapisan lain yang mencampuri pekerjaan itu, kecuali keturunan raja atau *kabilaha* yang mengawasinya.

Mengenai hubungan kemasyarakatan dapat pula dikemukakan bahwa hal ini berjalan secara wajar pula dengan mengikuti ketentuan adat yang berlaku. Misalnya di dalam upacara-upacara adat (adat dan upacara daur hidup, adat dan upacara pertanian serta adat dan upacara mendirikan rumah baru dan menempati rumah baru). Dalam setiap adat dan upacara tersebut raja dan keturunannya yang memimpin upacara ini, yang menentukan tempat dan waktu upacara, menentukan kewajiban-kewajiban peserta upacara (*Tauka maroa*). Dalam hal ini peserta upacara yang menyediakan seluruh bahan-bahan upacara, membuat tempat upacara yang dilakukan secara gotong royong. Di sini *Hawik* selalu diberi tugas yang berat-berat *Hawik* tidak diperbolehkan sebagai peserta upacara.

Perubahan lapisan.

Perubahan lapisan dalam komunitas kecil di lokasi penelitian di sini berkaitan erat dengan adanya perubahan kebudayaan mereka. Perubahan kebudayaan ini melalui suatu proses yang cukup lama. Dalam hubungan dengan perubahan lapisan ini yang menyangkut komunitas kecil di lokasi penelitian, maka akan dikemukakan tiga hal pokok yaitu sebab-sebab perubahan, proses perubahan dan hasil perubahan lapisan itu sendiri.

Mengenai sebab-sebab perubahan lapisan di sini dapat dikemukakan bukan karena kemajuan dunia pendidikan, bukan karena kemajuan teknologi, bukan pula karena kelancaran arus komunikasi, melainkan

banyak disebabkan karena perubahan struktur kekuasaan. Hal ini terjadi karena sebagaimana diketahui wilayah dari komunitas kecil di lokasi penelitian ini sejak dahulu hingga sekarang ini masih tetap terisolir, masih tetap tertutup dari dunia luar kecuali misi zending yang banyak memasuki kehidupan mereka. Karena itu satu-satunya penyebab terjadinya perubahan ini adalah karena perubahan struktur kekuasaan. Dalam hal perubahan struktur kekuasaan ini dapat dilihat perubahan struktur pemerintahan dari zaman sebelum Belanda, zaman Belanda, zaman Jepang sampai zaman kemerdekaan. Di sini kelihatan dari bentuk kerajaan, menjadi kerajaan dengan onderdistrik, menjadi swapraja dengan distrik-distrik dan akhirnya dikenal kecamatan dan desa-desa. Perubahan ini banyak pengaruhnya terhadap perubahan lapisan dalam komunitas kecil ini. Tetapi di samping itu peranan misi zending juga membawa perubahan lapisan. Dalam hal ini pengaruh keagamaan khususnya agama Kristen yang dibawa oleh misi zending merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan lapisan di sini.

Seperti dikemukakan di atas bahwa proses perubahan itu banyak ditentukan oleh perubahan struktur pemerintahan dan datangnya misi zending yang membawa agama Kristen ke wilayah ini. Kedua faktor inilah dengan melalui proses yang cukup lama, memperlihatkan adanya proses perubahan dalam lapisan yang ada selama ini. Khusus peranan misi zending tersebut di mana masyarakat di wilayah ini pada waktu dahulu menganut agama/kepercayaan kepada dewa-dewa, roh-roh halus, benda sakti dan keramat dan lain sebagainya (agama *khalaik*) telah merubah pandangan masyarakatnya dan menganut agama Kristen. Perubahan kepercayaan ini dari agama *Khalaik* (agama nenek moyang) kepada agama Kristen banyak mempengaruhi perubahan lapisan yang ada, di samping adanya perubahan struktur kekuasaan di wilayah ini.

Mengenai hasil perubahan lapisan itu sendiri sebagai akibat dari adanya sebab-sebab perubahan yang sudah melalui proses yang cukup panjang, dapat dikemukakan di sini bahwa kalau dahulu *Tuana* dan *Kabilaha* itu merupakan lapisan yang sangat menentukan dalam segala bidang kehidupan, maka kini kelihatannya terdapat satu komponen dalam lapisan atas itu ialah komponen yang diberi kepercayaan mengurus masalah keagamaan (pendeta). Pendeta di sini bukan hanya beranggotakan orang dari lapisan pertama dan kedua tetapi terbuka kemungkinan dari lapisan ketiga (*Tauna Maroa*) yang benar-benar dapat menghayati dan mengamalkan secara baik agama yang dibawa oleh misi zending tersebut. Dengan demikian terlihat pula bahwa peranan

ketua-ketua adat yang banyak mengurus bidang upacara-upacara adat dahulu seperti upacara adat daur hidup, bidang pertanian, perubahan dan sebagainya secara bertahap banyak ditangani oleh pendeta, walaupun sesungguhnya masih kelihatan perbauran antara agama dan kepercayaan yang ada selama ini. Tetapi yang jelas peranan pendeta cukup besar dalam kehidupan masyarakatnya. Hal demikian ini sudah kelihatan sejak zaman kemerdekaan, apalagi sekarang dengan adanya Kepala Wilayah Kecamatan dan aparat-aparat pemerintah formal lainnya. Setelah mengemukakan pelapisan sosial resmi dalam lapisan sosial masa lalu sebagaimana digambarkan di atas maka berikut ini akan dikemukakan pelapisan sosial samar.

Pelapisan sosial samar.

Dalam lapisan sosial samar ini akan diusahakan menggambarkan sesuatu yang merupakan anggapan masyarakat, anggapan dalam kehidupan masyarakat pada komunitas kecil ini, yang sesungguhnya belum secara nyata mewarnai lapisan-lapisan yang telah ada. Untuk hal ini akan diuraikan hal-hal berikut ini:

Dasar pelapisan sosial samar di sini adalah karena kepandaian atau keahlian seseorang yang cukup menonjol dalam kehidupan masyarakatnya. Misalnya orang atau kelompok orang yang ahli dalam pertukangan (memimpin membangun rumah mulai dari awal hingga selesai, menentukan kayu yang boleh dan tidak boleh digunakan), dan orang yang ahli dalam upacara-upacara keagamaan seperti misalnya yang mengetahui secara pasti waktu-waktu upacara, waktu membuka tanah pertanian, waktu menanam, waktu panen pertama, waktu upacara panen, waktu mendirikan rumah, waktu menaiki rumah baru, tempat mendirikan rumah, waktu perkawinan dan sebagainya. Kedua kelompok inilah sesungguhnya juga dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang berhak dikategorikan dalam lapisan sosial tertentu.

Dengan demikian kelihatan bahwa di dalam kehidupan masyarakat pada komunitas kecil ini selain pelapisan sosial resmi yang dikemukakan di atas, juga adanya anggapan masyarakat bahwa para tukang dan para pemimpin agama/kepercayaan yang hidup dalam kehidupan masyarakat sesungguhnya dapat diberi lapisan tersendiri. Hal ini dianggap penting justru kedua kelompok ini mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam kehidupan masyarakatnya. Tetapi kenyataannya mereka itu hanya sebagai rakyat biasa yang sewaktu-waktu diharuskan menjalankan tugas dan keahliannya untuk kepentingan kerajaan dan

untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI

Pelapisan sosial resmi.

Mengenai pelapisan sosial masa kini adalah:

1. Tokoh-tokoh formal yaitu mereka yang diangkat secara resmi oleh Pemerintah dalam jabatan tertentu; seperti: Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Komandan Koramil, Komandan Sektor Kepolisian, Kepala Kantor P dan K Kecamatan, Guru guru, Kepala Kantor Urusan Agama.
2. Tokoh-tokoh adat yang disebut *To tua ada*. Tokoh adat di sini dihimpun dalam *Lembaga Adat*. Mereka ini terdiri dari tokoh-tokoh dalam bidang keagamaan, pengobatan tradisional (dukun), pertanian, bangunan rumah dan bidang daur hidup lainnya. Tokoh-tokoh semacam ini masih sangat besar peranannya dalam kehidupan masyarakat, justru karena itu merupakan tempat bertanya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
3. Tokoh-tokoh organisasi sosial lainnya. Tokoh-tokoh di sini dapat saja berasal dari pemimpin formal, pemimpin non formal maupun dari tokoh masyarakat lainnya, seperti LKMD, BAMUDES, Organisasi Gereja, organisasi dalam bidang Pendidikan, Olah Raga, koperasi dan lain-lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah lokasi komunitas kecil ini sampai sekarang masih sangat terisolir dalam arti hubungan dengan dunia luar masih sangat terbatas sehingga tidak banyak mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Pengaruh ini antara lain masih terlihat pada sistem pelapisan sosial. Oleh karena itu dasar pelapisan sosial masa kini masih banyak mendasarkan diri kepada keaslian, senioritas, keturunan. Hanya saja sudah memperhitungkan kekuasaan (yang memerintah atau pejabat-pejabat) dan orang-orang asli yang sudah mengecap pendidikan formal tertentu. Dasar-dasar pelapisan ini saling berkaitan dalam arti bahwa pelapisan sosial di sini banyak ditentukan oleh komponen-komponen dasar yaitu keaslian, senioritas, keturunan, kekuasaan dan pendidikan seseorang.

Bertolak dari dasar-dasar pelapisan tersebut, maka terlihat bahwa bentuk lapisan sosial yang resmi sekarang adalah selain masih dikenal adanya golongan bangsawan, maka yang menonjol adalah golongan

yang memerintah (Camat, Kepala Desa, Dan Ramil serta Dan Sektor) yang biasa disebut pemimpin formal. Selain itu juga dikenal para pendidik (guru-guru sekolah), pegawai di bidang keagamaan. Kemudian dikenal rakyat. Sedangkan *Hawik* sudah tidak ada. Tegasnya bentuk lapisan di sini adalah: Tokoh-tokoh formal, tokoh-tokoh adat (dari golongan bangsawan) dan rakyat biasa. Mengenai tokoh-tokoh formal di sini adalah mereka yang secara resmi diangkat oleh Pemerintah sebagai pegawai negeri/pegawai daerah dalam jabatan tertentu. Jadi yang termasuk golongan lapisan ini adalah Camat, Kepala Desa, Dan Ramil, Dan Sektor, Ka Kandep P dan K, Guru-guru, Pegawai Syara', Imam dan pendeta), sedangkan gelar-gelar yang disandangnya adalah Pak Camat, Pak Kepala bagi kepala kampung, Komandan Koramil, Komandan Sektor Kepolisian, Imam, Pendeta, Pak guru. Gelar ini merupakan gelar fungsional dalam masyarakat. Mengenai hak-haknya ialah secara fungsional melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak boleh jalan sendiri-sendiri, tetapi harus selalu mengadakan hubungan konsultatif dengan tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh masyarakat setempat, terutama dalam bidang kemasyarakatan atau dalam adat istiadat di wilayah ini. Sedangkan kewajibannya ialah membina kehidupan masyarakat, mengayomi masyarakat dan mengarahkan masyarakat kepada tugas-tugas pembinaan dan pengembangan demi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini jiwa dan kepribadian gotong royong merupakan dasar hakiki yang selalu ditegakkan, justru azas gotong royong ini masih tetap melekat dengan sangat baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa peranan golongan lapisan pemimpin formal ini sangat besar dalam mengantarkan rakyat ke arah kehidupan yang lebih baik.

Mengenai lapisan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang anggotanya adalah dari lapisan bangsawan (keturunan Raja) yang biasa diberi gelar *To tua adat* (orang tua-tua adat/pemegang adat), merupakan salah satu komponen yang masih sangat dihormati dan dimuliakan oleh setiap warga masyarakat apakah itu pemimpin formal ataukah ia rakyat biasa. *To tua adat* atau tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat ini berhak menegakkan dengan sebaik-baiknya seluruh adat kebiasaan yang berlaku di dalam komunitas kecil ini. Berhak memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar. Biasanya dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum adat ini dibantu oleh pihak Kepolisian, dan pegawai syara' (pendeta dan imam). Namun yang

dominan di sini adalah keputusan Ketua Adat yang bersangkutan, sedangkan Kepolisian dan pegawai syara' hanya sebagai pembantu atau pelengkap saja. Kecuali kalau perkara kriminal atau tindak pidana ditangani langsung oleh pihak kepolisian. Jadi jelas bahwa *To tua adat* di sini mempunyai peranan yang cukup besar dalam mengajomi dan melindungi masyarakat terutama dalam usaha untuk menegakkan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di wilayah ini.

Mengenai rakyat pada umumnya, adalah mereka yang tidak termasuk golongan pemimpin formal dan golongan Ketua Adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Rakyat di sini masih diberi nama dengan *tauna maroa* (orang kebanyakan) yang mempunyai hak memberikan pendapat atau saran-saran kepada Pemerintah, berkewajiban membantu Pemerintah dan ketua adat dalam segala bidang kehidupan. *Tauna Maroa* inilah merupakan potensi yang cukup besar karena jumlah lapisan inilah yang terbanyak. Rakyat inilah yang ikut mengerjakan segala pekerjaan seperti bertani, tukang, berternak, dan berkewajiban membantu pemerintahan dan memelihara adat kebiasaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kelihatannya masyarakat di sini sangat patuh kepada Pemerintahnya, sangat taat kepada adat istiadatnya. Mereka membentuk kelompok-kelompok kerja di wilayahnya masing-masing untuk mengerjakan bidang-bidang pekerjaan secara gotong royong. Jarang kelihatan ada penduduk yang bekerja sendiri-sendiri. Di mana-mana selalu ditemui penduduk bekerja secara bersama-sama dalam bentuk kelompok-kelompok kerja yang sengaja dibentuk untuk setiap desa atau setiap Rukun Kampung atau Rukun Tetangga. Kelompok-kelompok kerja ini mengadakan kegiatan secara kompetisi positif dan dikoordinir oleh Kepala Desa atau Ketua Rukun Kampung atau Ketua Rukun Tetangga mereka masing-masing. Kenyataan yang dilihat dalam komunitas kecil ini bahwa lapisan formal, lapisan *To tua adat* serta rakyat pada umumnya selalu mengadakan hubungan yang baik dalam membina dan mengembangkan tugas-tugas pembinaan wilayahnya.

Hubungan antar lapisan di sini yang kelihatan sekarang adalah terjalannya suatu hubungan disebabkan antara lain oleh karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan tetangga, hubungan pekerjaan dan hubungan kemasyarakatan lainnya. Hubungan kekerabatan karena terjadinya perkawinan. Dalam perkawinan di sini tidak lagi terlihat pembatasan-pembatasan yang tajam. Artinya antara golongan pemimpin formal dapat saja kawin dengan golongan dari lapisan penguasa/peme-

gang adat dan rakyat biasa. Demikian pula sebaliknya antara rakyat dengan lapisan lainnya. Hanya saja masih diikat oleh ketentuan adat yang masih cukup ketat, terutama anggota rakyat biasa yang laki-laki tidak mudah kawin dengan golongan keturunan raja (bangsawan).

Hubungan tetangga antar lapisan yang ada sekarang ini cukup baik. Tiap-tiap beberapa rumah tangga dalam suatu kampung selalu dibentuk kelompok-kelompok kerja antara tetangga-tetangga itu sendiri yang anggota-anggotanya terdiri dari lapisan-lapisan sosial yang ada. Ini berarti bahwa hubungan tetangga tetap terbina dengan baik. Kehidupan yang demikian sudah melembaga sejak dahulu hingga sekarang. Mereka hidup dalam rukun-rukun atau kelompok-kelompok kerja (sekarang Rukun Kampung dan Rukun Tetangga) yang berfungsi mengadakan kegiatan gotong royong dalam segala bidang kehidupan mereka.

Dengan dasar rukun-rukun atau kelompok-kelompok kerja tersebut di atas, maka hubungan pekerjaan antar kelompok lapisan ini sangat baik dan berjalan dengan lancar. Kelompok-kelompok kerja antar lapisan ini selalu ada pada setiap desa/tetangga. Misalnya kelompok kerja dalam bidang pertanian, dalam bidang perumahan, peternakan, pada pelaksanaan upacara keagamaan. Kelompok-kelompok kerja di sini dikoordinir dan dipimpin oleh Kepala Desa atau oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tidak ada rakyat yang bekerja sendiri-sendiri, semuanya disatukan dalam unit-unit kelompok kerja tersebut.

Mengenai hubungan kemasyarakatan sudah jelas tergambar dari uraian yang dikemukakan di atas, yaitu sangat baik. Suatu hal yang sangat unik dan menarik mengenai hubungan kemasyarakatan ini sebagai pencerminan hubungan mesra di antara mereka adalah diwujudkan dalam upacara "*Modulu-dulu*". *Modulu-dulu* adalah suatu upacara makan sehidangan. Di sini seluruh anggota masyarakat dari lapisan sosial yang ada membawa makanan sendiri-sendiri lengkap dengan lauk-pauknya di mana makanan yang dibawa ini dikumpulkan menjadi satu pada tempat upacara *Modulu-dulu* diadakan. Misalnya di tengah sawah setelah panen selesai, atau di tempat-tempat lainnya seperti di *Buho*. Biasanya makanan itu diletakkan di atas daun yang telah disiapkan. Di sinilah mereka menikmati makanan tersebut dengan makan bersama. Tidak ada perbedaan tingkat sosial dalam makan bersama itu. *Modulu-dulu* ini dipelopori oleh tokoh masyarakat atau pemimpin formal lainnya dengan tujuan sebagai media komunikasi antara masyarakatnya, sebagai media pertemuan muda-mudi, media perdamaian apabila ada yang berselisih paham, media kegembiraan (rekreasi) dan bahkan media

penghormatan kepada tokoh-tokoh adat dan pemimpin masyarakat lainnya. Upacara *modulu-dulu* ini menggambarkan semangat sama rata dan sama rasa di antara mereka itu.

Walaupun komunitas kecil ini wilayah pemukimannya masih tertutup dari dunia luar, tetapi sesungguhnya sejak dahulu (zaman Belanda) sudah didatangi oleh misi zending yang membawa agama Kristen. Sehingga kehidupan keagamaan di wilayah ini cukup kuat dan taat. Rupanya kedatangan misi zending inilah yang membawa pula angin baru dalam cara berpikir dan sekaligus dapat merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan lapisan yang ada di wilayah ini. Sampai sekarang misi zending ini masih aktif di mana bahwa sudah ada pesawat cesna yang selalu mendatangi wilayah ini. Di samping itu, juga beberapa penduduk sudah terdidik terutama dalam bidang keagamaan dan pendidikan formal lainnya, yang ikut pula membuat perubahan lapisan. Juga terjadinya perubahan sistem pemerintahan yang sekarang banyak memegang peranan dalam perubahan pelapisan ini, justru aparat-aparat pemerintah sebagai unsur pembaharu dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penghayatan dan pengamalan agama, peranan tokoh-tokoh formal merupakan sumber penggerak daripada adanya perubahan lapisan di sini. Hal ini tercermin, bahwa komunitas kecil ini sudah dapat menerima hal-hal yang baru, misalnya kalau dahulu orang terlalu terikat oleh adat kebiasaan yang sifatnya sangat tradisional maka sekarang sudah ada kemajuan berpikir menerima hal-hal baru seperti cara bercocok-tanam, cara pembuatan rumah, cara pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini justru karena adanya misi zending dan pengaruh dari Kepala Wilayah Kecamatan dan aparat-aparatnya termasuk pengaruh Puskesmas (dokter Puskesmas) serta adanya Butsi yang ditempatkan di wilayah ini.

Pelapisan sosial samar.

Dalam lapisan sosial samar ini akan digambarkan anggapan masyarakat pada komunitas kecil ini yang sesungguhnya belum secara nyata mewarnai lapisan-lapisan yang telah ada. Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dasar pelapisan sosial samar di sini adalah karena kepandaian seseorang. Misalnya dia sebagai pendidik (guru), atau dia seorang pemuka agama (pendeta), atau dia sebagai petani yang baik dan berhasil dan sebagainya walaupun dia adalah anggota masyarakat biasa. Di sini

mereka beranggapan bahwa mereka itu dapat digolongkan dalam satu lapisan sosial tertentu. Justru kepandaian dan keahliannya itu dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian kelihatannya golongan-golongan ini mendapat tempat di hati masyarakat, dihormati oleh masyarakat dan merupakan tempat bertanya. Karena itu mereka itu dianggap pantas digolongkan dalam satu lapisan sosial tertentu di dalam kehidupan masyarakat di wilayah komunitas kecil ini.

IV. PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Mengenai gambaran umum ini akan dikemukakan dua hal pokok yaitu uraian yang berhubungan dengan pimpinan tradisional dan pimpinan masa kini serta struktur pimpinan tradisional masa kini dan pimpinan masyarakat.

Pimpinan tradisional yang formal.

Pada komunitas kecil suku bangsa Lore ini, pimpinan tradisional yang formal tidak terlepas dari keadaan kehidupan pemerintahan kerajaan di wilayah ini. Dengan demikian tidak akan terlepas pula dengan bentuk pimpinan kerajaan yang berlaku pada waktu itu. Bentuk pimpinan tradisional yang formal di sini ialah berpusat kepada Raja (*Tuana*). *Tuana* dibantu oleh: *Pabisara* (Ketua Adat) yang bertugas memelihara dan menegakkan hukum adat dalam kerajaan, *Kabilaha* yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mempersiapkan pasukan pengawal kerajaan. Juga pada setiap desa atau *wanua* atau *kampu* Raja mengangkat pembantu. Pembantu di *kampu* ini adalah orang terdekat raja sendiri (masih keturunan langsung), dan pembantu raja di *kampu* ini adalah *tuana mahile*. Raja (*Tuana*) dengan pembantu-pembantunya menjalankan tugasnya justru didasari oleh kekuasaan yang diberikan oleh kerajaan kepadanya, sehingga dengan kekuasaan ini ia mempunyai wewenang dan kekuatan. Wewenang dan kekuatan ini menjelmakan sifat-sifat kepemimpinan yang didasari oleh *kharisma* Raja itu sendiri. Dengan *kharisma* yang dimiliki oleh raja, maka beliau menunjuk atau mengangkat pembantu-pembantunya atas pertimbangan Ketua Adat. Yang biasa dipertimbangkan ialah karena keahlian dan ketrampilan seseorang untuk diangkat sebagai pembantu raja. Karena sifat *kharisma* raja ditambah dengan kemampuan, keahlian dan ketrampilan para pembantunya di bidangnya masing-masing maka ini mempunyai pengaruh yang

cukup besar bagi rakyatnya. Apalagi kalau raja dengan pembantu-pembantunya benar-benar mengayomi dan melindungi masyarakatnya sehingga terbina kehidupan yang baik, aman dan damai.

Pimpinan tradisional yang informal.

Mengenai hal ini juga tidak terlepas dari keadaan kehidupan kerajaan pada waktu itu. Untuk ini maka pimpinan tradisional yang informal pada komunitas kecil suku bangsa Lore sesungguhnya masih merupakan pembantu raja yang non struktural, tetapi kedudukannya fungsional. Dalam hal ini ada tiga unsur pokok pembantu raja yang non struktural tersebut, yaitu pimpinan informal dalam bidang keamanan, dalam bidang pertanian dan dalam bidang keagamaan. Jadi bentuknya ialah *Kabilaha* yang membidangi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, *Topakubangi* yang bertugas dan membidangi pengelolaan dalam pertanian pada umumnya, mulai dari membuka sawah/ladang sampai kepada selesai panen, dan *Toponutu* yang bertugas dan membidangi kehidupan keagamaan, misalnya memimpin upacara-upacara dalam segala bidang kehidupan (upacara pertanian, pembukaan tanah baru untuk pertanian, upacara selamatan panen, yang disebut *Wunta*, upacara menaiki rumah baru, upacara selamatan dalam daur hidup dan sebagainya). *Kabilaha*, *Topakubangi* dan *Toponutu* ini secara fungsional membantu raja dalam bidang tugasnya masing-masing, dan ini merupakan tugas mereka karena memang ahli dalam bidang itu. Jadi sifatnya karena keahlian dan kemampuan. Mereka itu mempunyai peranan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, justru masyarakat memerlukan bimbingan dan pembinaan dalam bidang keamanan, pertanian dan keagamaan.

Pimpinan masa kini yang formal.

Pada komunitas kecil suku bangsa Lore ini, pimpinan masa kini yang formal adalah apa yang dilihat sekarang ini, yaitu mulai dari Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) dengan aparat-aparat pembantunya di tingkat Kecamatan sampai kepada Kepala-Kepala Desa di tingkat desa. Kepala-Kepala Desa sendiri dibantu oleh sekretaris desa lengkap dengan staf pembantu yang meliputi bidang/urusan pemerintahan/ketertiban, pembangunan/ekonomi, keuangan, kesejahteraan rakyat dan umum/pelakat. Jelas di sini bahwa Camat dan Kepala Desa adalah pemimpin formal yang sifatnya sudah melembaga yang justru pejabat

tersebut dipilih oleh rakyat sendiri. Pemimpin formal ini direstui oleh Pemerintah melalui surat keputusan. Dengan demikian jelas pemimpin formal ini sangat besar arti dan peranannya dalam membina pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Pemimpin formal inilah yang bertanggung jawab terhadap usaha mewujudkan pembangunan desa secara terpadu, mewujudkan desa dari swakarya, swadaya, menjadi desa swasembada sampai menjadi desa Pancasila. Tugas ini cukup berat, sehingga partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan baik dalam bentuk pikiran, tenaga, maupun material dan sebagainya. Di sini pula diperlukan kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang terbuka agar usaha mewujudkan desa yang dicita-citakan dapat dicapai. Karena itu perlu keterpaduan dari segala unsur yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Pimpinan masa kini yang informal.

Untuk pelaksanaan tugas-tugas pemimpin masa kini yang formal sebagaimana dikemukakan di atas, mutlak perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan pemimpin masa kini yang informal. Untuk ini maka di setiap desa dikenal apa yang disebut Lembaga Musyawarah Desa yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat, para ulama dan para guru di desa itu. Juga dikenal adanya Lembaga Ketahanan Desa yang diketuai oleh Kepala Desa dengan anggota-anggota selain tokoh masyarakat, juga dari organisasi sosial yang ada (wanita, pemuda) dan organisasi keagamaan (persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Ibu Kristen dan Persatuan Bapak Kristen). Lembaga Musyawarah Desa bertugas sebagai wadah perencanaan, sedangkan Lembaga Ketahanan Desa bertugas sebagai wadah pelaksana. Dalam hubungan dengan pembinaan dan pengembangan kehidupan desa ini, jelas diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pimpinan formal (Camat dan Kepala Desa) dengan Badan Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa sebagai pimpinan informal di wilayah ini. Keterpaduan antara pemimpin formal dan informal tersebut sangat penting untuk mengemban tugas yang dihadapi, di mana partisipasi masyarakat sangat diharapkan.

Dari gambaran dan uraian tersebut di atas, akan dilihat lebih jauh tentang struktur atau susunan dari pimpinan tersebut, baik pimpinan tradisional maupun pimpinan masa kini dan pimpinan masyarakat

Struktur pimpinan tradisional.

Seperti dikemukakan di atas bahwa susunan pimpinan tradisional

yang formal adalah berpusat kepada Raja (**Tuana**) dibantu oleh *Pabisara* (Ketua Adat), *Kabilaha* (keamanan) dan *tuana mahile* (kepala kampu atau wanua). Antara *Pabisara*, *kabilaha* dan *tuana mahile* harus ada kerjasama yang baik sebagai pembantu utama raja (*Tuana*) dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Kerajaan. Selanjutnya mengenai pimpinan tradisional yang informal strukturnya adalah sesungguhnya juga berpusat kepada *Tuana* di mana beliau dibantu secara fungsional sesuai keahlian yang dimilikinya, yaitu oleh *kabilaha* (keamanan), *Topakubangi* (bidang pertanian) dan *Toponuntu* (bidang keagamaan/kepercayaan). *Kabilaha*, *Topakubangi* dan *Toponuntu* ini harus mengadakan koordinasi dan kerjasama yang baik untuk mengemban tugasnya masing-masing dalam usaha membantu *Tuana* dalam menjalankan tugasnya.

Struktur pimpinan masa kini.

Untuk hal ini sudah jelas sebagaimana diuraikan di atas bahwa struktur pimpinan masa kini yang formal adalah Camat yang memerintah seluruh desa di wilayahnya, dibantu oleh Kepala Desa di tingkat desa. Dari susunan ini jelas pula bahwa hubungan dari atas ke bawah ialah Camat langsung kepada Kepala-Kepala Desa. Dan Camat itu sendiri dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh aparat lainnya seperti Koramil dan Komandan Sektor Kepolisian. Camat, Dan Ramil dan Komando Sektor Kepolisian disebut Tripida di tingkat Kecamatan. Tripida ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang harus bekerjasama dan senantiasa terjalin koordinasi dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya. Demikian pula di tingkat desa sebagai aparat pembantu pemerintahan yang terbawah harus mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, wanita dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya di mana sudah dikenal wadah Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa sebagaimana dikemukakan di atas. Sedangkan Pimpinan masa kini yang informal diikat dalam wadah Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa yang bersifat fungsional menghimpun kekuatan sosial dalam kehidupan masyarakat dan dikoordinir oleh Kepala Desa. Peranan pimpinan informal ini sangat besar dalam kehidupan masyarakat, justru kedua lembaga ini merupakan wadah perencanaan desa (Lembaga Musyawarah Desa) dan juga sebagai wadah pelaksana operasional desa (Lembaga Ketahanan Desa) yang membantu Kepala Desa dalam mengemban tugas pokoknya.

Mengenai *struktur pimpinan masyarakat* pada komunitas kecil

suku bangsa Lore ini sesungguhnya sudah digambarkan di atas, yaitu sudah diserap dalam Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa. Sebab kedua lembaga ini menampung pimpinan-pimpinan masyarakat di desa-desa, baik sebagai pembantu pemerintah desa di bidang perencanaan desa maupun di dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional desa itu sendiri.

PIMPINAN TRADISIONAL

Untuk memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap pimpinan tradisional baik formal maupun informal sebagaimana dikemukakan dalam gambaran umum uraian di atas, di bawah ini diberikan pelukisan yang bersifat deskriptip dari insan pimpinan tradisional tersebut sebagai berikut:

Insan pimpinan tradisional yang formal.

Sesungguhnya sudah dikemukakan secara singkat pada bagian di atas. Tetapi untuk lebih memperjelas maka dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: Nama atau gelar; ialah Raja (*Tuana*) harus dari keturunan raja, melalui pelantikan dan gelar tersebut tetap digunakan selama berkuasa sebagai *Tuana*. Beliau memimpin seluruh kerajaan di wilayah Lembah Bada (sekarang Lore Selatan). Raja tersebut diangkat dengan syarat-syarat seperti keaslian, keturunan, sudah senior dan mempunyai kemampuan untuk diangkat sebagai raja. Raja (*Tuana*) berhak memerintah sesuai ketentuan kerajaan, mengayomi seluruh rakyatnya baik lahir maupun batih. Dan sebaliknya juga berhak memberikan hukuman bagi orang yang bersalah, berhak mengangkat pembantu-pembantunya. Kewajibannya adalah melindungi seluruh wilayah kerajaan dari ancaman, meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat, mengadakan kerjasama dengan kerajaan tetangga, menghormati hak dan kewajiban setiap aparat kerajaan, berlaku adil dalam menjalankan kewajibannya. Raja ini diangkat sesuai ketentuan, yaitu apabila Raja sebelumnya mangkat atau sudah tua (tidak mampu lagi menjalankan tugas), dan oleh Ketua Adat dengan aparat Hadat memusyawarahkan penggantinya. Raja ini dilantik dalam upacara kerajaan yang dipimpin oleh Ketua Hadat disaksikan oleh seluruh rakyat, dan aparat kerajaan. Seorang Raja mempunyai pakaian khas, yaitu *Puruka* (*Sengke*) = celana yang panjangnya sampai lutut dan ketat, *Siga* (destar), *Badu Bandara* (baju), *Tiho* (parang) dilengkapi dengan Tombak dan perisai. Demikian pula rumah raja (istana) yaitu *Tambi* yang besar pada bubungannya

bagian muka dan belakang dipasang kepala kerbau lengkap dengan tanduknya. Antara raja dengan unsur pimpinan lainnya selalu terjadi kerjasama dan koordinasi yang baik, baik itu *kabilaha*, *pabisara*, *ketua hadat*, *toponutu*, *topakubangi*, maupun dengan *tunan mahile*, sebagaimana diuraikan di atas. Demikian pula hubungan antara raja dengan masyarakat cukup baik, misalnya dapat dilihat dalam upacara *modulu-dulu* (makan sehidangan) yang dilaksakakan oleh raja dengan seluruh unsur masyarakat. *Modulu-dulu* mempunyai aspek sosial yang paling mendasar antara raja dengan rakyat, seperti sebagai media komunitas, media hiburan, media perdamaian, media muda-mudi dan sebagainya. Di sinilah antara lain dapat dilihat cerminan pengaruh raja dalam kehidupan masyarakat, justru dengan upacara *modulu-dulu* yang sering digunakan oleh raja akan lebih mendekatkan raja dengan rakyatnya secara keseluruhan.

Mengenai pembantu raja, yaitu *Kabilawa*, *Pabisara* dan *Tuana Mahile* yang juga merupakan pimpinan tradisional yang formal merupakan gelar bagi mereka yang khusus sebagai pembantu utama raja dalam bidangnya masing-masing. *Kabilaha* : bertugas dalam bidang keamanan di wilayah kerajaan dan sekitarnya. Dia harus keturunan raja dan pemberani, berhak mengusulkan kepada raja tentang ketentuan tata tertib, dan norma yang berlaku dalam kerajaan, berkewajiban melindungi kerajaan dan seluruh rakyat dari ancaman musuh. *Kabilaha* diangkat atas kehendak raja setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Adat. Dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan pembantu raja lainnya baik di tingkat kerajaan maupun di tingkat kampu. Hubungan dengan masyarakat harus selalu ada karena tugas pokoknya adalah pengamanan kerajaan. Karena itu ia mempunyai pengaruh yang cukup besar. Mengenai *Pabisara* adalah gelar bagi mereka yang diangkat sebagai Ketua Adat kerajaan. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah kerajaan. Beliau diangkat atas pertimbangan ketua-ketua *adat kampu* kepada raja melalui *tuana kampu* masing-masing. Beliau berhak melaksanakan hukum adat yang berlaku pada kerajaan. Beliau memberi pertimbangan kepada *Tuana* siapa yang melanggar adat dan tidak dematuhi adat kerajaan. Kewajibannya ialah agar adat tetap tegak di wilayah kerajaan. Tambi beliau selalu berdekatan dengan istana Raja. Pakaianannya sama dengan bentuk dan jenis pakaian raja. Beliau harus bekerjasama dengan unsur pimpinan lainnya, agar tugasnya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan *Toponuntu* yang memimpin upacara-upacara keagamaan.

Pabisara ini mempunyai hubungan yang banyak dengan rakyat, karena penduduklah yang harus mentaati adat kerajaan. Karena itu pengaruhnya cukup besar.

Insan pimpinan tradisional yang informal.

Insan pimpinan di sini adalah *Kabilawa*, *Topakubangi* dan *Toponuntu*. Mengenai *Kabilaha* sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya mengenai *Topakubangi* adalah gelar yang disandang oleh mereka yang dipercayakan untuk menangani tugas-tugas dalam bidang pertanian/perkebunan, seperti pembukaan sawah/ladang, menentukan waktu turun sawah, waktu menanam, waktu panen dan sebagainya. Wilayahnya seluruh daerah pertanian dalam kerajaan. Beliau diangkat sebagai *Topakubangi*, karena beliau ahli dalam bidang pertanian. Beliau berhak menentukan waktu-waktu yang baik untuk memulai mengerjakan sawah, menentukan waktu menanam dan panen. Kewajibannya ialah memberi petunjuk kepada petani bagaimana bertani yang baik sesuai pengetahuan (masih sangat tradisional dan bersifat magis-religius). Beliau ini banyak berhubungan dengan *Toponuntu* dalam menjalankan tugasnya. Hubungan dengan masyarakat khususnya masyarakat tani sangat besar, sehingga pengaruhnya pun cukup besar. Selanjutnya mengenai *Toponuntu*, sebagaimana dikemukakan di atas adalah gelar bagi mereka yang ahli dalam bidang keagamaan (kepercayaan lama). Wilayahnya ialah seluruh wilayah kerajaan. Beliau ini adalah orang yang ahli dalam bidang keagamaan (dukun dan semacamnya). Beliau berhak menentukan waktu yang baik untuk memulai pekerjaan, kapan diadakan upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya. Beliau lah yang berusaha melindungi seluruh kerajaan dan rakyat dari bencana melalui upacara-upacara keagamaan seperti upacara *walia* (*Balia* di Kaili), seperti permohonan, perlindungan dan sebagainya. Karena itu rakyat seluruh kerajaan banyak menggantungkan diri pada peranan *Toponuntu* ini. Jadi jelas bahwa *Toponuntu* sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

PIMPINAN MASA KINI

Insan pimpinan masa kini yang formal

Hal ini sudah dikemukakan di atas, namun untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan: Nama atau gelar adalah Camat dan Kepala Desa. Gelar ini dipakai setelah diangkat

dengan resmi oleh Pemerintah melalui *urat Keputusan. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang memimpin Wilayah Kecamatannya yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan di desa yang memimpin tugas-tugas pemerintahan desa. Persyaratan pengangkatan bagi Camat adalah tamatan Sekolah Lanjutan Atas atau Akademi dan bagi Kepala Desa tamatan Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Dasar ditambah pengalaman, berpengaruh, jujur, sehat jasmani dan rokhani, setia kepada Negara, Senior. Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan Camat dan Kepala Desa adalah disenangi oleh masyarakat, mampu memperlihatkan prestasi kerja yang baik dan mempunyai pengalaman luas dalam bidang kemasyarakatan. Mereka berhak menerima gaji dari Pemerintah. Khusus Kepala Desa berhak memperoleh jaminan dari rakyat berupa *tanah bengkok* seluas 1 Ha digarap oleh rakyat untuk Kepala Desa. Juga berhak atas *pinontol* artinya jaminan dari rakyatnya Rp.200,— setiap kepala rumah tangga dalam setahun, atau 2 hari kerja per tahun untuk kepentingan Kepala Desa. Kepala Desa juga berhak atas pungutan pajak sejumlah 10% setahun. Kewajiban Camat dan Kepala Desa pada hakekatnya adalah mengkoordinir perangkat kecamatan/perangkat desa, mensejahterakan rakyatnya dalam segala bidang kehidupan, menjaga stabilitas desa. Mereka diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. Kepala Desa dipilih oleh rakyat, sedangkan perangkat desa diangkat dan diusulkan oleh Camat. Atributnya ialah tanda pangkat dan tanda jabatan sesuai peraturan. Pimpinan formal ini berhubungan dengan aparat bawahannya secara struktural mulai Camat sampai kepada Kepala Desa, dan berhubungan secara fungsional dengan pemimpin informal di wilayahnya. Pimpinan informal ini diikat dalam wadah Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa. Dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, maka pimpinan formal dan informal ini selalu mengadakan hubungan kerja melalui musyawarah atau rapat-rapat di Kecamatan atau di Desa. Camat dan Kepala Desa sangat menentukan jalannya pemerintahan di wilayahnya. Mereka itu adalah sesepuh di wilayahnya masing-masing, sebab beliaulah sebagai motivator, sebagai pemimpin yang membawa seluruh rakyat pada tingkat kehidupan yang lebih baik.

Insan pimpinan masa kini yang informal.

Untuk ini juga telah diuraikan di atas. Yang jelas bahwa insan pimpinan masa kini yang informal ini adalah tikoh-tokoh adat, tokoh-

tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh pemuda dan wanita yang ada di desa-desa itu. Untuk lebih efektifnya peranan mereka, maka tokoh-tokoh masyarakat desa itu diikat dalam wadah atau lembaga Desa. Lembaga ini ialah Lembaga Musyawarah Desa yang bertugas antara lain membuat perencanaan pembangunan desa dan penjabaran selanjutnya akan dikelola oleh Lembaga Ketahanan Desa. Di sini peranan Kepala Desa dalam melaksanakan rencana yang dibuat oleh Lembaga tersebut sangat besar, justru Kepala Desa lah sebagai unsur pimpinan dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam perencanaan itu. Dengan demikian jelaslah bahwa tokoh-tokoh masyarakat melalui Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa sangat berperan dalam menampung aspirasi masyarakat desa untuk selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kepala Desa di wilayahnya masing-masing, demi mengantarkan desanya ke taraf kehidupan yang lebih baik. Dengan mekanisme yang demikian tergambar adanya saling kerjasama antara pimpinan formal dan pimpinan informal dalam masyarakat.

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Sistem pengendalian sosial di sini khususnya pada komunitas kecil suku bangsa Lore, dimaksudkan agar warga masyarakatnya dapat berpikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Sebab dengan adanya pengendalian ini diharapkan setiap anggota masyarakat di wilayah komunitas kecil ini di samping menghayati nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang ada, juga mampu berbuat, bertindak-laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan itu.

Dalam kerangka pengendalian sosial ini, ditempuhlah cara-cara antara lain: mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu dan mengembangkan rasa takut.

MEMPERTEBAL KEYAKINAN.

Mempertebal keyakinan dalam rangka pengendalian sosial digunakan beberapa jalur seperti: pendidikan, sugesti sosial, propaganda dan kepercayaan/agama.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menanamkan keyakinan. Adapun macam pendidikan yang ada dalam komunitas kecil ini adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP Kristen) sebagai pendidikan formal, dan pendidikan non formal

yang dilakukan oleh organisasi sosial Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi tingkat Kecamatan seperti penyelenggaraan Kursus Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, ketrampilan Khusus Wanita. Juga dilakukan pendidikan ketrampilan khusus pemuda putus sekolah yang diselenggarakan oleh Butsi dan Ampi di wilayah Kecamatan Lore Selatan seperti ketrampilan mengolah sawah dan menggunakan pupuk, tukang kayu dan kesegaran jasmani. Dengan demikian jelas bahwa di samping tugas pendidikan formal (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama) yang ada mendidik anak-anak di sekolah sesuai dengan kurikulum, maka juga diadakan pendidikan ketrampilan seperti misalnya pengenalan makanan bergizi, kesehatan lingkungan, jahit-menjahit, pertukangan kayu, cara-cara mengolah sawah/ladang, kesegaran jasmani dan sebagainya yang pada hakekatnya ditujukan agar masyarakat pada umumnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Sugesti sosial merupakan salah satu sarana untuk mempertebal keyakinan. Dalam hal ini para orang tua-tua atau tokoh masyarakat biasa menyampaikan dongeng-dongeng baik dalam lingkungan keluarga maupun di dalam upacara-upacara tertentu. Dongeng yang cukup terkenal adalah mengenai kisah Burung Garuda. Burung Garuda di sini merupakan tunggangan putri kayangan yang menyampaikan amanat Dewa kepada penduduk Gintu di Lore Selatan. Kisah itu antara lain bahwa seluruh penduduk harus memelihara dengan baik sungai Malei dan sungai Lariang sebagai sumber kehidupan. Barang siapa yang tidak ikut memelihara dan melaksanakan amanat ini akan mendapat bahaya. Tegasnya bahwa barang siapa yang berbuat jahat akan ditelah oleh sungai Malei dan sungai Lariang. Di samping dongeng juga dikenal cerita rakyat seperti cerita ular kembar. Cerita rakyat ini dikenal luas oleh suku bangsa komunitas kecil ini. Salah satu turunan Raja (*Tuana*) melahirkan kembar ular (yang satu manusia jenis kelamin laki-laki dan kembarnya adalah ular). Tetapi ular itu berkelakuan manusia dan selalu menolong setiap manusia yang susah, asalkan orang itu baik kepadanya. Bahkan ular itu selalu menjaga keturunan raja di wilayah ini dari segala bencana. Juga dikenal pepatah yang cukup besar artinya dalam kehidupan masyarakat seperti pepatah yang berbunyi: *Patekna mampo wuakke halemu heneike masumba hang kaku ondea*, artinya: tubuh kita harus berbuahakan biji peluh baru mendapat sesuap nasi. Ini berarti setiap orang harus bekerja keras. Dari ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa setiap manusia harus berbuat baik, harus tolong-menolong antara sesama manusia dan setiap manusia harus bekerja

keras untuk mendapatkan sesuatu.

Propaganda merupakan salah satu media untuk meyakinkan seseorang. Di dalam setiap kesempatan di mana ada pertemuan-pertemuan di wilayah ini baik di Kecamatan maupun di desa maka tokoh-tokoh formal (Camat dan Kepala Desa) serta tokoh-tokoh masyarakat (orang tua-tua desa, tokoh adat dan tokoh agama) senantiasa menggugah masyarakatnya agar selalu menghargai waktu, bekerja keras, mempertebal rasa keagamaan, mempertinggi solidaritas kegotongroyongan, saling menghormati dan senantiasa membantu Pemerintah agar kehidupan dapat lebih aman, sejahtera serta berkeadilan sosial.

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa kepercayaan dan agama pada komunitas kecil ini sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat. Seperti dalam kepercayaan masih dikenal luas upacara-upacara magis religius seperti upacara daur hidup (mulai lahir sampai mati), upacara petanian, upacara mendirikan rumah baru, upacara selamatan panen. Pada dasarnya komunitas kecil di sini masih tetap meyakini dan melaksanakan dengan baik seluruh tata upacara tersebut di atas. Apabila ada seseorang yang berani melanggar atau acuh tak acuh dalam melaksanakan tata upacara tersebut, maka di dalam dirinya akan timbul perasaan berdosa. Bahkan apabila ada yang terang-terangan menentang upacara-upacara itu, maka pasti akan tersisih dan terisolir dalam kehidupan masyarakat. Karena itu upacara-upacara ini selalu dilaksanakan dengan baik dan dilakukan dengan gotong royong tanpa kecuali. Misalnya dalam upacara selamatan panen yang disebut *Wunta* seluruh rakyat dalam wilayah ini secara bersama-sama ikut bertanggung jawab, ikut berpartisipasi, ikut sebagai peserta untuk suksesnya upacara *Wunta* itu. Demikian pula apabila ada upacara perkawinan atau kematian. Khusus mengenai kehidupan keagamaan pada komunitas kecil ini sama dengan kehidupan kepercayaan di atas. Yang jelas bahwa dengan agama diarahkan untuk lebih mempertebal keyakinan dan rasa keagamaan, menjauhi segala larangan agama dan mengamalkan segala sesuatu yang dilanjutkan dalam agama. Dalam hal ini dapat dilihat perwujudannya dalam kehidupan masyarakat seperti misalnya perayaan hari-hari besar keagamaan (Hari Natal, Paskah, Idul Fitri, Idul Adha), senantiasa dirayakan dengan husyu' sebagai tanda pengabdian yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wujud lain yang dapat dilihat bahwa di wilayah Komunitas kecil ini dibentuk berbagai perkumpulan/persatuan yang sifatnya membina kehidupan keagamaan seperti misalnya Persatuan Pemuda Gereja, Persatuan Baqak Gereja, Persatuan Ibu-ibu

Gereja di samping adanya wadah yang lebih besar yaitu Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dengan demikian peranan agama pada komunitas kecil suku bangsa Lore ini khususnya di lokasi penelitian ini sangat besar. Bahkan Gereja Kristen Sulawesi Tengah telah mendirikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Gintu, ibukota Kecamatan Lore Selatan.

MEMBERI IMBALAN

Memberi imbalan merupakan salah satu usaha untuk pengendalian sosial. Imbalan di sini meliputi antara lain imbalan yang konkrit, imbalan dalam kepercayaan dan imbalan dalam agama.

Imbalan yang konkrit dapat berupa imbalan material dan non material. Imbalan material biasanya diberikan bagi mereka yang menunjukkan prestasi baik di lingkungannya seperti pemenang *Lomba Desa*. Imbalan yang diberikan di sini antara lain berupa uang, obat-obatan, alat-alat pertanian, pupuk. Selain lomba desa juga karena mereka berpartisipasi dan menunjukkan prestasi di dalam menunjang program Pemerintah. Dalam hal ini diberi imbalan berupa uang, lampu petromaks, bendera, alat-alat pertanian dan sebagainya. Partisipasi dan prestasi di sini adalah dari kelompok-kelompok kerja yang ada dalam setiap desa. Selain mendapat imbalan yang bersifat material, mereka memperoleh pula imbalan dalam bentuk non material seperti piagam penghargaan, fasilitas meninjau tempat-tempat lain di Kabupaten dan Propinsi se Sulawesi Tengah. Imbalan ini diberikan karena mereka memperlihatkan prestasi dan dedikasi dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah. Imbalan yang diperoleh ini sangat besar arti dan peranannya, justru akan mendorong seluruh masyarakat untuk berkompetisi secara sehat, dalam rangka memperlihatkan usaha-usaha positif mereka membina wilayah atau desanya masing-masing.

Imbalan dalam kepercayaan.

Imbalan di sini diperoleh apabila seseorang bersikap dan bertindak laku sesuai dengan kepercayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Artinya tetap setia dan taat serta patuh melaksanakan upacara-upacara adat, upacara religius yang masih berlaku sebagai norma dan nilai budaya masyarakatnya. Mereka di sini akan mendapatkan penghormatan dan dihormati oleh masyarakat pada umumnya. Mereka diberi jabatan sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat. Mereka inilah yang selalu memimpin upacara-upacara daur hidup, upacara per-

tanian, upacara mendirikan dan ~~menaik~~ rumah baru dan lain-lain upacara keagamaan/kepercayaan lainnya Mereka cukup besar peranan dan pengaruhnya di lingkungan masyarakat komunitas kecil ini.

Imbalan dalam agama.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa pada komunitas kecil suku bangsa Lore agama terbesar yang dianut adalah agama Kristen (kurang lebih 98%) sedangkan 2% lainnya adalah Islam. Imbalan yang diperoleh apabila seseorang bersikap, bertindak laku sesuai dengan ajaran agama yang dianut ialah mereka itu dihormati oleh seluruh masyarakat. Yang Kristen mendapatkan gelar *Pendeta*, atau *Penatua*, sedangkan yang Islam mendapatkan gelar *Ustaz* atau *Kyai*. Mereka ini termasuk golongan yang cukup dimuliakan dan dihormati oleh masyarakat lingkungannya, dan mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat besar.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Bahwa rasa malu merupakan salah satu aspek yang berpengaruh besar dalam pengendalian sosial, sebab rasa malu adalah suatu rintangan untuk berbuat, bertindak laku di luar nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas kecil suku bangsa Lore ini. Karenanya makin besar rasa malu, makin besar kemungkinan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, dan sebaliknya sebagai alat pendorong untuk bertindak laku sesuai kebiasaan di lingkungannya. Dalam hubungan inilah akan dicoba menguraikan dan mengungkapkannya melalui: peranan gunjing, peranan kepercayaan dan peranan agama.

Peranan gunjing.

Gunjing di sini sering dilakukan di tempat-tempat seperti di sungai (tempat mandi dan cuci umum), di tempat-tempat pekerjaan bersama (kerja kelompok) misalnya di sawah, di ladang, dan lokasi pekerjaan lainnya, dan tempat-tempat upacara tertentu. Yang dipergunjingkan di sini adalah kelakuan seseorang, atau kelompok orang yang tidak mematuhi nilai-nilai, norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya, misalnya seseorang yang enggan menghadiri upacara-upacara adat, enggan mengikuti kerja kelompok atau selalu memperlihatkan sikap dan kelakuan yang tidak senonoh, suka mengganggu orang lain, kikir, suka hidup sendiri, tidak menghormat

mati hak orang lain dan sebagainya. Biasanya hasil gunjingan ini akan berkembang dari mulut ke mulut dan membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang kena gunjingan itu. Biasanya pengaruh gunjing ini dapat merubah sikap dan tingkah laku seseorang, namun harus diakui bahwa masih ada juga orang yang kebal akan gunjing ini.

Peranan kepercayaan.

Adapun perbuatan-perbuatan yang memalukan menurut kepercayaan di wilayah komunitas kecil suku bangsa Lore ini ialah, sikap acuh tak acuh terhadap penyelenggaraan suatu upacara tradisional yang dianut oleh masyarakatnya. Misalnya tak acuh terhadap upacara selamatan padi (Wunta), tak acuh terhadap upacara pertanian lainnya, tak acuh terhadap upacara perkawinan, kematian dan sebagainya. Orang yang acuh tak acuh tersebut akan diisolir oleh masyarakatnya sehingga pada akhirnya yang bersangkutan merasa berdosa bahkan tersisih dalam kehidupan masyarakat. Biasanya peranan kepercayaan ini dapat menggugah masyarakat untuk mempertebal rasa malu.

Peranan agama.

Pada hakekatnya uraian di sini sama dengan peranan dalam kepercayaan sebagaimana disebutkan di atas. Adapun perbuatan-perbuatan yang memalukan menurut agama yang dianut oleh masyarakat di wilayah ini juga sikap acuh tak acuh terhadap penghayatan dan pengamalan agama itu sendiri. Misalnya seseorang lebih mementingkan tinggal di rumah atau bekerja pada hari Minggu daripada pergi ke gereja, atau tinggal di rumah pada hari Jumat daripada pergi ke mesjid. Atau acuh tak acuh terhadap perayaan hari-hari besar keagamaan baik Kristen maupun Islam. Biasanya orang yang demikian ini diisolir dan disisihkan dalam kehidupan masyarakat. Artinya mereka itu tidak ditegur, tidak diikutsertakan dalam kegiatan bersama, tidak dikunjungi kalau sakit dan sebagainya. Kalau terjadi hal yang demikian maka yang bersangkutan akan merasa malu sendiri, merasa sangat berdosa. Kalau ini yang terjadi maka jelas bahwa peranan agama dalam mempertebal rasa malu cukup besar.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Salah satu bentuk dalam pengendalian sosial adalah mengembangkan rasa takut, justru rasa takut merupakan salah satu aspek yang perlu

dikembangkan agar masyarakat tidak berbuat dan bersikap di luar nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalam komunitas kecil ini. Oleh karena itu dalam melukiskan perkembangan rasa takut di sini ada tiga faktor yang penting dan perlu diperhatikan, yaitu faktor kepercayaan, agama dan hukum adat.

Kepercayaan.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kepercayaan di sini adalah meremehkan atau tidak mentaati tata upacara yang dianut oleh masyarakat. Seperti tidak mau ikut dalam upacara selamatan panen (*Wunta*), upacara naik rumah baru, enggan ikut bersama-sama secara gotong royong dalam setiap upacara yang diharuskan dan merupakan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diharuskan ialah mengikuti dan taat melaksanakan setiap upacara yang berlaku dalam lingkungan masyarakat seperti diharuskan ikut bersama-sama secara gotong royong berpartisipasi demi suksesnya upacara itu.

Bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh kepercayaan di sini, sanksinya adalah sanksi moral berupa beban psikologis, beban perasaan penuh dosa. Hal ini akan dirasakannya setelah yang bersangkutan dipencilkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Jadi diberi hukuman sosial. Hukuman sosial ini mempunyai pengaruh cukup besar mendidik orang yang berbuat seperti tersebut di atas, sehingga biasanya hasilnya dapat dilihat adanya perubahan tingkah laku dan sikap terhadap pentingnya menghayati kepercayaan yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Agama.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama tentunya semua larangan agama itu sendiri, seperti mencuri, menipu, zina, berhati dengki, mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diharuskan adalah menolong sesama manusia, mengabdikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan Taqwa yang sebenarnya, menjauhi segala laranganNya, dan mematuhi seluruh ketentuan yang digariskan oleh agama. Bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sanksinya adalah adanya perasaan yang diliputi dengan dosa besar, sehingga merupakan suatu sanksi moral yang selalu mengejar-ngejarnya di dalam perjalanan hidupnya. Di dunia ini tidak akan diberikan sanksi secara langsung dan nyata tetapi sanksi

di sini berupa hukuman sosial. Hal ini akan dirasakan oleh yang bersangkutan apabila dia sudah disisihkan dan dipencilkan dalam kehidupan masyarakat lingkungannya. Sedangkan sanksi sesudah mati nanti ialah siksaan Tuhan yang tiada taranya. Apabila sanksi ini dirasakan oleh yang bersangkutan maka cepat atau lambat akan mempengaruhinya, sehingga peranan dan pengaruhnya akan terasa, terutama akan menggugah yang bersangkutan untuk merubah sikap dan tingkah lakunya selama ini, dan menyadari segala kesalahan dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya.

Hukum adat.

Hukum adat di sini sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan adat istiadat yang berlaku pada komunitas kecil ini. Adat istiadat di sini sesungguhnya identik dengan aturan, nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat komunitas kecil suku Lore yang tercermin pada upacara-upacara adat yang sejak lama hidup, dan adat kebiasaan yang mereka pupuk dan agungkan. Upacara-upacara adat seperti dalam bidang pertanian, dalam bidang daur hidup, dalam bidang pembuatan rumah baru, menaiki rumah baru dan sebagainya itu, merupakan suatu nilai budaya, dan juga sebagai norma dan aturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat lingkungannya. Ini berarti bahwa kepercayaan yang hidup selama ini dilestarikan melalui hukum adat yang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Dari pengertian di atas, maka perbuatan-perbuatan orang atau individu yang dianggap melanggar adat istiadat sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketegangan dalam masyarakat seperti mengadakan zina, kawin lari, membunuh, tidak melaksanakan tata upacara adat yang ada, berbuat seenaknya, mencuri, merampok dan sebagainya itulah perbuatan yang dilarang oleh hukum adat. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diharuskan di sini ialah agar seluruh masyarakat menjaga ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dengan jalan mentaati seluruh norma dan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan adat kebiasaan masyarakatnya yang selama ini tetap tumbuh dan berkembang dan tetap terpelihara baik. Bagi individu yang melakukan perbuatan melanggar adat istiadat atau hukum adat, maka para penguasa adat (pemangku adat) bersama-sama dengan pemimpin formal lainnya (Camat, Kepala Desa) menyelidiki benar tidaknya pelanggaran itu. Apabila perbuatan itu benar-benar melanggar adat istiadat atau hukum adat yang berlaku, misalnya mengadakan zina, atau membunuh, atau kawin lari atautkah melanggar tata

upacara adat yang berlaku, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan di sini didasarkan berat ringannya hasil perbuatan orang itu. Kalau sangat berat maka sanksinya ialah orang itu dijadikan budak (*Hawik*) pada zaman dahulu, tetapi sekarang orang yang bersangkutan didenda harus membayar 7 ekor kerbau dan seperangkat alat-alat rumah tangga, alat-alat keperluan wanita. Bahkan sekarang ini biasanya dilimpahkan kepada pengadilan agama atau aparat Pemerintah lainnya untuk memutuskan hukuman itu. Tetapi apabila pelanggaran tersebut ringan, maka sanksinya juga ringan, misalnya kerja bakti dalam waktu tertentu di tempat Ketua Adat atau di tempat pemimpin formal lainnya. Sanksi ini diberikan sebagai usaha untuk mendidik masyarakatnya dalam rangka usaha mentaati adat kebiasaan/hukum adat yang berlaku, sebab dengan mentaati seluruh hukum adat itu, berarti ikut bersama-sama memelihara ketentraman, memelihara kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Oleh karena itu pemberian sanksi bagi yang melanggar di sini mempunyai pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat.

VI. BEBERAPA ANALISA

Dalam sub bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan uraian terdahulu mengenai Bentuk, Sistem Pelapisan Sosial, Pemimpin masyarakat dan Pengendalian sosial serta perubahan-perubahan nilai yang terjadi dalam proses perkembangannya.

BENTUK KOMUNITAS KECIL

Dari uraian-uraian di muka nampak bahwa sudah ada perubahan bentuk Komunitas Kecil suku bangsa Lore di lokasi Penelitian. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri dengan adanya batas wilayah administrasi, batas wilayah alam, namun dari segi dialek bahasa penduduk tidak mengalami perubahan.

Mengenai sistem pemerintahan sudah banyak mengalami perubahan, yaitu dari sistem pemerintahan kerajaan menjadi Distrik dan kemudian menjadi swapraja dan pada akhirnya menjadi Kecamatan, Rukun Kampung dan Rukun Tetangga.

Sedangkan perangkat adat tetap masih dikenal adanya lembaga Adat, hanya saja bukan lagi raja (*Tuana*) sebagai pusat dari adat itu, tetapi dipimpin secara kolektif di mana anggota Lembaga Adat ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun non formal,

tokoh adat, tokoh agama. Dan khusus mengenai bangunan adat sebagai tempat upacara adat tetap menggunakan *Duhunga*. Hanya jumlah *Duhunga* sudah sangat langka dibandingkan pada waktu silam.

Lembaga adat ini tidak begitu berperan lagi, justru masalah adat sudah banyak ditangani oleh aparat pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama di Kecamatan.

Mengenai atribut-atribut komunitas kecil seperti simbol-simbol masih dikenal walaupun sudah terbatas seperti pakaian-pakaian raja/bangsawan. Biasanya dipakai pada waktu ada upacara daur hidup. Demikian pula bangunan khusus sudah sangat terbatas seperti *Duhunga*.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Sistem pelapisan sosial komunitas kecil suku bangsa Lore juga mengalami perubahan yang cukup mendasar setelah melalui suatu proses yang panjang. Sekarang ini tidak dikenal lagi istilah atau gelar *Tuana* (Raja), *Kabilaha*, *Pabisara*, *Tauna Maroa* dan *Hawik*. Yang dikenal adalah Pak Camat di tingkat Kecamatan dan *Kepala* di tingkat Desa. Selain Pak Camat dan Pak Kepala masih dikenal tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dan terutama tokoh-tokoh agama (*Pendeta*, *Juru Jemaat*). Karena itu dalam kehidupan kemasyarakatan maka Pak Camat/Kepala Kampung mutlak perlu mengadakan hubungan baik dengan tokoh-tokoh adat dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya, justru tokoh-tokoh non formal ini tetap berakar dan dihormati oleh penduduk.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan pelapisan sosial ini antara lain adalah:

1. Karena desakan faktor agama, di mana faktor agama ini secara bertahap menggeser kepercayaan agama Khalaik (agama nenek moyang) yang bersumber dari kepercayaan *Tomanuru* yang dianut oleh masyarakat pendukungnya.
2. Karena faktor pendidikan agama dan perubahan sistem pemerintahan.

Walaupun terjadi perubahan-perubahan tersebut maka ciri kepribadian masyarakat yang tetap melekat adalah jiwa kegotongroyongan masyarakat.

PIMPINAN MASYARAKAT

Pergeseran bentuk dan struktur pemerintahan yang berlaku pada

komunitas kecil suku bangsa Lore membawa pula perubahan-perubahan dalam bidang pemimpin masyarakat.

Kalau dahulu *Pabisara* (Ketua adat) dan *Kabilaha* (Panglima Perang) merupakan tangan kanan Raja (Tuana), maka sekarang ini hanya dikenal *Lembaga Adat* yang harus bekerjasama dengan Pemerintah (Camat, Kepala Kampung), dan khususnya bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama dalam sektor Kepolisian setempat.

Lembaga Adat ini dewasa ini banyak bergerak dalam masalah yang menyangkut implikasi yang timbul dari sengketa mengenai harta warisan, ketertiban masyarakat, dan bidang kemasyarakatan lainnya. Tetapi Lembaga Adat ini tidak *otonom*, justru masih harus bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, sektor Kepolisian dan Koramil setempat dan bertanggung jawab kepada Camat.

Karena itu jelas pemimpin tradisional yang dikenal dahulu semakin tidak berperan secara maksimal, justru tugas-tugasnya banyak diambil alih oleh instansi formal.

Perubahan ini terjadi oleh karena:

1. Semakin baiknya sistem pemerintahan di desa-desa, di mana aparat-aparat pemerintahan semakin lengkap khususnya dalam bidang kemasyarakatan, yang mempersempit tugas pemimpin tradisional.
2. Pengaruh pendidikan yang menggeser peranan tokoh-tokoh tradisional yang pada umumnya tidak berpendidikan formal. Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak pemimpin tradisional difungsikan dan diberi peranan dalam setiap upacara adat di desa-desa.

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Sistem pengendalian sosial juga mengalami perubahan. Hal ini justru disebabkan karena adanya perubahan sistem nilai dalam kehidupan masyarakat. Sistem nilai tradisional sudah tergeser dalam kehidupan generasi muda, justru dengan kehidupan dan kemajuan dewasa ini. Di sini efek positif daripada pembangunan di pedesaan yang sudah mulai dirasakan hasil-hasilnya.

Kenyataannya kepercayaan yang bersifat magis-religius sudah mulai terdesak dan digantikan oleh peranan kehidupan keagamaan. Adapun faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut adalah:

1. Perkembangan ekonomi yang semakin baik.
2. Hubungan dengan dunia luar sudah mulai terbuka, walaupun masih rendah frekwensinya.
3. Pendidikan masyarakat yang sudah agak maju.
4. Adanya kecenderungan masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah dan penanganan kehidupan sosial budaya dan pemerintah.

Namun demikian masih tetap tegaknya nilai-nilai luhur daripada masyarakat, justru mereka merasa malu dan takut apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang hidup selama ini.

Kesimpulan.

Bahwa salah satu komunitas di daerah Sulawesi Tengah ini adalah komunitas suku bangsa Lore yang sudah lama dikenal. Suku bangsa ini memiliki potensi nilai budaya dan sistem budaya yang cukup besar. Potensi nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya komunitas kecil suku bangsa Lore tersebut perlu dibina, dikembangkan bahkan dilestarikan bahkan dilestarikan sebagai milik nasional.

Bahwa komunitas ini telah lama menumbuhkan sikap demokratis dalam sistem pemerintahan yang dianutnya (Kerajaan) di mana sudah lama dikenal adanya lembaga eksekutif dan legislatif.

Bahwa dalam komunitas ini sudah lama dikenal adanya sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial yang pada hakekatnya merupakan alat untuk membina masyarakat dan sebagai wujud nyata dari keberadaan komunitas kecil tersebut di dalam membina kehidupan untuk tumbuh dan berkembang.

Saran-saran.

Untuk lebih mendalami esensi hakiki daripada komunitas kecil ini dari segala aspeknya, maka perlu diadakan penelitian mendalam dan bersifat analistis tentang:

1. Upacara-upacara tradisional dengan segala aspeknya.
2. Peninggalan-peninggalan purbakala khususnya peninggalan *Megalith* yang banyak terdapat dan dimiliki oleh komunitas suku bangsa Lore.

3. Hukum adat yang berlaku pada suku bangsa Lore.
 4. Asal-usul dan hubungannya dengan bangsa Kulawi.
 5. Perbandingan mengenai: Sistem pemerintahan masa lalu dengan masa kini, sistem pelapisan sosial masa lalu dan masa kini dan pimpinan masyarakat tradisional dan pimpinan masyarakat masa kini.
-

BAB KEEMPAT
KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA BUOL
I. IDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan keadaan geografis

Letak administrasi suku bangsa Buol, dapat dilihat pada peta terlampir, dengan batas-batas: di sebelah utara dengan Laut Sulawesi, di sebelah timur dengan Kabupaten Gorontalo (Sulawesi Utara), di sebelah selatan dengan Kabupaten Gorontalo (Sulawesi Utara) dan di sebelah barat dengan Kecamatan Baolan Galang dan Toli-toli Utara (Dati II Buol-Toli-toli). Sedangkan letak komunitas kecil suku bangsa Buol di lokasi penelitian adalah di Kecamatan Biau khususnya desa Buol (desa tertua). Mengenai letak geografis maka suku bangsa Buol ini mendiami wilayah yang terletak antara $0^{\circ} 20'$ – $1^{\circ} 20'$ lintang utara dan 120° – $122^{\circ} 20'$ bujur timur. di mana wilayahnya terletak sepanjang pesisir pantai yang merupakan tempat bermuaranya beberapa sungai kecil. Sebagian kecil wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan.

Keadaan alam fauna di lokasi penelitian pada umumnya hampir sama dengan di daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tengah, misalnya di daerah ini dikenal dan dijumpai binatang-binatang buruan seperti rusa, babi, babi rusa, bermacam-macam ular dan burung. Di samping binatang tersebut, maka penduduk di wilayah ini memelihara sapi dan kuda untuk digunakan sebagai tenaga kerja dan untuk dijual. Sedangkan alam flora, juga pada umumnya sama dengan daerah tropis lainnya. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil kelapa dan cengkeh yang sangat potensial dan merupakan bahan komoditi yang cukup besar. Di hutan-hutan dikenal berbagai macam kayu lunak, rotan, damar dan kayu manis. Juga cukup banyak tumbuh pohon enau yang merupakan sumber bahan gula merah.

Pola perkampungan.

Mengenai pola perkampungan suku bangsa Buol, pada mulanya mereka hidup mengelompok padat pada pusat-pusat perkampungan. Dalam perkembangannya mereka menyebar luas sesuai dengan perkembangan penduduk dan pola permukiman, di mana dewasa ini pola

perkampungan mereka merupakan campuran antara pola mengelompok padat dengan pola menyebar luas.

Sedangkan pola perkampungan di lokasi penelitian, sama saja dengan pola perkampungan suku bangsa Buol pada umumnya, di mana dewasa ini telah mengalami banyak perubahan, justru karena adanya pengaruh dari luar. Namun secara singkat dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bangunan-bangunan antara lain ialah rumah tempat tinggal, Rumah Adat, dan tempat-tempat ibadah (mesjid dan gereja). Rumah tempat tinggal terdapat di seluruh desa yang cukup teratur, sedangkan rumah adat terdapat di pusat desa yang biasanya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Raja atau keturunannya. Demikian pula rumah-rumah ibadah pada umumnya terletak di pusat desa. Bangunan tersebut jelas fungsinya, seperti rumah tempat tinggal, mesjid dan gereja sebagai tempat ibadah, sedangkan rumah adat berfungsi sebagai tempat upacara-upacara adat, seperti penyelesaian perkara-perkara yang timbul dalam desa, upacara-upacara selamatan panen, pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh adat dan sebagainya. Sedangkan bahan-bahan bangunan tersebut pada umumnya terdiri dari kayu, mulai dari tiang sampai lantai dan kerangkanya, sedangkan atapnya dari rumbia dan terakhir ini dari seng. Mengenai strukturnya ialah bahwa rumah tempat tinggal adalah rumah panggung (bertiang) di mana sudah dikenal ada kamar tamu dan kamar-kamar tidur serta dapur. Biasanya bagian depan rumah ada beranda untuk tempat istirahat atau untuk menerima tamu. Rumah adat juga berupa rumah panggung di mana di dalamnya terdiri atas satu ruangan besar yang merupakan tempat upacara atau musyawarah para tokoh adat dan tokoh masyarakat. Mendirikan bangunan-bangunan tersebut pada umumnya dengan cara gotong royong, di mana pada permulaan pembangunannya ditangani oleh para tukang yang memang ahli untuk itu. Setiap komponen bangunan diusahakan secara gotong royong, seperti tiang, balok, rangka, lantai, dinding, atap dan sebagainya. Belum ada ukiran yang menonjol dalam bangunan itu.

Mengenai tempat-tempat tertentu pada komunitas kecil suku bangsa Buol di lokasi penelitian ini adalah sudah adanya lapangan-lapangan yang terletak di pinggiran desa, demikian pula kuburan-kuburan yang terletak pula di pinggiran desa. Demikian pula dikenal tempat-tempat upacara khusus seperti di sawah atau di ladang. Upacara ini khusus untuk upacara selamatan panen atau upacara selamatan yang berhubungan dengan berhasilnya panen atau pekerjaan dalam pertanian.

Sekarang tempat upacara ini sudah tidak dikenal lagi, sebab semua upacara adat dilakukan di rumah adat yang terdapat di desa.

Mengenai jalan-jalan dapat dikemukakan bahwa jalan adalah jalan daratan, jalan sungai dan laut. Jalan darat ada satu jalur jalan Propinsi, satu jalur jalan daerah dan beberapa jalan desa sendiri. Sedangkan jalan sungai terdapat di desa Buol, yaitu sungai Buol yang berfungsi sebagai pelabuhan motor-motor laut dan perahu-perahu. Sungai Buol ini merupakan lalu-lintas penduduk baik dari luar desa melalui laut, maupun dari desa Buol sendiri dari udik ke muara dan sebaliknya. Sedangkan jalan laut ialah bahwa lokasi penelitian ini terletak di pantai maka perhubungan laut juga memegang peranan penting, di mana cukup banyak motor laut dan perahu yang menyinggahi desa Buol yang memang terletak di pantai.

Mengenai batas-batas dalam desa itu sendiri, seperti pagar dibuat penduduk secara baik dan teratur. Setiap rumah mempunyai pagar. Demikian pula antara satu ladang dengan ladang yang lain juga ada pagar. Juga antara sawah dengan sawah dibuat parit. Parit ini juga berfungsi sebagai jalan air untuk sawah-sawah. Mengenai pagar yang dibuat itu berfungsi sebagai alat untuk menghindari masuknya binatang ke dalam halaman rumah atau masuk ke dalam kebun.

Mengenai tempat mandi, pada umumnya mereka mandi di sungai. Sungailah merupakan tempat mandi umum, di mana biasanya di pinggir sungai dibuat sumur khusus untuk air minum dan atau untuk cuci. Untuk tempat mandi ini dibuat secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tempat mandi di sungai ini juga berfungsi sebagai media komunikasi antara mereka. Di tempat inilah mereka banyak membicarakan keadaan kehidupan dan keadaan sosial kemasyarakatan dari mereka itu, baik yang positif maupun yang negatif.

P E N D U D U K

Gambaran umum tentang suku bangsa Buol.

Sebagaimana diketahui suku bangsa Buol ini mendiami lima wilayah Kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada di Daerah Tingkat II Buol-Toli-toli. Jumlah penduduk suku bangsa Buol diperkirakan 55.00 jiwa. Penduduk ini mendiami atau bermukim di Kecamatan Biau, Momunu, Bokat, Bunobugu dan Paleleh (lihat uraian pada bab pendahuluan), dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta terlampir. Hubungan dengan daerah-daerah lain masih sangat terbatas, di mana

pada umumnya banyak menggunakan perhubungan laut, sedangkan perhubungan darat masih sangat sulit. Jalan darat antara ibukota Propinsi ke Wilayah Buol ini belum ada. Demikian pula antara ibukota Kabupaten Buol-Toli-toli ke wilayah yang didiami oleh suku bangsa Buol masih sangat terbatas perhubungank daratnya. Tegasnya belum ada jalan yang dapat digunakan untuk kendaraan roda empat. Dengan demikian wilayah suku bangsa ini hanya dapat dijangkau dengan perhubungan laut semata. Dari keadaan perhubungan tersebut bukan berarti bahwa suku bangsa ini terlalu terisolir, tetapi sudah cukup banyak suku bangsa Buol yang hidup di daerah lain terutama di wilayah Kabupaten Donggala, khususnya Palu, dan juga di daerah-daerah lain seperti di Ujung Pandang, di Jawa. Mereka terdiri dari para pelajar dan mahasiswa dan sebagai pedagang, walaupun jumlahnya masih kecil. Khususnya di daerah Toli-toli suku bangsa Buol ini cukup banyak yang memegang peranan penting baik dalam pemerintahan, pendidikan dan perdagangan. Dengan demikian jelas bahwa suku bangsa Buol ini sudah mengarah kepada kadar mobilitas dan penyebaran yang agak meluas walaupun harus diakui masih terbatas kepada para pelajar, pedagang dan aparat pemerintahan.

Gambaran penduduk suku bangsa Buol di lokasi penelitian.

Jumlah penduduk di lokasi penelitian diperkirakan 1.500 orang, di mana keadaan pendidikannya rata-rata tamatan Sekolah Dasar atau sudah tahu membaca dan menulis. Penduduk asli diperkirakan kurang lebih 1.350 orang atau 90%, dan sisanya adalah pendatang seperti dari Gorontalo, dari Bugis dan Toli-toli. Pekerjaan penduduk asli pada umumnya adalah bertani dan berkebun. Hasil utama ialah kelapa dan cengkeh. Kedua hasil ini merupakan komoditi terbesar daerah ini. Di samping itu ada pula sebagian kecil sebagai nelayan khususnya bagi mereka yang hidup di pantai. Ada pula sebagian kecil yang hidup sebagai pedagang. Mengenai penduduk pendatang yang jumlahnya kurang lebih 10% pada umumnya juga sebagai petani kelapa dan cengkeh, di samping sebagai nelayan atau pedagang kecil. Mereka datang ke wilayah ini karena sangat tertarik akan kesuburan tanah khususnya untuk penanaman cengkeh dan kelapa. Mengenai hubungan penduduk asli dan pendatang dapat digambarkan sebagai berikut:

Hubungan mereka cukup baik, tidak ada perbedaan di antara mereka, mereka saling menghormati, bahkan kadang-kadang pendatang yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan khusus ditiru oleh

penduduk asli, misalnya ketrampilan menangkap ikan, menanam kelapa dan cengkeh. Pada umumnya mereka bekerjasama dan bergotong royong dalam segala bidang pekerjaan. Sudah tidak kelihatan mana yang pendatang dan mana yang asli dalam bidang kegiatan sehari-hari. Demikian pula dalam hubungan perkawinan sudah tidak ada masalah. Jadi perkawinan antara pendatang dengan penduduk asli sudah dianggap biasa saja. Frekwensi perkawinan di antara mereka cukup tinggi setiap tahun, sehingga asimilasi di antara mereka semakin akrab, apalagi bagi pendatang yang sudah cukup lama dan berhasil di daerah ini. Demikian pula halnya dalam hubungan pekerjaan. Mereka dalam bekerja sudah tidak terpisah-pisah. Pada umumnya mereka diikat dalam kegiatan gotong royong yang sangat baik dan lancar. Tidak ada masalah dalam bidang hubungan pekerjaan ini, justru kehidupan gotong royong sebagai ciri kepribadian di wilayah ini sama-sama ditegakkan dengan baik oleh kedua belah pihak. Dari gambaran di atas, jelaslah bahwa partisipasi pendatang dalam kegiatan sosial di lokasi penelitian cukup besar, justru mereka sudah merasakannya sebagai penduduk yang tidak asing lagi. Mereka sudah dapat merasakan kebiasaan-kebiasaan dan dapat menghayati norma dan pranata sosial yang berlaku dalam komunitas kecil ini. Dengan gambaran tersebut di atas jelaslah pula bahwa penduduk pendatang ini dapat menyesuaikan diri dengan penduduk asli dalam segala aspek kehidupan, bahkan kadang-kadang penduduk pendatang itu dapat dijadikan contoh oleh penduduk asli, justru karena penduduk pendatang itu pada umumnya ulet dan tabah dalam segala kehidupan yang dihadapinya.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Latar belakang sejarah

Sesuai informasi yang diperoleh, tanah Buol berasal dari bahasa Buol yaitu "*BOELA*". Semula lokasi wilayah ini didiami oleh lima kelompok manusia yang saling berselirih faham. Karena perselisihan itu tidak henti-hentinya, akhirnya timbul marabahaya alam berupa terjadinya guntur yang hebat, kilat sambung-menyambung, badai dan hujan lebat yang turun yang tidak henti-hentinya sehingga menimbulkan banjir besar. Para penduduk diliputi rasa takut dan mereka panik mencari perlindungan. Mereka berusaha mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindar dari bahaya. Dalam keadaan yang panik itulah muncul segumpal tanah yang hitam yang kemudian di atas tanah tersebut terlihat seorang perempuan yang diselimuti oleh awan, duduk di

atas sebuah batu hitam yang dalam bahasa Buol disebut *Tonggo Tau* artinya satu orang. Batu hitam itu terletak di bagian dalam sungai Buol sekarang, dan dikenal luas dengan batu perempuan, atau *batu buaiy*. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, muncul juga seorang laki-laki di sekitar gunung *Pogogul*, yang dikenal dengan nama *Togu Togulo*, artinya orang yang duduk sambil berjongkok. Kedua orang tadi memanggil seluruh penduduk yang sedang panik untuk datang mendekat di gunung *Pogogul*. Dan setelah mereka semua berkumpul lalu kedua orang itu memberikan nasihat dan petunjuk. Nasihat dan petunjuk itu ialah agar penduduk jangan selalu berselisih faham dan bertengkar, dan apabila perselisihan mereka tidak dihentikan maka akan datang lagi bahaya dan bencana yang lebih besar untuk membinasakan seluruh penduduk. Akhirnya penduduk yang berselisih itu mengadakan mufakat untuk mengangkat kedua orang itu menjadi pemimpinnya dan dikukuhkan sebagai Raja dan permaisuri. Pada waktu itu neburut cerita bahaya dan bencana yang mengancam terus berhenti. Pusat kerajaan Boul pada waktu itu terletak di sekitar gunung *Pogogul*. Raja mereka itu diberi nama yang dalam bahasa Buol disebut *Tigino Mandulo* artinya orang yang baru bangkit. Sedangkan permaisurinya bernama *Kibuki Kno Milato*, artinya permaisuri yang bercahaya. Raja inilah yang mempunyai tiga orang anak yakni:

Anong Lipu (laki-laki) yang mempunyai pusaka *Samada* artinya semacam tutup kepala sebagai mahkota kebesaran,

Angga tonobe (perempuan) dengan pusaka *Ummu* artinya semacam penutup kepala bagi perempuan,

Dai Bole (laki-laki) dengan pusaka *Buniya* artinya burung elang yang pandai diperintah. Burung elang ini kemudian menjelma menjadi *Sudang* yang berarti semacam keris berubah.

Demikianlah sejarah asal-mula terbentuknya komunitas kecil suku bangsa Buol, di mana keturunan Raja inilah yang memerintah secara turun-temurun sampai masuknya penjajah Belanda, dan kemudian zaman Jepang. Demikian pula setelah kemerdekaan, di mana pemerintahan kerajaan telah digantikan dengan sistem pemerintahan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Pertumbuhan perkembangan lokasi penelitian komunitas kecil suku bangsa Buol ini dari masa ke masa sesungguhnya bertolak dari keberadaan kampung Buol itu sendiri, justru kampung Buol inilah yang paling tua dan pertama dikenal di wilayah ini. Kampung Buol sebagai lokasi penelitian sudah ada sejak adanya komunitas kecil ini untuk pertama kalinya. Karena itu tidak

mengerankan apabila kenyataan yang dilihat sekarang ini kampung Buol ini terletak di muara sungai Buol , di mana pada sungai Buol itulah tempat munculnya nenek moyang suku bangsa Buol.

Sistem mata pencaharian.

Mata pencaharian utama komunitas kecil pada lokasi penelitian adalah bertani (sawah dan ladang) serta nelayan. Khusus sawah di daerah dataran rendah, demikian pula kelapa. Tanaman kelapa dan cengkeh di lokasi ini sangat menonjol dan merupakan sumber penghasilan dan penghidupan masyarakat. Kelapa dan cengkeh sangat cocok tumbuh di lokasi ini. Nelayan umumnya adalah penduduk yang tinggal di pantai, tetapi mereka membuka pula kebun kelapa dan cengkeh di daerah-daerah pedalaman. Sebagian kecil penduduknya ada juga yang dagang kecil-kecilan.

Sistem kekerabatan.

Pada suku bangsa Buol hanya dikenal keluarga inti dan juga keluarga luas. Keluarga inti atau betih terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Ayah bekerja di sawah dan di ladang dan dibantu oleh anak-anaknya, sedangkan ibu mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga dan biasanya juga membantu ayah pada pekerjaan di sawah atau ladang dengan jalan menyiapkan konsumsi dan kebutuhan bekal lainnya. Ayah dan ibu berkewajiban memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, berkewajiban mengawinkan anaknya yang sudah dewasa. Sedangkan keluarga luas, dapat dilihat pada waktu kehidupan masyarakat dahulu, seperti beberapa keluarga batih menempati sebuah rumah besar. Di sini keluarga batih yang senior yang berkuasa dan mengatur segala-galanya dalam lingkungan keluarga luas itu. Sekarang ini kelihatan bahwa keluarga batih yang membuat rumah sendiri, masih dalam lingkungan satu desa atau sepekarangan. Sehingga hubungan kekerabatan sangat erat. Tegasnya ikatan sosial dalam keluarga luas sangat erat. Ikatan sosial ini mulai dari nenek, ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kemanakan dan cicit dan seterusnya merupakan suatu ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Tetapi yang jelas bahwa keluarga batih yang senior dalam keluarga luas tersebut yang menentukan segala-galanya.

Sistem religi.

Sistem religi di sini adalah agama yang dianut dan kepercayaan

yang hidup dalam komunitas kecil suku bangsa Buol. Adapun agama yang dianut dan jumlah pengikutnya adalah: Agama Islam, jumlah pengikutnya kurang lebih 92% dan selebihnya 8% adalah penganut agama Kristen. Aliran-aliran dalam agama sesungguhnya masih ada seperti Muhammadiyah, pengikut Ahlusunnah Waljamaah, tetapi sudah tidak merupakan masalah besar. Yang jelas bahwa pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat, memperlihatkan suatu kerukunan hidup umat beragama yang cukup baik. Dari kenyataan menunjukkan bahwa antara pemeluk agama senantiasa saling menghormati, demikian pula kerukunan antar umat beragama dan antar umat beragama serta antara umat beragama dengan Pemerintah berjalan dengan baik. Jadi kehidupan umat beragama di lokasi ini sudah melaksanakan dengan baik Trilogi kerukunan umat beragama sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah sekarang ini. Dalam wujudnya dapat dilihat bahwa dalam setiap upacara-upacara keagamaan, kerjasama antara umat beragama senantiasa terlaksana dengan baik. Mereka secara gotong royong membangun mesjid dan gereja, tanpa adanya pikiran saling mencurigai. Keadaan semacam ini berlaku umum untuk suku bangsa buol. Mengenai *kepercayaan yang hidup dalam masyarakat* dapat dikemukakan antara lain, seperti yang terlihat dalam berbagai upacara adat misalnya dalam upacara daur hidup mulai dari kelahiran, masa remaja, perkawinan sampai kematian. Upacara ini masih tetap dibesarkan sebagai warisan yang harus dilestarikan oleh masyarakatnya. Demikian pula dalam upacara naik rumah baru, upacara selamatan panen baik panen padi maupun panen tanaman lainnya. Yang cukup menonjol dalam kepercayaan ini ialah seluruh penduduk suku bangsa Buol tetap percaya akan kebesaran dan kesaktian gunung *Pogogul*. Sehingga selalu merupakan tempat upacara permintaan doa dan keselamatan. Gunung Pogogul adalah tempat yang dianggap keramat, justru tempat inilah sebagai sumber dan asal mula dari nenek moyangnya.

Bahasa.

Mengenai bahasa yang mempunyai relevansi dengan pokok tema di sini dapatlah dikemukakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi, baik dalam suku bangsa Buol maupun dalam komunitas kecil di lokasi penelitian, sering ditandai oleh adanya perbedaan dalam bahasa untuk stratifikasi sosial tertentu dan masyarakat pada umumnya. Penggunaan bahasa untuk stratifikasi sosial tertentu di sini semata-mata sebagai penghormatan antara seorang yang lebih muda kepada orang yang lebih

tua, atau khusus kepada keturunan raja dan orang tua-tua serta tokoh-tokoh masyarakat.

II. BENTUK

CIRI-CIRI KOMUNITAS KECIL

Di sini akan dikemukakan mengenai batas-batas wilayah, legitimasi, atribut-atribut dan ciri-ciri khusus lainnya.

Batas-batas wilayah komunitas kecil ini antara lain batas wilayah alamiah. Tetapi dari segi batas wilayah secara administratif seperti yang telah ditetapkan dalam peta adalah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara, di sebelah selatan juga dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Donggala, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Toli-toli Utara, Baolan dan Galang.

Legitimasi dari komunitas kecil di sini antara lain ialah adanya pakaian adat yang berlaku bagi masyarakatnya, mulai dari tutup kepala, baju, sarung dan beberapa instrumen adat yang harus dipakai dalam upacara adat. Pada setiap upacara adat pakaian ini harus digunakan. Dalam hubungan ini maka jelas dikenal adanya kepemimpinan adat (Pemangku adat), di mana keturunan raja Buol sebagai pemangku adat. Pemangku adat atau tokoh-tokoh adat inilah yang berkewajiban menata pranata sosial, norma sosial dan aturan kemasyarakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat yang ada dalam komunitas kecil ini. Para pemangku adat atau tokoh adat tersebut pada rumah tempat tinggalnya selalu dilengkapi dengan sebuah kentongan (gong) dari kayu. Kentongan ini digunakan/dipukul apabila ingin mengumpulkan rakyat guna keperluan desa.

Atribut-atribut yang mewarnai komunitas kecil ini dapat dilihat dari rumah adat sebagai bangunan khusus yang digunakan untuk bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu perkara yang ada di dalam wilayah komunitas kecil tersebut. Rumah adat ini berbeda bentuknya dengan rumah tinggal. Rumah adat ini selalu berdampingan dengan rumah raja, dan selalu digunakan untuk upacara-upacara adat.

Yang lebih menarik lagi dan menandai komunitas kecil suku bangsa Buol ini adalah pengucapan bahasa lisan yang sama di antara mereka, yang bagi orang yang bukan suku atau komunitas kecil Buol susah untuk dimengerti. Dialek dan intonasi bahasa lisan mereka sangat berbeda dengan suku bangsa lain yang ada di daerah Sulawesi Tengah

STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Komunitas kecil suku bangsa Buol di lokasi penelitian ini sesungguhnya merupakan induk dari komunitas seluruh suku bangsa Buol yang ada. Hal ini justru pada lokasi penelitian inilah sebagai sumber adanya suku bangsa Buol sesuai dengan sejarahnya. Sesuai dengan latar belakang sejarah sebagaimana diuraikan terdahulu, maka komunitas kecil suku bangsa Buol ini menyebar serta tumbuh dan berkembang yang sekarang ini mendiami wilayah 5 kecamatan di wilayah Dati II Buol-Toli-toli. Jadi jelas bahwa komunitas kecil di lokasi penelitian ini adalah induk dari komunitas suku bangsa Buol secara keseluruhan.

PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Pemerintahan adalah suatu perangkat yang ada di dalam suatu komunitas kecil dalam usaha mengatur, mengembangkan dan mengawasi masyarakat dalam suatu komunitas kecil itu. Jadi pemerintahan dalam komunitas kecil itu ikut mewarnai bentuk komunitas kecil itu. Dalam hal ini akan dikemukakan hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan komunitas kecil sebagai berikut:

Sejarah pertumbuhan pemerintahan.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, menurut sejarah pemerintahan komunitas kecil ini pada mulanya diperintah oleh dua orang yang muncul secara tiba-tiba dan diangkat sebagai Raja oleh penduduk yang sedang diancam oleh banjir besar. Jelas bahwa pemerintahan yang ada pada mulanya adalah sistem pemerintahan kerajaan. Keturunan Raja inilah yang memerintah dan dibantu oleh aparat-aparat kerajaan. Dalam perkembangan kerajaan ini sesuai dengan informasi susunan daripada pemerintahan dan aparat-aparat kerajaan adalah: Sultan yang berkuasa secara mutlak, beliaulah sebagai pemegang kekuasaan mutlak. Pada setiap wilayah kekuasaannya beliau dibantu oleh aparat-aparatnya yang terdiri atas: Raja, Pembantu Raja, *Jogugu*, *Kapitan Laut*, *Syahbandar*, *Anak punuh*, *Anak dukuh*, *Kepalaa*, *Mayordoku*, *Mayor Pembantu*, *Juru tulis* dan *Pengawal*. Raja di sini sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Sultan. Dalam melaksanakan tugasnya beliau dibantu oleh Pemangku Adat sebagai aparat yang mengelola pranata sosial, norma sosial dan hukum adat yang berlaku. Dan pemangku adat ini bertanggung jawab kepada Sultan dan Raja. Sistem pemerintahan kerajaan inilah yang digunakan sampai zaman penjajahan Belanda, bahkan sampai kepada zaman

Jepang. Pada zaman Jepang dipergunakan istilah-istilah pemerintahan Jepang seperti *gunco*, *sonco* dan *kuco*. Memasuki zaman kemerdekaan pengaruh kekuasaan raja sudah berkurang dan sistem pemerintahan kerajaan dirubah sesuai dengan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, di mana wilayah kerajaan dahulu sudah berubah menjadi Kecamatan. Perkembangan pemerintahan itu adalah dari Kerajaan menjadi Onder-Distrik kemudian menjadi Kecamatan. Jadi jelas bahwa pada zaman kemerdekaan ini wilayah Kerajaan Buol dahulu telah berubah menjadi Kecamatan yang meliputi 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Biau, Momunu, Bokot, Bunobogu dan Paleleh. Tiap-tiap Kecamatan terdiri atas beberapa desa.

Aparat-aparat.

Aparat-aparat di sini adalah aparat yang ada sekarang. Sesuai dengan bentuk pemerintahan yang berlaku sekarang maka di wilayah lokasi penelitian, adalah: Camat yang membawahi Kepala-Kepala Desa. Camat dibantu oleh staf Kecamatan dan Kepala Desa dibantu oleh aparat-aparat desa. Khusus aparat desa terdiri atas dua bagian, yaitu Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Badan Musyawarah Desa (Bamudes), di samping adanya aparat desa yang secara langsung di bawah taktis Kepala Desa, yaitu Bidang pemerintahan/ketertiban, pembangunan, pembangunan/ekonomi, urusan keuangan, kesejahteraan rakyat dan bidang urusan umum. Lembaga Musyawarah Desa dan Badan Musyawarah Desa merupakan wadah yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan di tingkat Kecamatan, Camat bersama-sama dengan aparat lainnya seperti Komandan Sektor Kepolisian, Komandan Koramil sebagai Tripida dibantu oleh Kepala-Kepala Desa bertugas mengayomi masyarakat di lingkungannya.

Hubungan vertikal.

Dari uraian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa hubungan vertikal di sini merupakan suatu keharusan yang diikat oleh suatu tata organisasi kelembagaan pemerintahan. Untuk ini Camat berhubungan secara vertikal dengan Kepala-Kepala Desa. Camat dibantu oleh staf kecamatan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Demikian pula Kepala Desa dibantu oleh Musyawarah Desa dan Lembaga Musyawarah Desa di samping dibantu secara langsung (routine) oleh aparat desa itu sendiri. Badan Musyawarah Desa dan Lembaga Musyawarah Desa di sini sangat penting artinya dalam menghidupkan hubungan vertikal Kepala

Desa dengan masyarakat di wilayahnya, justru aspirasi masyarakat desa banyak dimonitor oleh kedua Lembaga desa itu, di samping kemampuan Kepala Desa menyerap aspirasi masyarakat. Kemampuan menyerap aspirasi masyarakat di desa-desa itulah, merupakan bahan yang sangat berguna dan bermanfaat untuk dikembangkan dan disalurkan melalui Kepala Wilayah Kecamatan.

Hubungan horizontal.

Untuk mengembangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayah komunitas kecil ini, maka Camat akan selalu mengadakan hubungan horizontal dengan aparat-aparat yang sederajat di tingkat Kecamatan antara lain dengan Sektor Kepolisian, Komandan Koramil setempat. Di samping itu juga senantiasa diadakan hubungan horizontal dengan Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan seperti lembaga adat, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL

Dalam mengemukakan bagian ini ada tiga hal pokok yang perlu digambarkan, yaitu lembaga ekonomi, lembaga kemasyarakatan dan sistem religi.

Mengenai *lembaga ekonomi* wujudnya dalam Koperasi Unit Desa. Lembaga ekonomi ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebab lembaga ini bertujuan menghimpun kekuatan ekonomi masyarakat desa untuk kepentingan bersama, terutama dalam bidang pertanian seperti hasil kopra, hasil cengkeh dan lain sebagainya. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Desa atau orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin seperti tokoh-tokoh masyarakat desa. Anggotanya adalah seluruh petani di desa itu.

Mengenai sistem kemasyarakatan pada komunitas kecil ini yang ada adalah Lembaga Sosial Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Kedua lembaga inilah yang merupakan wadah kegiatan masyarakat di desa. Tujuannya adalah agar masyarakat desa ikut serta secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan desanya. Lembaga ini selain beranggotakan pejabat formal di desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya), juga mengikutsertakan tokoh-tokoh informal lainnya seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, para ulama, pemuda dan wanita.

Sistem religi

Di wilayah ini masih cukup besar peranan adat. Dalam hal ini

Ketua Adat dan pemangku adatlah yang berperan. Adat-istiadat berupa pranata sosial, aturan dan norma-norma kemasyarakatan harus dibina dan ditegakkan sebaik-baiknya. Karena Lembaga Adat sangat diperlukan dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Mereka itu merupakan unsur pembantu di bidang keagamaan demi tegaknya hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Dewan Hadatlah yang membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang mungkin timbul. Ketua adat atau pemangku adatlah yang memimpin lembaga ini. Beliaulah yang memimpin setiap upacara adat, seperti upacara daur hidup, upacara selamat di bidang pertanian, upacara menaiki rumah baru dan lain-lain. Karena itu peranan lembaga ini cukup besar dalam menata kehidupan masyarakat di lingkungannya.

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Dalam sistem pelapisan sosial ini akan diuraikan dua hal pokok, yaitu sistem pelapisan sosial masa lalu dan pelapisan sosial masa kini. Sedangkan tiap-tiap pelapisan sosial tersebut akan dikemukakan pula pelapisan sosial resmi dan pelapisan sosial samar.

Sesuai dengan data yang diperoleh di lokasi penelitian pada komunitas kecil suku bangsa Buol, dapatlah dikemukakan sistem pelapisan sosial tersebut sebagai berikut.

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

Dalam melukiskan pelapisan sosial masa lalu ini akan dikemukakan empat hal pokok yang akan memberikan gambaran tentang pelapisan sosial ini, yaitu: dasar pelapisan, bentuk pelapisan, hubungan antar lapisan dan perubahan pelapisan.

Pelapisan sosial resmi

Dasar pelapisan sosial

Sesuai kenyataan yang ada pada komunitas kecil ini khususnya yang berhubungan dengan dengan dasar pelapisan sosial, ada tiga dasar utama yang dijadikan sebagai patokan menentukan dasar pelapisan sosial di sini. Ketiga dasar tersebut adalah keturunan, kekuasaan dan keaslian. Ketiga dasar tadi harus dimiliki oleh seseorang khususnya bagi lapisan yang dipandang tertinggi dalam masyarakat. Ini terjadi justru di lokasi penelitian pada waktu yang lampau merupakan wilayah

kerajaan. Lapisan tertinggi di sini ada dua lapisan yaitu Raja yang diberi gelar *Tau Poyogduiya* termasuk keluarganya, dan bangsawan/keturunan Raja yang diberi gelar *Tau Wayu*. Jadi seorang *Tau Poyogduiya* dan *Tau Wayu* harus karena keturunan, penduduk asli dan mempunyai kekuasaan dalam arti memiliki kewibawaan dan dicintai oleh rakyatnya.

Bentuk pelapisan.

Gambaran mengenai bentuk pelapisan meliputi dua hal pokok yaitu struktur pelapisan dan komponen-komponen setiap lapisan. Mengenai struktur pelapisan di sini, terbagi atas empat lapisan pokok, bahkan ada lima lapisan yaitu: Raja (*Tau Poyogduiya*), *Tau Wayu* (Bangsawan dan keturunan Raja), *Tau Wanom* (orang-orang pertengahan), *Taupat* (rakyat biasa atau orang kebanyakan) dan *Budak* (orang yang melanggar adat atau tawanan perang). Lapisan pertama Raja atau *Tau Poyogduiya*, adalah Raja. Untuk lapisan ini hanya keturunan Raja Secara langsung yang mempunyai darah biru yang dapat dijadikan Raja. Mereka ini menggunakan atribut-atribut adat, seperti pakaian adat kerajaan di mana beliaulah yang berhak memakai *Samada* (ikat Kepala) yang dibuat secara khusus, dan berhak memakai kain yang diikat di atas dada sampai mata kaki yang warnanya ialah hijau atau kuning. Pakaian semacam ini dilarang dipakai oleh lapisan yang lain. Atribut lainnya ialah Rumah Raja berbeda dengan rumah-rumah rakyat. Gelar Raja di sini ialah *Tau Poyogduiya* yang dikenal pula dengan orang dua belas, artinya kalau mas kawinnya sejumlah 120 pohon kelapa. Gelar ini bersifat fungsional dalam masyarakatnya. Mengenai hak-hak dalam masyarakat ialah mengayomi seluruh masyarakat. Golongan inilah yang memerintah sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Dalam memerintah beliau dibantu oleh Ketua Hadat. Ketua Hadat juga berasal dari keturunan raja. Raja berhak memutuskan hukuman bagi pelanggar adat, dan menetapkan perang. Juga berhak menetapkan lokasi pembangunan rumah adat. Beliau pula yang memimpin upacara-upacara kerajaan, menetapkan kapan upacara dilakukan dan di mana dilakukan. Mengenai kewajibannya selain melindungi seluruh rakyatnya, maka berkewajiban pula untuk memimpin musyawarah kerajaan (*Bokid*), juga berusaha untuk kesejahteraan seluruh rakyat baik rohani maupun jasmani. Jadi jelas bahwa Rajalah yang menentukan jalannya kehidupan masyarakat.

Lapisan kedua yaitu *Tau Wayu*, anggota-anggotanya adalah bangsawan yang masih merupakan keturunan raja yang dekat. Tetapi sudah tidak berdarah biru lagi. Artinya ayahnya mungkin keturunan Raja

tetapi mungkin ibunya sudah dari lapisan ketiga. Atribut-atribut sama dengan lapisan pertama, hanya saja dibedakan dari pakaian adat yang digunakan. Lapisan kedua ini menggunakan pakaian adat, yaitu pakai selempang di bahu, kainnya diikat sama dengan lapisan pertama, juga warnanya sama, hanya tidak menggunakan *Samada*. Gelar untuk lapisan kedua ini ialah *Tau Wayu* atau juga disebut orang delapan, dalam arti mas kawinnya sama dengan 80 pohon kelapa. Hak-haknya ialah sebagai pembantu utama raja dalam melaksanakan tugas kerajaan. Demikian pula kewajibannya sebagai pembantu raja. Karena itu peranannya dalam masyarakat cukup besar dan ikut menentukan, justru dari mereka inilah didapatkan informasi, pertimbangan untuk pengelolaan pemerintahan kerajaan di samping dari Ketua Hadat atau pemangku adat.

Lapisan ketiga yaitu *Tau Wanon*, yaitu orang pertengahan, artinya mereka ini masih keturunan raja tetapi sudah agak jauh. Jadi darahnya sudah tidak biru lagi. Atribut khusus mengenai pakaian ialah kainnya diikat dari pinggang sampai di lutut, dan warnanya tidak boleh sama dengan Lapisan I dan II. Hak-haknya ialah mendapat perlindungan hukum, mengikuti upacara-upacara adat yang diselenggarakan oleh kerajaan, mengeluarkan pendapat atau saran kepada Raja, kepada Ketua Hadat yang dianggap merugikan dirinya. Sedangkan kewajibannya ialah melaksanakan perintah dari Kerajaan dan mengabdikan kepada kerajaan. Jadi harus patuh kepada aturan dan norma yang berlaku. Lapisan ini berperan dalam pengembangan dan pembinaan tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas sosial dalam wilayah kerajaan. Sedangkan lapisan keempat sesungguhnya sama saja dengan keadaan lapisan ketiga di atas. Hanya saja lapisan keempat ini benar-benar orang kebanyakan, rakyat biasa, sehingga pakaiannya hanya boleh diikat di pinggang saja. Mereka biasa disebut *Taupat*. Hak dan kewajibannya sama dengan lapisan ketiga. Demikian pula peranannya. Khusus lapisan kelima yaitu *Budak*, lapisan ini adalah orang-orang yang dihukum, yang melanggar adat kerajaan atau tawanan perang. Mereka tidak mempunyai hak, tidak mempunyai atribut. Hanya kewajibannya ialah melaksanakan seluruh perintah *Raja* dan *Tau Wayu* tanpa reserve. Semua perintah harus dilaksanakan.

Hubungan antar lapisan

Di dalam hubungan antar lapisan ini akan digambarkan lapisan-lapisan dalam komunitas kecil suku bangsa Buol di lokasi penelitian ini terjalin. Jalinan tersebut dapat terbentuk karena adanya hubungan

kekerabatan, hubungan tetangga, hubungan pekerjaan dan hubungan kemasyarakatan.

Hubungan kekerabatan terjadi melalui perkawinan. Perkawinan pada komunitas kecil ini terbatas pada lapisan tertentu, artinya antara lapisan Raja (*Tau Poyogduiya*) sendiri atau *Tau Wayu* sendiri. Tetapi juga dapat antara Raja dengan *Tau Wayu* (antara lapisan I dan II). Demikian pula antara lapisan III sendiri, lapisan IV sendiri. Tetapi dapat saja seorang Raja (lapisan I) kawin dengan lapisan ke III dan IV asalkan pihak Raja dan keturunannya adalah laki-laki, sedangkan pihak lapisan III dan IV adalah perempuan. Tidak mungkin terjadi sebaliknya, di mana lapisan ke III dan ke IV adalah laki-laki dan pihak lapisan ke I dan II adalah perempuan. Tetapi antara lapisan ke III dan ke IV dapat saja bebas terjadi perkawinan tanpa larangan. Dan khusus untuk budak hanya terjadi dalam lingkungan atau sesama budak saja. Dengan gambaran di atas, jelaslah bahwa dengan adanya lapisan-lapisan dalam komunitas kecil suku bangsa Buol ini, mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam pembinaan hubungan kekerabatan antara lapisan yang ada.

Mengenai hubungan tetangga antara lapisan, walaupun ada perbedaan derajat sosial dan perbedaan status sosial bukan berarti menghalangi hubungan tetangga di antara mereka. Hubungan tetangga di sini berjalan secara wajar, dalam arti seorang Raja dan keturunan Raja atau *Tau Poyogduiya* dan *Tau Wayu* dapat sewaktu-waktu berhubungan atau bergaul dengan bukan keturunan Raja atau rakyat kebanyakan atau rakyat biasa, demikian pula sebaliknya, asalkan mengikuti tata-kerama, norma dan aturan adat sopan-santun pergaulan yang berlaku dalam lingkungan kerajaan. Hanya saja budak tidak diperkenankan bergaul dengan lapisan sosial yang ada. Jadi mereka hidup terisolir.

Mengenai hubungan pekerjaan, juga berjalan secara wajar dalam arti bahwa dalam kehidupan komunitas ini kerja gotong royong yang paling menonjol. Pada umumnya lapisan III dan lapisan ke IV (*Tau Wanom dan Taupat*) selalu mengerjakan pekerjaan dari lapisan I dan II (Raja dan *Tau wayu*), di mana pihak lapisan I dan II menyiapkan konsumsi dan fasilitas lainnya, dan memberikan petunjuk yang diperlukan. Jadi jelas bahwa hubungan pekerjaan di sini berjalan dengan baik. Tetapi kalau pekerjaan itu adalah tugas budak, maka tidak ada yang membantunya. Budak itu sendiri harus menyelesaikannya.

Hubungan kemasyarakatan di sini berjalan dengan baik dengan mengikuti semua ketentuan, norma dan aturan yang berlaku dan di-

tetapkan oleh kerajaan. Misalnya dalam upacara-upacara adat (adat dan upacara daur hidup, adat dan upacara selamat pertanian, menaiki rumah baru, mendirikan rumah baru dan sebagainya). Dalam setiap pelaksanaan upacara-upacara itu maka pihak Raja dan keturunannya dan dibantu oleh Ketua Hadat yang memimpin upacara, menentukan waktu dan tempat upacara, serta menentukan kewajiban dan hak-hak peserta upacara. Upacara ini dilakukan dengan gotong royong terutama dari pihak lapisan III (*Tau Wanom*) dan lapisan IV (*Taupat*). Dalam hal ini peserta upacara inilah yang menyiapkan segala sesuatunya seperti bahan-bahan dan perlengkapan upacara, membuat bangunan tempat upacara dan sebagainya. Khusus untuk budak selain diberi tugas yang cukup berat. Budak tidak diperkenankan sebagai peserta upacara.

Perubahan lapisan

Perubahan lapisan dalam komunitas kecil suku bangsa Buol pada lokasi penelitian, berkaitan erat dengan adanya perubahan kebudayaan mereka. Perubahan ini melalui proses yang cukup lama. Dalam hal ini akan dikemukakan tiga hal pokok, yaitu sebab-sebab perubahan, proses perubahan dan hasil perubahan itu sendiri. Mengenai sebab-sebab perubahan lapisan, dapat dikemukakan bukan karena kemajuan dunia pendidikan, bukan karena kemajuan teknologi, bukan pula karena kemajuan dan kelancaran arus komunikasi, melainkan banyak disebabkan karena perubahan struktur kekuasaan. Dalam perubahan struktur kekuasaan di sini dapat dilihat perubahan dari struktur pemerintahan dari zaman sebelum Belanda, sampai kepada zaman Belanda, zaman Jepang bahkan sampai zaman kemerdekaan. Di sini terlihat perubahan dari zaman kerajaan menjadi onder-distrik dan akhirnya menjadi Kecamatan. Dengan perubahan struktur kekuasaan ini, maka secara bertahap dengan melalui proses yang cukup lama terjadilah perubahan lapisan, di mana sekarang ini walaupun masih dikenal ada keturunan Raja, tetapi dapat saja seorang rakyat biasa menjadi Camat atau tokoh masyarakat. Dengan perubahan ini banyak pengaruhnya terhadap perubahan lapisan dalam komunitas kecil ini. Dari hasil perubahan ini kelihatan secara nyata bahwa tidak ada lagi perbedaan antara seorang keturunan raja dengan rakyat biasa. Mereka berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Prinsip kebersamaan sudah kelihatan dalam kehidupan komunitas kecil ini, walaupun sesungguhnya masih dapat dirasakan adanya tata kerama adat yang mengikat seperti adat sopan-santun antara lapisan-lapisan itu. Di samping perubahan itu disebabkan

karena perubahan struktur kekuasaan, juga karena adanya pengaruh dari agama yang dianut oleh masyarakatnya khususnya agama Islam. Bagi golongan atau masyarakat yang benar-benar mendalami dan menghayati serta mengamalkan secara baik agama, maka mereka itu mendapat tempat terhormat di mata masyarakat. Walaupun orang itu sendiri hanya dari rakyat biasa saja. Jadi jelas perubahan itu juga banyak disebabkan karena pengaruh agama khususnya agama Islam yang banyak dianut oleh masyarakat. Di sinilah dikenal para ulama, para Kyai, Ustaz yang cukup terpandang di mata masyarakat banyak. Hal-hal yang dikemukakan di atas adalah pelapisan sosial masa lalu yang bersifat resmi. Selanjutnya akan dikemukakan pelapisan sosial masa lalu yang termasuk kategori pelapisan sosial samar.

Pelapisan sosial samar

Dalam pelapisan sosial samar ini akan diusahakan menggambarkan sesuatu yang merupakan anggapan masyarakat di mana anggapan itu sesungguhnya belum secara nyata mewarnai lapisan-lapisan yang telah ada. Untuk hal ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Dasar pelapisan sosial samar, adalah karena kepandaian, keahlian dan kecakapan seseorang yang cukup menonjol dalam kehidupan masyarakat lingkungannya. Misalnya saja seseorang atau kelompok orang yang mempunyai keahlian dan kepandaian dalam bidang pertukangan, ahli menentukan kayu mana yang baik dan cocok untuk bangunan tertentu, atau orang yang ahli dalam meramalkan waktu yang baik, waktu memulai turun sawah/ladang, waktu panen, waktu mendirikan dan menaiki rumah baru dan sebagainya. Demikian pula orang yang mempunyai keahlian dalam bidang keagamaan/kepercayaan. Misalnya saja adanya orang atau kelompok orang yang ahli dalam menyembuhkan penyakit, menolak mara-bahaya, menentukan hari-hari perkawinan dan sebagainya. Orang-orang yang demikian ini sesungguhnya juga dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang berhak dikategorikan ke dalam lapisan sosial tertentu. Dengan demikian maka kelihatan walaupun samar, bahwa dalam kehidupan komunitas kecil suku bangsa Buol ini selain adanya pelapisan sosial resmi sebagaimana dikemukakan di atas, juga ada anggapan masyarakat bahwa para ahli atau orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat serta orang yang menghayati kehidupan keagamaan/kepercayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat komunitas kecil ini dapat diberi lapisan tersendiri. Hal ini

dianggap penting justru kelompok-kelompok yang ahli ini cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kenyataannya, mereka itu hanya sebagai rakyat biasa yang sewaktu-waktu diharuskan menjalankan tugas sesuai keahlian yang dimilikinya untuk kepentingan kerajaan dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI

Dalam menggambarkan pelapisan sosial masa kini, akan dikemukakan empat hal pokok yang akan memberikan gambaran tentang pelapisan sosial yang kelihatan sekarang ini seperti: dasar pelapisan, bentuk pelapisan, hubungan antar lapisan dan perubahan lapisan. Ini pun dibagi dalam dua pokok uraian, yaitu pelapisan sosial resmi dan pelapisan sosial samar.

Pelapisan sosial resmi

Berdasarkan data yang ada sehubungan dengan pelapisan sosial resmi sekarang ini dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar pelapisan sosial

Dasar pelapisan sosial yang ada dalam komunitas kecil suku bangsa Buol masa kini antara lain berdasarkan atas senioritas, kekuasaan dan kepandaian (pendidikan). Senioritas dalam arti selain umur juga tingkat seseorang dalam jenjang kekeluargaan, kekuasaan dalam arti yang memerintah secara resmi (pejabat pemerintah) dan kepandaian ialah mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti ahli dalam bidang keagamaan (para ulama dan Ustaz). Tetapi di samping itu masih juga memperhitungkan tentang keturunan seseorang, walaupun tidak lagi terlalu dominan sebagaimana masa yang lampau.

Bertolak dari dasar-dasar pelapisan tersebut di atas terlihat bahwa bentuk pelapisan sosial sekarang ini kelompok orang yang dituakan dan mempunyai pengaruh dalam masyarakat (tokoh adat dan tokoh informal lainnya), para pejabat pemerintahan yang diangkat secara resmi (Camat Dan Sektor, Dan Ramil dan pemimpin formal lainnya), dan kelompok pendidik (guru-guru) dan aparat pegawai syara' di bidang keagamaan serta para ulama dan ustaz. Kemudian dikenal rakyat biasa. Jelas bahwa strukturnya adalah adanya kelompok formal dan kelompok informal serta rakyat.

Tokoh-tokoh formal adalah mereka yang telah diangkat resmi oleh Pemerintah sebagai aparat Pemerintah (Camat, Kepala Desa, Dan Ramil, Dan Sektor Kepolisian, petugas di bidang pendidikan umum dan agama) sedangkan tokoh informal adalah Ketua Adat, tokoh masyarakat dan tokoh dalam bidang keagamaan.

Mengenai gelar yang disandang bagi tokoh formal adalah Pak Camat, Pak Kepala Desa bagi Kepala Kampung, Dan Ramil dan Dan Sektor, Imam, dan Pak Guru. Gelar ini merupakan gelar fungsional. Sedangkan bagi tokoh adat bergelar Ketua Adat atau pemangku adat, bagi tokoh agama diberi gelar Kiyai atau Ustaz.

Mengenai hak-haknya bagi tokoh formal ialah menentukan ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi, menentukan pekerjaan dan rencana pembangunan di wilayahnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sedangkan tokoh informal berhak mengajak masyarakat ikut serta membantu Pemerintah untuk kesejahteraan umum dan untuk menjaga kehidupan lingkungan secara lebih baik. Dengan demikian tokoh formal berkewajiban mengayomi seluruh masyarakat dengan berusaha membina masyarakatnya secara lebih baik dengan mengadakan hubungan kerjasama dengan tokoh-tokoh informal lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Rakyat biasa berkewajiban tunduk dan taat atas ketentuan yang berlaku, dan memberikan partisipasi sebaik mungkin dalam pembinaan dan perkembangan lingkungannya. Oleh karena itu peranan tokoh formal dan informal tersebut sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kerjasama di antara mereka merupakan kunci berhasilnya pengelolaan tugas-tugas yang diembannya. Misalnya dapat dilihat peranan tokoh adat dalam membantu tugas dalam bidang keagamaan atau ketertiban masyarakat sangat besar. Ketua adatlah yang menangani pertama-tama kasus yang ada, dan kalau tidak dapat diselesaikan, maka diserahkan kepada petugas yang menangani bidang keagamaan atau bidang keamanan di tingkat Desa atau di tingkat Kecamatan. Demikian pula peranan para Kyai dan para ulama lainnya. Kenyataan yang dilihat dalam komunitas kecil suku bangsa Buol ini ialah bahwa lapisan formal, lapisan informal serta rakyat di wilayah ini pada umumnya senantiasa mengadakan hubungan baik dalam usaha membina dan mengembangkan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan wilayahnya.

Hubungan antar lapisan

Hubungan antar lapisan yang kelihatan adalah terjalannya suatu

hubungan karena adanya hubungan kekerabatan, tetangga, pekerjaan dan hubungan kemasyarakatan. Hubungan kekerabatan terjadi melalui perkawinan. Dalam hal ini tidak lagi terjadi pembatasan-pembatasan secara ketat, artinya golongan pemimpin formal dapat saja kawin dengan lapisan lainnya (lapisan informal dan rakyat biasa), demikian pula sebaliknya. Hanya saja masih diikat oleh ketentuan adat yang masih cukup kuat dalam arti memenuhi persyaratan adat yang berlaku, memenuhi norma keagamaan dan aturan lainnya yang mengikat.

Hubungan tetangga antar lapisan cukup baik. Dalam hal ini pada beberapa rumah tangga dibentuk rukun-rukun tetangga yang merupakan kelompok rumah tangga sebagai wadah dalam pembinaan kelompok di lingkungannya yang meliputi berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan. Rukun tetangga ini tergabung lagi dalam bentuk rukun kampung yang lebih besar dengan tujuan yang sama. Para anggotanya adalah seluruh keluarga-keluarga batih dalam lingkungannya. Jelas bahwa rukun tetangga dan rukun kampung ini cukup besar arti dan peranannya dalam kehidupan masyarakat, justru karena kedua wadah ini lebih mengakrabkan hubungan di antara mereka dan mereka diikat oleh bentuk kegiatan gotong royong dalam segala bidang kehidupan. Dari gambaran tentang hubungan tetangga ini maka hubungan pekerjaan di antara mereka cukup baik, justru segalanya didasarkan atas gotong royong. Ciri khas inilah yang menandai kehidupan komunitas kecil ini. Tidak ada di antara mereka yang berani dan terang-terangan menentang kerja gotong royong ini. Dengan demikian rukun tetangga dan rukun kampung sangat besar peranannya.

Hubungan kemasyarakatan sudah jelas tergambar dalam uraian di atas, yaitu cukup baik. Biasanya melalui rukun tetangga dan rukun kampung inilah sebagai media kehidupan kemasyarakatan di antara mereka. Misalnya ada pesta perkawinan atau kematian dan lain sebagainya, maka seluruh warga desa itu merasa berdosa apabila tidak ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan itu. Demikian pula dalam upacara-upacara keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Isra' Mi'raj, Natal dan sebagainya), seluruh warga masyarakat ikut serta secara bersama-sama meramaikannya tanpa adanya perbedaan perasaan baik dari segi status sosial maupun dari kedudukannya dalam masyarakat.

Perubahan lapisan

Adapun sebab-sebab sehingga terjadi perubahan lapisan pada komunitas kecil di sini antara lain ialah adanya perubahan struktur

pemerintahan yang melalui proses yang cukup lama dan juga adanya kemajuan di bidang pendidikan. Demikian pula adanya pengaruh arus lalu-lintas melalui lautan, di mana wilayah ini cukup banyak didatangi dan disinggahi oleh kapal-kapal motor dan perahu, bahkan sudah ada suku bangsa lain yang berdomisili di wilayah ini. Demikian pula pengaruh agama khususnya agama Islam sangat kuat. Dari gambaran sebab-sebab adanya perubahan di atas yang walaupun prosesnya cukup lama, namun karena adanya kesadaran masyarakat akan perubahan itu, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung untuk menghayati secara baik akan perubahan tersebut, terutama perubahan yang dibawa oleh kehidupan spiritual terutama oleh agama Islam. Demikian pula adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai sumber kemajuan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa penghayatan dan pengamalan akan ajaran agama, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan sungguh merupakan era baru dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin pada komunitas kecil suku bangsa Buol ini, di mana mereka sudah dapat menerima hal-hal baru, di mana mereka tidak selalu terikat oleh adat kebiasaan yang bersifat tradisional. Mereka sudah memiliki pola berpikir yang lebih maju seperti menerima hal-hal baru misalnya cara-cara bertani yang lebih baik, cara pembuatan rumah, cara pemeliharaan kesehatan dan sebagainya.

Pelapisan sosial samar

Dalam lapisan sosial samar ini akan digambarkan anggapan masyarakat komunitas kecil suku bangsa Buol, yang sesungguhnya belum secara nyata mewarnai lapisan-lapisan yang telah ada. Dalam hal ini akan digambarkan sebagai berikut:

Dasar pelapisan sosial samar di sini adalah antara lain karena kepandaian dan keahlian seseorang. Misalnya saja seseorang yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik atau terpelajar, dia sebagai pemuka dan tokoh agama (Kyai, Ulama, Ustaz), sebagai petani yang baik dan berhasil karena dibekali oleh keahlian khusus, sebagai pelopor pembaharuan misalnya pembuatan alat-alat rumah tangga, alat-alat bangunan rumah dan sebagainya. Mereka ini dianggap termasuk sesuatu lapisan tertentu, justru karena kepandaian dan keahlian yang dimilikinya bermanfaat dan berguna bagi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian mereka itu mendapat tempat di hati masyarakat, dihormati oleh masyarakat dan bahkan merupakan tempat bertanya. Karenanya mereka dianggap pantas digolongkan dalam satu lapisan sosial tertentu

di dalam kehidupan masyarakat.

IV. PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Mengenai gambaran umum di sini akan dikemukakan dua hal pokok yaitu uraian yang berkenan dengan pimpinan tradisional dan pimpinan masa kini serta struktur pimpinan tradisional, pimpinan masa kini dan pimpinan masyarakat.

Pimpinan tradisional yang formal

Pada komunitas kecil suku bangsa Buol, pimpinan tradisional yang formal tidak terlepas dari keadaan kehidupan pemerintahan kerajaan yang berlaku di wilayah ini. Jadi tidak terlepas dari bentuk pimpinan kerajaan yang berlaku pada waktu itu. Bentuk pimpinan tradisional yang formal berpusat kepada Raja atau *Tau Poyogduiya*. Raja ini dibantu oleh Ketua Adat atau pemangku adat yang pada umumnya berasal dari *Tau Wayu* yang masih keturunan raja. Pemangku adat inilah yang bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum adat, menegakkan ketertiban dalam wilayah kerajaan. Juga pada setiap *Lipu* (kampung) ada pembantu Raja dan pembantu Pemangku Adat. Mereka ini bertanggung jawab kepada raja. Pembantu Raja di *Lipu* (kampung) adalah keturunan raja secara langsung, demikian pula Pemangku adat di tingkat *Lipu* adalah orang dekat Raja yang terdiri dari *Tau Wayu*. Raja dengan pembantu-pembantunya menjalankan tugas kerajaan justru disadari bahwa kekuasaan yang diberikan kepadanya mempunyai kekuatan hukum kerajaan, di mana Raja dan pembantunya diangkat dan dilantik dalam suatu upacara kebesaran dan disaksikan oleh seluruh rakyat. Dengan demikian secara hukum kerajaan, raja dan pembantunya memegang peranan yang sangat menentukan dalam menjalankan tugas eksekutif dan tugas legislatif kerajaan, di mana seluruh rakyatnya harus taat kepada Raja dan aparat-aparatnya. Dengan kenyataan ini jelas pulalah bahwa pengaruh Raja sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan pengaruh pemangku adat (Ketua Adat) sebagai pemegang tugas legislatif sangat menentukan dalam kerajaan komunitas kecil ini. Namun harus diakui bahwa kepemimpinan ini sifatnya dan dasarnya adalah keturunan dan keaslian, harus pula didukung oleh sifat-sifat dan ciri-ciri kewibawaan dicintai rakyatnya, adil, jujur dan berpengaruh. Dengan sifat dan ciri kepemimpinan tradisional yang formal baik untuk

raja maupun untuk tokoh adat, akan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam membina dan mengembangkan tugas yang diembankan kepadanya.

Pimpinan tradisional yang informal

Mengenai pimpinan tradisional yang informal ini, juga tidak akan terlepas dari keadaan kehidupan kerajaan pada waktu itu. Untuk ini maka pimpinan tradisional yang informal pada komunitas kecil suku bangsa Buol ini, sesungguhnya masih merupakan pembantu raja yang non struktural, tetapi kedudukannya bersifat fungsional. Dalam hal ini dikenal beberapa kelompok pimpinan tradisional yang informal yang bersifat fungsional tersebut antara lain ialah: *Panggoba*, ialah orang atau kelompok orang yang didengar pendapatnya dalam bidang pertanian, justru mereka itulah yang dianggap ahli dalam bidang pertanian. Misalnya saja dalam membuka tanah pertanian, memulai turun sawah, mulai menanam, mulai panen dan kapan dilakukan upacara selamatan panen, *panggoba* inilah yang menentukan. Dengan keahliannya inilah maka ia diangkat atau ditunjuk oleh Raja sebagai pembantu dalam bidang pertanian.

Palima, ialah orang yang ahli meramalkan masa-masa yang akan datang. Beliau berfungsi sebagai peramal dan penunjuk jalan. Beliaulah yang diberi tugas untuk memberi pertimbangan kepada Raja dalam merencanakan sesuatu, justru beliau ahli melihat masa depan yang lebih jauh. *Dukun*, ialah orang atau kelompok orang yang ahli dalam menyembuhkan penyakit. Biasanya dalam melaksanakan tugasnya harus melalui upacara-upacara keagamaan. Beliaulah yang memimpin setiap upacara keselamatan yang akan diadakan oleh kerajaan.

Tukang, ialah orang atau kelompok orang yang ahli dalam pembangunan rumah baik rumah tempat tinggal maupun rumah adat dan tempat-tempat upacara.

Keempat pimpinan tradisional yang informal tersebut di atas harus saling mengisi, bekerjasama dalam menjalankan tugasnya di mana beliau-beliau tetap akan meminta petunjuk dari Raja dan Ketua Hadat Kerajaan. Dari gambaran tersebut di atas, jelaslah kepada kita bahwa pimpinan tradisional yang informal ini mempunyai fungsi yang cukup menentukan dalam kehidupan komunitas kecil ini, bahkan mempunyai pengaruh yang cukup luas di kalangan masyarakat lingkungannya.

Pimpinan masa kini yang formal

Pada komunitas kecil suku bangsa Buol ini, pimpinan masa kini

yang formal adalah apa yang dilihat dan berlaku sekarang ini, mulai dari Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) dengan aparat-aparat pembantunya di tingkat Kecamatan sampai kepada Kepala-Kepala Desa di tingkat desa (*Lipu*). Kepala Desa sendiri dibantu oleh sekretaris desa lengkap dengan staf pembantu yang meliputi beberapa bidang seperti bidang/urusan pemerintahan/ketertiban, pembangunan/ekonomi, keuangan, kesejahteraan rakyat dan bidang umum. Jelas bahwa Camat dan Kepala Desa adalah pemimpin formal yang sudah melembaga. Pemimpin formal ini diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. Di samping Camat dan Kepala Desa juga dikenal pemimpin formal lainnya seperti Aparat Kepolisian, Aparat Angkatan Darat (Koramil) Urusan Keagamaan, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Kakandep) yang kesemuanya di tingkat Kecamatan. Beliau-beliau ini berkewajiban membantu Camat dalam mengemban tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Pemimpin formal inilah yang bertanggung jawab terhadap usaha mewujudkan pembangunan desa secara terpadu, mewujudkan desa dari swakarya, swadaya menjadi desa swasembada sampai menjadi desa Pancasila. Camat dibantu oleh seluruh aparat pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa. Dalam hal ini seorang Camat dan Kepala Desa harus memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis, terbuka, jujur dan berdedikasi yang tinggi, agar dapat mencapai tujuan pembangunan di wilayahnya. Kepemimpinan yang demikian perlu didukung oleh sikap keterpaduan dari segala unsur yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Pimpinan masa kini yang informal.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dari pemimpin formal sebagaimana dikemukakan di atas, mutlak perlu adanya kerjasama dan hubungan baik dengan pemimpin informal yang ada dalam masyarakat. Adapun pemimpin informal masa kini yang ada dalam masyarakat komunitas kecil ini antara lain ialah tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat (orang tua-tua), tokoh agama (Ulama, Kyai, Ustaz), tokoh pemuda dan wanita (organisasi sosial kemasyarakatan seperti Kontak Tani, PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi) dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin informal ini dipersatukan dalam wadah yang dibentuk dalam lingkungan desa, yaitu Lembaga Musyawarah Desa yang anggota-anggotanya adalah dari tokoh adat, tokoh masyarakat, para ulama, para guru di desa, dan juga Lembaga Ketahanan Desa dengan anggota-anggota selain tokoh masyarakat, tokoh adat juga dari organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di desa. Kedua

lembaga ini diketuai dan dikoordinir oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada Camat. Dari gambaran di atas jelas pulalah bahwa fungsi dan peranan pemimpin informal cukup besar dalam rangka membina dan mengembangkan kehidupan di desa. Keterpaduan antara pemimpin formal dan informal tersebut sangat penting untuk mengemban tugas-tugas yang dihadapi, di mana partisipasi masyarakat sangat diharapkan.

Dari gambaran dan uraian di atas, jelaslah bahwa susunan dari pimpinan tersebut, baik pimpinan tradisional, pimpinan masa kini dan pimpinan masyarakat itu sendiri merupakan potensi yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat pada komunitas kecil suku bangsa Buol ini.

Struktur pimpinan tradisional

Seperti dikemukakan di atas bahwa susunan pimpinan tradisional yang formal berpusat kepada Raja (Sultan), atau dengan gelar *Tau Poyogduiya* yang merupakan pusat kekuasaan dalam lingkungan kerajaan. Beliau dibantu oleh Pembantu Raja di tiap-tiap *Lipu* atau desa di wilayah kekuasaannya. Di samping itu secara resmi pula dibantu oleh Ketua adat atau pemangku adat. Ketua adat ini berasal dari *Tau Wayu* yang masih keturunan raja. Jadi Raja dan pembantu Raja di tiap *Lipu* merupakan badan eksekutif sedangkan Ketua adat baik di lingkungan kerajaan maupun di *Lipu* (desa) dalam wilayah kerajaan merupakan badan legislatif. Kedua badan ini harus bekerjasama dalam mengemban tugas kerajaan. Selanjutnya mengenai struktur pimpinan tradisional yang informal, sesungguhnya juga berpusat pada Raja (Sultan), di mana beliau dibantu secara fungsional oleh pemimpin-pemimpin tradisional yang informal seperti *Panggoba* (ahli dalam bidang pertanian), *Palima* (ahli meramalkan hal-hal yang jauh di depan dan sebagai penunjuk jalan), *Dukun* (ahli dalam pengobatan dan pemimpin dalam upacara-upacara selamatan) dan *Tukang* (ahli dalam bidang pembangunan rumah, baik rumah raja maupun rumah adat). Keempat pimpinan tradisional tersebut harus saling isi mengisi, bekerjasama dalam menjalankan tugasnya demi pengabdianya kepada Raja dan Kerajaan.

Struktur pimpinan masa kini

Sebagaimana diuraikan di atas, struktur pimpinan masa kini yang formal adalah Camat yang merupakan pemimpin formal yang memerin-

tah seluruh wilayah kekuasaannya, dibantu oleh Kepala Desa. Dari susunan ini jelas bahwa hubungan dari atas ke bawah ialah Camat langsung kepada Kepala-Kepala Desa. Camat sendiri dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh aparat pemerintah lainnya seperti Koramil, Sektor Kepolisian, Camat, Dan Ramil dan Dan Sektor biasanya disebut *Tripida*, di tingkat Kecamatan. *Tripida* ini merupakan suatu lembaga yang harus bekerjasama dan menjalin koordinasi dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya. Demikian pula halnya di tingkat desa sebagai aparat pemerintahan yang terbawah harus mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat desa, para pemuda desa, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang sudah dihimpun dalam wadah Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa. Sedangkan pimpinan masa kini yang informal diikat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa sebagaimana disebutkan di atas. Kedua lembaga ini menghimpun kekuatan sosial kemasyarakatan dan bersifat fungsional, di mana Kepala Desa yang memimpin dan mengkoordinirnya. Peranan pimpinan informal ini sangat besar dalam kehidupan masyarakat desa, justru karena kedua lembaga ini merupakan wadah perencanaan pembangunan desa dan juga sebagai wadah operasional yang membantu Kepala Desa mengemban tugasnya. Mengenai struktur pimpinan masyarakat pada komunitas kecil suku bangsa Buol ini, sesungguhnya sudah digambarkan di atas. Jelaslah bahwa Camat dan aparat-aparatnya di desa juga dibantu secara fungsional oleh Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa, di mana kedua lembaga ini beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, guru, pemuda dan wanita sebagai pemimpin informal.

PIMPINAN TRADISIONAL

Untuk memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap pimpinan tradisional baik formal maupun informal sebagaimana dikemukakan pada gambaran umum di atas, di bawah ini diberikan pelukisan yang bersifat deskripsi dari insan pimpinan tradisional tersebut sebagai berikut:

Insan pimpinan tradisional yang formal

Dalam hubungan ini akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut: Nama atau gelar ialah Raja dan secara luas diberi gelar *Tamadika*, dan ini berasal dari keturunan secara turun-temurun sejak dikenalnya kerajaan

Buol, dan diberikan secara resmi kepada keturunan langsung *Tamadika* melalui upacara adat kerajaan yang dipimpin oleh Ketua atau pemangku adat kerajaan. Gelar *Tamadika* digunakan dalam wilayah kerajaan yang berarti bahwa beliaulah yang memegang kekuasaan eksekutif di wilayah kerajaan Buol. Sedangkan yang memegang kekuasaan legislatif bergelar *pemangku adat* (Ketua adat), juga atas dasar keturunan dari Raja (*Tamadika*), beliau ditunjuk oleh Raja. Gelar tersebut digunakan dalam lingkup tugas-tugas menata dan membina Hukum adat di wilayah kerajaan secara keseluruhan sebagai aparat pembantu Raja. Dengan gambaran di atas jelas bahwa Raja adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang memimpin dan bertanggung jawab tentang jalannya pemerintahan di wilayah kerajaan, sedangkan pemangku adat adalah pemegang kekuasaan dalam bidang legislatif yang memimpin tugas-tugas mengelola pembinaan hukum adat termasuk di dalamnya pelaksanaan norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan serta pranata-pranata sosial kemasyarakatan dalam wilayah kerajaan Buol. Adapun daerah atau lokasi kepemimpinan Raja dan Pemangku adat adalah dalam lingkungan komunitas Buol yang meliputi wilayah Paleleh, Bunobogu, Bokat, Bomunu dan Biau. Mengenai persyaratan formal untuk menjadi Raja dan Pemangku adat antara lain ialah keturunan, keaslian, senior dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas kerajaan. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya ialah kewibawaan, kejujuran, pengabdian, dan kesetiaan kepada kerajaan dan seluruh rakyat. Raja (*Tamadika*) berhak menetapkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam wilayah kerajaan, memerintah seluruh wilayahnya, mengangkat para pembantu-pembantu raja, dan berhak memberikan hukuman bagi orang yang bersalah/melanggar hukum adat, berhak menyatakan kerajaan dalam bahaya, menyatakan perang. Kewajibannya adalah melindungi seluruh wilayah kerajaan, meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya, mengadakan kerjasama dengan kerajaan tetangga, menghormati hak rakyatnya, bersikap adil dalam menjalankan tugas kewajibannya. Bagi pemangku adat sebagai pemegang adat kerajaan berhak menata aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam wilayah kerajaan demi terciptanya ketentraman dan kedamaian. Juga berhak mengusut orang yang melanggar adat untuk selanjutnya menyampaikan pertimbangan kepada raja dalam mengambil keputusan terakhir. Pemangku adat berkewajiban untuk menegakkan hukum adat, menciptakan ketertiban dan keamanan dalam wilayah kerajaan di mana beliaulah yang selalu berkomunikasi dengan

seluruh rakyatnya dalam rangka menciptakan ketentraman dalam lingkungannya. Seorang Raja diangkat melalui upacara adat kebesaran. Raja yang baru diangkat apabila Raja sebelumnya mangkat atau sudah tua dan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Biasanya Raja yang diangkat adalah putra mahkota kerajaan yang sudah memenuhi syarat. Sebelum dikukuhkan diadakan musyawarah adat oleh Pemangku adat untuk menetapkan sebagai raja yang baru. Setelah pemangku adat bermusyawarah, dilanjutkan dengan upacara pelantikan dan dihadiri oleh seluruh rakyat kerajaan. Sedangkan pengangkatan pemangku adat (Ketua Adat), berdasarkan penunjukan Raja. Sebelum raja memberikan persetujuan dan pengangkatan Ketua Adat ini maka Raja meminta pertimbangan tokoh-tokoh adat yang ada dalam wilayah kerajaan, melalui musyawarah paripurna pemangku adat tersebut. Ketua adat yang ditunjuk ini dilantik oleh Raja dalam satu upacara kebesaran kerajaan. Seorang Raja memiliki atribut kerajaan seperti hanya beliau saja yang berhak menggunakan *Samada* (ikat kepala) yang memang khusus untuk raja semata, demikian pula Istana (Rumah) raja berlainan bentuknya dengan rumah lainnya. Juga pakaian Raja berbeda dengan pakaian rakyat biasa (*Tau Wanon* dan *Taupat*), yaitu kain yang digunakan diikat di atas dada sampai mata kaki dan harus berwarna hijau atau kuning. Sedangkan atribut bagi Pemangku Adat (Ketua Adat) adalah sama dengan Raja, khususnya mengenai pakaian, tetapi tidak berhak menggunakan *Samada*. Rumah Ketua Adat selalu berdekatan dengan Rumah Raja dan berdekatan pula dengan rumah adat. Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya adalah baik. Di sini gotong royong yang senantiasa melandasi dalam melakukan setiap pekerjaan. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa unsur pimpinan informal lainnya seperti *Panggoba* (ahli dalam bidang pertanian), *Palima* (ahli meramal dan penunjuk jalan), *Dukun* (ahli pengobatan dan upacara-upacara keagamaan lainnya), *Tukang* (ahli dalam pembangunan), senantiasa merupakan tangan kanan bagi Raja dan bagi pemangku adat dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan di wilayah kerajaan. Keterpaduan antara unsur-unsur pimpinan yang ada, selalu digalakkan untuk membina dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian kelihatan bahwa hubungan semacam ini benar-benar cukup baik dalam menata masyarakat seluruhnya. Ini berarti bahwa pengaruh pimpinan ini cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Misalnya saja dalam bidang pertanian mulai dari membuka tanah pertanian sampai kepada upacara selamat panen peranan Raja. Tokoh adat dan *Panggoba*

sangat besar, justru jauh sebelumnya mereka sudah merencanakan setiap komponen dan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan di mana seluruh rakyat ikut serta secara gotong royong di dalamnya. Demikian pula dalam pembangunan rumah baru, dan sebagainya.

Insan pimpinan tradisional yang informal

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, insan pimpinan tradisional yang informal di sini adalah *Panggoba*, *Palima*, *Dukun* dan *Tukang*. *Panggoba* adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian. *Panggoba* ini mengetahui secara pasti lokasi pertanian yang baik, mengetahui kapan harus membuka tanah pertanian, kapan memulai menggarap dan mengerjakan sawah atau ladang, kapan sebaiknya mulai menanam bibit, mulai menanam, mulai panen dan kapan sebaiknya diadakan upacara selamatan panen. Dalam hal ini seorang *Panggoba* diberi fungsi oleh Raja sebagai pembantu raja dalam bidang pertanian dengan segala aspeknya.

Palima adalah orang yang ahli meramalkan masa-masa yang akan datang. Beliau berfungsi sebagai peramal keadaan apakah baik atau buruk. Jadi beliau sebagai penunjuk jalan. Beliau berfungsi memberi pertimbangan kepada Raja atau kepada Pemangku adat untuk merencanakan sesuatu, seperti kapan sebaiknya upacara kerajaan diadakan, kapan memulai pembangunan rumah, kapan dimulai upacara-upacara daur hidup, upacara-upacara panen dan sebagainya. Biasanya beliau bekerja sama dengan *Dukun*

Dukun, adalah orang yang ahli menyembuhkan penyakit melalui upacara sakral, upacara religius, justru dalam melaksanakan tugasnya selalu melalui upacara-upacara keagamaan. Beliau yang senantiasa memimpin upacara-upacara setelah mendapat petunjuk dari Ketua Adat.

Tukang adalah orang yang ahli dalam pembangunan rumah, baik rumah tempat tinggal, rumah Raja, rumah adat dan tempat-tempat upacara lainnya. Keahlian beliau bukan hanya terbatas pada keahlian sebagai tukang semata, tetapi beliau juga ahli dalam menentukan kayu yang cocok untuk dipakai, tempat atau lokasi pembangunan rumah, cara-cara menyambung kayu dan sebagainya.

Keempat insan pimpinan tradisional yang informal ini harus bekerjasama, justru untuk saling mengisi, saling memberi agar tugas di bidangnya berhasil dengan baik. Biasanya dalam melakukan pekerjaan ia selalu mendapat petunjuk dari Raja dan dari Ketua Adat.

PIMPINAN MASA KINI

Insan pimpinan masa kini yang formal

Nama atau gelar adalah Camat dan Kepala Desa. Gelar ini dipakai apabila sudah diangkat dan dilantik secara resmi. Pengangkatannya melalui surat Keputusan. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatannya yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan di tingkat desa yang bertugas melaksanakan pemerintahan di desa. Persyaratan pengangkatan bagi Camat adalah serendah-rendahnya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan bagi Kepala Desa adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah Dasar ditambah dengan pengalaman. Camat dan Kepala Desa harus berpengaruh, berkemampuan yang tinggi, memperlihatkan prestasi kerja yang baik dan memiliki pengalaman luas dalam bidang kemasyarakatan. Jujur, sehat jasmani dan rokhani, setia kepada Negara dan Bangsa. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya ialah disenangi oleh rakyat, berwibawa, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Camat berhak memberikan perintah kepada aparat-aparat pemerintahan di wilayahnya, mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain, memungut pajak, merencanakan pembangunan wilayahnya dan berhak menerima gaji dari Pemerintah. Sedangkan Kepala Desa berhak meneruskan perintah dari Camat, berhak mendapatkan jaminan dari rakyat berupa *tanah bengkok* seluas 1 ha digarap oleh rakyat desa untuk kepentingan Kepala Desa, berhak atas *pinontol* artinya jaminan dari rakyatnya sejumlah Rp.200,— setiap kepala Rumah Tangga dalam setahun, atau dua hari kerja per tahun untuk kepentingan Kepala Desa. Kepala Desa juga berhak atas pungutan pajak 10% setahun. Kewajiban Camat dan Kepala Desa pada hakekatnya adalah mengkoordinir perangkat di Kecamatan/di Desa, mensejahterakan seluruh rakyatnya, membina kualitas hidup masyarakatnya, menjaga stabilitas desa, melaksanakan program pemerintah yang telah digariskan. Mereka diangkat atas dasar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. Kepala Desa dipilih oleh rakyat, sedangkan perangkat desa diangkat dan diusulkan oleh Camat. Atributnya ialah tanda pangkat dan tanda jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pimpinan formal ini berhubungan dengan aparat bawahannya secara struktural mulai dari Camat sampai kepada Kepala Desa. Juga berhubungan dengan pimpinan formal lainnya seperti Komandan Sektor Kepolisian, Komandan Koramil, Kepala-

kepala Jawatan tingkat Kecamatan. Hubungan ini sangat penting artinya dalam rangka berhasilnya tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya. Camat dan Kepala Desa sangat menentukan jalannya pemerintahan di wilayahnya. Beliaulah sebagai motivator, stabilisator dan penggerak di dalam wilayah kekuasaannya, demi mengangkat rakyat ke tingkat hidup yang lebih baik. Jadi jelaslah bahwa pengaruhnya cukup besar, justru beliaulah sebagai sumber utama dalam menata dan mengelola seluruh aspek kehidupan.

Insan pimpinan masa kini yang informal

Adapun insan pimpinan masa kini yang informal adalah Ketua Adat, Ulama (Kyai dan Ustaz), Guru, Ketua PKK, Ketua Dharma Pertiwi, Ketua-ketua organisasi sosial lainnya. Mereka inilah sebagai pemimpin informal, justru fungsinya sesuai dengan bidangnya masing-masing cukup menonjol dan menentukan dalam rangka membantu pimpinan formal yang ada. Khusus di desa-desa pimpinan informal ini diikat dalam wadah kelembagaan. Lembaga ini adalah Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Desa. Tugas Lembaga Musyawarah Desa adalah merencanakan pembangunan desa dari segala segi, yang penjabaran selanjutnya akan dikelola oleh Lembaga Ketahanan Desa sebagai pelaksana operasional yang membantu Kepala Desa. Kepala Desalah sebagai Koordinator daripada lembaga ini di mana kedua lembaga ini beranggotakan unsur-unsur pimpinan informal yang ada dalam wilayah desa tersebut. Dengan mekanisme yang tercermin dalam hubungan lembaga-lembaga desa tersebut dengan Kepala Desa, menunjukkan adanya saling kerjasama, adanya keterpaduan antara pimpinan formal dan pimpinan informal dalam masyarakat. Segala hasil usaha dan kegiatannya dipertanggungjawabkan kepada Kepala Wilayah Kecamatan.

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Sistem pengendalian sosial khususnya pada komunitas kecil suku bangsa Buol, adalah suatu sistem yang bermaksud agar warga masyarakat dapat berpikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan komunitas kecil ini. Dengan adanya pengendalian sosial tersebut diharapkan setiap anggota masyarakat di samping menghayati nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, juga harus mampu berbuat,

bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan masyarakat.

Dalam rangka pengendalian sosial ini, ditempuh jalan atau cara-cara antara lain: mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu dan mengembangkan rasa takut.

MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Mempertebal keyakinan dalam rangka pengendalian sosial digunakan beberapa jalur seperti pendidikan, sugesti sosial, propaganda dan kepercayaan/agama.

Macam-macam pendidikan-pendidikan yang ada ialah pendidikan formal seperti Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Atas, Sekolah Pendidikan Guru Agama, Sekolah Dasar, Sekolah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta. Yang diajarkan adalah materi kurikulum yang berkenaan dengan sikap dan nilai hidup, ilmu pengetahuan, ketrampilan, humaniora, kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila sebagaimana tertuang di dalam kurikulum yang sudah dibakukan, sesuai tingkat dan jenjang pendidikan yang ada. Yang diharapkan dari adanya pendidikan formal ini ialah membentuk manusia yang berkepribadian Indonesia, berdisiplin, kerja keras, menghargai pandangan orang lain, menyadari kemampuan diri sendiri, mempunyai kehormatan, mampu menghayati dan mengamalkan agama dan Pancasila serta menghormati nilai-nilai hidup kemasyarakatan.

Sedangkan macam-macam pendidikan non formal adalah, pendidikan kepramukaan, pendidikan ketrampilan, pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan pendidikan kemasyarakatan lainnya, yang pada umumnya dilaksanakan oleh organisasi sosial yang ada di tingkat Kecamatan. Yang diajarkan di sini ialah memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk membantu anak dalam memasuki hidup kemasyarakatan yang lebih luas, belajar berdiri sendiri, kemampuan berkomunikasi dengan lingkungannya secara baik dan pendidikan watak dan disiplin. Pendidikan non formal ini membantu pendidikan formal dan pendidikan informal di lingkungan keluarganya. Hasil yang diharapkan ialah agar anak dapat hidup lebih baik dan menghayati kehidupan kemasyarakatan yang lebih luas.

Sugesti sosial

Dalam sugesti sosial ini biasanya peranan orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat sangat penting. Hal ini biasanya dilakukan di ling-

kungan keluarga atau pada tempat-tempat pertemuan. Misalnya selalu diingatkan bahwa hidup berkasih sayang, saling menghormati dengan istilah *Mopoponua* harus ditegakkan oleh seluruh masyarakat, dan keluarga. Demikian pula *Bokid*, (musyawarah) harus dilaksanakan dalam setiap akan memulai pekerjaan. Dan satu hal yang selalu diingatkan ialah sejarah tentang Buol ini, di mana pada mulanya mereka hidup berkotak-kotak, hidup dengan pertikaian dan perselisihan yang selalu diliputi dengan ancaman, hidup tidak tenteram dan segala hal yang sifatnya negatif. Dan berkat persatuan dan kesatuan di antara mereka maka kehidupan masyarakatnya dapat terbina, aman dan damai diliputi kebahagiaan lahir dan batin. Jelaslah bahwa materi pokok yang senantiasa diungkapkan dalam setiap pertemuan sebagai sugesti sosial ialah pentingnya saling menghormati, saling kasih sayang, kerjasama sebagai dasar hakiki untuk mewujudkan masyarakat yang baik, masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Propaganda

Dalam setiap pertemuan baik di tingkat Kecamatan, maupun di tingkat desa para pemimpin formal (Camat dan Kepala Desa) serta para pemimpin informal (Ketua Adat dan tokoh-tokoh masyarakat) senantiasa menggunakan kesempatan tersebut untuk menggugah masyarakat agar menghargai waktu, bekerja keras, mempertebal rasa keagamaan, mempertinggi kegiatan gotong royong, memiliki budi pekerti yang luhur, menghormati orang lain dan senantiasa membantu Pemerintah, sehingga sikap yang demikian diharapkan akan menumbuhkan suasana kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Kepercayaan dan agama

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, peranan kepercayaan dan agama yang hidup dalam komunitas kecil suku bangsa Buol ini sangat besar. Dapat dilihat misalnya banyaknya upacara-upacara keagamaan mulai dari upacara daur hidup, pertanian, upacara pendirian gedung dan sebagainya. Dan dalam kehidupan keagamaan ini dapat dilihat seperti kegiatan yang diarahkan untuk lebih mempertebal keyakinan, rasa keagamaan, menjauhi segala larangan agama dan mengamalkan segala sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Dalam hal ini dilihat perwujudannya dalam kehidupan masyarakat seperti perayaan hari-hari besar agama (Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj, Maulid, Hari Natal) senantiasa dirayakan dengan khusus sebagai tanda pengabdian kepada

Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kehidupan komunitas kecil ini peranan ajaran-ajaran agama sangat besar, di mana sikap dan tingkah laku seseorang banyak diukur dari penghayatan dan pengalamannya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Karenanya kerukunan hidup beragama di daerah ini cukup baik.

MEMBERI IMBALAN

Memberi imbalan adalah salah satu usaha untuk pengendalian sosial. Imbalan ini meliputi imbalan konkrit, imbalan dalam kepercayaan dan imbalan dalam agama.

Imbalan konkrit di sini berupa imbalan material dan non material. Imbalan material di sini diberikan kepada mereka yang menunjukkan prestasi baik di lingkungannya seperti pemenang lomba desa. Yang diberikan antara lain ialah alat-alat pertanian, obat-obatan, pupuk dan bahkan sejumlah uang. Selain imbalan konkrit, mereka mendapat pula imbalan non material karena berprestasi dalam mensukseskan program Pemerintah. Imbalan tersebut antara lain piagam penghargaan, pemberian kesempatan untuk meninjau daerah-daerah lain (Kabupaten/Propinsi lain) dengan biaya Pemerintah. Imbalan semacam ini baik material maupun non material sangat besar artinya, justru akan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk berkompetisi secara sehat dalam rangka memperlihatkan usaha-usaha positif mereka membina wilayah atau desa masing-masing.

Imbalan dalam kepercayaan.

Imbalan yang diperoleh seseorang di sini ialah apabila seseorang bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan kepercayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Artinya apabila ia tetap taat dan patuh melaksanakan upacara-upacara adat, upacara-upacara religius lainnya dan tetap menghormati nilai-nilai luhur yang berlaku. Mereka akan tetap dihormati oleh masyarakat. Bahkan mereka diberi gelar tokoh adat, dan sekaligus dipercayakan untuk memimpin upacara-upacara seperti upacara daur hidup, upacara pertanian, upacara religius lainnya. Mereka ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam lingkungan komunitas kecil ini.

Imbalan dalam agama

Di wilayah komunitas kecil ini, agama yang jumlah penganutnya terbesar adalah agama Islam. Imbalan yang diperoleh apabila seseorang

bersikap, bertingkah laku sesuai dengan ajaran agamanya terutama benar-benar menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan baik, maka ia akan memperoleh gelar atau panggilan Pak Kyai atau Pak Ustaz. Mereka ini merupakan orang yang cukup terhormat di mata masyarakat, dan merupakan contoh teladan masyarakatnya. Karena itu mereka cukup dihormati dan disegani. Jadi mereka mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam lingkungan masyarakatnya.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Rasa malu adalah salah satu aspek yang berpengaruh dalam pengendalian sosial, sebab rasa malu adalah suatu rintangan untuk berbuat, bertingkah laku di luar nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas kecil suku bangsa Buol ini. Karena itu makin besar rasa malu, makin besar pula kemungkinan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, dan sebaliknya sebagai alat pendorong untuk bertingkah laku sesuai kebiasaan lingkungannya. Dalam hubungan inilah akan dicoba menguraikan dan mengungkapkannya melalui: peranan gunjing, peranan kepercayaan dan peranan agama.

Peranan gunjing

Gunjing di sini sering dilakukan di tempat-tempat pertemuan khusus seperti di sungai, di mana sungai dijadikan tempat mandi umum dan tempat mencuci, atau di tempat-tempat pekerjaan lainnya seperti di sawah, di ladang atau di lokasi kegiatan bersama lainnya, misalnya di tempat upacara, di tempat diadakan kerja gotong royong. Yang dipergunjingkan sering mengenai kelakukuan seseorang, atau kelompok orang yang selalu tidak mematuhi nilai-nilai sosial kemasyarakatan, yang tidak mematuhi norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungannya, misalnya seseorang yang selalu memperlihatkan kelakuan yang tidak senonoh, suka mengganggu orang lain, kikir, egoistis, enggan menghadiri upacara-upacara keagamaan atau pertemuan-pertemuan lainnya, menyendiri dan tidak menghormati orang lain dan sebagainya. Biasanya hasil gunjingan ini akan berkembang dari mulut ke mulut dan membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama bagi mereka yang dipergunjingkan. Kadang-kadang pengaruh gunjing ini dapat merubah sikap dan tingkah laku seseorang, tetapi bukan berarti terjadi perubahan yang mendasar, justru banyak di antara sasaran gunjing tersebut sudah ada yang memang kebal akan gunjingan ini.

Peranan kepercayaan

Adapun perbuatan-perbuatan yang memalukan menurut kepercayaan di wilayah komunitas kecil suku bangsa Buol adalah sikap acuh tak acuh terhadap penyelenggaraan suatu upacara tradisional yang hidup dalam masyarakat. Misalnya acuh tak acuh terhadap upacara selamatan dalam bidang pertanian, atau pada upacara-upacara kematian. Orang yang demikian biasanya diisolir oleh masyarakatnya, sehingga lama kelamaan akan merasa disisihkan dari kehidupan masyarakatnya. Biasanya orang yang demikian tergugah juga untuk tidak acuh lagi, sebab selain tersisih dari pergaulan kehidupan kemasyarakatan, ia juga merasa diliputi oleh dosa. Karena itu peranan kepercayaan ini cukup kuat dalam kehidupan komunitas kecil ini.

Peranan agama

Uraian mengenai peranan agama pada hakekatnya sama dengan uraian pada peranan kepercayaan. Perbuatan-perbuatan yang memalukan menurut ajaran yang dianut oleh masyarakat (Islam), ialah acuh tak acuh terhadap penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. Misalnya saja lebih baik tinggal di rumah atau bekerja daripada pergi sembahyang Jumat, atau menghadiri upacara-upacara peringatan keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Isra' dan Mi'raj). Biasanya orang yang demikian ini disisihkan dari kehidupan masyarakat, disisihkan dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bahkan tidak dikunjungi oleh tetangga dan masyarakat kalau ada pesta-pesta atau ada kegiatan yang ia lakukan. Akibatnya yang bersangkutan akan merasa malu sendiri, akan merasa berdosa. Dengan demikian jelas bahwa peranan agama sangat besar dalam kehidupan komunitas kecil suku bangsa Buol ini.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Salah satu bentuk dalam pengendalian sosial adalah mengembangkan rasa takut, justru rasa takut tersebut merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan agar masyarakat di lingkungannya tidak berbuat dan bersikap di luar nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalam komunitas kecil ini. Dalam kaitan ini maka ada tiga faktor penting yang diperhatikan, yaitu faktor kepercayaan, faktor agama dan faktor hukum adat.

Kepercayaan

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kepercayaan di sini

adalah meremehkan dan tidak mentaati tata upacara yang diharuskan dan berlaku secara umum di lingkungan masyarakat (upacara selamatan panen, naik rumah baru, pengobatan, dan upacara daur hidup lainnya), sedangkan perbuatan-perbuatan yang diharuskan ialah mengikuti dan taat melaksanakan setiap upacara sesuai ketentuan, misalnya ikut sebagai peserta upacara, ikut menyumbangkan tenaga dan materi dalam pelaksanaan upacara, membantu dukun demi suksesnya upacara itu.

Bagi mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang diberikan sanksi berupa hukuman sosial seperti dipencilkan dalam kehidupan masyarakatnya, atau berupa beban psikologis seperti perasaan penuh dosa. Hal ini akan dirasakan oleh yang bersangkutan apabila sanksi ini sudah berjalan. Hukuman sosial demikian mempunyai pengaruh cukup besar dan mendidik orang yang berbuat hal yang dilarang oleh kepercayaan yang hidup dalam masyarakat lingkungannya. Biasanya dapat dilihat hasil dari sanksi ini, di mana adanya perubahan sikap dan tingkah laku untuk menjunjung dan menghayati kepercayaan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam kehidupan masyarakat komunitas kecil ini.

Agama.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama adalah semua larangan yang memang diajarkan oleh agama itu sendiri, seperti mencuri, menipu, berzina, berhati dengki, egoistis, iri hati, sombong dan seluruh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diharuskan adalah menolong sesama manusia, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempertebal ke-Taqwaan sesuai dengan ajaran agama. Tegasnya menjauhi segala larangan dan mematuhi seluruh ketentuan dan ajaran agama.

Bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sanksinya adalah adanya perasaan yang diliputi dosa, sehingga merupakan suatu sanksi moral yang senantiasa mengejar-ngejarnya dalam perjalanan hidupnya. Di dunia ini mungkin tidak ada sanksi secara langsung, tetapi yang pasti adanya perasaan tidak tenteram, justru bagi mereka itu akan disisihkan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan sanksi sesudah mati adalah siksaan Tuhan yang tiada taranya. Apabila sanksi ini dapat dirasakan oleh yang bersangkutan maka cepat atau lambat akan mempengaruhi jiwanya, terutama akan menggugahnya untuk bertobat, dan merubah sikap dan tingkah lakunya untuk mengikuti ajaran agama dengan sebaik-baiknya.

Hukum adat

Hukum adat di sini sesungguhnya sangat erat dengan adat-istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam komunitas kecil suku bangsa Buol ini. Adat-istiadat di sini identik dengan aturan, nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat komunitas kecil ini, yang tercermin pada tata upacara yang hidup, adat yang tetap berlaku dan seluruh norma sosial yang tetap tumbuh dan diagungkan. Upacara-upacara adat seperti upacara daur hidup, upacara di bidang pertanian, di bidang perumahan dan lain sebagainya merupakan nilai budaya, bahkan merupakan norma dan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Kesemuanya ini masih tetap hidup dan tumbuh dan diusahakan untuk dilestarikan melalui hukum adat yang harus diperlakukan sebaik-baiknya untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat komunitas kecil ini. Apabila ada orang yang melanggar adat-istiadat atau hukum adat yang berlaku dan diagungkan itu, sehingga menimbulkan ketegangan sosial seperti misalnya melakukan zina, kawin lari, merampok, mencuri, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan Hukum Adat maka jelas akan ada sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diharuskan ialah harus tetap menghormati dan memuliakan hukum adat/adat kebiasaan dengan jalan ikut serta menghayati dan mengamalkan tata nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam komunitas kecil suku bangsa Buol ini. Adapun sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum adat atau adat-istiadat seperti disebutkan di atas, tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggaran itu berat seperti berzina, kawin lari, mencuri, membunuh maka sanksinya adalah dijadikan budak (pada waktu dahulu), dan sekarang ini diselesaikan menurut hukum adat yang berlaku atas kerjasama Ketua Adat dengan aparat Pemerintah seperti pengadilan agama/atau pengadilan negeri melalui proses dari pemimpin-pemimpin formal mulai tingkat desa hingga Kecamatan bahkan sampai tingkat Kabupaten. Tetapi apabila pelanggaran itu dianggap ringan berdasarkan bukti-bukti, maka sanksinya agak ringan seperti kerja bakti dalam waktu tertentu. Sanksi-sanksi ini diberikan untuk mendidik masyarakat terutama bagi yang melanggar, dalam usaha mentaati dan menghormati hukum adat yang berlaku. Ini berarti ikut memelihara kehidupan sosial yang lebih baik. Karena itu pemberian sanksi di sini mempunyai pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat komunitas kecil suku bangsa Buol.

VI. BEBERAPA ANALISA

Dalam sub bab ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan uraian-uraian terdahulu baik yang berhubungan dengan Bentuk, Sistem Pelapisan Sosial, Pimpinan Masyarakat dan Pengendalian Sosial serta beberapa kesimpulan dan saran-saran.

BENTUK

Perubahan bentuk dari bentuk kerajaan menjadi beberapa bagian kerajaan. Hal ini terjadi sebelum zaman Belanda disesuaikan dengan sistem Pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian bentuk komunitas ini dirubah dalam bentuk Kecamatan-kecamatan disesuaikan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Begitu juga perubahan bentuk dan fungsi pimpinan masyarakat, yakni dari bentuk kerajaan menjadi bentuk pemerintahan Republik.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Di sini terlihat bahwa pelapisan sosial sudah mengalami perubahan. Perubahan pelapisan sosial tersebut menyangkut dasar pelapisan, bentuk pelapisan dan hubungan antar lapisan baik pelapisan sosial masa lalu maupun pelapisan sosial masa kini.

Dari uraian terdahulu sehubungan dengan perubahan-perubahan pelapisan sosial tersebut menunjukkan bahwa perubahan ini terjadi melalui suatu proses yang lama dan bersumber dari beberapa sebab. Adapun sebab-sebab terjadinya perubahan di sini antara lain ialah adanya kemajuan dalam pola berpikir terutama semakin mendalamnya pengertian dan pemahaman atas ajaran agama (Islam) yang pada umumnya dianut oleh masyarakat. Juga sudah dapat menerima hal-hal baru, di samping semakin terbukanya wilayah ini dari dunia luar (melalui laut) dan adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal sebagai sumber kemajuan. Perubahan itu antara lain lapisan-lapisan rendah dapat bergeser ke atas disebabkan oleh faktor pendidikan dan faktor kekayaan. Dengan demikian lapisan bawah dapat kawin dengan lapisan atas dengan adanya faktor-faktor tersebut. Hal ini belum berlaku secara umum. Dengan perkawinan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan lapisan sosial dari lapisan rendah ke lapisan atas. Perubahan ini terjadi dalam masa kemerdekaan.

PIMPINAN MASYARAKAT

Mengenai pimpinan masyarakat di sini ialah sudah dikenal secara

luas seperti pimpinan tradisional yang formal dan informal, demikian pula pimpinan masa kini. Antara pimpinan-pimpinan tersebut terwujud jalinan hubungan yang cukup baik, justru mekanisme yang demikian sudah merupakan kewajiban para pimpinan dan seluruh anggota masyarakat karena segala sesuatunya didasarkan atas kegiatan bersama, kegiatan gotong royong dan prinsip kebersamaan serta prinsip kekeluargaan yang mengikatnya. Keterikatan kebersamaan dan kekeluargaan dalam segala kehidupan inilah yang merupakan dasar hakiki sehingga jalinan hubungan tersebut tetap terbina dengan baik.

Penghormatan kepada pimpinan tradisional yang walaupun tidak memegang kekuasaan pada pimpinan masa kini, tetapi tetap memegang fungsi dan peranan di tengah-tengah masyarakat. Pimpinan tradisional yang formal tersebut sekarang ini merupakan pimpinan informal, seperti misalnya tokoh-tokoh agama (para ulama, Kyai dan Ustaz), para tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya.

PENGENDALIAN SOSIAL

Mengenai pengendalian sosial pada komunitas kecil suku bangsa Buol ini menggunakan beberapa jalur untuk pelaksanaannya. Jalur tersebut adalah bagaimana cara yang digunakan agar masyarakat lebih dapat mempertebal keyakinan, bagaimana kriteria untuk memberi imbalan, bagaimana usaha untuk mengembangkan rasa malu di dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana pula mengembangkan rasa takut bagi kehidupan masyarakat suku bangsa Buol ini.

Hal ini ditempuh di samping untuk usaha melestarikan nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya yang dimiliki, juga diarahkan untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang lebih baik, terpuji, di mana diharapkan dengan pengendalian sosial tersebut benar-benar bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungannya. Ini berarti bahwa dengan sikap yang demikian itulah, akan terbina dalam diri pribadi setiap insan untuk lebih menghayati dan mengamalkan secara nyata nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial lainnya demi mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Pada umumnya untuk mewujudkan pengendalian sosial di sini digunakan beberapa media. Media yang paling hakiki dan mendasar adalah peranan agama dan peranan kepercayaan. Jadi benar-benar setiap insan dalam komunitas kecil ini diarahkan untuk dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Di samping

peranan agama dan kepercayaan tersebut, juga digunakan media lainnya seperti media pendidikan, media yang bersumber dari hukum adat, pemberian imbalan, sugesti sosial dan penggunaan propaganda.

Dari uraian singkat di atas, dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

Kesimpulan.

- 1. Bahwa komunitas kecil suku bangsa Buol ini adalah suatu komunitas yang sudah lama ada. Mereka tumbuh dan berkembang dengan segala perangkat yang ada padanya untuk menunjang eksistensinya.
- 2. Bahwa komunitas kecil suku bangsa Buol tersebut memiliki potensi nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya yang cukup besar yang perlu ditata dan dibina sebaik-baiknya.
- 3. Bahwa dalam komunitas suku bangsa Buol ini sudah lama dikenal sistem pemerintahan kerajaan di mana kehidupan demokrasi yang telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin adanya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif pada komunitas ini.
- 4. Bahwa dalam kehidupan komunitas kecil suku bangsa Buol sudah sejak lama dikenal adanya sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial sebagai upaya nyata dan essensi hakiki keberadaan komunitas ini sebagai suatu komunitas yang otonom.

Saran-saran.

Untuk lebih mengetahui secara pasti dan mendalam tentang aspek-aspek sosial kemasyarakatan dan tata nilai yang berlaku dan hidup dalam komunitas ini terutama yang berkaitan dengan sistem nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya komunitas tersebut, maka hendaknya diadakan penelitian secara mendalam tentang :

- 1. Berbagai upacara tradisional dengan segala aspeknya.
- 2. Hukum adat yang berlaku dalam komunitas suku bangsa Buol ini.
- 3. Asal usul suku bangsa Buol dan bagaimana hubungannya dengan suku bangsa lainnya terutama suku bangsa Gorontalo.
- 4. Perbandingan-perbandingan mengenai: sistem pemerintahan masa lalu dan masa kini, sistem pelapisan sosial masa lalu dan masa kini dan perbandingan pimpinan masyarakat tradisional dan pimpinan masyarakat masa kini.

BIBLIOGRAFI

1. Albert C. Kuryt, *Membangun Perumahan di Sulawesi Tengah*, Panitia Pembangunan Rumah Adat Sulawesi Tengah di Palu, 1973.
2. *Adat Kaili dalam Lembaran*, Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Palu, 1976.
3. Bochari, *Konsep Sintuwu Dalam Kehidupan Masyarakat Kaili*, (laporan penelitian), IKIP Ujung Pandang Cabang Palu, Mei 1980.
4. Kuntjaraningrat, *Beberapa pokok Antropologi* PT Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
5. *Kekerabatan Bahasa-bahasa di Sulawesi Tengah*, hasil Prasurvey Kebudayaan di Sulawesi Tengah Tahap I, Team Prasurvey Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah, Palu, 1973.
6. Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tahun 1973.
7. *Sulawesi Tengah Dalam Angka 1976*, Kantor Sensus dan Statistik Sulawesi Tengah, Palu, Nomor 26/1977.
8. *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Tengah*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979/1980.

INDEKS

Ada nekasuwia,
Ada nosibolai,
Ado,
Ava,
Angga tonobe,
Anak punuh,
Anak dukuh,
Boya,
Binangga,
Bantaya,
Baruga,
Balia,
Baligau,
Balia ntomanuru,
Balia bone meloso,
Balia Mounda,
Balia Tampilangi,
Banawa,
Burhani,
Batua,
Buho,
Bambaru,
Bulili,
Badu bandara,
Boela,
Batu biaiy,
Buniya,
Bokid,
Doi,
Dewan Pitunggota,
Doti,
Dae mangulu,
Datu mporea,
Dota ntodeya,
Dota pasanggani,
Duhunga,
Dai bale,
Dukun,
Ebony,
Galara,
Gandaria,
Gadalangi,
Hawik,
Jogugu,
Kayu ipi,
Kasiavera,
Kinta,
Kakatua,
Kagaua,
Kota pitunggota,
Karampua,
Karampua nulangi,
Karampua ntana,
Kataba,
Kasa,
Kulinti,
Khalaik,
Kabilaha,
Klava,
Kala Bulohu,
Kampu,
Kibuku kno Miloto,
Kepalaa,
Kapitan laut,
Libu Nu maradika
Libu Nto Deya,
Ledo,
Lamagau,
Lamarauna,
Lasadindi,
Libu,
Lobo,
Lapabada,
Lembah,

Lolo,
Longki,
Lipu,
Mata uwe,
Moraego,
Maradika,
Magau,
Mangkau,
Madika malolo,
Madika Matua,
Motula bala,
Malau ava,
Malau riva,
Malau rinjaa,
Malonda,
Makagili,
Magau Dae Lipu,
Madika Lusu Manuru,
Madika datundalangi,
Madika Rampatana,
Madika ntana,
Magau nuada,
Modulu-dulu,
Megalith,
Mayor doku,
Mayor pembantu,
Moponasua,
Manuru,
Novarunja
Pande,
Punggawa,
Pabicara,
Pabisara,
Pince pute,
Pue Bunggu,
Pus ruantaku tunana,
Pue jempe,
Papa Dae Mbene,
Pue mponenju,

Pue subi,
Panintu,
Pagane,
Pitumpole,
Pengayaye,
Puruka sengke,
Pohea,
Pinontol,
Penatua,
Pogogul,
Panggoba,
Palima,
Pemangku adat,
Raiva,
Rai,
Riva,
Rinjaa,
Raja Manlonda,
Raja Kabe,
Sampoas,
Sabandara,
Suro,
Soki,
Sima-sima,
Sando,
Sanjaio,
Sintuwu,
Siga,
Samada,
Sudang,
Syahbandar,
Tadulako,
Totua nungata,
Totua nungapa,
Topanuru,
Tobaraka,
Tara,
To tua nuboya,
Tana mpoadas,

Tetua ntana,
Togura nungapa,
To dea,
To Pagane,
Tambi,
Tuana,
To tua ada,
Tauna marea,
Tiko,
To panuntu,
To pakubangi,
Tuana mahile,
Tripida,
Tanah bengkok,
Tango tau,
Togu Tagula,
Togino mandah,

Tau poyogduiya,
Tau wayu,
Taupat,
Tau wanom,
Tukang,
Tamadika,
Uwe libo,
Unde,
Ulutumba,
Ula-ula,
Ummu,
Valo bulava,
Welado,
Walia,
Wini,
Wanua,
Wunta.

Perpustakaan
Jenderal